



## **MEDIA INFORMASI KEGIATAN (MIK) BBTKL PP YOGYAKARTA**



**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
BBTKLPP YOGYAKARTA**

Jl. Wiyoro Lor, Banguntapan, Bantul 551197, Telp. 0274-371588, Fax. 443288  
Website : [www.btkljogja.or.id](http://www.btkljogja.or.id) Email : [info@btkljogja.or.id](mailto:info@btkljogja.or.id)



### **Pertemuan Koordinasi Kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Dengue (S3D) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

Pada hari Selasa, 22 Januari 2019, dilaksanakan pertemuan koordinasi kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Dengue (S3D) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 di RSUD Tugurejo Semarang. Pada tahun 2019, selain RSUD Tugurejo Semarang, ditambah dengan Puskesmas Tlogosari Kulon sebagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sentinel di Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan dibuka oleh dr. Yuswanti, M.H.Sc (Wakil Direktur Pelayanan RSUD Tugurejo), dilanjutkan dengan arahan tentang kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Arboviroses oleh dr. Astrid Septrisya Paat (Sub Direktorat Arboviroses Direktorat P2PTVZ Ditjen P2P). Setelah itu, dr. Yohanna Gita Chandra, M.S. (Kepala Seksi Lingkungan Biologi BBTCLPP Yogyakarta) memberikan overview kegiatan S3D tahun 2019 dan dilanjutkan dengan sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan S3D tahun 2019 oleh dr. Ratna Wijayanti, M.P.H. (ketua tim S3D BBTCLPP Yogyakarta). Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, tim S3D Puskesmas Tlogosari Kulon, serta tim S3D RSUD Tugurejo Semarang.



### **Pertemuan Koordinasi S3D dan Training Bagi Petugas Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang Tahun 2019**

Pada hari Rabu, 23 Januari 2019, dilaksanakan pertemuan koordinasi Sistem Surveilans Sentinel Dengue (S3D) dan training bagi tim S3D Puskesmas Tlogosari Kulon. Pertemuan dibuka oleh dr. Puriyanto Wahyu Nugroho (Kepala Puskesmas Tlogosari Kulon), dilanjutkan dengan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Surveilans Sentinel Arbovirus (S3A) tahun 2019 oleh dr. Astrid Septrisya Paat (Sub Direktorat Arbovirus Direktorat P2PTVZ Ditjen P2P). Setelah itu, dr. Yohanna Gita Chandra, M.S. (Kepala Seksi Lingkungan Biologi / Koordinator Kegiatan S3A BBTKLPP Yogyakarta) menyampaikan tentang sistem pelaksanaan kegiatan S3D bagi puskesmas. Kemudian dilanjutkan oleh dr. Ratna Wijayanti, M.P.H. (Ketua Tim S3D BBTKLPP Yogyakarta) memberikan informasi tentang berbagai jenis formulir S3D cara pengisiannya, dan Indaryati, S.ST. (Analisis Kegiatan S3D Laboratorium BBTKLPP Yogyakarta) menyampaikan cara pengambilan spesimen S3D, penanganan spesimen S3D di puskesmas, serta transportasi spesimen S3D ke BBTKLPP Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut hadir seluruh tim S3D Puskesmas Tlogosari Kulon, petugas Dinas Kesehatan Kota Semarang (Dwi Susanti, S.K.M. dan Wiwik Dwi Lestari, S.K.M.), dan dari Subdit Arbovirus Direktorat P2PTVZ Ditjen P2P (Hanifah Rogayah, S.K.M., M.P.H.).



### **Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Eliminasi Malaria di Wilayah Jawa**

Dalam rangka percepatan eliminasi malaria di Wilayah pulau Jawa, mulai tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2019 bertempat di Hotel Swissbell Belboutique Yogyakarta diselenggarakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Eliminasi Malaria Wilayah Jawa. Pertemuan yang melibatkan peserta yang berasal dari 4 Provinsi wilayah Jawa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur serta 12 Kabupaten yang berjuang mewujudkan eliminasi malaria sebelum tahun 2023, BBTCLPP dan subdit Malaria dibuka secara resmi oleh Direktur P2PTVZ Ditjen P2P kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Dalam sambutannya Direktur P2PTVZ berharap bahwa eliminasi malaria di wilayah Pulau Jawa bisa diwujudkan pada tahun 2023 dengan lebih mengoptimalkan koordinasi perencanaan upaya pengendalian malaria terpadu yang disusun dan dilaksanakan secara bersama dengan melibatkan berbagai instansi dan institusi yang ada di masing-masing wilayah termasuk Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Daerah.

Kegiatan pertemuan ini secara terstruktur diawali dengan pemberian materi terkait dengan : Kebijakan malaria dalam menuju eliminasi malaria oleh Direktur P2PTVZ, Upaya Percepatan Eliminasi dan Rekomendasi Kegiatan di Wilayah Menoreh oleh Kepala B/BTKLPP Yogyakarta (DR.dr. Irene, MKM), Presentasi dari Kemendes tentang Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengendalian Malaria, Paparan Evaluasi Pengendalian Malaria di 12 Kabupaten/Kota oleh Kasubdit Malaria, Persiapan Eliminasi Regional WHO oleh WHO Perwakilan Indonesia, Lesson learn penanggulangan Malaria di Kab. Banjar Negara oleh JMD dan aparat desa, Analisis Bionomik Vektor Malaria hasil Rikhus Vektora dan Rekomendasi oleh BPPRV Salatiga, Analisis Bionomik Vektor Malaria oleh Litbangkes Banjar Negara dan Pangandaran dan Analisis Hasil Assasment Wilayah Menoreh oleh Konsultan WHO. Pada bagian akhir pertemuan diisi dengan kegiatan diskusi dan presentasi hasil penyusunan ROK kegiatan Percepatan Eliminasi Malaria tahun 2019 di 12 Kabupaten/Kota Wilayah Pulau Jawa menuju eliminasi 2023.



### **Kunjungan LBM Eijkman ke BBTCLPP Yogyakarta**

Pada tanggal 29 Januari 2019 ada kunjungan dari LBM Eijkman Jakarta sebanyak 5 orang dalam rangka koordinasi kegiatan kelaboratoriuman terutama laboratorium bakteriologi. Tim diterima oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Ibu Dr. dr. Irene, MKM beserta Kepala Bidang PTL, Kepala Bidang SE serta beberapa fungsional laboratorium.

Ketua tim, Bp Dody Safari menyampaikan maksud dan tujuan ke BBTCL PP Yogyakarta untuk memberikan bantuan pelatihan baik yang dilakukan di Eijkman atau bisa dilakukan pelatihan di BBTCL PP Yogyakarta, Selain itu juga mendiskusikan pemeriksaan Difteri, uji resistensi Kusta, dan pemeriksaan Neisseria meningitidis menggunakan teknik PCR, selain dengan identifikasi biokimia.

Diharapkan ke depan LBM Eijkman dapat bekerja sama dalam kegiatan kajian kesehatan haji pada jemaah haji di Asrama Haji Donohudan Boyolali, yang dilakukan dengan pemeriksaan bakteri Neisseria meningitidis pada jemaah haji sebelum dan sesudah berangkat ibadah.

Pada waktu yang bersamaan dilakukan bimbingan pada penataan ruangan laboratorium Molekuler di gedung baru oleh tim dr LBM Eijkman Diharapkan dengan kedatangan tim dari LBM Eijkman ini dapat menambah jejaring dan kerjasama terhadap pemeriksaan bakteriologi dengan uji molekuler.



## **Uji Coba Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan Di Wilayah**

Pada tanggal 30 Januari-1 Februari 2019 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P, Kemenkes RI mengadakan pertemuan Uji Coba Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di Wilayah. Berlokasi di Hotel Horison Yogyakarta, pertemuan ini dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan dari 14 Provinsi, BLK DIY, Kepolisian, KKP Yogyakarta dan BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili Kasie advokasi dan KLB. Pertemuan dibuka dengan Laporan Panitia yang disampaikan oleh Kasie Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD), dr. I Made Yosi Purbadi Wirentana, MKM, disampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan draft pedoman penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan di wilayah tahun 2018. Dalam pertemuan ini akan dilakukan uji coba terhadap draft yang sudah disusun sebagai masukan untuk finalisasi dokumen. Selanjutnya adalah arahan sekaligus pembukaan pertemuan yang disampaikan oleh Kasubdit Kekejarantinaan Kesehatan, dr. Benget saragih, M.Epid. Acara dilanjutkan dengan paparan mengenai UU RI No.6 tahun 2018 mengenai Kekejarantinaan Kesehatan yang disampaikan oleh Kasubdit Kekejarantinaan Kesehatan. Materi selanjutnya adalah Overview Pedoman Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di Wilayah oleh Kasie Karantina Kesehatan Wilayah dan PLBD.

Acara dilanjutkan dengan bedah Rancangan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di Wilayah. Dalam acara ini seluruh peserta diminta mencermati draft dokumen dan memberi masukan mengenai draft tersebut. Dari hasil bedah dokumen, ada beberapa hal dalam dokumen yang diperbaiki diantaranya mengenai kewenangan pejabat karantina kesehatan terkait dengan struktur dalam dinkes setempat dan domain wilayah dengan adanya sistem komando saat KKM, pembiayaan pada saat terjadi KKM, dan peraturan lingkungan pada situasi KKM. Acara ditutup oleh Kasie Karantina Kesehatan Wilayah dan PLBD dengan menyampaikan bahwa sebelum terjadi KKM kab/kota diharapkan mempunyai dokumen renkon. Hal ini masih menjadi target indikator Direktorat SKK tahun 2020-2024.



### **Koordinasi Kegiatan Kajian Faktor Risiko Flu Burung Tahun 2019 DI BBVET Wates Kulon Progo**

Pada hari Jumát, 1 Februari 2019, dilakukan koordinasi kegiatan Kajian Faktor Risiko Flu Burung BBTKLPP Yogyakarta dengan Balai Besar Veteriner Wates. Tim BBTKLPP Yogyakarta yang terdiri dari Kepala Bidang ADKL (Feri Astuti, S.T., M.P.H.), Kepala Seksi Lingkungan Biologi (dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.), dan Ketua Tim Kajian FR Flu Burung (Atikah Mulyawati, S.K.M.) menemui Kepala BBVet Wates (drh. Bagoes Poermadjaja, M.Sc.), lalu berdiskusi dengan Kepala Bidang Pelayanan Veteriner (drh. Indarto Sudarsono, M.M.T.), Penanggung Jawab Laboratorium Serologi (drh. Elly Puspasari Lubis, M.Sc.), dan Bendahara PNBP (Endang Witnaning).

BBTKLPP Yogyakarta akan bekerja sama dengan BBVet Wates dalam pengambilan dan pengujian spesimen terkait Kajian Faktor Risiko Flu Burung yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019.



### **Koordinasi Kegiatan Kajian Faktor Risiko Flu Burung Tahun 2019 DI Kabupaten Bantul**

Pada hari Rabu, 6 Februari 2019, tim BBTKLPP Yogyakarta yang terdiri dari Kepala Seksi Lingkungan Biologi (dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.) dan Ketua Tim Kajian FR Flu Burung (Atikah Mulyawati, S.K.M.) menemui dan berdiskusi dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Joko Waluyo, S.Pt., M.Si.), Kepala Seksi Kesehatan Hewan (Eddy Suryanto, S.Pt.), dan pemegang program terkait (drh. Wahyu Tri Sunari) di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kajian Faktor Risiko Flu Burung di DIY akan dilakukan di 6-12 peternakan di Kabupaten Bantul dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan/atau jajarannya. Setelah itu, tim BBTKLPP Yogyakarta juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Kajian Faktor Risiko Flu Burung.





### **Pengumpulan Data dan Spesimen Kajian Flu Burung di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019**

Menindaklanjuti pertemuan koordinasi dengan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Februari 2019, pada tanggal 20-22 Februari 2019 dilanjutkan dengan tanggal 25-27 Februari 2019, dilaksanakan pengumpulan data dan spesimen Kajian Flu Burung di 12 peternakan yang pernah mengalami kematian unggas di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut dilakukan wawancara dengan pemilik peternakan, pekerja peternakan, dan petugas pos kesehatan hewan setempat terkait faktor risiko penyakit Flu Burung di peternakan. Selain itu, dilakukan observasi keadaan lingkungan peternakan, serta pengambilan spesimen swab orofaring unggas, air, dan tanah di lingkungan peternakan. Dalam satu hari dilakukan pengambilan data dan spesimen di dua peternakan. Pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan pengumpulan data dan spesimen di wilayah Kecamatan Pajangan, pada tanggal 21 Februari 2019 di wilayah Kecamatan Pandak, pada tanggal 22 Februari 2019 di wilayah Kecamatan Imogiri, pada tanggal 25 Februari 2019 di wilayah Kecamatan Sanden, pada tanggal 26 Februari 2019 di wilayah Kecamatan Pundong dan Kretek, dan pada tanggal 27 Februari 2019 di wilayah Kecamatan Jetis. Tahap kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan petugas BBVet Wates dalam pengambilan spesimen, serta petugas Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan petugas Poskeswan dalam penentuan dan pendampingan ke lokasi peternakan. Tim juga memberikan peragaan cara penggunaan desinfektan kepada pemilik peternakan.



### **Penelaahan Dalam Rangka Buka Blokir DIPA TA. 2019 Satker Pusat DAN UPT Ditjen P2P**

Pelaksanaan Penelaahan Anggaran oleh Ditjen P2P, Biro Perencanaan dan Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan telah berjalan dengan lancar selama tiga hari terhitung dari tanggal 6 sd 8 Februari 2019 di Bekasi Jawa Barat. Penelaahan ini dilaksanakan dalam rangka buka blokir atas dokumen Daftar Isian Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2019 satker Pusat dan UPT Ditjen P2P Kemkes. Blokir yang muncul dalam dokumen anggaran tahun 2019 dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pemerintah dalam kegiatan upaya mencapai target program secara tepat sasaran dan tepat guna.

Kegiatan Prioritas Nasional berbasis gerakan masyarakat tetap menjadi fokus dalam penelaahan ini. Proses ini merupakan langkah pengawalan atas penyelenggaraan keuangan negara dan harapannya seluruh perencanaan akan selaras dengan pelaksanaan dan menghasilkan keluaran nyata yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.


Tim Perencana BBTCLPP Yogyakarta dihadirkan dalam desk penajaman ini dan telah mengikuti proses penelaahan dengan baik sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan BBTCLPP Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 telah teralokasikan dalam dokumen anggaran dan siap dilaksanakan.



### **Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan Pelaksanaan Survei Evaluasi Program Eliminasi Filariasis Nasional**


Indonesia telah menandatangani kesepakatan di tingkat global untuk eliminasi Filariasis di Tahun 2020. Untuk memutus rantai penularan, dilakukan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis yang diberikan kepada semua sasaran kabupaten/kota endemis 1 kali setahun selama minimal 5 tahun berturut-turut. Untuk monitoring dan evaluasi program eliminasi Filariasis, ada 2 jenis survei evaluasi yang dikenal dengan survei preTAS (Transmission Assesment Survey) dan TAS. Pada tanggal 6 – 9 Februari 2019 dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan Pelaksanaan Survei Evaluasi Program Eliminasi Filariasis Nasional bagi B/BTKL PP, Balai/Loka Litbangkes dan Subdit Filariasis dan Kecacingan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Pertemuan dihadiri 40 orang dari 10 B/BTKLPP se-Indonesia, Balai Litbangkes Baturaja, Balai Litbangkes Tana Bumbu, Balai Litbangkes Donggala, Loka Litbangkes Ciamis, Loka Litbangkes Waikabubak, Subdit Filariasis dan Kecacingan dan perwakilan RTI ENVISION-USAID.

Pertemuan yang diawali dengan laporan ketua penyelenggara oleh Kasubdit Filca dilanjutkan pembukaan oleh Direktur P2PTVZ, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman protokol survei evaluasi program eliminasi Filariasis, mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan pelaksanaan survei, dan rancangan pelaporan hasil survei ke tingkat pusat dan global. Agenda penting dalam pertemuan koordinasi ini antara lain paparan mengenai Kebijakan Program Eliminasi Filariasis di Indonesia oleh Direktur P2PTVZ, Tahapan Monitoring dan Evaluasi Filariasis Dukungan B/BTKL PP dan Loka Litbangkes oleh Kasubdi Filca, dan Anggaran Ditjen P2P dalam Mendukung Montoring oleh Kabag P.I. Agenda selanjutnya adalah paparan dari 10 B/BTKL PP dalam mendukung Program Eliminasi Filariasis. Pada pertemuan koordinasi ini juga dilakukan desk penjadwalan pelaksanaan survey evaluasi, sumber dana dan SDM bagi seluruh B/BTKL PP dengan Subdit Filca.



BBTKLPP Yogyakarta yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi, supervisor dan perencana program kegiatan filariasis menyampaikan rencana kerja BBTKLPP Yogyakarta dalam mendukung eliminasi Filariasis di wilayah layanan BBTKLPP Yogyakarta Tahun 2019, antara lain pelaksanaan Survey preTAS di Kota Pekalongan dan Surveilans Kecacangan pada Anak Sekolah di Kabupaten Bantul, Pekalongan, Grobogan, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas. Selain itu dilakukan koordinasi mengenai kesiapan dan waktu distribusi logistic bahan survei preTAS dan surveilans kecacangan dari Subdit Filca. Pada akhir kegiatan Subdit Filca menyampaikan rencana survei preTAS dan TAS Tahun 2020 bagi BBTKLPP Yogyakarta antara lain di Kabupaten Blora, Pati, Pekalongan (preTAS) dan Kota Pekalongan (TAS).

---





### **Pengajian Rutin Jumat Minggu Pertama Bulan Februari 2019**

Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dilaksanakan sholat Ashar berjamaah dan pengajian rutin di Aula lantai 3 Timur BBTCLPP Yogyakarta. Acara dimulai dengan tilawah Al Quran Surat Al Isra' ayat 78-84 oleh Ibu Nunik Triasih, AMAK. dilanjutkan dengan sambutan oleh Kabid PTL, Ibu Hj. Indah Nurhaeni, S.Si., M.Sc. Kemudian acara inti yaitu tausiah dengan tema Total Bergantung Kepada Allah disampaikan oleh Ustadz Abu Adzkia dari PPALC Yogyakarta.

Salah satu rumus dalam kehidupan adalah jika kita total bergantung kepada Allah maka kebutuhan terpenuhi. Sebagai contoh janin dalam rahim dipenuhi kebutuhan nutrisinya dengan dibuatkan oleh Allah plasenta. Namun, manusia dewasa telah punya gantungan-gantungan lain yang amat banyak dan menyaingi kedudukan Allah seperti bergantung pada pekerjaan, pasangan, bos, usahanya, dll sehingga ia tak lagi total bergantung pada Allah. Dengan tidak total bergantung pada Allah, sering kali justru Allah persulit pemenuhan kebutuhannya.



### **Koordinasi dan Konsultasi BBTCLPP Yogyakarta ke PT Bio Farma dan Institut Teknologi Bandung (ITB)**

Dalam rangka persiapan beberapa kegiatan Bidang PTL BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2019 dan 2020, maka dilakukan koordinasi dan konsultasi ke PT Bio Farma dan ITB Bandung. Kunjungan pertama dilakukan tanggal 11 Februari 2019 di PT Bio Farma Bandung. Tim terdiri dari Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Kabag TU, Kabid PTL, dan Kasie Teknologi Laboratorium. Tim ditemui oleh Bp. Iman Suryaman (Kabag Distribusi), Ibu Diyah Widhiastuti (Kabag Surveilans dan Epidemiologi), dan Bp. Dhanny (Penanggung jawab gudang). Dalam kunjungan itu dijelaskan oleh PT Bio Farma mengenai proses pemantauan rantai dingin vaksin beserta persyaratannya yang dilakukan PT Bio Farma dari mulai pengepakan, penyimpanan di gudang sampai dengan distribusi ke Dinas Kesehatan Provinsi. Selain itu juga dilakukan diskusi mengenai pengiriman sampel polio lingkungan yang sudah dilakukan secara rutin oleh BBTCLPP Yogyakarta ke PT Bio Farma dalam rangka Erapo. Dalam kesempatan itu disampaikan oleh Tim BBTCLPP Yogyakarta, bahwa untuk pengiriman sampel polio lingkungan pada tahun 2020 yang semula hanya diambil dari IPAL di DIY, untuk tahun 2020 direncanakan akan ditambah dari IPAL di Provinsi Jawa Tengah.

Kunjungan kedua dilakukan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tanggal 12 Februari 2019. Tim Bidang PTL berkunjung ke Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB ditemui Wakil Dekan, Bp. Irsan Soemantri Brodjonegoro, PhD. Selanjutnya Tim mengunjungi Laboratorium Kualitas Air dan Laboratorium Pengolahan Air untuk berdiskusi teknologi tepat guna pengolahan air dengan Kepala Lab Kualitas Air, Bp. Qomarudin Helmy, MT. Dalam kesempatan itu dijelaskan tentang pengolahan air payau, pengolahan Fe dan Mn kadar tinggi serta desalinasi air laut dengan metode sederhana. Dari kunjungan ini diharapkan menambah wawasan dan mengoptimalkan kegiatan di bidang PTL BBTCLPP Yogyakarta tahun 2019 dan 2020, baik kelaboratoriuman maupun pengembangan teknologi tepat guna.




### **Sosialisasi Rencana Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Bawaan Air Melalui Depot Air Minum (DAM) di Kabupaten Rembang Tahun 2019**

Pada tanggal 11-12 Februari 2019 tim kajian BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Bawaan Air Melalui Depot Air Minum (DAM). Tim BBTCLPP Yogyakarta diterima oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dr. Nurani Her Utami, didampingi oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Al Furqon, S.I.Kom, S.K.M., dan Staf Sie Kesling Kesjaor Rini Setyowati, S.K.M.


Sedangkan sosialisasi yang berupa pertemuan dilaksanakan tanggal 12 Februari 2019 dihadiri oleh sepuluh orang peserta yaitu tiga orang petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dua orang petugas Puskesmas, satu orang petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, satu orang petugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dua orang petugas Asosiasi DAM dan satu orang petugas Kepolisian Resort Rembang.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Kesmas dr. Nurani Her Utami. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terima kasih kepada BBTCLPP Yogyakarta yang telah memilih Kabupaten Rembang untuk dijadikan tempat kajian/penelitian. Dalam pertemuan diundang juga dari Polres karena ada surat yang meminta jika ada kegiatan yang berhubungan dengan DAM pihak Polres agar dilibatkan. Sambutan kedua dari BBTCLPP Yogyakarta oleh Kepala Bidang ADKL Feri Astuti, S.T., M.P.H. yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan peserta menghadiri pertemuan. Dalam sambutannya disampaikan tujuan kegiatan yaitu untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan penyakit bawaan air melalui DAM. Meskipun jumlah DAM yang akan disurvei tidak bisa seluruhnya, namun diharapkan hasil yang ada dapat membantu memberikan gambaran kondisi di lapangan untuk pedoman pengawasan selanjutnya oleh Dinkes.



Pada pertemuan ini untuk pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc., penjelasan pengisian kuesioner oleh koordinator tim kegiatan Sri Ningsih, S.ST., M.T. yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Pertemuan ditutup oleh Kepala Seksi Kesling Kesjaor Kabupaten Rembang Al Furqon, S.I.Kom, S.K.M. dengan harapan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan bermanfaat. Disampaikan juga terima kasih kepada BBTKLPP Yogyakarta yang telah berkenan membantu dengan kegiatan tersebut.

---







### **Pertemuan Koordinasi Kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Dengue (S3D) Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019**

Pada hari Selasa, 12 Februari 2019, dilaksanakan pertemuan koordinasi kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Dengue (S3D) tahun 2019 di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan dibuka oleh dr. Rini Dwi Lestari M.Sc., Sp.A. (Ketua Tim S3D RSUD Wonosari), dilanjutkan oleh dr. Yohana Gita Chandra, M.S. (Kepala Seksi Lingkungan Biologi / Koordinator Kegiatan S3D BBTCLPP Yogyakarta) memberikan overview kegiatan S3D tahun 2018 dan 2019. Kemudian, dr. Galuh Budhi L., M.Kes. (Pemegang Program S3D Sub Direktorat Arboviroses Direktorat P2PTVZ Ditjen P2P) memberikan arahan tentang Kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Arbovirosis, dilanjutkan dengan sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan S3D tahun 2019 oleh dr. Ratna Wijayanti, M.P.H. (Ketua tim S3D BBTCLPP Yogyakarta).

Dengan semakin meningkatnya kasus DBD sejak akhir tahun 2018, tim S3D RSUD Wonosari berharap ada penambahan logistik dan RDT untuk kasus DBD. Akan tetapi karena keterbatasan RDT yang ada, penambahan tersebut belum dapat dipenuhi. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Subdit Arboviroses (dr. Worowijat), dari Dinas Kesehatan DIY (Budi Sartono, S.K.M., M.P.H. dan Fifi Indriani, S.K.M.), dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (dr. Rr. Dewi Angraini/Kepala Bidang P2P dan Winarta, S.Kep./pemegang program DBD), serta tim S3D RSUD Wonosari.



### **Koordinasi Kegiatan Survei Vektor DBD di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019**

Pada tahun 2019, BBTCLPP Yogyakarta mendapat tugas untuk melakukan Survei Vektor DBD yang disinkronkan dengan hasil kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Dengue (S3D) di RSUD Wonosari. Dari kasus DBD di kegiatan S3D DIY yang memenuhi definisi operasional spesimen (sesuai kriteria spesimen SOP S3A Subdit. Arbovirosis Dit. P2PTVZ Ditjen. P2P, tahun 2017, RDT positif, dan Dengue universal positif berdasarkan pemeriksaan molekular) pada periode 26 Januari – 7 Februari 2019, diambil tiga kasus untuk dilakukan survei vektor DBD di sekitar rumah kasus. Tiga kasus terpilih tersebut berada di wilayah kerja Puskesmas Wonosari I, Puskesmas Ponjong I, dan Puskesmas Karangmojo II. Pada hari Senin, 11 Februari 2019, tim BBTCLPP Yogyakarta yang terdiri dari Kepala Seksi Lingkungan Biologi (dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.), Ketua Tim Survei Vektor DBD tahun 2019 (Kustiah, S.Si.), dan Aslam Fahmiaji, A.M.K.L. melakukan koordinasi kegiatan Survei Vektor DBD dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan Puskesmas Wonosari I. Kemudian dilanjutkan pada hari Selasa, 12 Februari 2019, Ketua Tim Survei Vektor DBD melakukan koordinasi dengan Puskesmas Ponjong I dan Puskesmas Karangmojo II.



### **Pertemuan Koordinasi Kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis (S3JE) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019**

Pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, tim kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis (S3JE) BBTCLPP Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Bidang ADKL, Ibu Feri Astuti, S.T., M.P.H., melaksanakan Pertemuan Koordinasi S3JE tahun 2019 dengan RSUP Dr Sardjito, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan Subdit Arbovirologi Direktorat P2PTVZ Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rajawali RSUP Dr. Sardjito, dan dibuka oleh Wakil Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Sardjito, drg. Rini Sunaring Putri, M.Kes. Dalam pertemuan ini, dr. Galuh Budhi L., M.Kes., dari Subdit Arbovirologi menyampaikan arahan mengenai rencana penguatan S3JE di DIY, dengan menambah lima RSUD dan empat RS swasta ke dalam jejaring S3JE yang sudah ada.

Penguatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kasus JE di DIY. Pada pertemuan ini juga dipaparkan hasil pengujian spesimen S3JE selama tahun 2018 oleh BBTCLPP Yogyakarta, yaitu sebanyak 31 spesimen dengan hasil negatif, dan perbaikan formulir investigasi untuk mempermudah pengumpulan data. Pada akhir pertemuan disepakati bahwa pemilihan rumah sakit yang akan dilibatkan dalam kegiatan S3JE akan didasarkan pada kesiapan RS untuk ikut serta, jumlah kasus AES yang ditangani, dan komitmen RS dalam kegiatan surveilans.



### **Pertemuan Persiapan Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di Lingkungan Sekolah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019**

Pada tanggal 13 - 14 Februari 2019 tim kajian BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan Pertemuan Persiapan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di Kabupaten Banjarnegara. Tim BBTCLPP Yogyakarta diterima oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Bpk. Heri Purnomo, S.K.M., dan Ka.Sie Kesmas Ibu Holly, S.K.M. Sedangkan pertemuan persiapan kajian dilaksanakan tanggal 14 Februari 2019 dihadiri oleh dua belas orang peserta yaitu tiga orang petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, dua orang petugas Puskesmas wilayah rencana kajian, satu orang petugas dinas pendidikan dan kebudayaan, masing-masing satu orang perwakilan dari 6 Sekolah Dasar (SD) yang terpilih sebagai kajian. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Kesmas dr. Sulis. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terima kasih kepada BBTCLPP Yogyakarta yang telah memilih Kabupaten Banjarnegara untuk dijadikan tempat kajian/penelitian. Sambutan kedua dari BBTCLPP Yogyakarta oleh Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc. yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan peserta menghadiri pertemuan. Dalam sambutannya disampaikan tujuan kegiatan yaitu untuk melakukan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di Lingkungan Sekolah Dasar. Meskipun jumlah sekolah yang akan disurvei tidak bisa seluruhnya, namun diharapkan hasil yang ada dapat membantu memberikan gambaran kondisi sekolah untuk pedoman pengawasan dan pembinaan selanjutnya oleh Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan Kebudayaan setempat.

Setelah pemaparan materi tahapan rencana pelaksanaan oleh ketua tim kajian Bpk. Suharsa S.ST yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

Pertemuan ditutup oleh Kepala Seksi Kesling Kesjaor Kabupaten Banjarnegara Heri Purnomo S.K.M. dengan harapan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan bermanfaat. Disampaikan juga terima kasih kepada BBTCLPP Yogyakarta yang telah berkenan membantu



### **Koordinasi Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB Di Kabupaten Bantul**

Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB dilaksanakan sebagai bentuk kewaspadaan dini adanya laporan kasus suspek penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB. Untuk itu pada tanggal 14 Februari 2019, Tim BBTCLPP Yogyakarta, yang terdiri dari Kepala Seksi Advokasi dan KLB, Dien Arsanti, SKM., M.Env, dr. Dwi Amalia, MPH, dan Pama Rahmadewi, SKM, melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Bantul. Kunjungan ini dimaksudkan untuk diskusi kondisi terkini penyakit berpotensi KLB yang ada di Kabupaten Bantul, menyampaikan rencana kegiatan surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB sekaligus meminta masukan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tim BTKLPP Yogyakarta bertemu dengan Kepala Seksi Surveilans, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit dan Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra Dinkes Kabupaten Bantul.

Dari hasil diskusi diketahui adanya desa sentra ternak di kabupaten Bantul yang perlu untuk dipantau kondisi lingkungannya terutama terkait penyakit zoonosis. Dinkes Kabupaten Bantul mendukung bila akan dilakukan pemantauan FR lingkungan di desa ternak sebagai bentuk kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB. Selanjutnya koordinasi dilanjutkan ke DPPKP Kabupaten Bantul. Disini Tim BTKLPP Yogyakarta diterima Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kasie Kesehatan Hewan, dan fungsional teknis Dinas PPKP Kabupaten Bantul. Setelah tim BBTCLPP Yogyakarta menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan serta rencana kegiatan pemantauan faktor risiko lingkungan penyakit yang berpotensi KLB di sentra desa ternak, DPPKP Kabupaten Bantul menyambut baik dan mendukung pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan informasi mengenai gambaran kondisi lingkungan di sentra desa ternak. Selanjutnya disepakati untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjut Tim BBTCLPP Yogyakarta dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra dan di DPPKP Kabupaten Bantul melalui Bidang Peternakan.



### **Pengumpulan Spesimen Dalam Survei Vektor DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Wonosari I Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019**

Pada tanggal 13 dan 14 Februari 2019 dilakukan persiapan dan pelaksanaan survei vektor DBD di wilayah kerja Puskesmas Wonosari I Kabupaten Gunungkidul khususnya di wilayah Desa Mulo dan Desa Wulung. Persiapan dilakukan di hari pertama dengan cara membagikan peralatan survei larva nyamuk dan memberikan pengarahan cara mengumpulkan larva nyamuk *Aedes sp.* kepada kader kesehatan dan petugas daerah yang membantu pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengumpulkan larva nyamuk *Aedes sp.* di 50 rumah sekitar radius 0-200 meter dari rumah kasus. Keesokan harinya, dilakukan pengumpulan larva di 50 rumah berikutnya. Larva dari 100 rumah dibagi menjadi 20 pooling berdasarkan wilayah administratif (tingkat Rukun Tetangga / RT) sekitar rumah kasus. Larva nyamuk *Aedes sp.* dikumpulkan dari dalam rumah dan luar rumah. Spesimen larva yang dikumpulkan akan dibawa ke Laboratorium Entomologi dan Pengendalian Vektor BBTCLPP Yogyakarta untuk identifikasi dan pemisahan spesimen, untuk selanjutnya dilakukan identifikasi keberadaan Virus Dengue di dalam larva dengan metode molekular di Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta.



### **Pengumpulan Spesimen Dalam Survei Vektor DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Ponjong I Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019**

Setelah pengumpulan larva nyamuk *Aedes sp.* dari sekitar rumah kasus DBD di wilayah Puskesmas Wonosari I, pada tanggal 18 dan 19 Februari 2019 dilakukan persiapan dan pelaksanaan survei vektor DBD di wilayah kerja Puskesmas Ponjong I Kabupaten Gunungkidul. Seperti sebelumnya, pada hari pertama dilakukan persiapan survei vektor dengan cara membagikan peralatan survei larva dan memberikan pengarahan cara mengumpulkan larva nyamuk *Aedes sp.* kepada kader kesehatan dan petugas daerah yang membantu pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengumpulkan larva nyamuk *Aedes sp.* di 30 rumah sekitar radius 0 - 200 meter dari rumah kasus di Dusun Gunung Krambil Desa Sidorejo. Keesokan harinya, dilakukan pengumpulan larva di 32 rumah berikutnya di Dusun Trenggono Lor dan Dusun Trenggono Kidul Desa Sidorejo. Larva dari 62 rumah akan dibagi menjadi 20 pooling. Larva nyamuk *Aedes sp.* dikumpulkan dari dalam rumah dan luar rumah. Spesimen larva nyamuk yang dikumpulkan akan dibawa ke Laboratorium Entomologi dan Pengendalian Vektor BBTCLPP Yogyakarta untuk identifikasi dan pemisahan spesimen, untuk selanjutnya dilakukan identifikasi keberadaan Virus Dengue di dalam larva dengan metode molekular di Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta.



### **Uji Coba Instrumen Penilaian Biorisiko oleh INDOHUN di BBTCLPP Yogyakarta**

Pada tanggal 18 Februari 2019 diadakan uji coba instrumen penilaian biorisiko oleh INDOHUN atau Indonesia One Health University Network di BBTCLPP Yogyakarta. Tujuan kegiatan ini untuk melakukan uji coba instrumen penilaian biorisiko di BBTCLPP Yogyakarta guna menyiapkan menjadi Laboratorium yang tersertifikasi SNI 8340 : 2016. Tim Indohun terdiri dari 3 orang, Bapak Dr. drh. Eko Sugeng Pribadi, MSi, Ibu Dr. drh. Diah Iskandriati dan Bapak Agus Heri Setiawan, SKM, MPH. Acara dibuka oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, MKM. Dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara, melihat dokumen dan observasi ke laboratorium Virologi, Mikrobiologi Klinis dan Biomarker sesuai instrumen yang diuji cobakan. Hasil penilaian menunjukkan ada beberapa kekuatan utama dan kesenjangan yang ada untuk menjadi laboratorium yang tersertifikasi SNI 8340 : 2016. Untuk memperbaiki kesenjangan yang ada, selanjutnya INDOHUN akan memberikan saran dan bimbingan. Dari hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Laboratorium BBTCLPP Yogyakarta menjadi Laboratorium yang tersertifikasi SNI 8340 : 2016.





### **Koordinasi Kegiatan Kajian Faktor Risiko Flu Burung Tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah**

Dalam rangka melaksanakan layanan pengendalian penyakit zoonosis, BBTCLPP Yogyakarta melakukan Kajian Faktor Risiko Flu Burung di wilayah layanannya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten dengan kasus Avian Influenza pada unggas di Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 18 Februari 2019, tim BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga terkait rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Tim diterima oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga (Ir. Lili Purwati), Kepala Bidang Peternakan (drh. Maria Sri Maharsiwulan), serta Kepala Seksi Kesehatan Hewan (drh. Edy Setyanta). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dan tim menyambut baik karena kegiatan ini bagi Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dianggap sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh mereka terkait surveilans Avian Influenza. Tim Dinas Pertanian juga menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait potensi risiko Avian Influenza di wilayah Kabupaten Purbalingga dan masukan terkait rencana pelaksanaan pengambilan spesimen di lingkungan peternakan.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Februari 2019 dilaksanakan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Tim BBTCLPP Yogyakarta ditemui oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Semedi, S.K.M., M. Kes. Tim BBTCLPP Yogyakarta menjelaskan rencana kegiatan Kajian Faktor Risiko Penyakit Flu Burung di Kabupaten Purbalingga yang pada tahun 2019 akan mengambil spesimen dari tanah, air, dan swab trakea unggas di 12 peternakan. Bila tahun berikutnya BBTCLPP Yogyakarta masih mendapat tugas melaksanakan layanan ini, BBTCLPP Yogyakarta akan mencoba mengembangkan dengan menambah pengujian antibodi dari sampel manusia yang bekerja di area peternakan unggas.



### **Koordinasi Pelaksanaan Program BBTCL PP Yogyakarta Tahun 2019 dan Evaluasi Kegiatan 2018, Selasa 19 Februari 2019**

Hak Rakyat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan dijamin oleh UUD RI 1945 Pasal 28 H ayat (1). Tanggung jawab negara sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dengan tanggung jawab yang demikian, desentralisasi diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bari Rakyat Indonesia walaupun pada pelaksanaannya masih terjadi tarik ulur pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah. Berdasarkan UU No. 32/2004 dan PP No. 38/2007, pembagian urusan pemerintahan termasuk pelayanan kesehatan yang kini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan lain kata, Pemerintah bukan lagi pelaksana melainkan pembuat kebijakan pelayanan kesehatan bagi daerahnya.

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat.

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan diantaranya adalah urusan kesehatan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kesehatan merupakan urusan konkuren, wajib dan berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Mencermati UU tersebut, pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyangkut

1. Upaya kesehatan,
2. SDM Kesehatan,
3. Sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman
4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

BBTKL PP Yogyakarta sebagai UPT Dirjen P2P yang mempunyai wilayah layanan Provinsi Jawa Tengah dan DIY dapat berperan mendukung pemerintah provinsi dalam mencapai indikator-indikator kesehatan dalam mencapai peningkatan upaya kesehatan melalui Pengelolaan kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi.

Untuk itu diawal tahun 2019 ini dilakukan koordinasi program kepada Dinkes Provinsi yang secara otonomi mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Disamping itu Kepala BBTKL PP Jogjakarta, DR. dr. Irene, MKM, juga menyampaikan hasil-hasil kajian pada tahun 2018 dari bidang PTL, ADKL dan SE, serta teknologi tepat guna yang sudah di distribusikan untuk mendukung Program.

Pada kesempatan ini, bersama-sama BBTKL PP Jogjakarta juga hadir bersama KKP Jogjakarta. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV jogjakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal P2P sesuai dengan Permenkes RI No.356/MENKES/PER/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Jogjakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular dan potensial wabah, pelayanan kesehatan terbatas diwilayah kerja Pelabuhan / Bandara dan lintas barat serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan berdasarkan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, dijabarkan melalui peran dan fungsi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan berbagai program / kegiatan dengan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas Internasional / Nasional baik orang, barang maupun alat. Meski disadari bahwa perkembangan lalu lintas Internasional / Nasional membawa dampak perubahan dalam pola penyebaran penyakit baik karena timbulnya New Emerging Diseases maupun RE-Emerging Diseases dalam konteks Public Health of International Concern (PHEIC).

Kepala KKP Jogjakarta Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM melakukan koordinasi program dan Sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2018 serta Permenkes Nomor 23 Tahun 2018.

Disampaikan bahwa dengan penetapan 5 pelabuhan karantina di Indonesia sebagai tonggak awal peran pemerintah RI pada kesehatan pelabuhan, kemudian lahir UU No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara yang ditetapkan oleh Presiden Pertama RI pada tanggal 18 Januari 1962. Periode selanjutnya pemerintah Indonesia menetapkan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU), hingga kemudian menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seperti yang kita kenal saat ini.

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Agustus tahun 2018 yang lalu, setelah berproses sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Undang – Undang ini lahir untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara kita dari ancaman penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah.

Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pelaksanaan jejaring kerja dalam pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko yang berpotensi KKM baik di Pintu Masuk maupun Wilayah.

Pada kesempatan ini Ibu Kepala Dinas Kesehatan DIY drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes. menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan fasilitasi yang selama ini oleh BBTCL dan PP Jogjakarta serta KKP Jogjakarta. Selanjutnya menyampaikan pemahaman terhadap Visi Misi Gubernur DIY, Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Sementara Dinas Kesehatan mempunyai VISI mendukung terciptanya status kesehatan DIY yang tinggi sebagai pusat pelayanan dan pelatihan kesehatan yang bermutu, beretika dan berbudaya. Dengan MISI (a) Mencegah meningkatnya resiko penyakit dan masalah kesehatan, (b) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, (c) Menyediakan upaya kesehatan pemerintah dan swasta yang merata, bermutu dan berkeadilan.

Terimakasih Ibu drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes. atas penerimaannya.

Semoga tetap bisa bersinergis menuju DIY Sehat



### **Pertemuan Tim Gerak Cepat (TGC) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara**

Pada Tanggal 20 Februari 2019, KKP Yogyakarta menyelenggarakan “Pertemuan Tim Gerak Cepat (TGC) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara”. Bertempat di Hotel University Yogyakarta, pertemuan ini dihadiri berbagai lintas sektor diantaranya RS, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili Kepala Seksi Advokasi dan KLB. Acara dibuka oleh Kepala KKP Yogyakarta, Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM yang sekaligus menyampaikan latar belakang dilaksanakannya pertemuan. Disampaikan bahwa pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain membawa risiko terjadinya penyebaran penyakit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). International Health Regulations 2005 (IHR 2005) adalah komitmen global yang mengatur tata cara dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun tidak menular. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Yogyakarta selaku penjaga pintu masuk negara melakukan kegiatan pencegahan deteksi dan respond sebagai perwujudan pelaksanaan IHR untuk mencegah terjadinya KKMMD. Penyelenggaraan Surveilans yang merupakan Kunci Pencegahan-Pengendalian Penyakit Potensi KKMMD terdiri dari kewaspadaan dini, deteksi dini, kesiapsiagaan dan respon.

Perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkala dan khususnya pada saat kejadian dalam rangka merespon kejadian melatarbelakangi dilaksanakannya pertemuan. Paparan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan Rapid Health Assessment (RHA) memberikan gambaran mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan respond jika terjadi KKMMD salah satunya adalah dengan pembentukan TGC. Sebagai penutup disampaikan bahwa adanya TGC di masing-masing instansi terkait penting untuk dibentuk, dimana nantinya antar TGC ini bisa dibangun jejaring yang akan memudahkan dalam pelaksanaan respond jika terjadi kondisi darurat/KKMMD.



### **Sosialisasi PMK 196/PMK.05/2018, Grand Mercure Hotel, 21 Februari 2019**

Penggunaan kartu kredit corporate bisa jadi bukan merupakan hal yang baru dalam institusi swasta. Namun saat ini sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pemerintah Pusat yang bersumber dana dari APBN melalui 19ribu satuan kerja (satker) yang tersebar di beberapa Kementerian dapat melakukan belanja dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Bertempat di Ruang Borobudur Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Kamis (21 Februari 2019) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta Kanwil Provinsi DI Yogyakarta, memberikan sosialisasi PMK No 196/PMK.05/2018 tentang Tata cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Acara ini dihadiri oleh mitra kerja KPPN Yogyakarta, termasuk BBTCL PP Jogjakarta yang dihadiri langsung oleh Kepala Satker Dr. dr. Irene, MKM dan Perbankan melibatkan Bank Penyedia Kartu Kredit Pemerintah anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu perwakilan Bank Mandiri, BNI dan BRI. Acara ini diselenggarakan bekerjasama dengan Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada.

Dekan Vokasi UGM, Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa Virtual era ini sudah melanda di seluruh aspek termasuk penggunaan Kartu kredit pemerintah.

Heru Pudyo Nugroho, SE, MM selaku Kepala KPPN Yogyakarta, mendorong seluruh satuan kerja (satker) lingkup KPPN menggunakan uang persediaan (UP) dalam bentuk kartu kredit pemerintah (KKP). Selain lebih flexibel, penggunaan KKP diklaim lebih aman, efektif dan akuntabel dibanding UP tunai.

Dengan diterbitkannya PMK 196/2018, maka KPPN tidak lagi memberikan uang persediaan tunai secara keseluruhan kepada satker. Proporsinya, 60 persen UP tunai dan 40 persen UP KKP.

Sesuai ketentuan, penggunaan KKP secara keseluruhan dilaksanakan oleh satker pada Juli 2019. Karena itu KPPN akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan KKP.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Yogyakarta dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Gajah Mada dan penandatanganan dukungan Zona Integritas KPPN Yogyakarta dengan Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI.

Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Kepada Satker Dengan Kinerja Terbaik dengan 12 Kriteria Penilaian, yaitu:

Satker Kecil:

1. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
2. Kantor Kementerian Agama Yogyakarta
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY

Satker Besar:

1. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta
3. Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta

Wibawa Pram Sihombing, SE, AK menyampaikan bahwa Kartu Kredit Pemerintah ini lebih fleksibel, aman, efisiensi dan akuntabel dan harus sudah dilaksanakan per tanggal 1 Juli 2019.

Kartu Kredit Pemerintah ini nanti bisa digunakan untuk belanja operasional seperti belanja barang, belanja modal serta dapat digunakan untuk perjalanan dinas. Khusus untuk perjalanan dinas, itu hanya dipakai untuk pembelian tiket, sewa kendaraan atau untuk pembayaran hotel. Kalau untuk uang hariannya itu tetap dibayarkan tunai oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan uang tunai persediaan tadi.

Untuk belanja operasional batasan limitnya Rp. 50 juta sedangkan untuk perjalanan dinas dibatasi maksimal Rp. 20 juta.

Selama ini belanja yang dilakukan satker masih menggunakan uang persediaan (UP) tunai yang ada di kas bendahara. Dengan membagi dua cara pembayaran melalui uang tunai yang berada di rekening kas bendahara dan kartu kredit pemerintah, maka Pemerintah tidak perlu menyediakan ketersediaan uang tunai di kas bendahara-bendahara dengan jumlah yang cukup signifikan apalagi di awal tahun anggaran. Selain itu dengan adanya waktu 30 hari Negara dapat lebih leluasa mengatur cash flow.

Penggunaan KPP ini sangat aman dan sesuai PMK, Penerbit KKP membebaskan Satker dari biaya penggunaan KKP yang meliputi: biaya keanggotaan (membership fee), biaya keterlambatan pembayaran, biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, dan biaya-biaya lain atas penggunaan KKP. Adapun yang dapat dikenakan dalam tagihan KKP hanya biaya materai.

Di akhir acara dilakukan Pengenalan Penggunaan dan Apply Kartu Kredit Pemerintah Kepada Bank dan Penyerahan Secara Simbolis Kartu Kredit Pemerintah Kepada Satker.



### **In House Training ISO/IEC 17025 : 2017**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya personil laboratorium, maka BBTKLPP Yogyakarta mengadakan In House Training ISO/IEC 17025 : 2017 bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 -21 Februari 2019, dengan instruktur Ibu Mardiana dan asisten Ibu Maya Kusuma Wardani. Jumlah peserta sebanyak 25 orang dari Instalasi Laboratorium Lingkungan, Laboratorium Penyakit dan Instalasi pendukung lainnya di BBTKLPP Yogyakarta .

Acara dibuka oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta Ibu Dr. dr. Irene, MKM. Materi in house training mencakup klausul yang ada dalam ISO/IEC 17025 : 2017 yang merupakan pembaharuan dari ISO/IEC 17025 : 2008. Pelatihan ditutup oleh Kabid PTL BBTKLPP Yogyakarta Ibu Indah Nur Haeni, SSi, MSc. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat mengimplementasikan dalam kegiatan kelaboratoriuman dan dapat menambah ruang lingkup akreditasi sebagai Laboratorium Pengujian sesuai ISO/IEC 17025 : 2017.





### **Workshop Dengan Lintas Sektor Terkait Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

Pada tanggal 21 Februari 2019 Dinas kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pertemuan workshop dengan lintas sektor terkait pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat. Bertempat di Royal Darmo Hotel kota Yogyakarta, pertemuan dihadiri dari undangan sebanyak tiga puluh orang terdiri dari dinkes dan bappeda dari kabupaten/kota serta lintas sektor lain di DIY. Peserta dari BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh Tri Setyo Winaryanto ST.,M.Sc. Acara dibuka dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh kepala Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY, Dra. Puji Hastuti M.Si., yang dilanjutkan dengan pemaparan materi Evaluasi Germas Tahun 2018 dan Rencana Aksi Germas Tahun 2020 - 2022. Sesi kedua penyampaian materi yaitu mengenai Pelaksanaan GERMAS di Indonesia dan Pelaporan Germas disampaikan Bpk Andi dari Direktorat Promkes dan Pemberdayaa Masyarakat Kemenkes RI. Sesi ke tiga materi mengenai Pengantar diskusi dan dilanjutkan diskusi penyusunan rencana aksi germas oleh Ka.Bid Kes. Masyarakat Dinas Kesehatan DIY.

Pertemuan ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Kepala Seksi Promkes dan PL dinkes prov DIY, Yulia Irene Henny Wahyunami S.K.M. MPH., Yaitu: 1. Perlu komitmen bersama dalam penyampaian laporan kegiatan germas sesuai dengan peraturan yg berlaku. 2. Peningkatan jejaring dengan seluruh lembaga terkait (akademisi, LSM, CRS dll). 3. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan germas di masing masing OPD / lembaga . 4. Pemanfaatan hasil monev sebagai dasar dalam mengambil langkah langkah kebijakan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif ke depan, serta memperluas praktek baik yang terbukti efektif dalam mendorong perilaku hidup sehat.



### **Bakti Sosial Dharmawanita BBTKL PP Jogjakarta di Panti 2 Yayasan Sayap Ibu, Sabtu 23 Februari 2019**

Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Hal ini benar adanya, terutama untuk teman-teman kita yang ada di Panti 2 Yayasan Sayap Ibu Cabang DI. Yogyakarta.

Dharmawanita BBTKL PP Jogjakarta dibawah pimpinan Ny. Hesti Sayekti Udi Utama, didampingi Pembina Dharmawanita Kepala BBTKL PP Yogyakarta Dr. dr. Irene, MKM melakukan Bakti Sosial ke Panti 2 Panti Pengasuhan Cacat Ganda, Yayasan Sayap Ibu, Jogjakarta yang terletak di Jl. Ukrim RT. 07/RW. 02, Purwovartani, Kalasan, Kabupaten Sleman. Panti 2 Yayasan Sayap Ibu ini merupakan sebuah panti yang merawat penyandang disabilitas.

Mereka tidak seberuntung kita. Kita terlahir dengan cukup sempurna dengan keadaan fisik yang tanpa kekurangan, namun banyak dari mereka yang terlahir dengan kondisi Hiperaktif, Down Syndrome, Autisme, dan banyak lagi.

Sebut saja ada Sulis yang mempunyai akun instagram, Desni yang suka fotografer, Mira yang hobby membuat kerajinan tangan, Sapta penyandang Autisme, ada Keisha yang terlahir dengan Cerebral Palsy dan Mikrocephaly, Mba Wiwid yg saat ini sudah berusia 32 tahun. Ada Kuat penyandang cacat mental, Azis, Jojo penyandang Hidrosephalus, dan masih banyak lagi.

Panti Asuhan Cacat Ganda Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta adalah salah satu unit kerja dari Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY. Panti Asuhan Cacat Ganda YSI merupakan panti asuhan yang melayani anak-anak terlantar berkebutuhan khusus (disabilitas/difabel) yang kebanyakan adalah penyandang tuna ganda (multi handycap) dengan beragam jenis kecacatan. Dalam pelayanannya Panti Asuhan Cacat Ganda berupaya mengupayakan panti sebagai rumah yang nyaman bagi anak-anak asuhnya.

Anak yang berada di Yayasan Sayap Ibu di Yogyakarta merupakan anak terlantar. Anak yang dirawat merupakan anak temuan, anak luar kawin yang lahir dari keadaan yang tidak dikehendaki kelahirannya dan anak cacat. Jadi tidak semua anak yang berada di Yayasan Sayap Ibu adalah anak tanpa identitas yang ditemukan, ada yang memang sengaja di serahkan oleh orang tua kandung kepada pihak yayasan karena orang tua kandung tersebut tidak bisa merawat dengan baik atau memang anak tersebut tidak dikehendaki kelahirannya.

Untuk bayi yang masih merah, diterima dan dirawat di Panti 1. Bayi normal dapat diadopsi menurut aturan hukum yang berlaku. Anak balita yang cacat setelah berumur 2 tahun dikirimkan ke Panti 2 untuk mendapatkan pelayanan khusus. Di lokasi yang sama juga terdapat SLB Daya Ananda (SD, SLTP dan SLTA). Disini anak-anak dapat berbaur dengan anak-anak luar panti, karena juga melayani umum. SLB Daya Ananda melaksana Kurikulum Pendidikan Nasional dan aktif mengembangkan pelatihan sesuai kondisi anak, melaksanakan Life Skill Education sesuai kemampuan anak. Mereka juga membuat kerajinan tangan yang dijual dengan harga yang sangat murah berkisar Rp. 2000,- sd Rp. 5.000,- yang hasilnya dipergunakan untuk membeli bahan dan ditabung untuk membeli sesuatu yang diinginkan anak-anak.

Di Panti 2 ini dirawat Anak Cacat Ganda dewasa yang mampu rawat seumur hidup, serta untuk anak usia sekolah yang tidak teradopsi. Juga anak yang mampu didik dan mampu latih. Untuk yang sudah mandiri selanjutnya akan dirawat di Panti 3. Demikian disampaikan oleh pimpinan Panti 2 Devi Indah Puspita Sari.

Ribuan air mata menetes melihat situasi ini, tanpa tertahankan. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia Tuhan adalah satu hal yang paling sering kita lupakan. Banyak dari kita yang kurang bersyukur atas keadaan yang kita miliki saat ini, tetapi ketika kita melihat saudara-saudara kita disana, kita akan belajar bersyukur atas hidup ini.

Sebagai makhluk sosial sudah selayaknya kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, sesuai dengan kemampuan kita. Kita ini masih terlalu banyak diberikan kenikmatan dan kemudahan dalam hidup ini oleh Allah.



### **Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuju Cakupan Kesehatan Semesta**

BANTEN 25/02/2019, Mengusung tema “Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuju Cakupan Kesehatan Semesta” Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Anung Sugihantono, M.Kes menyampaikan dalam laporannya capaian Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sampai akhir tahun 2018, info penting terkait trend penyakit menular maupun tidak menular yang sedang berkembang di Indonesia saat ini sekaligus mengungkap tantangan kesehatan kedepan di hadapan Ibu Menteri Kesehatan RI.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM memberikan apresiasinya kepada Dirjen P2P atas inisiasi penyelenggaraan acara ini, dan berterima kasih atas pencapaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit. Menteri Kesehatan menekankan bahwa bangsa ini harus segera mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) dimana pelayanan kesehatan harus dimiliki oleh semua orang yang artinya akses untuk semua dengan pelayanan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial. Peran pencegahan dan pengendalian penyakit sangat besar agar beban kuratif tidak semakin tinggi. Kedepan harapannya orang akan pergi ke Rumah Sakit bukan untuk berobat atau sakit melainkan untuk pemeriksaan kesehatan rutin saja.

Setelah membuka resmi acara RAKONTEK P2P Menteri Kesehatan mengunjungi pameran sosialisasi program-program P2P. Beliau berkeliling melihat pameran yang digelar lebih dari 8 booth yang disajikan oleh kolaborasi Pusat (5 Direktorat) dan UPT (KKP, B/BTKLPP), beserta layanan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh peserta berupa test PTM (Kolesterol dan Gula Darah), test Kejiwaan, test HIV AIDS dan test Hepatitis.

Kepala BBTKLPP Yogyakarta beserta jajaran Kabag dan Kabidnya menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK) P2P yang diselenggarakan selama lima hari penuh mulai tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019 dengan peserta Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, B/BTKLPP dan KKP seluruh Indonesia, dan menghadirkan pula narasumber, praktisi, lintas sektor dan lintas program dari Bappenas, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Kemkes, Ditjen Yankes, Ditjen Farmalkes, BPPSDM Kesehatan. Rangkaian materi pembahasan berupa Evaluasi kegiatan 2018, percepatan pencapaian target 2019, perencanaan kegiatan 2020, upaya terobosan untuk percepatan pencapaian target Program P2P, pelaksanaan SPM bidang kesehatan Program P2P, kebijakan dan operasional anggaran Dekon serta DAK bidang kesehatan dan Penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program P2P.

Melengkapi rangkaian acara disajikan presentasi success story pemanfaatan Dana PIS-PK untuk program PTM di Palangkaraya, Pengembangan Aplikasi e-Jiwa pendukung PIS-PK di Jakarta, Implementasi Program menuju Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B di Kab Sinjai, Pemberdayaan Masyarakat Kunci pencegahan dan pengendalian DBD, Kekuatan Lintas Sektor dalam akselerasi peningkatan cakupan dan kualitas Imunisasi di Gorontalo, Sinergitas BBTKL dan Dinkes Dalam Akselerasi Peningkatan Upaya Pencegahan & Pengendalian Penyakit di Wilayah Kerja oleh BBTKLPP Jakarta dan Sinergitas Upaya Cegah Tangkal Polio di pintu Masuk Papua.

Kegiatan RAKONTEK P2P ini akan berlangsung sampai dengan empat hari kedepan dengan simultan side event berupa Rakordit Paripurna, Peran Rumah Sakit Jiwa Dalam Mendukung SPM Kab/Kota dan PIS-PK, Temu Pakar dan Praktisi bertema Tantangan Tantangan Eradikasi Polio di Indonesia dan Penguatan Surveilans AFP dan Tantangan Tata Laksana TBC Laten Menuju Eliminasi TBC.

Salam Indonesia Sehat



## **Pengumpulan Spesimen Dalam Survei Vektor DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmojo II Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019**

Setelah pengumpulan larva nyamuk *Aedes* sp. dari sekitar rumah kasus DBD di wilayah Puskesmas Wonosari I dan Ponjong I, pada tanggal 22 dan 26 Februari 2019 dilakukan persiapan dan pelaksanaan survei vektor DBD, berdasarkan kasus ketiga dari beberapa kasus konfirmasi infeksi Virus Dengue dalam kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Dengue (S3D), di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo II Kabupaten Gunungkidul. Seperti di lokasi sebelumnya, pada tanggal 22 Februari 2019 dilakukan persiapan survei vektor dengan cara membagikan peralatan survei larva

nyamuk dan memberikan pengajaran cara mengumpulkan larva nyamuk *Aedes* sp. kepada kader kesehatan dan petugas daerah yang membantu pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengumpulkan larva nyamuk *Aedes* sp. di 50 rumah sekitar radius 0 - 200 meter dari rumah kasus di Dusun Sokoliman II Desa Bejiharjo. Pada tanggal 26 Februari 2019, dilakukan pengumpulan larva di 50 rumah berikutnya di Dusun Sokoliman I dan Dusun Sokoliman II Desa Bejiharjo. Larva dari 100 rumah akan dibagi menjadi 20 pooling. Larva nyamuk *Aedes* sp. dikumpulkan dari dalam rumah dan luar rumah. Spesimen larva nyamuk yang dikumpulkan akan dibawa ke Laboratorium Entomologi dan Pengendalian Vektor BBTCLPP Yogyakarta untuk identifikasi dan pemisahan spesimen, untuk selanjutnya dilakukan identifikasi keberadaan Virus Dengue di dalam larva dengan metode molekular di Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta.



### **In House Training Pengujian Fisika Kimia dalam Air, Tanah dan Udara di BBTCLPP Yogyakarta**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas laboratorium di BBTCLPP Yogyakarta, maka diadakan In House Training Pengujian Fisika Kimia dalam Air, Tanah dan Udara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Februari 2019, bertempat di Aula Lantai III Gedung BBTCLPP Yogyakarta. Acara dibuka oleh Kabid PTL Ibu Indah Nur Haeni, SSi, MSc dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Laboratorium di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta, yaitu Laboratorium Fisika Kimia Air, Fisika Kimia Padatan dan B3, Fisika Kimia Gas dan Radiasi, Biologi Lingkungan, dan Mikrobiologi. Materi yang diberikan adalah Teori dan Praktek Pengujian Kadar Air, Kadar Lemas, Phosphate dan Nitrat dalam Tanah (Dr. Ir. Eko Hanudin MS – Fak Pertanian UGM); Teori dan Praktek Pengambilan dan Pengujian Udara Emisi, Udara Ambien, Kondisi Fisik dan Indeks Saturasi Bola Basah, Parameter Kebauan (Januar Arif Fatkhurrahman, ST - BBTTPPI Semarang); Teori dan Praktek Pengujian Pestisida (Maftuchatul Chaeriyah, STP, MEcDevb - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY); Teori dan Praktek Pengambilan dan Pengujian Jumlah Kuman dan Jamur di Udara, serta Bakteri Pathogen dalam Air (dr. Titi Nuryastuti, MSi, PhD, SpMK(K) - Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM). Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat diaplikasikan di laboratorium masing-masing untuk meningkatkan kualitas pengambilan dan pengujian sampel.

Setelah selesai dilakukan evaluasi peserta dengan post test, evaluasi pengajar diklat dan evaluasi penyelenggaraan. Acara ditutup oleh Kepala Bidang PTL.



### **Pengambilan Data Lingkungan Pada Kajian Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di Lingkungan Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara**

Pada tanggal 26 – 28 Februari 2019 Tim kajian analisis dampak faktor risiko penyakit berpotensi KLB di lingkungan sekolah dasar dari BBTCLPP Yogyakarta yang terdiri dari petugas supervisi ka.Sie Lingkungan Fisik Kimia yaitu Tri setyo Winaryanto ST., M.Sc serta tim kajian yang terdiri dari Suharsa S.ST, Prabawa SKM., M.Kes, E. Kristanti ST., M.Sc serta Juari melakukan pengambilan data lingkungan di 6 (enam) sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas makanan/jajanan/air bersih/sanitasi lingkungan sekolah serta ruang kegiatan belajar yang mempunyai faktor risiko penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB). Adapun SD yang terpilih berdasarkan hasil pertemuan sosialisasi tanggal 14 Februari 2019 dengan Dinas Kesehatan Banjarnegara adalah SDN Kutayasa, SDN Madukara, SDN Gemuruh 1, SDN Gemuruh 2, SDN Gemuruh 3 dan SDN Limbangan. Tim di dampingi oleh petugas sanitarian dari Dinkes Kabupaten Banjarnegara yaitu Bp. Arif, S.T. dan Ibu Haryani Purwaningrum serta dari petugas sanitarian Puskesmas Madukara 1 Ibu Vera Prasetyowati dan Puskesmas Bawang 1 Ibu Norisa Avyna Nuraeni. Kegiatan yang dilaksanakan didalam pengambilan data lingkungan adalah observasi lingkungan sekolah secara umum, pengamatan jentik untuk menghitung Container Index, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sarana air bersih (Sumur) dan pengambilan sampel air bersih, observasi dan pengambilan sampel makanan/minuman di kantin Sekolah, inspeksi sanitasi jamban, serta obseravasi dan pengukuran kualitas kondisi kelas (suhu, kelembaban, pencahayaan dan kebisingan). Hasil uji yang diperoleh akan dievaluasi sehingga dapat disusun rekomendasi yang nantinya diharapkan dapat sebagai bahan untuk mengantisipasi KLB keracunan akibat konsumsi makanan bagi anak sekolah. Selain itu juga sebagai bahan pendukung dalam program sekolah sehat.





### **Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2019**

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI menyelenggarakan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Th 2019 dengan melibatkan 15 Satker di Lingkungan Kemenkes di wilayah Prov. Jateng dan DIY. Acara yang dilaksanakan di Hotel Santika Premier Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari s.d 1 Maret 2019, mengambil Tema “Penguatan Tata Kelola Pengawasan Intern dalam rangka Mendukung Pembangunan Kesehatan Menyongsong Periode RPJMN 2020– 2024. Rakerwas yang diselenggarakan setiap tahun ini sebagai sarana dalam rangka sosialisasi pencapaian Kinerja Reformasi Birokrasi dan penyusunan rencana peningkatan tata kelola pengawasan, Manajemen Resiko dan pengendalian Internal Pemerintah khususnya diLingkungan Kemenkes.

Dalam acara tersebut dihadirkan juga beberapa Narasumber antara lain Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik , Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP dan Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Selain ketiga narasumber tersebut Inspektorat Jenderal Kemenkes RI juga menghadirkan Inspektur Jenderal Kemenkeu dan Inspektur VII- Inspektorat Jenderal Kemenkeu sebagai Narasumber untuk menyampaikan tata kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kemenkeu. Dengan dihadirkannya Narasumber dari Kementerian Keuangan tersebut diharapkan peserta dapat mempelajari dan mengambil hal-hal positif untuk diterapkan dalam tata kelola pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan, mengingat Kemenkeu sampai saat ini menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Internal.

Selain Diskusi Panel, dalam acara tersebut juga dilaksanakan diskusi Kelompok dan pada diskusi tersebut peserta dibagi menjadi 4 kelompok. Dan didapatkan beberapa Output yang dihasilkan dalam diskusi, Kelompok A adalah dihasilkannya rumusan kebijakan Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kemenkes, Kelompok B adalah dihasilkannya Rumusan Rancangan Rencana Strategis /Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2020-2024, Kelompok C adalah dihasilkannya Rumusan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kemenkes, dan Kelompok D adalah dihasilkannya Rumusan Implementasi Manajemen Resiko di Lingkungan Kemenkes.



### **Persiapan Kegiatan Surveilans Penyakit Leptospirosis Ke B2P2VRP Salatiga**


Tingginya kasus Leptospirosis di Provinsi Jawa Tengah, dengan CFR 37,5% pada tahun 2017 dan 20,84% pada tahun 2018, mendorong BBTKLPP Yogyakarta untuk melakukan kegiatan Surveilans Leptospirosis guna mengetahui besaran permasalahan leptospirosis di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan hal tersebut, Tim kegiatan BBTKLPP Yogyakarta yang terdiri dari Kasie Advokasi dan KLB, Dien Arsanti, SKM., M.Env., serta dua orang Epidemiolog Kesehatan, dr. Dwi Amalia, MPH dan Imam Wahjoedi, SKM., MPH melakukan kunjungan ke B2P2VRP Salatiga pada tanggal 27 Februari 2019, untuk konsultasi sekaligus membicarakan kerjasama dalam hal pengujian sampel leptospirosis. Tim BBTKLPP Yogyakarta diterima oleh Kepala Seksi Pelayanan Teknis, Evi Sulistyorini, SKM., M.Si. dan Kepala Seksi sarana penelitian dan pengembangan, Lulus Susanti, SKM., MPH. Beliau menyambut baik kedatangan Tim BBTKLPP Yogyakarta, dan menyatakan kesiapannya untuk kerjasama dalam pengujian sampel. Selanjutnya terkait teknis penanganan sampel, Tim BBTKLPP Yogyakarta berkonsultasi langsung dengan petugas dari laboratorium terkait yaitu Arief Mulyono, S.Si, M. Sc. dan Arum Sih Joharina, S.Si. Pada kesempatan itu dipaparkan prosedur operasional standar pada kegiatan surveilans leptospirosis yang dilaksanakan oleh B2P2VRP Salatiga.

Dari hasil paparan dan diskusi diketahui bahwa B2P2VRP Salatiga akan melakukan kegiatan surveilans leptospirosis di beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, dan diharapkan BBTKLPP Yogyakarta bisa melaksanakan kegiatan serupa di lokasi yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi data dan informasi terkait kasus leptospirosis di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Dalam paparan tersebut disampaikan juga mengenai teknik penanganan sampel, antara lain bahwa sampel serum dan darah dapat disimpan pada suhu 4 C hingga tiga bulan. Pada kegiatan Surveilans Leptospirosis ini, direncanakan sampel darah akan diperiksa dengan metode PCR sedangkan sampel serum akan diperiksa dengan metode MAT.




### **Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora di BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2019**

Dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas di wilayah Kabupaten Blora maka pada tanggal 28 Februari 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menyelenggarakan kunjungan ke BBTCLPP Yogyakarta dan kunjungan lapangan ke salah satu Depot Air Minum (DAM) yang ada di Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk memahami tentang Higiene Sanitasi dan Maintenance DAM. Jumlah peserta kunjungan sebanyak 40 orang dan diterima di Aula Lt. 2 Gedung C BBTCLPP Yogyakarta. Acara pembukaan dilakukan safety briefing terlebih dahulu dari tim Diklat BBTCLPP Yogyakarta Bp. Dr. Hadi Sumanto, STP., M.Kes. kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Bp. Suharyanto, S.K.M., M.M. Beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada BBTCLPP Yogyakarta yang telah mengizinkan dan menerima kegiatan kunjungan ini dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas bagi Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas di wilayah Kabupaten Blora. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Ibu Indah Nur Haeni, S.Si., M.Sc selaku Kepala Bidang PTL, menjelaskan tugas pokok dan fungsi BBTCLPP Yogyakarta serta kegiatan bidang SE, ADKL dan PTL di wilayah layanan DIY dan Provinsi Jawa Tengah.



Secara rinci dijelaskan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sudah dilakukan guna pencegahan dan pengendalian penyakit. TTG tersebut diantaranya adalah penjernih air keruh, pengolahan Fe dan Mangan, perangkat alat, sterilisasi alat makan, sterilisasi udara ruang, dll yang dapat dilihat melalui "PojoK TTG" website BBTKLPP Yogyakarta. Selain itu BBTKLPP Yogyakarta juga melakukan bimbingan teknis kepada laboratorium di Kabupaten/Kota di DIY dan Provinsi Jawa Tengah guna meningkatkan kapasitas petugas laboratorium daerah dalam pengujian dan akreditasi. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi terkait Higiene Sanitasi dan Maintenance DAM yang disampaikan oleh Bp. Sukoso, S.ST., M.Sc. Setelah rangkaian acara di BBTKLPP Yogyakarta selesai kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke DAM Khaira di Jl. Tritunggal No. 2 Ruko Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Harapannya dengan dilakukan kunjungan ke salah satu DAM di Kota Yogyakarta dapat menambah ilmu dan pengalaman yang dapat diterapkan di DAM wilayah Kabupaten Blora serta dapat dibentuk Asosiasi DAM guna mempermudah pengawasan DAM.

---





### **Koordinasi Program KLB Keracunan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ke BBTCLPP Yogyakarta**

Salah satu Tupoksi BBTCLPP Yogyakarta, berdasarkan PMK RI Nomor 2349 tahun 2011 adalah "Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana". Dalam rangka pelaksanaan Tupoksi tersebut BBTCLPP Yogyakarta memberikan fasilitasi kepada Kab/kota di Wilker BBTCLPP Yogyakarta, DIY dan Provinsi Jawa Tengah, dalam bentuk: 1) Bantuan tenaga untuk Penyelidikan Epidemiologi, DLL, 2) pengujian sampel, dan 3) Bantuan logistik. Kabupaten Klaten, salah satu mitra kerja BBTCLPP Yogyakarta, seringkali mengirim sampel KLB keracunan pangan ke BBTCLPP Yogyakarta untuk pengujian sampel. Sehubungan hal tersebut dan untuk peningkatan kerjasama dalam penanggulangan KLB, pada tgl 1 maret 2019 Tim DKK Klaten yang dipimpin oleh Kabid P2P, dr. Anggit Budiarto, berkunjung ke kantor BBTCLPP Yogyakarta. Tim DKK Klaten diterima Kabid PTL, Indah Nur Haeni, S.Si., M.Sc. beserta tim. Disampaikan Kabid P2P DKK Klaten bahwa, tujuan kedatangan, selain koordinasi juga evaluasi kerjasama pengujian sampel KLB yang selama ini sudah terjalin. Selanjutnya dilakukan paparan oleh Kasie Advokasi dan KLB mengenai Tupoksi BBTCLPP Yogyakarta terkait Fasilitasi Respon Cepat dan Penanggulangan KLB dan dilanjutkan dengan penyampaian mengenai tata cara pengambilan dan pengiriman sampel KLB oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi Klinis. Acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai proses pengiriman sampel KLB yang selama ini sudah berjalan dan bentuk kerjasama selanjutnya untuk meningkatkan kualitas respon cepat dan penanggulangan KLB di Kab Klaten. Dari hasil diskusi diketahui:

1. proses pengiriman sampel KLB dari DKK Klaten telah sesuai dengan prosedur namun perlu diperjelas mengenai jenis paramater pengujian yang diminta
2. permintaan bahwa sampel KLB mendapat prioritas dalam pengujian sampel, sudah berjalan dengan adanya SOP pengelolaan spesimen KLB di BBTCLPP Yogyakarta. Untuk meningkatkan kualitas respon cepat dan penanggulangan KLB diharapkan adanya bimbingan teknis dari BBTCLPP Yogyakarta bagi petugas kesehatan di wilayah Kab. Klaten dalam respon cepat dan penanggulangan KLB.



### **Focus Group Discussion Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018**

KPPN Yogyakarta menyelenggarakan acara Focus Group Discussion Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung Keuangan Negara, Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta pada hari Selasa, 5 Maret 2019.

Acara yang melibatkan Satker di seluruh wilayah DIY yang sedang membangun wilayah bebas dari korupsi ini dibuka dengan sambutan oleh kepala KPPN Yogyakarta, Bapak Istu Wahudi.

Sebagai pengisi acara inti, KPPN menghadirkan 2 orang Narasumber. narasumber pertama yaitu Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Bapak Oce Madril, SH, MA yang menyampaikan garis besar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan gambaran kasus Korupsi di Tahun 2018, serta Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain, penerapan program pencegahan korupsi dengan proses pembangunan Zona Integritas, Pengelolaan UPG, Benturan Kepentingan, sistem pengaduan masyarakat dan Sistem pengendalian internal dengan contoh konkrit bisa melalui system rekrutmen pegawai yang transparan, Promosi Jabatan sesuai dengan prestasi kerja, dan keterbukaan informasi Publik. Narasumber kedua yaitu Jaksa Satgas Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi kejaksaan tinggi DIY Bapak Faisal Banu, SH., M.Hum yang menyampaikan terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan Arah Kebijakan Nasional, dengan memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan oleh kementrian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan aksi pencegahan Korupsi di Indonesia dengan focus di sektor Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Kegiatan tersebut diakhiri dengan Sharing tentang penyelenggaraan Strategi KPPN Yogyakarta dalam penanggulangan Korupsi yang disampaikan oleh Kepala KPPN Yogyakarta. Beliau menyampaikan dalam menerapkan tata kelola reformasi Birokrasi terdapat beberapa strategi yang dilakukan antara lain: Perombakan struktur organisasi, Pembentukan tata laksana (SOP), Perombakan sistem informasi manajemen, Manajemen perubahan yang diterapkan mulai dari pejabat, Pembentukan dan pemfungsian seksi MS KI (Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal) yang melaksanakan tugas dalam hal pengendalian dan pengawasan Internal, Penyediaan kotak WBS/Saran dan Pelayanan berbasis kemitraan.



### **Pertemuan Persiapan Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di Lingkungan Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2019**

Pada tanggal 5 Maret 2019 tim kajian BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan pertemuan untuk koordinasi rencana Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di Lingkungan Sekolah di Kabupaten Sleman. Pertemuan dihadiri oleh enam orang peserta yaitu satu orang petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dua orang petugas Puskesmas di wilayah kajian, satu orang petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dua orang petugas UPT Yandik Kecamatan di wilayah kajian. Pertemuan dibuka oleh Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Mujiyana, S.K.M. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terima kasih kepada BBTCLPP Yogyakarta dan tamu undangan. Pemilihan SD sementara telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bersama Puskesmas terkait berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BBTCLPP Yogyakarta yaitu sekolah yang pernah terjadi KLB atau berpotensi KLB. Mohon masukan dari UPT Yandik apabila dirasa ada yang tidak sesuai. Sambutan kedua dari BBTCLPP Yogyakarta oleh Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia, Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan peserta menghadiri pertemuan. Dalam sambutannya disampaikan tujuan kegiatan yaitu untuk mengetahui gambaran kualitas lingkungan sekolah (SD) yang menjadi faktor risiko terjadinya gangguan kesehatan khususnya penyakit berpotensi KLB di sekolah dasar. Pemaparan materi disampaikan oleh tim kajian, Sri Ningsih, S.ST., M.T. yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Hasil diskusi diperoleh kesepakatan berjumlah 6 SD sebagai lokasi kajian di 2 wilayah puskesmas. Pertemuan ditutup oleh Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia BBTCLPP Yogyakarta Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc dengan harapan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut. Disampaikan pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini.



### **Pengambilan Data Lingkungan Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di Lingkungan Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2019**

Menindaklanjuti pertemuan koordinasi rencana Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di Lingkungan Sekolah di Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Maret 2019, maka pada tanggal 26-28 Maret 2019 dilaksanakan pengambilan data lingkungan di sekolah dasar yang telah disepakati. Tim kajian dari BBTCLPP Yogyakarta sebanyak lima orang, yang terdiri dari satu orang petugas supervisi, dua orang sanitarian bertugas melaksanakan observasi dan pengukuran kualitas fisik udara ruang kelas kegiatan belajar mengajar/perpustakaan dan dua orang petugas laboratorium yang bertugas melakukan pengambilan sampel. Dalam melaksanakan tugas ini didampingi dan dibantu oleh satu orang petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan satu orang petugas sanitarian puskesmas tempat SD yang dijadikan sebagai kajian.

Adapun Observasi yang dilakukan meliputi observasi lingkungan sekolah, IKL jenis sarana sumur dangkal, IKL jamban/ kamar mandi, IKL kantin/pedagang keliling, dan data kondisi kelas. Sedangkan jenis sampel yang diambil adalah air bersih dan makanan/minuman baik dari kantin sekolah maupun dari pedagang keliling. Selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa. Pengambilan data lingkungan hari pertama, tanggal 26 Maret 2019 di lokasi SD Negeri Nglempong dan SD Negeri Rejodani masuk dalam wilayah Puskesmas Minggir.

Pengambilan data lingkungan hari kedua, tanggal 27 Maret 2019 di lokasi SD Negeri Balangan 2 dan SD Muhammadiyah Plembon masuk dalam wilayah Puskesmas Ngaglik. Pada pengambilan data lingkungan hari ketiga, tanggal 28 Maret 2019 di lokasi SD Muhammadiyah Sunten dan SD Muhammadiyah Sragan masuk dalam wilayah Puskesmas Ngaglik. Hasil pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan di sambut baik semua guru di sekolah dasar yang dijadikan kajian. Kegiatan ini diharapkan nanti dapat digunakan sebagai masukan bagi sekolah terkait dan sebagai dasar Dinas Pendidikan atau UPT Yandik kecamatan untuk melakukan pembinaan perbaikan kualitas lingkungan.





### **Observasi/Inspeksi Sanitasi/Pemantauan dan Pengambilan Sampel dalam rangka Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Bawaan Air Melalui Depot Air Minum (DAM) di Kabupaten Rembang Tahun 2019**

Sebagai tindak lanjut dari koordinasi Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Bawaan Air Melalui Depot Air Minum (DAM) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11-12 Februari 2019 maka pada tanggal 13-15 Maret 2019 tim kajian BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan observasi/inspeksi sanitasi/pemantauan dan pengambilan sampel. Tim BBTCLPP Yogyakarta yang terdiri satu orang supervisi, dua orang observasi/inspeksi sanitasi/pemantauan dan tiga orang petugas laboratorium yang bertugas melaksanakan pengambilan sampel.

Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Rini Setyowati, S.K.M. dan petugas sanitarian Puskesmas Rembang 1 Siti Kholifah, S.K.M.

Dalam kegiatan ini dilakukan observasi/inspeksi sanitasi/pemantauan dan pengambilan sampel pada dua puluh DAM yang di bagi menjadi sepuluh DAM di wilayah Puskesmas Rembang 1 dan sepuluh DAM di wilayah Puskesmas Rembang 2. Adapun jenis sampel yang diambil di setiap DAM meliputi air baku (air bersih sebelum proses), air setelah proses (air hasil olahan), usap tangan operator DAM dan usap kran pengisian galon (outlet), selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium untuk diuji sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, kecuali untuk parameter lapangan langsung diuji di lokasi tempat pengambilan sampel.

Diharapkan dari hasil observasi/inspeksi sanitasi/pemantauan dan pengujian sampel akan didapatkan gambaran kondisi dan kualitas DAM di Kabupaten Rembang sehingga dapat digunakan sebagai dasar melakukan tindak lanjut dalam pengawasan dan pembinaan DAM.



## Surveilans Faktor Risiko Penyakit Zoonosis Yang Berpotensi KLB

Surveilans faktor risiko penyakit zoonosis yang berpotensi KLB dilaksanakan sebagai bentuk kewaspadaan dini adanya laporan kasus suspek penyakit-penyakit zoonosis yang berpotensi menimbulkan KLB. Mengingat bahwa penyakit zoonosis memiliki potensi menimbulkan KLB/wabah dan juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat maka perlu dilakukan surveilans pada penyakit ini. Adapun faktor risiko yang lebih ditekankan pada kegiatan surveilans ini adalah faktor risiko penyakit zoonosis yang terkait lingkungan.

Wilayah Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di D.I. Yogyakarta yang memiliki kawasan desa sentra ternak dan mensuplay sebagian besar kebutuhan daging di D.I. Yogyakarta. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Zoonosis Yang Berpotensi KLB di wilayah tersebut telah dilaksanakan pada Bulan Februari - Maret 2019. Kegiatan diawali dengan koordinasi oleh Kepala Seksi Advokasi dan KLB beserta tim kegiatan Bidang SE ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Februari 2019, untuk berdiskusi mengenai kondisi penyakit zoonosis terkini di Kabupaten Bantul, menyampaikan rencana kegiatan serta menghimpun masukan dan dukungan dalam pelaksanaan surveilans. Tahap selanjutnya yaitu observasi dilakukan pada tanggal 5 Maret 2019. Pada tahap ini dilakukan pengamatan kondisi lingkungan di wilayah Segoroyoso dan mengidentifikasi titik-titik yang memungkinkan memiliki faktor risiko lingkungan penularan penyakit zoonosis, seperti tempat potong hewan (TPH), rumah potong hewan (RPH), kandang ternak, dan daerah hilir sungai.

Tahap pengambilan sampel dilakukan tanggal 12 – 13 Maret 2019. Ada 20 titik pengambilan sampel yaitu 4 TPH, 1 RPH, Kandang Ternak milik Kelompok Ternak Sapi dan Kambing, serta daerah hilir sungai dimana limbah dari kandang dan tempat pemotongan bermuara. Jenis sampel yang diambil adalah usap lantai, tanah, dan air di tempat pemotongan dan kandang ternak. Sampel selanjutnya dikirim ke BBVet Wates tanggal 14 Maret 2019 untuk dilakukan identifikasi bakteri dengan metode kultur bakteri.



## **Pertemuan Evaluasi Sakip Satker Pusat Dan Upt Ditjen P2P**

Pertemuan Evaluasi Desk SAKIP satker Pusat dan UPT digelar Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mulai tanggal 12 sd 15 Maret 2019 di Bekasi, Jawa Barat dan dihadiri oleh 59 UPT (KKP dan B/BTKLPP se Indonesia) dan 5 satker Pusat.


Arahan Sesditjen P2P yang dibacakan oleh Kepala Bagian Program dan Informasi dr. Elvieda Sariwati, M.Epid menyampaikan bahwa SAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban seluruh Instansi Pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

Apresiasi Sesditjen diberikan kepada Tim SAKIP P2P yang telah berupaya untuk menyiapkan segala kebutuhan atas penilaian SAKIP yang nantinya akan dilakukan oleh tim APIP Kemenkes RI.

Harapannya seluruh satker P2P kedepan dapat meningkatkan prestasi penilaian SAKIP baik dari sisi predikat maupun capaian penilaiannya. Status predikat AA (sangat memuaskan) harus diupayakan sebaik-baiknya.


Sesditjen juga memberi pesan untuk meningkatkan komunikasi efektif pusat dan daerah agar good government dapat terbentuk dan seluruh permasalahan dapat ditemukan solusinya.

Narasumber dari KemenpanRB dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI juga dihadirkan dalam rangka memberikan refreshing upaya mewujudkan instansi pemerintah yang (lebih) akuntabel terhadap kinerjanya dan juga upaya penguatan perencanaan dan monev program dalam rangka menjangkau akuntabilitas.



Pertemuan yang diselenggarakan Ditjen P2P dalam rangka proses pendampingan kepada satuan kerja dilingkungannya dilakukan dengan mekanisme desk reviu antara unit utama Ditjen P2P dan UPT baik dari kelengkapan dokumen penilaian sampai dengan kualitas Laporan Kinerja yang telah disusun. Peningkatan kualitas dokumen penilaian adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar, ini harus dilakukan agar kinerja dapat tersajikan dengan baik. Perlu meningkatkan kualitas laporan dan sistematika laporan kinerja; penajaman analisis pencapaian dan kegagalan indikator; dan melengkapi semua capaian dengan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas instansi terhadap kerjanya.


Pada akhir pertemuan, masing-masing satker akan mendapatkan dokumen Catatan Hasil Reviu (CHR) SAKIP sebagai bentuk penilaian kesiapan satker dalam rangka menyambut agenda penilaian SAKIP oleh APIP Kemenkes RI selanjutnya.






### **Koordinasi dan Konsultasi Program Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang di BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2019**

Dalam rangka menambah wawasan terkait kesehatan lingkungan maka pada tanggal 13 Maret 2019 telah dilakukan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi tentang Program Kesehatan Lingkungan dari Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang di BBTCLPP Yogyakarta. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesjora Bp. Asyhar Kuncoro, S.K.M., didampingi oleh lima orang petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Tim diterima oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Ibu Dr. dr. Irene, M.K.M beserta Ka.Bid PTL, Ka.Bid ADKL dan staf ADKL di Ruang Rapat Kepala BBTCLPP Yogyakarta. Bp. Asyhar Kuncoro, S.K.M menyampaikan bahwa di Kabupaten Semarang terdapat 26 Puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan. Dari 26 Puskesmas tersebut belum seluruhnya mempunyai tenaga sanitarian yang berlatar belakang pendidikan kesehatan lingkungan. Puskesmas yang telah memiliki petugas sanitarian dengan pendidikan kesehatan lingkungan baru berjumlah 13 Puskesmas, sedangkan 13 Puskesmas lainnya dirangkap oleh tenaga kesehatan yang lain. Selain itu, disampaikan juga maksud dan tujuan koordinasi/konsultasi ke BBTCLPP Yogyakarta yaitu untuk mengenal lebih dekat dan mohon bantuan untuk bimbingan petugas sanitarian di Kabupaten Semarang agar sanitarian-sanitarian tersebut dapat bekerja sebagaimana mestinya. Menanggapi hal tersebut Ibu Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc. selaku Ka.Bid PTL menyampaikan bahwa BBTCLPP Yogyakarta menyambut baik kedatangan dan rencana pertemuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.



Disampaikan pula bahwa Bidang PTL juga mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, seperti pengolahan air yang tidak memenuhi syarat baik fisik, kimia maupun biologi, penanganan kasus-kasus KLB, sterilisasi udara, dan lain sebagainya. Kemudian Kepala Bidang ADKL Ibu Feri Astuti, S.T, M.P.H menyampaikan bahwa bidang ADKL juga mengerjakan kajian-kajian yang ada kaitannya dengan kesehatan lingkungan seperti kajian DAM, pammaskarta, sekolah, haji, arus mudik, event khusus, dan lain sebagainya. Dalam diskusinya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang berencana untuk mengajak petugas sanitariannya berkunjung ke Yogyakarta dalam rangka menimba ilmu di BBTKLPP Yogyakarta dan ke salah satu daerah STMB di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu Bp. Budi Aryawar juga menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan direncanakan pada awal bulan Mei 2019 dengan peserta sanitarian lama dan baru, sehingga diharapkan untuk sanitarian lama dapat sebagai penyegaran ilmu dan sanitarian baru untuk menambah ilmu.

Acara ditutup dengan penyampaian ucapan terimakasih dari Bp. Asyhar Kuncoro, S.K.M atas diterima kedatangannya di BBTKLPP Yogyakarta, dengan harapan kerjasama ini bisa berkelanjutan. Dari pihak BBTKLPP Yogyakarta juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan berharap agar kerja sama ini tetap terjalin.





### **Workshop Managing Service Consistency Gran Melia Jakarta, 13-15 Maret 2019**

Workshop ke VI ini dilaksanakan untuk UPT Kemenkes dg menghadirkan para pimpinan masing-masing satuan kerja. UPT BBTCLPP Yogyakarta dihadiri langsung oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta Dr. dr. Irene, MKM.

Pelayanan pelanggan menjadi salah satu keunggulan kompetitif perusahaan dalam upaya mempertahankan pelanggan. Makin ketatnya persaingan bisnis membuat para pelaku bisnis bersaing dalam pelayanan terhadap pelanggannya. Untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya, maka perlu pemahaman tentang bagaimana teknik-teknik pelayanan pelanggan.

Setiap personil di semua tingkatan dalam perusahaan harus memahami secara tepat bagaimana melayani pelanggan, memahami siapa pelanggan mereka, apa kebutuhan pelanggan mereka, dan bagaimana melayani dan memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Salah satu kunci sukses dari keberhasilan dalam meningkatkan penjualan adalah dengan berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan customer, dengan cara memberikan pelayanan yang memuaskan. Dengan berinteraksi dapat membangun kesempatan untuk mempromosikan produk, layanan dan perusahaan. Namun tidak mudah bagi pihak perusahaan untuk menjalankannya. Sukses dalam menciptakan kepuasan pelanggan sangat tergantung dari tingkat keahlian customer service.

Peningkatan kualitas layanan seharusnya secara kontinyu diupayakan oleh seluruh karyawan. Salah satu faktor dalam peningkatan kepuasan pelanggan adalah penanganan komplain pelanggan. Untuk mengembangkan organisasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (service excellence), keterampilan menangani komplain pelanggan merupakan keterampilan yang sangat penting.



### **Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI**


Bertempat di Planet Holiday Hotel & Residences Batam, pada tanggal 13 – 15 Maret 2019 telah diselenggarakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang digelar oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkes RI.

Sebagai Dasar Hukum yang melandasi diselenggarakannya pertemuan adalah telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/153/2018 tentang Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/172/2018 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) di Lingkungan Kemenkes RI.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Biro Umum Ibu dr. Desak Made Wisamarini M.K.M bertujuan untuk menggali kendala dan permasalahan Satker dan UPT terkait penyelenggaraan Gerakan Kantor BERHIAS dan memberikan pelatihan kepada petugas teknis terkait cara pengisian sistem pelaporan online Gerakan Kantor BERHIAS yang meliputi pelaksanaan penilaian mandiri, penilaian internal, monitoring dan evaluasi penghematan penggunaan energi baik listrik maupun air serta transfer knowledge mengenai 5 aspek Gerakan Kantor BERHIAS yaitu Kantor Ramah Lingkungan, K3 Perkantoran, Efisiensi Energi, 5R dan Pengelolaan Kearsipan dengan narasumber yang berasal dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes, Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM, Direktorat Bina Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, dan ANRI.

Pertemuan dilaksanakan selama 3 hari dihadiri oleh perwakilan 220 Satker Pusat dan Daerah/UPT Kemenkes yang terdiri dari pejabat eselon II dan III beserta staf di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Badan Litbangkes, Badan PPSDM, Ditjen Yankes, dan Ditjen P2P, sementara dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Staf Jabfung Umum Epidemiologi Kesehatan.






Pertemuan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat mendorong seluruh Satker/UPT untuk terus konsisten dalam menyelenggarakan Gerakan Kantor BERHIAS dalam pengelolaan bangunan gedung yang berdaya ungkit terhadap produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, karena sebagai abdi negara yang bertugas melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah seharusnya kita menjadi contoh bagi seluruh pihak terkait yang pada akhirnya juga turut memberikan sumbangsih positif terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang merugikan lingkungan hidup dan kehidupan manusia.

Pada akhir pertemuan dihasilkan kesepakatan bersama berupa 9 (sembilan) butir kesepakatan Rencana Tindak Lanjut Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Gerakan Kantor BERHIAS di Lingkungan Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah pemberian penghargaan Gerakan Kantor Berhias yang dilaksanakan oleh seluruh Satker di lingkungan Kemenkes, akan dilombakan melalui Gerakan Kantor Berhias Award yang diupayakan diberikan kepada Satker Terbaik pada setiap peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN).

---





### **Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran T.A. 2019 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA K/L Dan Anti Gratifikasi**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2019 dan 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor : 94/PMK.02/2017 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan acara sosialisasi terkait peraturan tersebut pada hari Kamis 14 Maret 2019 di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY.

Dalam acara tersebut BBTCLPP Yogyakarta ikut berpartisipasi bersama perwakilan dari 139 Satker lainnya di bawah wilayah layanan Kanwil DJPb DIY. Tujuan penyelenggaraan sosialisasi agar setiap Satuan Kerja dapat mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara yang berlaku, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam perencanaan selanjutnya.

Acara diawali dengan Sambutan dari Bapak Eko Budiyanto mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh 4 Narasumber yaitu Kepala Bidang PA I Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Ibu Maria Emmaculata Sri Nuryati yang menyampaikan materi terkait Isu Strategis Pelaksanaan Anggaran 2019, Ibu Lestari menyampaikan materi terkait Pokok-pokok ketentuan PMK Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, Ibu Mardiah menyampaikan materi terkait Pokok-pokok PMK No.206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019 dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPPN Yogyakarta Bapak Nur Hidayat menyampaikan materi terkait Zona Integritas termasuk anti korupsi yang sudah dijalankan di KPPN Yogyakarta

Acara diakhiri dengan sesi diskusi panel dan tanya jawab yang berjalan sangat aktif membahas terkait kasus dan kendala revisi dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja



### **In House Training Pemetaan Kebutuhan TTG Pengendalian Penyakit Tahun 2019**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya personil dalam pemetaan wilayah khususnya untuk menunjang penentuan lokasi implementasi TTG yang tepat jenis dan tepat sasaran, maka BBTCLPP Yogyakarta mengadakan In House Training Pemetaan Kebutuhan TTG Pengendalian Penyakit. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 -20 Maret 2019, dengan narasumber dari SIMKES Fak Kedokteran UGM yaitu bapak dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, PhD; Arief Kurniawan Nur Prasetyo; Sari Rahmawati Kusuma Dewi. Jumlah peserta sebanyak 20 orang dari Bidang PTL, Instalasi Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Penyakit serta Instalasi pendukung lainnya di BBTCLPP Yogyakarta .

Acara dibuka oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Ibu Dr. dr. Irene, MKM. Materi in house training mencakup:

1. Fundamental Dasar-dasar pemetaan dan fungsi pemetaan dalam Decision Making di bidang Pengendalian Penyakit.
2. Pengenalan Aplikasi dan Proses Digitasi Peta dng Menggunakan Google Map.
3. Manajemen data Pemetaan (membuat, mengedit tabel, penggabungan tabel membuat ( field record dan query).
4. Buffering, overly peta dan obyek grafik, lay out peta.
5. Pengambilan titik koordinat dengan GPS dan Aplikasi Mobile Topographer dan Join ke QGIS.
6. Eksplorasi unsur Area (Polygon) dan titik (Point), Penggunaan Simbology dan Label.



### **Presentasi Pendampingan TP4D Kejaksaan Tinggi DIY**

Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal, yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, dan ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.

BBTCL PP Jogjakarta pada Tahun Anggaran 2019 ini akan membangun Gedung Kantor BBTCL PP Jogjakarta, setelah sebelumnya pada Tahun 2018 telah dibangun Gedung Laboratorium BBTCL PP Jogjakarta yang juga didampingi oleh TP4D Provinsi DIY.



### **Penelaahan Usulan Program P2P Satuan Kerja Pusat, UPT dan Dekonsentrasi Tahun 2020 di Semarang**


Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pada tanggal 19 sampai dengan 22 Maret menyelenggarakan E-Planning dengan tema "Penelaahan Usulan Program P2P Satuan Kerja Pusat, UPT, dan Dekonsentrasi Tahun 2020". Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Arkenso Semarang dihadiri peserta Dinkes Provinsi, BB/TKLPP dan KKP dari Regional Barat.

Arahan Sesditjen P2P yang dibacakan pada pembukaan berisi bahwa, "dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran program P2P dapat dilakukan lebih cermat dengan mengedepankan program Nasional tanpa mengesampingkan program bidang, termasuk juga dalam menentukan alokasi anggaran agar mempertimbangkan realisasi dari tahun sebelumnya, hal ini untuk menjaga anggaran agar tidak melebihi batas yang diperlukan."

Acara menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen RI yang menyampaikan evaluasi program P2P 2018, point-point kebijakan perencanaan tahun 2020 dan sosialisasi penggunaan aplikasi eRenggar sebagai instrumen pengusulan pagu anggaran.

Inti acara berupa reviu usulan pagu anggaran 2020 melalui aplikasi eRenggar yang dilakukan oleh Bagian Program dan Informasi Setditjen P2P bersama 5 Direktoratnyanya terhadap UPT dan Dinkes Provinsi secara terintegrasi per wilayah.

Diharapkan dipertemukannya seluruh perwakilan satker dibawah pembinaan Ditjen P2P di tiap wilayah ini mampu memberikan forum diskusi yang strategis dalam rangka membangun perencanaan kegiatan yang lebih baik, lebih tepat sasaran dan menghindari kegiatan tumpang tindih.



Pada kesempatan tersebut hadir juga Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Bapak dr. Anung Sugihantono, M. Kes. Sebagai bentuk pendampingan, beliau memberikan arahan kepada seluruh peserta bahwa :

1. **Serius** sejak tahap perencanaan harus dilakukan, tidak hanya saat menyusun RKA KL
2. Merencanakan harus sesuai Tugas Fungsi Kewenangan
3. Merencanakan harus berdasar Prioritas , harus disadari tidak semua program bisa menjadi prioritas
4. Merencanakan secara detail sejak awal untuk menghindari seringnya dilakukan revisi
5. Kegiatan harus mempunyai daya ungkit untuk pencapaian program nasional
6. Integrasi dan Efisiensi dilakukan sejak penyusunan Perencanaan, tidak dilakukan melalui proses revisi.

Semoga dengan perencanaan yang baik akan diperoleh hasil yang optimal dan percepatan keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penyakit demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salam Sehat Indonesia.





## **Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur ke BBTCLPP Yogyakarta**

Selasa 19 Maret 2019, Komisi E (Kesra) DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan, Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Materia Medica Batu dan Tenaga Ahli melaksanakan kunjungan kerja ke BBTCLPP Yogyakarta dalam rangka sharing informasi/mencari informasi terhadap Raperda Usul Prakarsa Komisi E (Kesra) tentang perlindungan terhadap Obat Tradisional khususnya terkait pola pengawasan obat herbal yang bebas diperjualbelikan di masyarakat.

Rombongan disambut oleh Kepala Balai Dr. Irene, MKM beserta pejabat struktural BBTCLPP Yogyakarta di Aula Lantai III. Dalam sambutannya Kepala Balai menyampaikan selamat datang dan berterimakasih mendapat kehormatan dikunjungi oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Kepala Balai juga menyampaikan profil BBTCLPP Yogyakarta, tugas pokok dan fungsi serta prestasi yang telah diperoleh BBTCLPP Yogyakarta.

Sambutan dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Bp. Sulidaim, Spd. Selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kerja ini untuk penguatan dalam pembahasan raperda karena saat ini banyak masyarakat yang beralih ke herbal. Untuk itu perlu mencari pelengkap informasi untuk penguatan perda dan cara edukasi ke pengusaha herbal.

Kepala BBTCLPP YK. Dr. Irene, MKM sangat menyarankan untuk berkunjung ke Kemenkes yaitu di Farmalkes, Yankemas, BPOM dan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) karena mereka yang langsung mengawal serta mengawal tentang obat tradisional. Karena di BBTCLPP Yogyakarta lebih kedampak lingkungannya saja.



### **Pertemuan Koordinasi Demam Berdarah Dengue, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Jumat 22 Maret 2019**

Lingkungan merupakan agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisasi. Salah satu peran lingkungan adalah sebagai reservoir dari berbagai agent dan vektor penyakit. Secara umum lingkungan dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan alamiah yang terdapat di sekitar manusia, sedangkan lingkungan non fisik ialah lingkungan yang muncul akibat adanya interaksi antar manusia.

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang sangat erat hubungannya dengan kesehatan lingkungan, sehingga ia disebut juga salah satu penyakit menular yang berbasis lingkungan. Artinya, kejadian dan penularannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Karena itu upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus ditujukan kepada penyehatan lingkungan hidup.

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, yang cenderung semakin luas penyebarannya sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Demam berdarah kerap kali menimbulkan Kejadian Luar Biasa dan mengakibatkan kematian yang tidak sedikit setiap tahun di berbagai daerah Indonesia.

Kesehatan lingkungan dalam aspek kesehatan lingkungan fisik yang berperan dalam penularan penyakit DBD misalnya pekarangan yang tidak bersih, seperti bak mandi yang jarang dikuras, pot bunga, genangan air di berbagai tempat, ban bekas, batok kelapa, potongan bambu, drum, kaleng-kaleng bekas serta botol-botol yang dapat menampung air dalam jangka waktu yang lama,



bak mandi, WC, tempayan, drum air, bak menara (tower air) yang tidak tertutup, sumur gali. Sementara dari lingkungan non fisik antaranya adalah keadaan demografi suatu wilayah (kepadatan, mobilitas, perilaku, adat istiadat, sosial ekonomi penduduk). Biasanya DBD akan menyerang orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran, kumuh. Faktor sosial seperti tingkat pendidikan serta ekonomi penduduk turut mempengaruhi perkembangbiakan vektor DBD.

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan Surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan mata.

Menindaklanjuti edaran Dirjen P2P Nomor 02.01/IV/355/2019 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD dan surat dari Dinas Kesehatan Purworejo tanggal 11 Maret 2019 telah dilaksanakan pertemuan tim TGC dengan kegiatan penyampaian hasil kajian resistensi dan informasi teknologi tepat guna pengendalian vektor yang diikuti pengelola program DBD dan sanitarian puskesmas di Wilayah Dinas Kesehatan Jepara tanggal 22 Maret 2019 di Aula Dinas Kesehatan Jepara. Dalam kesempatan ini kepala BBTKL PP Jogjakarta, DR. dr. Irene, MKM memberikan arahan tentang peran BBTKL PP dalam upaya penanggulangan DBD, dilanjutkan dengan pemaparan Kajian-kajian yang dilakukan BBTKL PP Yogyakarta terkait DBD oleh Kabid PTL, Indah Nur Haeni, S.Si, MSc dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil kajian tentang monitoring dan resistensi vektor DBD *Aedes aegypti* oleh Kepala Instalasi Entomologi Yohanes Didik Setiawan, M.Si, M.Sc dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengendalian DBD oleh Kepala Instalasi TTG Nur Basuki, ST, MPH diantaranya Sticky Larvae Trap, Mosquito Resting Trap Plus, Electric Killing Insect dan Mosquito Lamp Trap.

BBTKL PP merupakan institusi yang erat dengan pencegahan dan pengendalian penyakit. Sebab, jajaran BTKLPP bertugas untuk mendeteksi berbagai faktor risiko penyakit di seluruh wilayah Indonesia dan memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan dan jajaran Pemda tentang intervensi serta upaya pencegahan dan pengendaliannya. Pada keadaan tertentu, BTKLPP dan Pemda setempat melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit secara bersama-sama.

Dengan motto kerja Kaji, Uji, dan Solusi, BBTKL PP memiliki pola kerja deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit dalam upaya pencegahan kejadian penyakit dalam upaya pencegahan kejadian penyakit dengan mengembangkan teknologi tepat guna, serta respon cepat terhadap kejadian luar biasa (KLB) dan berbagai bencana yang terjadi di pelosok Nusantara.



### **Pertemuan Pembahasan & Penyusunan Laporan Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium Tahun 2019**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya personalil dalam penyusunan laporan layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium khususnya untuk menunjang penerapan statistik pada penyusunan dan publikasi ilmiah data pasif, maka BBTCLPP Yogyakarta mengadakan Pertemuan Pembahasan & Penyusunan Laporan Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019, dengan narasumber dari Fak MIPA UII Yogyakarta yaitu ibu Dr. Is Fatimah, M.Si. Jumlah peserta sebanyak 25 orang . Acara dibuka oleh Bapak Sukoso,S.ST, M.Sc.

Materi pertemuan mencakup:

- 1.Pengolahan dan Penyajian Data: Data Collection, Kind of Quantitative Data, Analysis Technique in Analyzing Data, Data Descriptive and Correlation Vs Regression.
- 2.Publikasi Ilmiah: Langkah Menulis Ilmiah, Etika Publikasi, Karakteristik Artikel Ilmiah, Pemilihan Jurnal Ilmiah.
- 3.Plagiarisme : “Kecurangan” di Dunia Ilmiah, Plagiarisme dalam Penulisan, Klasifikasi Plagiarisme, Pencegahan Plagiarisme, Hal yang Bukan Plagiarisme, Sanksi Plagiarisme, dan Undang-undang Hak Cipta.

Pertemuan ditutup oleh Bapak Sukoso, S.ST, M.Sc. Diharapkan setelah mengikuti pertemuan, peserta dapat mengimplementasikan dalam kegiatan kajian bidang dan menunjang penyusunan data pasif sehingga dapat menyusun laporan analisis data pasif yang lebih menarik dan komunikatif serta lebih informatif dalam menampilkan hasil analisis data pasif tersebut .



### **Pertemuan Diseminasi Hasil Kegiatan dalam Percepatan Eliminasi Malaria**

Terwujudnya target eliminasi malaria di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2023 tidak hanya bergantung dari kabupaten endemis yang belum mencapai eliminasi, namun juga sangat didukung pada kemampuan kabupaten yang sudah eliminasi dalam memelihara status eliminasinya. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian malaria telah dilaksanakan di kabupaten fase eliminasi ataupun fase pemeliharaan. Informasi hasil kajian dalam upaya pencegahan dan pengendalian malaria yang telah dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta Tahun 2018 dan rencana kegiatan tahun 2019 perlu didiseminasikan kepada stakeholder terkait. Selain berguna untuk melengkapi data epidemiologis malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, juga untuk menjadi bahan advokasi selanjutnya bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam perencanaan percepatan eliminasi ataupun pemeliharaan status eliminasi di wilayahnya.

Bertempat di Hotel Griya Persada Ungaran, pada tanggal 29 - 30 Maret 2019, BBTCLPP Yogyakarta menyelenggarakan Pertemuan Diseminasi Hasil Kegiatan dalam Percepatan Eliminasi Malaria. Pertemuan ini mengundang seluruh dinas kesehatan Provinsi/ kabupaten/kota, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi, UPTD (Balkesmas), Kantor Kesehatan Pelabuhan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta serta B2P2VRP Salatiga dan Balitbangkes Banjarnegara. Pada pertemuan ini berkenan hadir Direktur Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan R.I., Bapak dr. Anung Sugihantono, M.Kes untuk membuka pertemuan sekaligus memberikan arahan perlunya kolaborasi pusat dan daerah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk dalam percepatan eliminasi malaria dan berharap BBTCLPP Yogyakarta termasuk semua UPT Ditjen P2P di daerah harus responsif dengan sistem jemput bola turun ke daerah untuk bersama sama menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di wilayah layannya.

Hadir pula Kepala Subdit Malaria, Ibu dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid dan menyampaikan paparannya mengenai Kebijakan Eliminasi Malaria dan Surveilans Migrasi Malaria. Menjawab arahan dari Bapak Dirjen P2P, Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Ibu Dr. dr. Irene, M.K.M., dalam pertemuan menyampaikan mengenai Dukungan BBTCLPP Yogyakarta Terhadap Program P2P dan Kesehatan Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Diskusi interaktif terjadi antara peserta dan narasumber terkait topik-topik yang dipaparkan.

Pada kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bapak dr. Yulianto Prabowo, M.Kes. dan Kepala Dinas Kesehatan DIY yang diwakili Kasi P2, Ibu dr. Veronica Nur Hardiyati memaparkan bagaimana Situasi Terkini Kejadian Malaria Tahun 2018/2019 Serta Upaya Percepatan Eliminasi Malaria di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Selain itu, Kabupaten Purworejo sebagai salah satu kabupaten yang sedang berupaya mencapai status eliminasi, melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Ibu dr. Sudarmi, M.M. memaparkan Upaya Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo. Tak kalah menarik, ada berbagi pengalaman Best Practice dari Kabupaten Wonosobo yang telah berhasil mencapai status eliminasi malaria. Paparan mengenai Keberhasilan Eliminasi Malaria di Kabupaten Wonosobo disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Bapak Junaedi, S.K.M., M.Kes., sedangkan Dukungan Bappeda dan Desa dalam kesuksesan eliminasi tersebut disampaikan oleh Kabid Pemerintahan Sosial Budaya Bappeda Wonosobo, Bapak Haris Gunarto, S.P., M.M., dan Kepala Desa Kaliguwo Kabupaten Wonosobo, Bapak Pajo, S.Pd.

Pada akhir kegiatan disusun rencana tindak lanjut yang memuat peran dari masing-masing sektor dalam mendukung percepatan eliminasi malaria di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Tak lupa di sela-sela pertemuan seluruh peserta pertemuan melaksanakan senam pagi bersama sebagai salah satu upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta kita semua untuk hidup sehat.



### **Sosialisasi Penggunaan Sistem Aplikasi Satu Anggaran Modul E-Revisi**

Memperhatikan peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 13 disebutkan bahwa usul revisi anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb dan Kantor Wilayah DJPb dilakukan/diproses menggunakan Sistem Aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran, maka dalam rangka persiapan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Satu Anggaran modul e-Revisi yang telah di release oleh DJA, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan acara sosialisasi terkait modul Aplikasi tersebut pada hari Senin 1 April 2019 di Aula lantai III Kanwil DJPb.

Dalam acara tersebut BBTCLPP Yogyakarta ikut berpartisipasi bersama perwakilan dari 96 perwakilan satker lainnya yang menggunakan layanan khususnya revisi anggaran Kanwil DJPb DIY. Tujuan dari acara tersebut adalah agar setiap satuan kerja dapat mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara penggunaan aplikasi e-Revisi yang selanjutnya tidak akan lepas digunakan satker dalam setiap proses revisi anggaran tingkat Kanwil DJPB.

Acara diawali dengan sambutan oleh wakil dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi DIY Bapak Heru. Dalam sambutannya Beliau menegaskan bahwa tersedianya sistem aplikasi e-Revisi Satu DJA ini diharapkan sebagai sarana untuk mempermudah proses revisi, tetapi yang perlu diingat hal ini bukan untuk mendorong Satker lebih sering melaksanakan revisi.

Pemaparan inti terkait sistem aplikasi e-Revisi Satu DJA disampaikan oleh Ibu Mardiah dan berlanjut dengan diskusi panel yang sangat aktif terkait penggunaan aplikasi revisi online tersebut.

Revisi online mulai diberlakukan tanggal 1 April 2019 dengan akan tetap dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Terutama untuk fitur digital signature yang sementara ini belum tersedia sehingga mengharuskan satker tetap menyerahkan surat usulan revisi dengan tanda tangan KPA Asli dan Cap Basah selain mengajukan revisi secara online sebagai legalitas pengesahan.

Kedepannya setelah fitur digital signature tersebut tersedia satker cukup melakukan upload dokumen revisi ke dalam sistem Aplikasi Revisi Online.



### **Pertemuan Koordinasi Kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis (S3JE) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

Pada hari Kamis, 4 April 2019, tim Sistem Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis (S3JE) BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan Pertemuan Koordinasi S3JE tahun 2019 dengan Fasyankes Sentinel di Ruang Kepodang Lama di RSUP Dr. Kariadi. Pertemuan dihadiri oleh petugas dari Sub Direktorat Arbovirologi Direktorat P2PTVZ Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, dr. Astrid S. Paat sebagai koordinator kegiatan S3JE nasional, tim S3JE RSUP Dr Kariadi, petugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan petugas Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pertemuan dibuka oleh dr. Himawan Sasongko, Sp. An., Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus Bidang Pelayanan Medik Direktorat Medik dan Keperawatan, mewakili manajemen RSUP Dr. Kariadi. Selanjutnya, dr. Astrid S. Paat memberikan pengarahannya terkait kegiatan S3JE. Diskusi dipimpin oleh dr. Yohanna Gita Chandra, M.S., selaku koordinator kegiatan S3JE BBTCLPP Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut diinformasikan mengenai rencana pengembangan jejaring S3JE di Jawa Tengah pada tahun 2020 dan up to date data pemeriksaan spesimen JE tahun 2019. Di awal tahun 2019 ini terkumpul lima spesimen suspek JE, dua diantaranya sudah diperiksa dengan hasil negatif. Perluasan jejaring dianggap perlu, agar cakupan S3JE dapat diperluas.



## **Persiapan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Kota Yogyakarta Tahun 2019**

Pada tanggal 4 April 2019 tim kajian BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan persiapan kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Kota Yogyakarta. Persiapan dilakukan dengan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Kantor Kesehatan Stasiun Daop 6 Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Terminal Giwangan.

Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tim BBTCLPP Yogyakarta yg terdiri dari tiga orang yaitu Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia Tri Setyo Winaryanto, S.T, M.Sc dan dua orang sanitarian yaitu Sri Ningsih, S.ST., M.T. dan Atikah Mulyawati, S.K.M. ditemui oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Eni Dwiniarsih, S.T., M.M. dan staf Adhi Luhung Prakoso.

Dalam koordinasi ini ditentukan lokasi kegiatan di Stasiun Lempuyangan dan Terminal Giwangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Pengambilan Sampel makanan/minuman, air bersih, usap tangan, usap alat makan masing-masing di lima warung makan yang ada di terminal dan stasiun serta restorasi di dalam kereta api. Rencana pelaksanaan pengambilan sampel di Stasiun Lempuyangan tanggal 15 April 2019 dan di Terminal Giwangan tanggal 16 April 2019.

Untuk tahun ini tidak ada peningkatan TTU seperti tahun lalu, sedangkan diseminasi hasil tetap ada dan akan dilaksanakan kurang lebih satu minggu sebelum terjadi arus mudik. Koordinasi di Stasiun Lempuyangan bertempat di Kantor Kesehatan Stasiun Daop 6 Yogyakarta. Tim BBTCLPP Yogyakarta ditemui oleh Manajer Kesehatan Daop 6 Yogyakarta dr. Christoffel dan staf Supardi. Kedatangan tim kajian dari BBTCLPP Yogyakarta disambut baik dari pihak stasiun dan mendukung pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 April 2019 di Stasiun Lempuyangan.

Sedangkan koordinasi di Terminal Giwangan tim BBTCLPP Yogyakarta ditemui oleh Pengelola Administrasi Aji Fajar dan Petugas Pelayanan Evak Nurwakhid, A.Md. Pihak terminal juga menyetujui untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 16 April 2019. Warung makan yang akan diambil sampelnya direncanakan dua warung makan di Blok M1, satu warung makan di Blok R, satu warung makan di Blok G 1/2, dan satu warung makan di Blok M2.

Diharapkan hasil kajian nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan makanan pada pedagang di Stasiun Lempuyangan dan Terminal Giwangan sehingga risiko KLB dalam arus mudik tidak terjadi.




### **Persiapan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Kota Yogyakarta Tahun 2019**

Pada tanggal 4 April 2019 tim kajian BBTKLPP Yogyakarta melaksanakan persiapan kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Kota Yogyakarta. Persiapan dilakukan dengan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Kantor Kesehatan Stasiun Daop 6 Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Terminal Giwangan.

Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tim BBTKLPP Yogyakarta yg terdiri dari tiga orang yaitu Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia Tri Setyo Winaryanto, S.T, M.Sc dan dua orang sanitarian yaitu Sri Ningsih, S.ST., M.T. dan Atikah Mulyawati, S.K.M. ditemui oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Eni Dwiniarsih, S.T., M.M. dan staf Adhi Luhung Prakoso. Dalam koordinasi ini ditentukan lokasi kegiatan di Stasiun Lempuyangan dan Terminal Giwangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Pengambilan Sampel makanan/minuman, air bersih, usap tangan, usap alat makan masing-masing di lima warung makan yang ada di terminal dan stasiun serta restorasi di dalam kereta api. Rencana pelaksanaan pengambilan sampel di Stasiun Lempuyangan tanggal 15 April 2019 dan di Terminal Giwangan tanggal 16 April 2019. Untuk tahun ini tidak ada peningkatan TTU seperti tahun lalu, sedangkan diseminasi hasil tetap ada dan akan dilaksanakan kurang lebih satu minggu sebelum terjadi arus mudik.






Koordinasi di Stasiun Lempuyangan bertempat di Kantor Kesehatan Stasiun Daop 6 Yogyakarta. Tim BBTKLPP Yogyakarta ditemui oleh Manajer Kesehatan Daop 6 Yogyakarta dr. Christoffel dan staf Supardi. Kedatangan tim kajian dari BBTKLPP Yogyakarta disambut baik dari pihak stasiun dan mendukung pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 April 2019 di Stasiun Lempuyangan. Sedangkang koordinasi di Terminal Giwangan tim BBTKLPP Yogyakarta ditemui oleh Pengelola Administrasi Aji Fajar dan Petugas Pelayanan Evak Nurwakhid, A.Md. Pihak terminal juga menyetujui untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 16 April 2019. Warung makan yang akan diambil sampelnya direncanakan dua warung makan di Blok M1, satu warung makan di Blok R, satu warung makan di Blok G 1/2, dan satu warung makan di Blok M2.

Diharapkan hasil kajian nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan makanan pada pedagang di Stasiun Lempuyangan dan Terminal Giwangan sehingga risiko KLB dalam arus mudik tidak terjadi.

---





## **Pemetaan Wilayah Reseptif Malaria di Kabupaten Fase Pemeliharaan Eliminasi di DIY Tahun 2019**

Empat dari lima Kab/kota di DIY sudah dalam fase pemeliharaan eliminasi malaria, yaitu Kab Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Meski telah eliminasi, empat daerah ini rentan mengalami penularan kembali malaria indigenous karena mobilitas penduduk dari dan ke daerah endemis yang dapat menjadi pembawa parasit malaria – Plasmodium sp masuk ke wilayah tersebut. Jika agent malaria tersedia dan ditunjang adanya wilayah reseptif maka penularan kembali malaria indigenous sangat dimungkinkan terjadi di empat kab/kota yang sudah eliminasi tersebut. Karena itu, penting dilakukan pemantauan wilayah reseptif, selain surveilans migrasi. Berdasarkan hal tersebut BBTCLPP Yogyakarta melakukan fasilitasi kajian Pemetaan Wilayah Reseptif Malaria di Kab Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Tujuannya adalah mengidentifikasi dan memetakan status reseptifitas wilayah survei. Penentuan reseptifitas wilayah dilakukan dengan cara survei larva. Status reseptifitas ditentukan kualitatif, yaitu reseptif jika di wilayah survei ditemukan larva Anopheles sp, sedangkan non reseptif jika tidak ditemukan larva Anopheles sp. di wilayah survey. Lokasi survei dipilih purposive, berdasarkan kriteria yaitu berbatasan dengan kabupaten endemis/ada riwayat kasus malaria (termasuk kasus impor). Di setiap Kab/kota dipilih dua kecamatan, dan dari setiap kecamatan dipilih dua kelurahan yang memenuhi kriteria. Survey dilaksanakan selama 4 hari untuk setiap kab/kota yaitu: tanggal 5-6 Maret (Paliyan) dan 11-12 Maret (Panggung) di kab Gunung kidul; 12-13 Maret (Kasihnan) dan 27-28 Maret (Pundong) di kab Bantul; 1-2 April (Mlati) dan 9-10 April (Ngaglik) di kab Sleman; 4-5 April dan 8-9 April 2019 di kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta (Khusus Kota Yogyakarta, 4 kelurahan berasal dari satu kec yaitu Gondokusuman). Survei dilaksanakan tim dari BBTCLPP Yogyakarta, Dinkes Kab/Kota, serta puskesmas dan kader setempat. Hasil Survei menunjukkan tiga wilayah positif larva Anopheles sp (reseptif) yaitu di Kab. Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo, sedangkan di Kota Yogyakarta negative larva Anopheles sp.



## **Persiapan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit dalam Arus Mudik di Kota Surakarta Tahun 2019**

Pada tanggal 9 April 2019 tim kajian BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan persiapan kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit dalam Arus Mudik di Kota Surakarta. Persiapan dilakukan dengan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Solo Balapan, dan Kantor Pelayanan Terminal Tirtonadi. Di Dinas Kesehatan Kota Surakarta tim BBTCLPP Yogyakarta yang terdiri dari tiga orang yaitu Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia Tri Setyo Winaryanto, S.T, M.Sc., Ketua Tim Kajian Suharso, S.ST., dan Sanitarian Bidang ADKL Endang Setyoningsih, S.K.M., M.SC ditemui oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Arif Dwi Widodo S.K.M. Tim BBTCLPP Yogyakarta menyampaikan latar belakang, tujuan, metode, tempat, tahapan, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pihak Dinas Kesehatan Kota Surakarta sangat senang dengan adanya kerjasama ini dan siap membantu dalam pelaksanaannya. Koordinasi dengan PT. KAI Solo Balapan bertempat di Kantor Stasiun Solo Balapan.


Tim BBTCLPP Yogyakarta ditemui oleh Bp. Tri, Bp. Gunawan dan Bp. Rian. Kedatangan tim kajian dari BBTCLPP Yogyakarta disambut baik dari pihak stasiun dan siap mendukung pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengambilan sampel direncanakan pada tanggal 23 April 2019. Sedangkan koordinasi di Terminal Tirtonadi tim BBTCLPP Yogyakarta ditemui oleh staf Kantor Pelayanan Terminal, Bp. Eko dan beberapa staf lainnya. Pihak terminal menyetujui dan siap mendukung pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada tanggal 24 April 2019. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat pengambilan sampel adalah inspeksi kesehatan lingkungan, pengambilan sampel makanan/minuman, usap tangan penjamah, dan usap alat makan terhadap lima penyedia makanan di stasiun dan terminal serta restorasi gerbong kereta api. Selain itu dilakukan pula pengambilan sampel air bersih yang digunakan di stasiun dan terminal. Hasil kajian akan disampaikan sebelum momen arus mudik lebaran sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan kualitas lingkungan dan makanan pada pedagang di Stasiun Balapan dan Terminal Tirtonadi sehingga risiko KLB dalam arus mudik tidak terjadi.



### **Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) KEMENPAN-RB Tahun 2019**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dan dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Kemenpan RB Tahun 2019 pada tanggal 10-12 April 2019 di Gran Melia Hotel, Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav X-0, Setia Budi, Jakarta Selatan.

Pertemuan dihadiri oleh peserta dari 42 (empat puluh dua) instansi di bawah Kementerian Kesehatan. Peserta dari BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh Dina Juli Retnaningsih, ST. Acara dibuka dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, drg. Widyawati, M.K.M. Dalam sambutannya, drg. Widyawati, MKM menyampaikan tentang pentingnya pelayanan publik, salah satu kunci sukses dari keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan adalah dengan berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, dengan cara memberikan pelayanan yang memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik ini. Diharapkan semua satker dapat mendaftarkan inovasi sebanyak-banyaknya, disampaikan ke dalam kalimat yang ringkas dan jelas. Proposal disubmit paling lambat tanggal 16 April 2019.




Selanjutnya disampaikan materi Reformasi Birokrasi oleh Bapak Busroni SIP. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi bersih dari KKN, akuntabel & berkinerja, dan pelayanan publik prima. Reformasi birokrasi meliputi 4 komponen yaitu:

- 1) SDM yang kompeten dan kompetitif,
- 2) Pemerintah yang efektif dan efisien,
- 3) Berbasis IT dan
- 4) Pemerintahan partisipatif dan melayani.

Sesi berikutnya yaitu penjelasan tata cara input proposal Sinovik Kemenpan RB dilanjutkan input proposal yang didampingi Prawito SKM, MM. dan Pak Iwan. Semua peserta melakukan input proposal untuk inovasi yang sudah diterapkan di satker masing-masing minimal 1 tahun dari batas waktu pemasukan proposal ke aplikasi Sinovik Kemenpan RB. Harapan dari workshop ini, akan semakin banyak inovasi dalam pelayanan publik dan semakin banyak pula inovasi yang didaftarkan pada kompetisi Sinovik Kemenpan RB dan semakin banyak yang menjadi pemenang dari Kementerian Kesehatan.

---





## **Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan PNBP di Lingkungan Kementerian Kesehatan**

Pada tanggal 10-12 April 2019 BBTCLPP Yogyakarta mengikuti Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan PNBP di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan BMN di Vouk Hotel dan Suites, Jl. Nusa Dua Selatan, Sawangan, Benoa, Bali. BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh Bendahara Penerimaan, Sunarsih, S.E. dan Petugas Pengelola PNBP, Sri Ningsih, S.ST., M.T. Dalam pertemuan ini diundang sebanyak 115 satker.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Drs. Setyo Budi Hartono, M.M. Dalam sambutan pembukaan disampaikan terima kasih atas kehadiran semua peserta dan mohon maaf jika ada kekurangan. Disampaikan juga bahwa nara sumber pertemuan berasal dari lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan materi Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan PNBP di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Materi kedua oleh Sesditjen Kefarmasian drg. Arianti Anaya, M.K.M. tentang Implementasi dan Interkoneksi Aplikasi SIMPONI pada Layanan PNBP.

Pada hari kedua disampaikan materi sebagai berikut :

- 1.Materi pertama Pengawasan Penggunaan Dana PNBP pada Satker Pengelolaan PNBP disampaikan oleh Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan drg. Moh. Nur Nasiruddin, M.Kes.
- 2.Materi kedua Tata Pengelolaan PNBP pada Undang-Undang No. 9/2018 disampaikan oleh Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kasnadi.
- 3.Materi ketiga Perencanaan Penggunaan Anggaran Sumber Dana PNBP dan Penghapusan Piutang Negara disampaikan oleh Direktorat PKPNL DJKN Kementerian Keuangan Hery Agung Wibowo.
- 4.Hari ketiga disampaikan tentang Review Pengelolaan PNBP oleh Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN.

Pertemuan ditutup oleh Kepala Sub. Bagian TLK 1 Roy Berridge, S.E., M.K.M. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi semuanya.

## Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Tim BBTCLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Puskesmas Purwokerto Barat, dan Puskesmas Purwokerto Selatan melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel di Stasiun Purwokerto dan Terminal Bulupitu Purwokerto pada tanggal 11 dan 12 April 2019. Kegiatan ini merupakan tahap utama dari Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Kabupaten Banyumas Tahun 2019.



Titik pelaksanaan kegiatan di stasiun terdiri dari lima penyedia makanan yaitu Indomart, Gerbong restorasi KA Serayu, Grand Cafe, Teh Jawa Café, dan California Fried Chicken (CFC). Sedangkan titik pelaksanaan kegiatan di terminal terdiri dari enam penyedia makanan yaitu Warung Makan Pak Into, Warung Makan Mahkota, Warung Makan Sederhana, Warung Makan Flamboyan, Warung Makan Dian Kamulyan, dan Warung Makan Sampurna.

Sampel lingkungan yang diambil terdiri dari makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bakteri dan bahan berbahaya, usap tangan penjamah, usap alat makan, dan air bersih. Parameter bakteri pada makanan minuman yang diperiksa yaitu *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, dan *Vibrio cholera*.

Parameter bahan berbahaya pada makanan minuman yang diperiksa yaitu Borax, Formalin, Rodhamin B, dan Methyl Yellow. Parameter pemeriksaan usap tangan penjamah dan usap alat makan yaitu Angka Lempeng Total atau Jumlah Kuman. Parameter pemeriksaan air bersih yaitu bau, TDS, kekeruhan, rasa, suhu, warna, pH, Besi, Fluorida, Kesadahan, Mangan, Nitrat, Nitrit, Sianida, Detergen, Pestisida, Air Raksa, Arsen, Kadmium, Kromium, Selenium, Seng, Sulfat, Timbal, Benzen, Zat organik, Total coliform, dan *E. coli*.

Hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan masih adanya penjamah/penyaji makanan yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, peralatan pengolahan makanan dalam kondisi kotor, penyajian makanan dan sarana penjaja makanan yang belum memenuhi persyaratan keamanan pangan.



## **Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta Tahun 2019**

Pada tanggal 15 April 2019, tim BBT KLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas Danurejan II melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan tahap utama dari Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Titik pelaksanaan kegiatan di stasiun terdiri dari lima penyedia makanan yaitu Gerbong restorasi KA Bogowonto, Loko Cafe, Warung Makan Bapak Agung, Mc Chicken, dan Warung Makan Amatun.

Sampel lingkungan yang diambil terdiri dari makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bakteri dan bahan berbahaya, usap tangan penjamah, usap alat makan, dan air bersih. Parameter bakteri pada makanan minuman yang diperiksa yaitu *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, dan *Vibrio cholera*.

Parameter bahan berbahaya pada makanan minuman yang diperiksa yaitu Borax, Formalin, Rodhamin B, dan Methyl Yellow. Parameter pemeriksaan usap tangan penjamah dan usap alat makan yaitu Angka Lempeng Total atau Jumlah Kuman. Parameter pemeriksaan air bersih yaitu bau, TDS, kekeruhan, rasa, suhu, warna, pH, Besi, Fluorida, Kesadahan, Mangan, Nitrat, Nitrit, Sianida, Detergen, Pestisida, Air Raksa, Arsen, Kadmium, Kromium, Selenium, Seng, Sulfat, Timbal, Benzen, Zat organik, Total coliform, dan *E. coli*.

Hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan masih adanya penjamah/ penyaji makanan yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, peralatan pengolahan makanan dalam kondisi kotor, penyajian makanan dan sarana penjaja makanan yang belum memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Hasil pemeriksaan kualitas lingkungan secara laboratorium diharapkan dapat diinformasikan kepada pengelola Stasiun Lempuyangan dan stakeholder terkait sebelum hari H mudik lebaran tahun 2019 guna pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat makanan di Stasiun Lempuyangan.





## **Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Kota Yogyakarta Tahun 2019**

Tim BBTKLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas Umbulharjo I melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel di Terminal Giwangan Yogyakarta pada tanggal 16 April 2019. Kegiatan ini merupakan tahap utama dari Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Titik pelaksanaan kegiatan di terminal terdiri dari lima penyedia makanan yaitu Warteg Bu Pur, Rumah Makan Asri Nunggal Rasa, Warung Makan Bu Muti, Warung Makan Bu Rodiah, dan Warung Makan Eco.

Sampel lingkungan yang diambil terdiri dari makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bakteri dan bahan berbahaya, usap tangan penjamah, usap alat makan, dan air bersih. Parameter bakteri pada makanan minuman yang diperiksa yaitu *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, dan *Vibrio cholera*.

Parameter bahan berbahaya pada makanan minuman yang diperiksa yaitu Borax, Formalin, Rodhamin B, dan Methyl Yellow. Parameter pemeriksaan usap tangan penjamah dan usap alat makan yaitu Angka Lempeng Total atau Jumlah Kuman. Parameter pemeriksaan air bersih yaitu Bau, TDS, Kekeruhan, Rasa, Suhu, Warna, pH, Besi, Fluorida, Kesadahan, Mangan, Nitrat, Nitrit, Sianida, Deterjen, Arsen, Kadmium, Kromium, Selenium, Seng, Sulfat, Timbal, Zat organik, Total coliform, dan *E. coli*.

Hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada penjamah/penyaji makanan belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, misal terdapat makanan yang terbuka serta tempat sampah terbuka dan tidak pilah, selain itu tim kajian menemukan beberapa jenis makanan ringan/ camilan berbentuk kemasan yang sudah kadaluwarsa, sehingga sekaligus dilakukan pensortiran.



## **Koordinasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis ke Kabupaten Sukoharjo**

Meningkatnya kasus penyakit Zoonosis terutama Leptospirosis dengan angka kematian yang cukup tinggi, perlu disikapi dengan meningkatkan Kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit Zoonosis. Kab Sukoharjo tidak termasuk daerah endemis leptospirosis namun angka kejadian leptospirosis cukup tinggi dengan IR tahun 2018 adalah 1,92. Selain itu Kab Sukoharjo berbatasan dengan Kabupaten Klaten yang endemis leptospirosis dengan IR tahun 2018 adalah 5,72. Untuk itu pada tanggal 18 April 2019, tim BBTCLPP Yogyakarta yang terdiri dari kepala Seksi Advokasi dan KLB serta dua orang staf Epidemiolog Kesehatan melakukan kunjungan ke Dinkes Kab Sukoharjo.

Tujuan kunjungan, selain untuk mengetahui situasi penyakit Leptospirosis di Kabupaten Sukoharjo, juga untuk menyampaikan rencana kegiatan sekaligus meminta dukungan dan merencanakan teknis pelaksanaan kegiatan. Tim BBTCLPP Yogyakarta diterima oleh Kasie P2 dan dua orang staf pengelola program Leptospirosis. Selanjutnya Tim BBTCLPP Yogyakarta menyampaikan rencana kegiatan, diantaranya bahwa kegiatan akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya pada kecamatan/wilayah puskesmas dengan kasus terbaru di Tahun 2019, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain observasi lingkungan, pemeriksaan sampel darah dengan metode PCR dan MAT pada sampel darah tikus, sapi, kambing, marmot serta sampel manusia. Selanjutnya Dinkes Kabupaten Sukoharjo menyambut baik rencana kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis Penyakit Leptospirosis dan menyampaikan bahwa kasus leptospirosis terbaru yang dilaporkan terjadi di tanggal 4 Maret 2019 di Kecamatan Kartasura sebanyak 1 kasus.

Selanjutnya dilakukan diskusi mengenai teknis pelaksanaan kegiatan, disepakati bahwa Dinkes Kabupaten Sukoharjo akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Puskeswan mengenai pelaksanaan kegiatan dan akan segera menghubungi tim BTKL Jogja bila menerima laporan kasus baru leptospirosis di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya BBTCLPP Yogyakarta akan menyiapkan tim dan alat bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.




## **Presentasi DED Perencanaan Tahap II pembangunan Gedung Pelayanan dan Area Parkir BBTCLPP Yogyakarta, 18 April 2019**

Detail Engineering Design (DED) adalah gambar kerja detail dengan skala (perbandingan). Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan, Engineer's Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), laporan akhir tahap perencanaan, meliputi laporan arsitektur, laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test), laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal dan laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi).

Gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan. Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) serta spesifikasi dan harga. Susunan dari RAB nantinya akan direview, perhitungannya dikoreksi dan diupdate harganya disesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).




Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. RKS kemudian menjadi syarat yang harus dipenuhi penyedia sehingga dapat dimasukkan ke dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP).

Mengawasi pembangunan Tahap II Gedung Pelayanan di Area Parkir BBTCL PP Yogyakarta adalah menyusun sebum DED dan pada kesempatan ini Dirjen P2P, dr. Anung Sugihantono, M.Kes sebagai Unit Utama yang membawahi BBTCL PP Yogyakarta berkesempatan memberikan masukan untuk pembangunan Gedung BBTCL PP Yogyakarta.

Setelah dilakukan presentasi dan diskusi acara dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Lokasi Pembangunan Gedung, oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta DR. dr. Irene, MKM beserta tim, Kabag Pegum Seditjen P2P, drg. Resi Arisaandi, MH dan Kabag Keuangan dan BMN, Drs. Warmo Sudrajat, M.Kes, MH.

Semoga Amanah dan pelaksanaan pembangunan gedung dapat berjalan sesuai dengan harapan.

---





## Eliminate Dengue Project (EDP), Yogyakarta 18 April 2019

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi persoalan yang menyulitkan pemerintah Indonesia karena tingginya angka jumlah terinfeksi. Diperkirakan 390 juta orang terinfeksi Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh dunia. Untuk wilayah Asia Pasifik, hampir 75% penderitanya berada di wilayah ASEAN.


Fakultas Kedokteran (FK) UGM telah mengembangkan sejumlah riset pengendalian DBD, yaitu melalui Eliminate Dengue Project (EDP) dan International Reserach Consortium on Dengue Risk Assesment, Management and Surveillance (IDAMS).

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak penelitian yang mencari tahu bagaimana menanggulangi masalah penyakit Demam Berdarah yang disebabkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti*.

TIM UGM melaksanakan sebuah penelitian yang diberi nama Eleminate Dengue Program pertama kali diteliti di Negara Australia.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang saat ini belum ditemukan cara mengatasinya, diharapkan untuk melakukan tindakan pertama dalam pencegahannya yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui sebuah iklan di televisi terutama dalam melakukan 3M yaitu: pertama dengan cara menguras bak mandi setiap seminggu sekali kedua dengan menutup air yang ditimbun, baik dengan menggunakan gentong, ember dan lainnya terakhir dengan cara mengubur sampah-sampah yang dapat menimbulkan timbunan air sehingga nyamuk tidak dapat bersarang dan bertelur mengeluarkan jentik larva

Menggunakan sebuah bakteri vaksin *Wolbachia* yang tidak berbahaya, bakteri ini berfungsi dalam melemahkan Virus Dengue yang ada dalam nyamuk *Aedes Aegypti*, dengan menyuntikkan dan mengolaborasikan pada nyamuk, sehingga nyamuk yang memiliki virus Dengue akan melemah dengan bakteri *Wolbachia*. Hal ini diharapkan akan menjadi sebuah solusi terhadap timbulnya penyakit demam berdarah yang ada di Indonesia.




Wolbachia merupakan salah satu bakteri alami yang terdapat pada hewan serangga sebagai parasit yang berfungsi mampu menghambat virus dengue dan melemahkan virus dengue sehingga tidak dapat ditularkan kepada manusia, penelitian dari Yayasan Tahija Universitas Monash, Australia dalam menyebarkan Nyamuk Aedes ber-Wolbachia di Dunia.

Penyebaran Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia termasuk Indonesia yang sudah proses penyebaran di Kota Yogyakarta dan dilaksanakan melalui Kerjasama Fakultas Kedokteran UGM dengan Yayasan di Australia.

Semoga penelitian ini memberikan sumbangsih dalam menanggulangi DBD di Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan benar-benar Etika Penelitian yang menjadi bagian penting dari riset modern, terutama ketika riset yang dilakukan menempatkan manusia sebagai subjek penelitian.

---






### **Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018**

Pada tanggal 22 - 26 April 2019 BBTCLPP Yogyakarta menghadiri pertemuan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 di Hotel Horison Bekasi. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh UPT dan Satker beserta jajarannya di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BBTKLPP Yogyakarta juga turut menghadiri pertemuan tersebut dan dihadiri oleh Dr. dr. Irene, MKM (Kepala BBTCLPP Yogyakarta), Dian Trikoriaty, ST, SKM, M.P.H (Kabag. Tata Usaha), Dhelina Auza Utami, S.Farm, Apt (Kasubbag Program dan Laporan), Nadia Regina Martanti, SKM (Perencana) dan Ardhiles. Pertemuan SAKIP tersebut di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, yaitu Bapak Oscar Primadi, MPH. Hasil penilaian evaluasi SAKIP untuk BBTCLPP Yogyakarta pada tahun ini adalah 98.71 (AA) atau sangat memuaskan. Begitu juga dengan seluruh Satker UPT Ditjen P2P juga mendapatkan status AA pada tahun ini.

Pada tanggal 26 April 2019, Bapak Oscar Primadi, MPH, yang diwakili oleh Ses Itjen Kemenkes Bapak Heru Arnowo, SH, MM, CFA, menyampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kesehatan 2018 dan beberapa poin penting yang disampaikan antara lain beliau memberikan apresiasi kepada unit-unit yang mendapatkan nilai memuaskan, namun pesan beliau jangan cepat berpuas diri, agar terus dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas kerjanya.

Sedangkan bagi unit yang belum mencapai nilai yang memuaskan diminta agar segera berbenah dan memperbaiki diri. Periksa apa yang masih kurang, perbaiki aspek-aspek yang masih lemah. Kalau dirasa perlu tak ada salahnya belajar kepada unit yang lebih baik kinerjanya.




Perbaiki kualitas perencanaan kinerja dengan menyempurnakan indikator tujuan pada Renstra Unit Eselon I, sehingga dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja di jangka menengah (5 tahun), dan tingkatkan kualitas cascade indikator kinerja utama tingkat kementerian dengan unit di bawahnya sampai pada tingkat UPT, SKPD Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi Kesehatan dan individu pegawai (SKP).

Manfaatkan pengukuran capaian kinerja mulai pejabat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Upayakan peningkatan kualitas penerapan Sakip di seluruh unit kerja baik pusat maupun unit di UPT.

Demikian beberapa arahan yang disampaikan oleh Ses Itjen untuk dapat dilaksanakan di seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan pada hari itu beliau sekaligus menutup acara pertemuan Evaluasi SAKIP.

---







## **Pertemuan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyusun Laporan Keuangan di Lingkungan E-1 Ditjen P2P**


Pada Tanggal 23 April 2019 Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA di dampingi Kepala Bagian Keuangan dan BMN P2P, Drs. Warmo Sudrajat, M.Kes, MH, Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM dan Kepala KKP Yogyakarta Agus Syah FH, SKM, MKM menghadiri, memberi arahan sekaligus membuka acara Pertemuan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyusun Laporan Keuangan di Lingkungan E-1 Ditjen P2P, yang berlangsung dari tanggal 23 – 26 April 2019 bertempat di Grand Tjokro Hotel Yogyakarta.

Acara diawali dengan sambutan dan arahan dari Sesditjen P2P, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA. Dalam arahnya Sesditjen P2P menyampaikan bahwa keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Laporan keuangan tersebut merupakan pencerminan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh satker di Kementerian/Lembaga dan merupakan sumber data laporan keuangan pemerintah yang dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Sebelum menjadi laporan keuangan Pemerintah, laporan keuangan tersebut direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta disampaikan secara berjenjang.


Sesditjen juga menyampaikan sangat mengapresiasi atas kinerja Bapak/Ibu sekalian khususnya dalam penyusunan Laporan Keuangan, sehingga pada tahun 2017 yang lalu Kementerian Kesehatan mendapatkan apresiasi atas Capaian Opini BPK WTP Paripurna (5 kali) karena secara berturut-turut dari TA 2013 s.d 2017 telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Dan kita berharap atas Laporan Keuangan Tahun 2018 mendapat opini WTP dari Tim BPK.



Hal tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkes dalam mempertahankan opini laporan keuangan WTP yang berkelanjutan. Dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai maka perlu menyusun pedoman penerapan, penilaian, dan revidu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Upaya mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan TA 2019 maka diperlukan Pertemuan Tindak Lanjut Peningkatan Kapasitas Petugas Penyusun Laporan Keuangan di Lingkungan E-1 Ditjen P2P.

---



## Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Stasiun Balapan Kota Surakarta Tahun 2019



Pada tanggal 23 April 2019, tim BBTCLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Puskesmas Gilingan serta dipandu oleh petugas dari Stasiun Balapan Surakarta melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel di Stasiun Balapan Surakarta. Kegiatan ini merupakan tahap utama dari Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Stasiun Balapan Kota Surakarta Tahun 2019.

Titik pelaksanaan kegiatan di stasiun terdiri dari lima penyedia makanan yaitu Gerbong restorasi KA Malioboro Expres, Loko Cafe, Warung Makan Ibu Ngatini, Warung Makan Tutik Ruwatiningsih, Twin Resto dan Teh Java Kopi.

Sampel lingkungan yang diambil terdiri dari makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bakteri dan bahan berbahaya, usap tangan penjamah, usap alat makan, dan air bersih. Parameter bakteri pada makanan minuman yang diperiksa yaitu *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., dan *Vibrio cholera*.

Parameter bahan berbahaya pada makanan minuman yang diperiksa yaitu Borax, Formalin, Rodhamin B, dan Methyl Yellow. Parameter pemeriksaan usap tangan penjamah dan usap alat makan yaitu Angka Lempeng Total atau Jumlah Kuman. Parameter pemeriksaan air bersih yaitu bau, TDS, kekeruhan, rasa, suhu, warna, pH, Besi, Fluorida, Kesadahan, Mangan, Nitrat, Nitrit, Sianida, Detergen, Pestisida, Air Raksa, Arsen, Kadmium, Kromium, Selenium, Seng, Sulfat, Timbal, Benzen, Zat organik, Total coliform, dan *E. coli*.

Hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan masih adanya penjamah/penyaji makanan yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, peralatan pengolahan makanan dalam kondisi kotor, penyajian makanan dan sarana penjaja makanan yang belum memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Hasil pemeriksaan kualitas lingkungan secara laboratorium diharapkan dapat diinformasikan kepada pengelola Stasiun Balapan dan stakeholder terkait sebelum hari H mudik lebaran tahun 2019 guna pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat makanan di Stasiun Balapan Kota Surakarta.



## **Pertemuan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyusun Laporan Keuangan di Lingkungan E-1 Ditjen P2P**


Pada Tanggal 23 April 2019 Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA di dampingi Kepala Bagian Keuangan dan BMN P2P, Drs. Warmo Sudrajat, M.Kes, MH, Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM dan Kepala KKP Yogyakarta Agus Syah FH, SKM, MKM menghadiri, memberi arahan sekaligus membuka acara Pertemuan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyusun Laporan Keuangan di Lingkungan E-1 Ditjen P2P, yang berlangsung dari tanggal 23 – 26 April 2019 bertempat di Grand Tjokro Hotel Yogyakarta.

Acara diawali dengan sambutan dan arahan dari Sesditjen P2P, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA. Dalam arahnya Sesditjen P2P menyampaikan bahwa keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Laporan keuangan tersebut merupakan pencerminan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh satker di Kementerian/Lembaga dan merupakan sumber data laporan keuangan pemerintah yang dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Sebelum menjadi laporan keuangan Pemerintah, laporan keuangan tersebut direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta disampaikan secara berjenjang.


Sesditjen juga menyampaikan sangat mengapresiasi atas kinerja Bapak/Ibu sekalian khususnya dalam penyusunan Laporan Keuangan, sehingga pada tahun 2017 yang lalu Kementerian Kesehatan mendapatkan apresiasi atas Capaian Opini BPK WTP Paripurna (5 kali) karena secara berturut-turut dari TA 2013 s.d 2017 telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Dan kita berharap atas Laporan Keuangan Tahun 2018 mendapat opini WTP dari Tim BPK.



Hal tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkes dalam mempertahankan opini laporan keuangan WTP yang berkelanjutan. Dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai maka perlu menyusun pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Upaya mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan TA 2019 maka diperlukan Pertemuan Tindak Lanjut Peningkatan Kapasitas Petugas Penyusun Laporan Keuangan di Lingkungan E-1 Ditjen P2P.

---





### **Survei Pre TAS Filariasis di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

Filariasis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup. Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan eliminasi Filariasis tahun 2020 sesuai ketetapan WHO tentang Kesepakatan Global Eliminasi Filariasis tahun 2020 (The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020). Program eliminasi dilaksanakan melalui dua pilar kegiatan yaitu : pemberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis kepada seluruh penduduk di kabupaten endemis filariasis, kedua dengan tatalaksana kasus klinis filariasis guna mencegah dan mengurangi kecacatan.

Surveilans Kesehatan dilaksanakan berbasis indikator dan berbasis kejadian dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui Penemuan Penderita, survei data dasar prevalensi mikrofilaria, survei evaluasi prevalensi mikrofilaria dan survei evaluasi penularan Filariasis. ?

Penemuan Penderita dilakukan secara aktif dan pasif, secara aktif dilaksanakan melalui survei darah jari dan survei kasus klinis dan secara pasif melalui penderita yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan laporan masyarakat.

Survei data dasar prevalensi mikrofilaria dilakukan untuk menentukan wilayah endemis Filariasis. Desa/kelurahan yang ditemukan penderita Filariasis kronis terbanyak akan dilakukan Survei Darah Jari untuk mengukur tingginya angka mikrofilaria rate sebagai dasar penentuan status endemisitas Filariasis daerah tersebut

Wilayah endemis Filariasis meliputi satuan kabupaten/kota yang ditentukan berdasarkan hasil survei data dasar prevalensi mikrofilaria menunjukkan angka mikrofilaria (microfilaria rate) lebih dari dan/atau sama dengan 1% (satu persen). ?Apabila berdasarkan hasil survei evaluasi penularan pada daerah kabupaten/kota menunjukkan angka mikrofilaria (microfilaria rate) kurang dari 1% (satu persen), pemberian obat Filariasis hanya dilakukan terhadap Penderita.

Pada semua penduduk di wilayah endemis Filariasis wajib dilakukan POPM Filariasis, meliputi penduduk sasaran usia 2 tahun sampai dengan usia 70 tahun, tidak dilakukan atau ditunda pemberiannya terhadap ibu hamil, penderita gangguan fungsi ginjal, penderita gangguan fungsi hati, penderita epilepsi, penderita penyakit jantung dan pembuluh darah, penduduk yang sedang sakit berat, penderita Filariasis klinis kronis sedang mengalami serangan akut dan/atau anak dengan marasmus atau kwasiorkor. Satuan lokasi pelaksanaan eliminasi Filariasis (implementation unit) adalah Kabupaten/Kota. POPM Filariasis dilaksanakan sekali setiap tahun paling sedikit selama lima tahun berturut-turut. Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) harus dilakukan secara maksimal. Kalau kurang dari 85 % tidak efektif dan akan menjadi sumber penularan.

Survei evaluasi prevalensi mikrofilaria dilakukan untuk menilai keberhasilan penurunan prevalensi mikrofilaria sesudah kegiatan POPM Filariasis.

Setiap kabupaten/kota yang sudah melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) Filariasis berkewajiban untuk melaksanakan Survei Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria setelah pelaksanaan kegiatan POPM Filariasis tahun ketiga dan kelima.

Survei ini tidak dilakukan diseluruh wilayah desa/kelurahan, tetapi hanya dilakukan pada beberapa desa terpilih, yaitu ditetapkan di satu Desa Sentinel dan satu Desa Spot (Spot Check). ?

Survei evaluasi penularan Filariasis atau Transmission Assessment Survey (TAS) dilakukan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya penularan Filariasis sesudah paling sedikit 5 (lima) tahun kegiatan POPM Filariasis dilakukan. Pelaksanaan POPM Filariasis wajib diteruskan selama 2 (dua) tahun apabila berdasarkan hasil survei evaluasi penularan Filariasis menunjukkan masih terjadi penularan dan/atau cakupan pengobatan tidak memenuhi persyaratan minimal 65 % dari penduduk sasaran.

Pada dasarnya, setelah POPM filariasis dilaksanakan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut, maka diharapkan sudah tidak terjadi penularan Filariasis, sehingga pada anak-anak berusia 6-7 tahun tidak ditemukan adanya cacing dewasa dalam darahnya.

Pelaksanaan POPM Filariasis dihentikan apabila berdasarkan hasil survei evaluasi penularan Filariasis menunjukkan tidak terjadi penularan. Setelah penghentian POPM Filariasis telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, pada wilayah tersebut dilakukan survei ulang evaluasi penularan Filariasis, jika hasil survei ulang evaluasi penularan Filariasis menunjukkan tidak terjadi penularan, POPM Filariasis tetap dihentikan dan dilakukan survei ulang penularan Filariasis kembali setelah 2 (dua) tahun.


Sesuai dengan jenis cacing Filariasisnya, metode diagnosis untuk menentukan ada tidaknya cacing filaria di dalam darah dibagi 2 cara yaitu Immunochromatographic Test (ICT)/Rapid Test untuk Bancrofti dan Rapid Test untuk Brugia. Untuk daerah dengan infeksi campuran *W. bancrofti* dan *Brugia* spp, dilakukan untuk masing-masing pemeriksaan ICT dan Rapid Test *Brugia*. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 9 kabupaten/kota yang endemis filariasis yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Brebes, Wonosobo, Semarang, Grobogan, Blora, Pati dan Demak. Pada tahun 2015 dicanangkan Bulan eliminasi kaki gajah (Belkaga) secara nasional dan setiap bulan oktober semua kabupaten endemis secara serentak melakukan kegiatan POPM dengan tujuan utama tahun 2020 Indonesia Bebas filariasis limfatik.

Pada tahun 2018, BBTCL PP Yogyakarta melakukan Survei Cakupan Pengobatan di Kabupaten Grobogan (81%), Kabupaten Wonosobo (83%) dan Kabupaten Semarang (84%), walaupun di beberapa desa masih terdapat titik-titik dengan cakupan minum obat kecil dari 65%. Disamping itu juga dilakukan survei evaluasi prevalensi mikrofilaria di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan dengan hasil *mf* Rate 0% baik di desa spot maupun sentinel. Pada tahun 2018, Kota Pekalongan telah menyelesaikan tahun ke 2 dari POMP setelah gagal pada tahun ke 5 POMP Filariasis, untuk itu dilakukan Survei evaluasi akhir Periode (Pre TAS). Survei Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria ini dilaksanakan oleh tim BBTCL PP Yogyakarta yang langsung dipimpin oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta DR. dr. Irene, MKM bersama Kepala Bidang Epidemiologi Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas dibantu oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Populasi survei, baik pada Desa Sentinel maupun Desa Spot, adalah penduduk berusia >5 tahun. Penduduk di Desa Sentinel yang positif mikrofilaria pada survei-survei sebelumnya, harus dimasukkan dalam sampel survei ini. Jumlah sampel 300 spesimen di setiap lokasi survei (satu Desa), dengan cara pengambilan dan penentuan sampel sama seperti pada Survei Darah Jari. Distribusi sampel survei menurut umur sedapat mungkin representasi distribusi populasi yang setiap daerah bisa berbeda. Apabila jumlah populasi yang berusia >5 tahun di Desa Lokasi Survei tidak mencukupi, maka sampel tambahan dapat diambil dari desa lain yang bersebelahan dengan topografi yang kurang lebih sama.


Cara menemukan sampel adalah dengan mengumpulkan penduduk sasaran survei yang tinggal di sekitar kasus kronis di Desa Sentinel atau dimulai dari tempat lain yang paling dicurigai sebagai tempat dengan risiko penularan Filariasis paling tinggi (rawa, dsb). Teknik Pengambilan Spesimen, Pewarnaan dan Pemeriksaan Sediaan sama dengan Survei Darah Jari.





Pelaksanaan survei evaluasi Pre TAS untuk mengetahui gambaran Mf rate ini dilaksanakan mulai tanggal 29 April hingga 4 Mei 2019. Survei dilaksanakan di dua desa, yaitu Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat sebagai Desa Spot dan Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, sebagai Desa Sentinel. Tim pengumpulan spesimen darah jari yang terdiri atas unsur: petugas Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Puskesmas Medono, Puskesmas Jenggot, Kader Kelurahan Sapuro Kebulen, Kader Kelurahan Jenggot, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan BBTCLPP Yogyakarta. Setiap tahapan pelaksanaan survey di kedua lokasi terlebih dahulu diadakan kegiatan penyiapan masyarakat berupa sosialisasi terkait dengan tujuan dan tata cara pelaksanaan kegiatan pengambilan specimen sediaan darah jari (SDJ) yang dilaksanakan pada malam hari (pukul 21.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB) sehingga diharapkan adanya kepedulian dan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Hasil sosialisasi ini cukup efektif karena dari hasil pengumpulan specimen Sediaan Darah Jari yang dilaksanakan dapat terjaring sebanyak 332 orang responden di Kelurahan Medono berusia antara 9 – 74 tahun, dengan proporsi 51% adalah laki-laki dan 49% perempuan, sementara untuk Kelurahan Jenggot terjaring sebanyak 315 orang responden berusia antara 6 – 79 tahun dengan proporsi 49% laki-laki dan 51% perempuan. Spesimen darah jari yang terkumpul akan diproses lebih lanjut di instalasi laboratorium parasitologi BBTCLPP Yogyakarta untuk mengidentifikasi keberadaan mikrofilaria.

---





### **Sosialisasi Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 23 April 2019**

Program Kementerian Keuangan menggunakan KKP untuk belanja negara di 26 ribu satuan kerja (satker) berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berlaku mulai tanggal 1 Juli 2019. Untuk itu BBTCL PP Yogyakarta melakukan Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah bertempat di Aula BBTCL PP Yogyakarta, pada Selasa, 23 April 2019 oleh Bank Mandiri Tbk Yogyakarta. Acara dibuka oleh Kepala B/BTKL PP Jogjakarta, DR. dr. Irene, MKM.

KKP adalah salah satu quickwin Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018 dan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Pemanfaatan kartu kredit pemerintah ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran.

KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan/pembayaran tagihan secara sekaligus setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Untuk mencegah adanya biaya bunga/denda, pembayaran kewajiban tagihan kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo. Pertanggungjawaban pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu.

Tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah, yaitu untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Pemakaian KKP dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab. Pemerintah menunjuk administrator kartu kredit. Apabila ditemukan ketidakwajaran, administrator dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kartu kredit. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah harus menyimpan semua bukti pengeluaran atas penggunaan kartu kredit dan menyerahkannya kepada PPK sebagai dasar verifikasi, pembayaran tagihan serta pertanggungjawaban uang persediaan dan PPK membuat verifikasi dengan Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (DPT KKP).

Satker hanya dapat melakukan perjanjian kerja sama pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP dengan Bank anggota Himbara sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 menunjuk empat Bank anggota Himbara yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk.(BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019 dan harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satker K/L), selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis.

Penggunaan kartu kredit yang digunakan pemerintah hanya untuk pembayaran yang bersifat UP. Jadi, tidak semua uang belanja negara dibayar memakai kartu kredit. Apalagi untuk membayar proyek infrastruktur, yang pembayarannya bisa mencapai puluhan miliar.

Tagihan atas kartu kredit pemerintah ini dibayar oleh bendahara pengeluaran menggunakan UP yang dikuasainya. UP Satker terdiri dari UP Tunai dan UP KKP. Sehingga UP KKP merupakan bagian dari UP yang dikelola oleh Satker. Adapun proporsi UP Tunai sebesar 60% dan proporsi UP KKP sebesar 40% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018.

KKP digunakan untuk belanja penyediaan layanan publik, pengadaan barang atau jasa publik, dan operasional pemerintahan.

Kartu kredit pemerintah digunakan hanya untuk pembayaran kepada 1 (satu) penerima/rekanan maksimal Rp 50 juta per transaksi untuk kebutuhan operasional dan Rp. 20 juta untuk perjalanan dinas. Langkah mitigasi ini dilakukan bertujuan untuk meminimalkan risiko dari sisi penyalahgunaannya.

Kartu kredit pemerintah digunakan oleh dua kelompok, yaitu pegawai yang tugasnya berbelanja kebutuhan sehari-hari perkantoran (dalam pemerintahan disebut Pejabat Pengadaan); dan, pegawai yang melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas, seperti pembayaran tiket atau hotel.

Pemegang kartu kredit harus ditetapkan oleh Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang. Untuk menjaga integritas, pemegang kartu kredit juga harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kartu kredit, dan bila terjadi penyalahgunaan bersedia untuk dituntut ganti rugi.

Untuk mencegah adanya biaya bunga atau denda, tagihan kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo, tentu saja setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu.

Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.

Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan barang antara lain belanja barang operasional (belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya), belanja barang non operasional (belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya), belanja barang untuk persediaan (belanja barang persediaan barang konsumsi), belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus non-pertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya), belanja pemeliharaan lainnya (belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya) dan/ atau belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan digunakan untuk komponen pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota.

Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja operasional dan belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.

Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp 20.000.000,00 untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.

Satker melalui Administrator Kartu Kredit Pemerintah dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Permintaan kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah harus mendapat persetujuan dari KPA.

Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah secara sementara dalam hal terdapat keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan dan persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah.

Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah secara permanen dalam hal terdapat keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan dan perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah.

Pengajuan TUP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah kepada Kepala KPPN disertai:

- a. rencana nilai batasan belanja (limit) TUP Kartu Kredit Pemerintah;
- b. rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP Kartu Kredit Pemerintah yang ditandatangani oleh KPA dan BP/BPP
- c. rencana periode penggunaan batasan belanja (limit) TUP Kartu Kredit Pemerintah (mulai-berakhir).

Kebijakan baru dalam pembayaran belanja negara dengan menggunakan Kartu Kredit ini merupakan model baru pengelolaan keuangan negara yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna kartu kredit (satker kementerian/lembaga), pemerintah dalam hal ini bendahara umum negara dalam mengoptimalkan kas negara, dan bagi bank itu

Penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai pembayaran belanja negara akan membuat transaksi kenegaraan lebih transparan karena pelaksanaannya akuntabel. Seluruh transaksi kartu kredit terekam secara elektronik, dan dapat diverifikasi antar kuitansi dan rincian tagihan. Hal ini mengurangi transaksi fiktif atau penggunaan kuitansi palsu.

Dengan kartu kredit ini, belanja operasional menjadi lebih efisien, karena pemerintah dapat memperoleh barang/jasa terlebih dahulu, melunasi kemudian, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih cepat dan lancar. Petugas tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar dalam pembayaran kegiatan operasionalnya

Selain itu dengan kartu kredit ini juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.

Pemakaian kartu kredit oleh satker kementerian negara dan lembaga juga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker yang bersangkutan. Pelaksana kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan atau pegawai) tidak perlu harus menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya.

Melalui penggunaan kartu kredit pemerintah dapat mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai (Cashless Society).



## **Kunjungan Kerja Sekjen Kementerian Kesehatan RI di BBTCLPP Yogyakarta**

Pada tanggal 24 April 2019 Sekjen Kementerian Kesehatan RI drg. Oscar Primadi, M.P.H. didampingi Sesditjen Kementerian Kesehatan RI dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, M.H.A., beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja ke BBTCLPP Yogyakarta.

Acara diawali dengan sambutan Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, M.K.M. Dalam sambutannya, Kepala BBTCLPP Yogyakarta menyampaikan bahwa pada tahun ini laboratorium BBTCLPP Yogyakarta akan pindah ke gedung baru di Jl. Imogiri Timur. Gedung tersebut merupakan gedung BSL2 dan semua ijin sudah lengkap. Pada tahun ini pula BBTCLPP Yogyakarta bersiap untuk pembangunan gedung pelayanan. Disampaikan pula bahwa pada tahun 2018 BBTCLPP Yogyakarta berhasil mematenkan dua produk teknologi tepat guna yaitu Penjernih Air Keruh (PAK) dan pewarna alami. Selain itu juga mendapat pengakuan penciptaan software untuk e-Simdadu dan e-Simpel. BBTCLPP Yogyakarta merupakan laboratorium terakreditasi yang sudah diakui KAN, laboratorium rujukan untuk wilayah DIY dan Jawa Tengah, serta merupakan laboratorium lingkungan yang ditetapkan oleh KLHK. BBTCLPP Yogyakarta juga meraih WBK dari Kemenkes dan sedang persiapan untuk WBK/WBBM dari Kemenpan.

Setelah sambutan Kepala BBTCLPP Yogyakarta dilanjutkan dengan arahan dari Sekjen Kemenkes RI. Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa hal-hal yang dilakukan BBTCLPP Yogyakarta benar-benar surprise, agar terus dipertahankan dan dilanjutkan. Tugas BBTCLPP Yogyakarta merupakan bagian dari pelayanan publik yang paling menonjol di antara instansi-instansi lain. Pada saat ini di pusat sedang dilakukan pembahasan tentang penataan organisasi yang harus terlaksana tahun 2020. Tetaplah bekerja dengan semangat, penataan organisasi jangan sampai mengganggu pelayanan. Diharapkan untuk BBTCL dan BLK dapat menjadi satu kesatuan yang utuh.

Acara dilanjutkan dengan diskusi, foto bersama dan tinjauan ke laboratorium



## **Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Terminal Tirtonadi, Surakarta Tahun 2019.**

Pada tanggal 24 April 2019, tim BBTCLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Puskesmas Gilingan serta dipandu oleh petugas Terminal Turtonadi Surakarta melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel di Terminal Turtonadi Surakarta. Kegiatan ini merupakan tahap utama dari Kegiatan Surveilans Faktor Risiko dalam Arus Mudik di Terminal Tirtonadi Surakarta Tahun 2019.

Titik pelaksanaan kegiatan di terminal terdiri dari lima penyedia makanan/Warung Makan (WM) yaitu WM Gaul, WN Barokah 2, WM Duta Sari, WM Handayani dan WM Riyan.

Sampel lingkungan yang diambil terdiri dari makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bakteri dan bahan berbahaya, usap tangan penjamah, usap alat makan, dan air bersih. Parameter bakteri pada makanan minuman yang diperiksa yaitu *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, dan *Vibrio cholera*.

Parameter bahan berbahaya pada makanan minuman yang diperiksa yaitu Borax, Formalin, Rodhamin B, dan Methyl Yellow. Parameter pemeriksaan usap tangan penjamah dan usap alat makan yaitu Angka Lempeng Total atau Jumlah Kuman. Parameter pemeriksaan air bersih yaitu bau, TDS, kekeruhan, rasa, suhu, warna, pH, Besi, Fluorida, Kesadahan, Mangan, Nitrat, Nitrit, Sianida, Detergen, Pestisida, Air Raksa, Arsen, Kadmium, Kromium, Selenium, Seng, Sulfat, Timbal, Benzen, Zat organik, Total coliform, dan *E. coli*.

Hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan masih adanya penjamah/penyajai makanan yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, peralatan pengolahan makanan dalam kondisi kotor, penyajian makanan dan sarana penjaja makanan yang belum memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Hasil pemeriksaan kualitas lingkungan secara laboratorium diharapkan dapat diinformasikan kepada pengelola Terminal Tirtonadi dan stakeholder terkait sebelum hari H mudik lebaran tahun 2019 guna pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat makanan di Terminal Tirtonadi



## **Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Kepegawaian (Rakonpeg) di Lingkungan Kemenkes Tahun 2019, Hotel Dafam Fortuna, 24 April 2019**

Rapat koordinat ini dilaksanakan dengan mengusung tema “Membangun SMART ASN Kementerian Kesehatan menuju Birokrasi Berkelas Dunia” dibuka oleh Sekjen Kemenkes RI, drg. Oscar Primadi, MPH, yang menyampaikan arahan dan membuka pertemuan secara resmi dan Pemberian Penghargaan Satker Terbaik Pengelola Kepegawaian.

Administrasi kepegawaian ialah segala macam bentuk kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan masalah pemakaian tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan dari administrator adalah untuk menyusun dan mengontrol semua kegiatan untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan ataupun menggunakan seluruh tenaga kerja sesuai dengan beban kerja sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

Fungsi administrasi kepegawaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Fungsi Manajerial (suatu fungsi yang berhubungan dengan penggunaan pikiran, seperti: perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengendalian) dan fungsi teknis (suatu fungsi yang berkaitan tentang teknis atau berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik, misalnya: pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pemensiunan).

Fungsi umum administrasi kepegawaian adalah Perencanaan Pegawai, Pengorganisasian Kepegawaian dan Pengarahan Pegawai.

Materi yang disampaikan pada pertemuan ini diawali dengan SMART ASN dan Birokrasi Berkelas Dunia oleh Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB.

Panel 1 yaitu Perencanaan Kebutuhan ASN oleh Asisten Deputi Perencanaan & Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian PANRB dan Membangun ASN Kemenkes yang Berintegritas oleh Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI.



Pada Panel 2 disampaikan materi Penilaian Kinerja 360 derajat dan Penegakan Disiplin Pegawai (Best Practice pada Kementerian Keuangan) oleh Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Layanan Kepegawaian oleh Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, BKN

Selanjutnya dilakukan Diskusi Kelompok dengan tema :

1. Pemenuhan Kebutuhan PNS dan PPPK di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Kesehatan.
4. Penegakan Disiplin Pegawai sebagai Upaya Mewujudkan ASN Kementerian Kesehatan yang Lebih Profesional.

Kemudian dilanjutkan dengan Desk Perencanaan Kebutuhan ASN (PNS, PPPK dan Inpassing) dan Presentasi hasil diskusi kelas (kesimpulan dan rencana tindak lanjut)

Acara diakhiri dengan penutupan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI, Suhartati, S.Kp., M.Kes, dengan harapan Pertemuan ini akan meningkatkan pemahaman dalam menyusun kebutuhan PNS dan PPPK sesuai dengan ABK dan peta jabatan, meningkatkan Prestasi Kerja PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan, merencanakan dan menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi PNS sesuai ?standar kompetensi jabatan serta memahami disiplin sebagai salah satu aspek dalam profesionalitas PNS dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran disiplin di lingkungan Kementerian Kesehatan.



## **Peringatan Hari Malaria Sedunia 2019 di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar**

Acara diawali dengan penyampaian Laporan Pelaksanaan oleh Direktur Jendral P2P Kemenkes, dr. Anung Sugihantono, M.Kes. mengatakan, peringatan Hari Malaria Sedunia jatuh pada 25 April. Tahun ini peringatan Hari Malaria Sedunia dilaksanakan di Bali karena Bali telah mencapai eliminasi malaria. Meski demikian, Provinsi Bali tetap berjalan melakukan upaya pemeliharaan status eliminasi. Diharapkan Bali dan Provinsi lain terus menginspirasi provinsi lainnya yang belum eliminasi malaria agar terus berupaya melakukan eliminasi malaria.

Sejarah hari ini, setiap tanggal 25 April diperingati sebagai Hari Malaria Sedunia. Pada peringatan Hari Malaria Sedunia 2019 yang jatuh pada hari ini, organisasi kesehatan dunia WHO mengusung tema "Zero Malaria Starts with Me" yang berarti "Nol Malaria Dimulai dari Saya". Setelah lebih dari satu dekade perang terhadap penyakit malaria, saat ini justru tidak terlihat kemajuan dalam menekan jumlah kematian akibat malaria.

Dari 514 kabupaten/ kota dari 34 provinsi, 285 kabupaten/kota dari 29 provinsi telah mencapai eliminasi malaria. Indonesia memiliki tantangan besar untuk eliminasi malaria karena masih ada lima provinsi yang belum eliminasi malaria yaitu, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT, belum ada satupun kotanya yang eliminasi kasus malaria.

Selanjutnya disampaikan sambutan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sertifikasi ini merupakan salah satu komitmen global agar bebas malaria. Tjahjo menyebut saat ini ada 225 kabupaten/kota dari total 514 kab/kota se-Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi bebas malaria.

Ini adalah sebagai bagian komitmen global untuk mengeliminasi malaria, kami mengapresiasi bahwa 10 tahun belakangan ini berdasarkan data Kemenkes 225 kabupaten/kota telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria. Tentunya kepada kepala daerah yang berhasil mencapai penghargaan tersebut harus mampu berupaya untuk mempertahankan prestasi tersebut sehingga kasus malaria tidak ditemukan kembali.

Mendagri juga menyampaikan bahwa, saat ini sudah karena ada 514 kabupaten/kota 34 provinsi dan hingga saat ini usulan daerah otonom baru per hari ini 314. Bayangkan kalau ditambah 314 hampir seribu, tapi saya cut sementara tidak ada.

Mendagri meminta komitmen para kepala daerah agar serius mengeliminasi malaria hingga ke daerah-daerah pelosok. Salah satu yang diapresiasi Tjahjo adalah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memasukkan eliminasi malaria dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2020.

Langkah konkret seluruh provinsi dan kabupaten/kota saya kira target RPJMD harus dimasukkan dalam target peta eliminasi malaria. Ini merupakan langkah konkrit berperan aktif sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah kabupaten/kota. Mendagri berharap para gubernur khususnya, karena kewenangan gubernur sebelum ke Mendagri juga memperhatikan isu-isu strategis nasional khususnya di provinsi untuk dapat menjadi pedoman.

Sejumlah kepala daerah dari Aceh hingga Toli-Toli hadir dalam acara ini. Dalam acara ini Menkes Nila F Moeloek dan Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan sertifikasi eliminasi malaria ke 11 kabupaten/kota terpilih dari 7 provinsi yang mendapatkan sertifikat tersebut. Sejumlah daerah ini adalah Aceh Barat, Bungo Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Luhu Timur, Lampung Barat, Cilacap, Kebumen, Toli – toli Sulawesi Tengah.

Melalui tema nasional Bebas Malaria Prestasi Bangsa, targetnya tahun 2030, Indonesia bebas malaria. Pada hari itu juga dilakukan kick off assesment tingkat regional Jawa Bali dalam penandatanganan komitmen eliminasi malaria. Pembacaan dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Selain itu juga ada penandatanganan komitmen bebas malaria 2023 oleh para kepala daerah di Jawa dan Bali yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wagub Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Paku Alam X, Wagub Jawa Timur Emil Dardak, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Selain itu juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan komitmen bupati dan walikota penerima sertifikasi eliminasi malaria.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berdialog dengan peserta. Kegiatan tersebut membahas target eliminasi malaria di Indonesia tahun 2030 yang dibagi menjadi lima kawasan, dimana Jawa dan Bali merupakan kawasan verifikasi eliminasi pertama yang ditargetkan oleh WHO pada tahun 2023.

Menteri Kesehatan menyebut acara ini sebagai salah satu peringatan hari malaria sedunia 2019 dan mengingatkan agar para kepala daerah bisa menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan.



## **Rapat Koordinasi Satuan Pengamanan Kantor, Senin, 29 April 2019**

Rapat dibuka oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM yang memberikan arahan, tentang peran penting Satpam dalam pengamanan kantor dan peningkatan pelayanan publik.

### **SATPAM SEBAGAI PENGAMANAN KANTOR**

Instansi/lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintah selain Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, yang menyelenggarakan Satuan Pengamanan.

Anggota Satpam bertugas untuk melaksanakan pengamanan, artinya membuat area menjadi aman. Aman adalah suatu keadaan yang **BEBAS DARI GANGGUAN, BEBAS DARI ANCAMAN DAN BEBAS DARI RESIKO**.

Gangguan dan ancaman bisa berasal dari dalam dan luar area. Dari dalam seperti : penggelapan (Pencurian oleh karyawan, kehilangan, korupsi, dll), sabotase (perusakan, dll), penggunaan asset tanpa hak, dll. Dari luar seperti pencurian, perampokan, perampasan, premanisme, penyerobotan, demo massa, kerusuhan, dll.

Resiko yang bisa terjadi di tempat kerja diantaranya resiko kecelakaan, keadaan darurat, bencana alam, dll.

Satpam melaksanakan pengamanan di Pos Jaga atau tempat kerja, adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupun non fisik di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Satpam hanya bisa menjalankan fungsinya sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerja nya karena Satpam mengemban tugas kepolisian terbatas baik secara area kerja maupun kewenangannya.

### **SATPAM DALAM PELAYANAN PUBLIK**

Satpam perannya sekarang telah berkembang menjadi frontliner yang membantu pelayanan sempurna sebuah kantor, sehingga harus bersikap yang lebih ramah dan banyak senyum.

Satpam selalu menjadi orang pertama yang ditemui pelanggan saat berinteraksi dengan kantor. Oleh karena itu, kantor yang berorientasi pada pelayanan sempurna, sangat berharap pada penampilan satpam yang lebih profesional, lebih berbahasa tubuh positif, lebih tersenyum, lebih memberikan kesan yang membantu kenyamanan dan keamanan pelanggan. Intinya, satpam harus tampil dengan sikap dan perilaku yang lebih melayani harapan dan kebutuhan pelanggan, tanpa kehilangan identitas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja.

Kesan pertama yang ramah dan membantu pelanggan akan menjadi awal yang baik untuk pelayanan berkualitas. Jadi, seorang satpam, walaupun sudah menunjukkan batas wilayahnya dengan seragam dan atribut yang dipakai. Tetapi, dia haruslah melebur dalam aliran budaya institusi, juga menjwai nilai-nilai budaya dan nilai-nilai perilaku utama insan institusi, tempat dia mengabdikan sebagai satpam.

Kemampuan satpam untuk menciptakan kesan pertama yang positif kepada setiap pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya, akan membuat target pelayanan semakin mudah untuk dicapai.

Di samping itu, satpam juga harus bersikap proaktif untuk membantu tugas-tugas customer services supaya pelayanan yang lebih berkualitas dapat diwujudkan dengan baik.

Karakter atau penampilan seorang satpam haruslah ramah, tenang, bersih, rapih, berwibawa, supel, bersahabat, proaktif, membantu, terhubung, dan melayani. Dan semua ini, hanya dapat diwujudkan bila satpam terlatih untuk cerdas emosi dan berpikir lebih positif terhadap wilayah kerjanya.

Sejak mulai membukakan pintu gerbang, satpam harus tampil dengan senyum dan memberikan salam penuh persahabatan.

Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemenkes, maka Jablat Satpam adalah Petugas Keamanan dengan Kelas Jabatan 5 sementara sebelumnya adalah Grade 3.

Jangan pernah menganggap kecil peran satpam. Siapapun yang tidak melibatkan fungsi satpam untuk peningkatan kualitas pelayanan, maka dia akan gagal untuk memberikan pelayanan sempurna kepada pelanggan.

Semoga dengan peningkatan ini, Satpam di BBTKL PP Yogyakarta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.



## **Pertemuan Penyusunan Standar Biaya Keluaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2020**

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Program P2P T.A. 2020 pada tanggal 2-4 Mei 2019 di Hotel Amaroosa Kota Bekasi. Pertemuan ini dihadiri oleh peserta dari unit utama di lingkungan Ditjen P2P dan perwakilan dari 16 UPT Ditjen P2P (12 KKP serta 4 BBTCLPP yaitu: BBTCLPP Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Banjarbaru). Pada kesempatan ini, BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh 3 orang pejabat struktural eselon IV, yaitu dari Bagian TU, Bidang SE, dan Bidang ADKL, serta satu orang staf Perencana Sub Bagian Program dan Laporan. Pertemuan dihadiri juga oleh Sesditjen P2P yang memberi arahan sekaligus membuka pertemuan. Agenda lain pertemuan adalah paparan terkait SBK, yaitu: 1) Kebijakan Penyusunan SBK Tahun 2020 oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI; 2) Rambu-rambu Perencanaan Kemenkes RI 2020 (Evaluasi SBKK Kemenkes 2018) oleh narasumber dari Biro Perencanaan & Anggaran Kemenkes RI; dan 3) SBK Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TA 2020 oleh Kabag Program dan Informasi Ditjen P2P Kemenkes RI.

Paparan materi oleh narasumber dari DJA menyampaikan bahwa tujuan penyusunan SBK adalah memperoleh keseragaman Komponen/Tahapan dan besaran biaya Output/Sub Output sejenis sehingga dapat mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran melalui proses benchmarking antar waktu maupun antar Output sejenis. Untuk itu, Output/Sub Output yang akan disusun/diusulkan menjadi SBK harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, yaitu: 1) bersifat berulang; 2) mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur; dan 3) mempunyai Komponen/Tahapan yang jelas.

Lebih lanjut, narasumber dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes memaparkan materi dengan topik Rambu-rambu Perencanaan Anggaran T.A. 2020. Selain memaparkan kebijakan perencanaan anggaran tahun 2020, disampaikan pula bahwa SBK T.A. 2020 akan diusulkan oleh unit utama (Ditjen P2P) dengan batas waktu penyampaian tanggal 10 Mei 2019. Pada kesempatan tersebut, narasumber juga menyampaikan evaluasi penggunaan SBK yang sudah ada sebelumnya, yaitu tentang kemudahan dan kesulitan dalam penyusunan maupun pelaksanaan.


Paparan selanjutnya adalah kebijakan penyusunan SBK program P2P disampaikan oleh Kabag Program dan Informasi Ditjen P2P, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Output/Sub Output yang akan disusun menjadi SBK adalah Output/Sub Output yang menjadi program prioritas, antara lain HIV, TB, dan pengendalian vektor (khusus KKP) serta kegiatan surveilans (khusus B/BTKLPP). Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa SBK berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan, sedangkan dari sisi pelaksanaan berfungsi sebagai estimasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan SBK merupakan tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang mengusulkan, sehingga nantinya SBK harus diusulkan oleh satker dan anggaran untuk itu akan dialokasikan oleh unit utama. Output/Sub Output yang akan diusulkan menjadi SBK bisa merupakan SBK lama (2019) atau membuat SBK baru.

Setelah pemaparan oleh Kabag PI Ditjen P2P, acara dilanjutkan dengan penyusunan SBK. Untuk itu peserta dibagi tiga kelompok:

1. Kelompok KKP; terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok PRL yang menyusun SBK pengendalian vektor, serta kelompok PKSE dan UKLW yang menyusun SBK HIV dan TB.
2. Kelompok BBTCLPP; terdiri empat BBTCLPP menjadi satu kelompok yang membahas SBK lama, yaitu SBK Sub Output Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium. Dari hasil revidi dan diskusi kelompok, BBTCLPP menyepakati bahwa SBK ini akan diperbaiki dan diusulkan kembali menjadi SBK T.A. 2020.


Setelah selesai penyusunan SBK, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penyusunan SBK untuk dicermati bersama. Ada tiga topik pembahasan dalam diskusi, yaitu: nomenklatur usulan, kriteria, dan kebutuhan anggaran.

Berdasarkan presentasi oleh masing-masing kelompok, diperoleh hasil bahwa secara umum, seluruh usulan SBK T.A. 2019 masih relevan untuk diusulkan kembali sebagai SBK TA 2020. Khusus usulan SBK B/BTKLPP, secara substantif tidak berubah. Penyesuaian perubahan pada definisi operasional dilakukan agar diperoleh gambaran lebih jelas terhadap pelaksanaan dan keluarannya. Penyesuaian dengan menurunkan pagu anggaran SBK juga dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya.



Beberapa masukan dan usulan memberikan pengkayaan dalam proses diskusi, dimana BBTCLPP memberikan gambaran kemungkinan dapat ditambahkan menu SBK di B/BTKLPP untuk kegiatan layanan pengendalian pes di Boyolali. Melalui pembahasan dengan unit utama secara teknis dan aturan kegiatan ini cukup memenuhi, namun masih diperlukan peran Direktorat P2PTVZ dalam penentuan standar pelaksanaannya. Selain itu, B/BTKLPP bersama unit utama dalam hal ini Bagian Program dan Informasi Setditjen P2P dan Direktorat terkait kegiatan dapat mulai merancang bersama menu lain yang sudah teridentifikasi memenuhi kategori SBK seperti output kajian yang dihasilkan setiap tahun.

Acara diakhiri dengan penutupan oleh Kabag PI Ditjen P2P. Beliau berharap agar peserta menguatkan hasil kesepakatan pertemuan ini kepada masing-masing pimpinan. Dengan demikian tidak akan ada lagi anggapan bahwa penerapan SBK tidak sesuai/menyulitkan/tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai situasi di lapangan. Unit utama diminta untuk mencermati kembali perbaikan-perbaikan TOR dan RAB sesuai hasil pembahasan. Selanjutnya SBK yang sudah disusun oleh peserta tersebut akan diproses oleh unit utama untuk diusulkan ke Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, kemudian diteruskan ke DJA Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diusulkan sebagai SBK T.A. 2020.








### **Workshop Penyehatan Kesehatan Lingkungan Dan Gerakan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Terminal Penumpang Tipe A**


Pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2019 Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan Workshop Penyehatan Kesehatan Lingkungan dan Gerakan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Terminal Penumpang Tipe A. Dengan tujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan wilayah terminal penumpang tipe A. Acara dibuka oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat Ibu dr. Kirana Pritasari, M.Q.I.H., yang sekaligus memberikan arahan untuk menghindarkan masyarakat tertular penyakit pada saat dalam perjalanan melalui terminal. Maka perlu adanya kerjasama antar UPT, Dinkes, Pengelola Terminal dan Kemenkes dalam memenuhi tugas masing masing untuk mensinergikan dalam menciptakan Terminal yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal sebagai salah satu tempat berkumpul dan bertemunya banyak orang apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi faktor risiko terhadap penularan penyakit bagi para penggunanya.

Pengelolaan yang baik harus dilakukan pada setiap komponen termasuk pengelolaan makanan yang dilakukan di terminal tersebut. Pengelolaan TPM yang ada di lingkungan terminal harus memenuhi syarat kesehatan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya penyakit bawaan pangan (food borne diseases). Kegiatan pembinaan dan pengawasan TPM merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat konsumen, namun selama ini pembinaan dan pengawasan terhadap TPM tersebut belum dilakukan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya keracunan pangan yang bersumber dari TPM yang disebabkan pencemaran biologi dan kimia. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan TPM di lingkungan Terminal untuk meminimalisasi faktor risiko penyakit sehingga kejadian penyakit bawaan pangan dapat dikendalikan.



Pelaksanaan Workshop Penyehatan Kesehatan Lingkungan dan Gerakan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Terminal Penumpang Tipe A dihadiri oleh 154 orang peserta dari pusat dan daerah yang terdiri dari peserta pusat 47 orang, Dinas Kesehatan Propinsi Percontohan 8 orang, Dinas Kesehatan Propinsi 30 orang, Balai pengelolaan Transportasi Darat Wilayah dan Dinas Perhubungan Percontohan 10 orang, Balai pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 17 orang, Labkesda di Kab/Kota 8 orang, Koordinator Satuan Pelayanan 11 orang, Dinas Kesehatan Kab/Kota 19 orang dan BBTCLPP 3 orang (Yogyakarta, Jakarta dan Surabaya). Materi yang disampaikan yaitu Kebijakan Kesehatan Lingkungan di Bidang Higiene Sanitasi Pangan (Direktur Kesling), Pengelolaan TPM di Terminal Kelas A (Direktur Prasarana Jalan), Pembinaan dan Pengawasan TPM di Terminal Kelas A (Kasubdit PP), Persyaratan Kesling TFU di Terminal (Kasubdit PUTK) dan Rencana Pelaksanaan Dekon Pembinaan dan Pengawasan TPM di Terminal A (di Propinsi Jateng, Jatim, Jabar dan DKI Jakarta). Pelaksanaan Workshop Penyehatan Kesehatan Lingkungan dan Gerakan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Terminal Penumpang Tipe A ditutup oleh Kasubdit Penyehatan Pangan Ibu Tutut Indra Wahyuni, S.K.M., M.Kes.

---





## **Peringatan Hari Kesehatan Sedunia dan Pekan Imunisasi Dunia Provinsi DIY, Stadion Mandala Krida, 4 Mei 2019**

Setiap tanggal 7 April, masyarakat dunia memperingati Hari Kesehatan Dunia yang juga bertepatan dengan tanggal berdirinya organisasi kesehatan dunia WHO. Hari Kesehatan Dunia diselenggarakan untuk memperingati pendirian WHO dan dipandang sebagai kesempatan menarik perhatian dunia untuk menyadari masalah-masalah besar kesehatan global setiap tahunnya. Tema Hari Kesehatan Dunia Tahun 2019 adalah "Health for All : Everyone; Everywhere" diharapkan semua orang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mengakses kesehatan, sebagai bagian Hak Asasi Manusia.

Untuk memperingati Hari Kesehatan Sedunia, Dinas Kesehatan DIY mengadakan berbagai kegiatan diantaranya Lomba Senam Peregangan dan Flashmob.

Puncak acara peringatan hari Kesehatan Dunia Provinsi DIY tahun 2019 dilaksanakan di stadion mandala krida, diawali dengan Pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY, drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes, senaat pagi bersama "Ayo Gerak Jangan Mager" dan pameran Kesehatan yang langsung dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Instimewa Yogyakarta (DIY), Gatot Saptadi.

Kepala BBTCL PP Ypgyakarta DR. dr. Irene, MKM, bersama Kabid SE Sayekti Udi Utama, SKM, MPH beserta tim akut menghadiri Peringatan Hari Kesehatan Dunia ini.

Pada kesempatan ini juga dilakukan pemberian hadiah pada pemenang Lomba dan menampilkan Best Performance Pemenang Lomba Flasmob.




## **Presentasi Akhir DED Perencanaan Tahap II pembangunan Gedung Pelayanan dan Area Parkir BBTCLPP Yogyakarta, 6 Mei 2019**

Detail Engineering Design (DED) adalah gambar kerja detail dengan skala (perbandingan). Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan, Engineer's Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), laporan akhir tahap perencanaan, meliputi laporan arsitektur, laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test), laporan perhitungan mekanikal dan elektrik dan laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi).


Pada hari Senin 6 Mei 2019 dilaksanakan Presentasi Akhir DED Perencanaan Tahap II pembangunan Gedung Pelayanan dan Area Parkir BBTCLPP Yogyakarta. Acara langsung dibuka oleh Kepala BBTCL/PP Yogyakarta DR. dr. Irene, MKM, dihadiri oleh PT Kala Prana sebagai penyusun DED, tim BBTCL PP Yogyakarta, PTK, Tim Teknis dari Dinas PU Provinsi DIY dan Kabupten Bantul, dan Tim TP4D yang mendampingi Tahap II pembangunan Gedung Pelayanan dan Area Parkir BBTCLPP Yogyakarta sejak dari proses perencanaan.

Setelah DED ini selesai akan dilanjutkan pada Tahap Pengadaan/ Pelelangan (Procurement/Tender). Tujuan dari tahap ini adalah untuk menunjuk Kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai sub-kontraktor yang melaksanakan konstruksi di lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah



PRAKUALIFIKASI yang meliputi pemeriksaan sumber daya keuangan, manajerial dan fisik kontraktor yang potensial, dan pengalamannya pada proyek serupa, serta integritas perusahaan. Untuk proyek-proyek milik Pemerintah, Kontraktor yang memenuhi persyaratan biasanya dimasukkan ke dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) dan DOKUMEN KONTRAK, sebagai dokumen legal yang menguraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dokumen kontrak akan ada setelah terjadi ikatan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Sebelum hal itu terjadi terdapat proses pengadaan atau proses pelelangan dimana diperlukan Dokumen lelang atau dokumen tender.

---






## **Pertemuan Percepatan Eliminasi Malaria Lintas Batas Provinsi Jawa Barat- Jawa Tengah**

Dalam rangka percepatan eliminasi Malaria di daerah perbatasan, pada tanggal 6-8 Mei 2019 bertempat di Gedung Pertemuan Setda Kabupaten Pangandaran diselenggarakan acara Pertemuan koordinasi percepatan eliminasi di daerah perbatasan provinsi Jabar dan Jateng. Acara dibuka secara langsung oleh Bupati Pangandaran dengan peserta berasal dari Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jajaran Dinkes kabupaten Pangandaran, Dinkes Kabupaten Cilacap, BBTCLPP Jakarta dan BBTCLPP Jogjakarta yang dihadiri Dr,Dr Irene, MKM (Ka. Balai) dan Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes (Kabid SE), subdit Malaria Ditjen P2P dan SKPD terkait di kabupaten Pangandaran.


Dalam arahan pembukaan Bupati Pangandaran menyampaikan bahwa dalam tahun awal kepemimpinan dimana Pangandaran baru terbentuk menjadi Kabupaten Baru masih memprioritaskan program untuk penyiapan infrastruktur termasuk RS, Puskesmas dan sarana prasarana kesehatannya lainnya. Di sektor kesehatan dengan adanya program gratis pengobatan bagi warga Pangandaran sangat berhasil dalam memberikan dukungan dalam upaya pengendalian penyakit di Pangandaran. bahkan untuk mensukseskan eliminasi malaria tahun 2023 jajaran pemerintah daerah Pangandaran berkomitmen untuk mendukung melalui kebijakan dalam bentuk regulasi peraturan bupati dan perangkat di bawahnya maupun kepedulian SKPD terkait dalam upaya implementasi pengendalian malaria di masyarakat melalui pemanfaatan anggaran yang ada di masing-masing SKPD maupun penggalian Sumber Daya di Masyarakat.



Pada kegiatan ini juga disampaikan beberapa materi terkait kebijakan dan upaya percepatan malaria baik di Jabar maupun Jateng, diantaranya : Startegi Pengendalian Penyakit Malaria (subdit Malaria), Pembelajaran upaya percepatan eliminasi malaria di kawasan Bukit Menoreh (BBTKLPP Yogyakarta), Dukungan BBTKLPP Jakarta dalam percepatan eliminasi malaria di lintas batas Provinsi Jabar, Pelaksanaan pengendalian malaria di Pangandaran dan daerah Perbatasan (Dinkes Pangandaran), dan Surveilans Migrasi vektor si wilayah kerja KKP Cilacap.

Pada sesi akhir pertemuan dilanjutkan dengan diskusi dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut yang menggambarkan rencana kerja seluruh SKPD yang hadir dalam mensukseskan percepatan eliminasi malaria tahun pada tahun 2019-2023. Dalqm RTL tersebut BBTKLPP Yogyakarta juga akan berkontribusi untuk melakukan kegiatan survei resistensi insektisida pengendalian malaria tahun 2019 dan survei reseptivitas daerah endemik malaria tahun 2020 di kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

---





### **Sosialisasi Kegiatan Surveilans Leptospirosis di Kabupaten Boyolali**

Kasus Leptospirosis di Jawa Tengah merupakan kasus yang tertinggi dibanding provinsi lainnya. Tahun 2017 tercatat sebanyak 409 kasus yang tersebar se-Jawa Tengah dengan korban meninggal 65 orang dan pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi 427 kasus dengan angka kematian mencapai 89 orang (20%). Kasus Leptospirosis paling banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pati. Kabupaten Boyolali bukan merupakan penyumbang kasus leptospirosis terbanyak di wilayah Jawa Tengah, akan tetapi angka kematian meningkat dari tahun ke tahun. Dari 7 kasus di tahun 2016 dengan tidak ada kasus meninggal, meningkat menjadi 34 kasus di tahun 2017 dengan kematian kasus 9 orang dan sampai dengan bulan April 2019 ini sudah ada 10 kasus dengan kematian kasus 5 orang (CFR 50%). Hal ini mendorong BBTCLPP Yogyakarta untuk melakukan kegiatan Surveilans Leptospirosis di Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran epidemiologi leptospirosis di lokasi kegiatan. Untuk memulai kegiatan, BBTCLPP Yogyakarta dan DKK Boyolali menyelenggarakan Sosialisasi kegiatan Surveilans Leptospirosis pada tanggal 30 Mei 2019. Bertempat di Rumah Makan Kedai Padmo Jalan Nangka Gumulan, Jomboran, Kemiri, Mojosongo, Kabupaten Boyolali, pertemuan dihadiri 26 orang peserta terdiri dari struktural dan pengelola program dari DKK Boyolali, perwakilan dari Puskesmas Banyudono I, Puskesmas Banyudono II, Puskesmas Ngemplak, Puskesmas Nogosari, Puskesmas Sambi dan BBTCLPP Yogyakarta.



Pertemuan dilaksanakan dengan metode paparan, praktek dan diskusi, dengan susunan acara Pembukaan, Pengantar Kegiatan Surveilans Leptospirosis, Penjelasan Teknis Surveilans dan Alur Penemuan Kasus, Penjelasan Teknis Pengambilan dan Pengiriman Darah dan Diskusi. Acara dimulai dengan Pembukaan oleh Kabid P2, dr. Sherly J. Kilapong, disampaikan bahwa tren leptospirosis di Kabupaten Boyolali dan angka kematiannya cukup tinggi di daerah bagian selatan. Tahun ini, di Boyolali dilaporkan ada 10 kasus leptospirosis dengan CFR 50%. Harapannya tahun ini segera koordinasi dengan surveilans agar cepat menemukan kasus, pemeriksaan dan terapi lebih dini sehingga kematian tidak meningkat. Selanjutnya adalah Sambutan sebagai Pengantar Kegiatan Surveilans Leptospirosis disampaikan oleh Kepala Bidang SE, Sayekti Udi Utama, SKM., M.Kes. Disampaikan bahwa kegiatan surveilans di Kabupaten Boyolali ini adalah rangkaian kegiatan sebelumnya. Hasil kajian BBTCLPP Yogyakarta tahun 2018 menunjukkan bahwa sangat kuat kasus leptospirosis di lokasi kegiatan ditularkan oleh tikus, dibuktikan dengan serovar pada tikus sama dengan serovar yang ada pada manusia. Sehingga yang perlu diwaspadai adalah potensi bahaya yang perlu diatasi secara bersama-sama oleh karena pada binatang leptospirosis ini tidak menimbulkan penyakit. Acara dilanjutkan dengan Penjelasan Teknis Surveilans dan Alur Penemuan Kasus oleh dr. Dwi Amalia, MPH, Penjelasan tentang tatacara pembuatan surat pertanggungjawaban setiap kegiatan oleh Sukirno, SKM dan paparan terakhir mengenai Teknis Pengambilan dan Pengiriman Darah oleh E. Kristanti, ST., MSc.

Acara dilanjutkan dengan diskusi, yang menghasilkan kesepakatan bahwa kegiatan surveilans leptospirosis akan dilaksanakan selama enam bulan dari Bulan Mei-Oktober 2019. Alat dan Bahan untuk pelaksanaan kegiatan telah diserahkan kepada lima puskesmas terpilih. Sampel yang didapat oleh puskesmas dikirim ke DKK Boyolali setiap 2 minggu sekali untuk diteruskan ke Laboratorium B2P2VRP Salatiga oleh petugas DKK Boyolali.



## **Pertemuan Persiapan Peringatan Hari Malaria Provinsi Jawa Tengah**

Dalam rangka persiapan peringatan hari malaria, pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di gedung pertemuan Balai Litbangkes Banjarnegara diadakan pertemuan koordinasi stakeholder yang terlibat dalam upaya percepatan eliminasi malaria wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah ini dihadiri peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, BBTCLPP Yogyakarta (S. Udi Utama, SKM. M.Kes), Dinkes Banjarnegara, Dinkes Provinsi Jateng, Balai Litbangkes Banjarnegara, BLK Semarang, Balkesmas Magelang, Balkesmas Ambarawa dan Konsultan WHO untuk Menoreh dan Banjarnegara. Dalam arahannya Kadinkes Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rasa optimisnya di Jawa Tengah dapat mencapai eliminasi malaria pada tahun 2023. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2019 ini di Jawa Tengah telah berhasil mewujudkan 2 kabupaten yang telah berhasil lulus assessment untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Dua kabupaten tersebut adalah Cilacap dan Kebumen yang secara terus menerus sejak tahun 2016 berhasil mempertahankan tidak ada kasus malaria indigeneus di wilayahnya.

Keberhasilan ini tentunya diharapkan dapat diikuti oleh 4 kabupaten lain yang masih berjuang untuk menuju eliminasi, yaitu Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara. Khusus kabupaten Purworejo perlu mendapatkan apresiasi atas perkembangannya sejak akhir tahun 2018 telah berhasil menekan dan mempertahankan tidak ada kejadian malaria indigeneus. Pada kesempatan tersebut seluruh peserta juga sempat beraudensi secara langsung kepada Bupati Banjarnegara untuk mendapatkan dukungannya dalam percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Banjarnegara, bahkan Bupati secara langsung segera menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya untuk mengawal melalui instruksi dan kebijakan bupati agar semua SKPD mendukung gerakan percepatan eliminasi malaria sesuai tingkat dan kewenangannya masing-masing dengan memprioritaskan dukungan anggaran dan kegiatan dalam menuntaskan eliminasi malaria di Kabupaten Banjarnegara maksimal sebelum tahun 2023.



## **Apel Siaga Pengukuhan Pejabat Kekekarantinaan Kesehatan dan Saka Bakti Husada, 14 Mei 2019**

Kegiatan pada hari pertama diisi dengan kegiatan registasi peserta dilanjutkan dengan gladi Persiapan apel siaga Pengukuhan Pejabat Kekekarantinaan Kesehatan dan Saka Bakti Husada Krida P2 Kementerian Kesehatan RI dipimpin oleh Pembina dari Lakespra dan Kwarnas.

Pada hari ke dua diawali dengan kegiatan persiapan dan Apel Siaga Pengukuhan Pejabat Kekekarantinaan Kesehatan dan Saka Bakti Husada Krida P2 Kementerian Kesehatan RI dipimpin oleh Menteri Kesehatan RI.

Dalam arahannya menteri kesehatan berharap dengan dikukuhkannya Pejabat Karantina Kesehatan di harapkan segera bisa mengemban amanah untuk segera melaksanakan ketugasan sebagai Pejabat Kekekarantinaan dalam rangka menjaga ancaman terjadinya penyakit menular di pintu masuk negara maupun di seluruh wilayah tanah air dengan selalu berkoordinasi dengan penanggungjawab kesehatan di daerah. Sementara untuk segenap pengurus SBH diharapkan bisa meningkatkan peran serta pangkalan-pangkalan SBH di B/BTKLPP dan KKP di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1440 H serta membuat kegiatan kegiatan kemasyarakatan dengan pendekatan kepramukaan dalam mendukung Germas, serta tetap bugar dan khidmat saat berpuasa.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan pemberian materi tentang kesakanan SBH dan untuk pimpinan dilanjutkan dengan kegiatan Rakordit.

Pada paparan materi kesakanan SBH disampaikan materi terkait dengan petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada dan Tata cara pembentukan Pangkalan SBH di UPT oleh nara sumber dari Kwarnas.

Pada hari kedua kegiatan di akhiri dengan pelaksanaan acara keakraban dengan agenda api unggun.



### **Rakordit Paripurna Ditjen P2P, 14 Mei 2019**


Rakordit Paripurna diawali dengan penyampaian Materi oleh Sesditjen P2P, dr. Asjikin Imam Hidayat Dahlan, MHA yang meliputi optimalisasi sisa anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai ROK dan percepatan proses pengadaan.

Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab langsung dipimpin oleh Bapak Sesditjen P2P

Berikutnya arahan dari Bapak Dirjen P2P, dr. Anung Sugihantono, M.Kes yang menyampaikan SUARA DARI BUMI, SUARA DAERA, SUARA UPT, SUARA DARI LANGIT DAN SUARA HATI.

SUARA DARI BUMI menyampaikan kegiatan RAKERKESDA – RAKONTEK di Provinsi (Banjarmasin (Kalsel); Bengkulu; Palembang (SumSel); Bandar Lampung (Lampung); Semarang (Jawa Tengah); Pekanbaru (Riau); Mamuju (Sulawesi Barat); Makassar (Sulawesi Selatan); Jailolo (Maluku Utara); Palu (Sulteng); Jogjakarta (DIY); Pangkal Pinang (Babel)), Kegiatan UPT (KKP Bengkulu; KKP-BTKL Palembang; KKP Pangkal Pinang; KKP & BBTCL Banjarmasin; BTKL Makassar; KKP Jogjakarta; KKP Ternate) dan Kegiatan Pusat di daerah : Cross Boarder Meeting RDTL Timor Leste, CBM Polio di Jayapura; HTBS Borobudur Magelang; HTBS Cipasung Tasikmalaya, ITA TIME Surabaya, Rapimnas BNN Jakarta; HMS Jambore Kader Jailolo.

SUARA DAERAH menyampaikan TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN MANAJEMEN PROGRAM yaitu bentuk riil KOLABORASI baik internal dan eksternal di Daerah contoh kegiatan yang ada, mekanisme KOORDINASI INTERNAL Dinkes pemahaman konsep, pengetahuan tentang administrasi termasuk Juknis, KOMUNIKASI dan penyampaian data kepada pimpinan kasus HIV/AIDS di Sleman dan TATA KELOLA PROGRAM persepsional dan urutan langkah kegiatan




SUARA UPT menyampaikan ADA PERUBAHAN Mind set dan pola kegiatan serta semangat yaitu kejelasan PENGORGANISASIAN kapan dan bentuk, konsekwensi, jenjang karier dan belunggu tatanan adminstrasi dokter, pejabat karantina, fungsional lainnya di UPT, tantangan dan TRANSFORMASI dari pelayanan pada era baru, PENGELOLAAN ASSET termasuk sumberdaya di daerah kepemilikan dan pengelolaan

SUARA DARI LANGIT mencakup RPJMN – Konsep, Ide, Konsekwensi dan TUNTUTAN INSTITUSI, Kasus Polio – Konsep pelaksanaan dan mekanisme pembinaan atau fasilitasi daerah keseriusan dan tanggungjawab, pembahasan Organisasi BAGIAN integral dari evaluasi organisasi Kemkes sekaligus antisipasi dan pembahasan Peraturan Perundangan sense of crisis serta CARA KERJA, profesionalisma(pragmatism dan profesionalisme).

SUARA HATI yaitu penyiapan bahan pimpinan TELITI, TERTIB, TERSTRUKTUR, dan TUNTAS, pengaturan kegiatan dan penugasan SENSE OF RESPONSIBILITY dan REPRESENTATIVENESS, mekanisme komunikasi dan keterbukaan informasi RESPONSIVE dan RESPECTFULL, TATA KELOLA APBN – ROK (TERIMA KASIH – apresiasi untuk SEMUA PIMPINAN SATKER, Pahamanan akan instrument MANAJEMEN dan penerapan POLA KEPEMIMPINAN, pengelolaan perubahan dengan cara : 3 S (SPEED, SURPRISE, SUDDEN SHIFT) dan 4 C (Case, Contact, Carrier, Comm engg)

---





### **Konsultasi Pengkayaan Referensi untuk penguatan Tim Teknis dalam pendampingan Perencanaan Tahap II pembangunan Gedung Pelayanan dan Area Parkir BBTCLPP Yogyakarta, 14 Mei 2019**



Dalam rangka penyempurnaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan dan Area Parkir BBTCLPP Yogyakarta dilakukan Pengkayaan ke BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Jln. Ngalengko No 1, Perintis Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara 20236. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM, Kabag TU/PPK Dian Trikoriati, ST, MPH, dan Pejabat Penandatanganan SPM, Sayekti Udi Utama, SKM, MPH bersama Tim Teknis dan Tim Perencana.

Pada kegiatan ini Tim diterima oleh Sekretaris Badan Peningkatan SDM Provinsi Sumatera Utara didampingi pejabat struktural terkait dan konsultan perencana dan pelaksana Gedung Pelatihan BPSDM Prov. Sumut.

Lokus kegiatan adalah salah satu Instansi pemerintah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang membangun gedung pelayanan baru pada tahun 2018 dengan konstruksi yang hampir sama dengan yang direncanakan BBTCLPP Yogyakarta, yaitu bangunan Tidak sederhana berlantai V dengan kondisi daerah juga merupakan daerah yang sering ada ancaman gempa.

Hal-hal yang perlu mendapatkan pencermatan dalam perencanaan gedung tidak sederhana adalah :

1. Estimasi waktu pelaksanaan dengan memperhitungkan umur kekuatan beton untuk konstruksi 5 lantai.
2. Pembentukan tim pendamping dalam mengawal pelaksanaan pembangunan baik dari internal instansi maupun eksternal instansi seperti PU, Kejaksaan maupun APIP.
3. Expose progres kegiatan harus secara rutin dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari pihak luar terkait.

- 
4. Sebelum pelaksanaan gedung dilaksanakan seluruh dokumen terkait perijinan seperti IMB dan dokumen rencana kelola lingkungan harus sudah dipersiapkan.
  5. Dalam perencanaan bangunan gedung pelayanan harus dipertimbangkan aksesibilitas dalam pelayanan maupun bila terjadi kegawat daruratan.
  6. Dalam perencanaan harus sudah dipertimbangkan dan diproyeksikan kecukupan luas dan fungsi bangunan untuk menampung kegiatan masa depan.
  7. Dalam perencanaan lantai 4 ke atas dipertimbangkan penggunaan alat bantu dalam pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan.
  8. Dipertimbangkan mekanisme CCO terkait dengan adanya perubahan pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan perencanaan yang ada saat ini.
- 
- 



### **Pertemuan Pemangku Kepentingan Nasional Hasil Midterm Study Dampak Implementasi Teknologi *Aedes Aegypti* Ber *Wolbachia* untuk Pengendalian Vektor Dengue, di Grand Aston Yogyakarta 14 Mei 2019**

Penelitian efektifitas pengendalian demam berdarah dengue (DBD) melalui teknologi pelepasan nyamuk *Aedes aegypti* ber-*Wolbachia* ke alam (pemukiman penduduk) merupakan penelitian global dan berjangka panjang, dilaksanakan di 12 negara, salah satunya di Indonesia. Penelitian ini dipelopori World Mosquito Program (WMP) yang dulunya bernama Eliminate Dengue Program (EDP).

Di Indonesia, penelitian ini dilakukan di wilayah Yogyakarta mulai tahun 2011 hingga tahun 2024 oleh Pusat Kedokteran Tropis UGM dengan nama penelitian WMP Yogyakarta. Tahapan pelaksanaan penelitian ini dibagi atas 4 fase, yaitu: fase 1 untuk uji keamanan dan kelayakan (Oktober 2011 – September 2013)); fase 2, untuk uji pelepasan skala terbatas *Ae. Aegypti* ber-*Wolbachia* (Oktober 2013 – Desember 2015); fase 3, untuk uji pelepasan skala luas *Ae. aegypti* ber-*Wolbachia* (2016 – 2020); dan fase 4 untuk uji model implementasi (2021 - 2024).

Penelitian WMP Yogya saat ini sedang berada dalam fase 3 (uji pelepasan skala luas *Ae. aegypti* ber-*Wolbachia*) untuk membuktikan secara ilmiah apakah pelepasan secara luas *Ae. aegypti* ber-*Wolbachia* ke alam efektif menurunkan transmisi infeksi dengue di wilayah intervensi dibanding daerah kontrol. Dari pelaksanaan penelitian dalam 2 fase sebelumnya telah dihasilkan informasi bahwa teknologi pelepasan *Ae. aegypti* ber-*Wolbachia* dinilai layak dan aman (Hasil penelitian fase 1), serta *Ae. aegypti* ber-*Wolbachia* yang dilepas ke alam dapat berkembang biak di habitat alami dan memiliki kemampuan menekan replikasi virus dengue di tubuh nyamuk (Hasil penelitian fase 2).



Dari pelaksanaan fase 3 yang menggunakan 2 rancangan studi secara paralel, yaitu studi Kuasi Eksperimental dengan kelompok pembandingan dan studi Cluster Randomized Controlled Trial atau studi Applying Wolbachia in Eliminate Dengue (AWED), juga telah dihasilkan informasi hasil sementara, sedangkan hasil penelitian yang lengkap masih dalam proses evaluasi karena pelaksanaan fase 3 berlangsung sampai 2020.

Terkait dengan perolehan hasil penelitian fase 3 maka Tim Peneliti WMP Yoga menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan Nasional Hasil Midterm Studi Dampak Implementasi Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia untuk Pengendalian Vektor DBD. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mendiskusikan dan membangun kesepahaman atas pilihan-pilihan strategis bagi implementasi teknologi pelepasan *Ae. aegypti* ber-Wolbachia untuk pengendalian vektor dengue berdasarkan pada perkembangan hasil kedua studi disebut di atas (studi Kuasi Eksperimental dan AWED) dan bukti-bukti dari implementasi WPM di negara-negara lain.

Pertemuan “Pemangku Kepentingan Nasional Hasil Midterm Studi Dampak Implementasi Teknologi Pelepasan Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia untuk Pengendalian Vektor Dengue” diselenggarakan oleh Pusat Kedokteran Tropis UGM pada tanggal 14 Mei 2019 di Hotel Grand Aston Yogyakarta. Pertemuan dihadiri para pemangku kepentingan (stakeholder) utama dari berbagai institusi terkait, yaitu Kementerian Kesehatan (Ditjen. P2P yaitu BBTCLPP Yogyakarta (DR. dr. Irene, MKM, Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes, DR. Andiatu Sanusi), Kasubdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Kasubdit. Arbovirosis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kapus I), Komli Pengendalian Vektor, BBPPVRP Salatiga dan Balitbang Kelas I Banjarnegara), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Lembaga Eijkman, Tim Risk Assessment dan Dewan Riset Nasional, Lembaga dan Asosiasi Nasional: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Internasional dan Donor: WHO Jakarta, Yayasan Tahija, Pemerintah Provinsi DIY (Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dewan Riset Daerah), Pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas Kesehatan dan Bappeda Kota Yogyakarta), UGM, Fakultas Kedokteran UI, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, WMP Global, WMP Yogyakarta.

Agenda utama pertemuan berupa paparan materi dan diskusi. Informasi utama dari paparan materi, terutama hasil midterm penelitian WMP Yogyakarta bahwa intervensi melalui teknologi pelepasan nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia telah menurunkan 74% insidensi kasus DBD di daerah intervensi.

Dari temuan penelitian ini tim peneliti optimis mengusulkan ke pemangku kepentingan nasional untuk adopsi pemanfaatan Wolbachia di level nasional sebagai strategi alternatif potensial untuk pengendalian DBD dengan peta jalan menuju adopsi, yaitu melalui perluasan daerah implementasi dan mengharapkan dilaksanakan pertemuan pemangku kebijakan di level nasional.

Selain pemaparan materi dari keempat narasumber di atas, juga disediakan waktu untuk penyampaian tanggapan terhadap pelaksanaan penelitian WMP Yogyakarta. Pada kesempatan pertama, tanggapan disampaikan perwakilan dari pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili Wakil Walikota Yogyakarta. Kesempatan kedua, tanggapan disampaikan perwakilan dari masyarakat. Baik perwakilan pertama maupun kedua, semuanya memberikan tanggapan positif atas pelaksanaan WMP Yogyakarta.

Selanjutnya dilakukan diskusi tentang pelaksanaan umum, hasil midterm dan usulan tim peneliti WMP Yogyakarta tentang perluasan daerah intervensi.

Beberapa masukan dari BBTCL PP Yogyakarta dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Entomolog BBTCLPP Yogyakarta : Tim peneliti perlu memastikan secara valid bahwa penurunan insidens DBD (74%) setelah intervensi adalah benar karena hasil intervensi dengan teknologi Wolbachia, bukan karena faktor lain, mengingat pola penurunan kasus di daerah intervensi sama terjadi di daerah kontrol.
2. Kepala BBTCL PP Yogyakarta : Ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu :
  1. Pemantauan dan evaluasi nyamuk karena pada RO ini nyamuk tersebut diberi perlakuan,
  2. Agar peneliti menghitung BIAS Penelitian penurunan kasus DBD dari faktor lain, misalnya PSN yang sudah dilaksanakan Program, iklim, dll, mengingat openurunan kasus memiliki pola yang sama di daerah kuasi dan di daerah kontrol,
  3. Untuk intervensi selanjutnya, jika memungkinkan digunakan Wolbachia strain lokal dalam kerangka cegah tangkal yang mungkin belum terpikirkan selama ini.



### **Apel Pagi BBTCLPP Yogyakarta, 15 Mei 2019**

Pada hari Senin Bbtclpp Yogyakarta melaksanakan apel pagi yang langsung dipimpin oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM.

Selain memberikan arahan, pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan disiplin PNS melalui reward dan punishment serta penghargaan ruangan 5R (administrasi dan laboratorium). Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Dalam hal Disiplin PNS, kita mempunyai Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (penyempurnaan PP No. 30 Tahun 1980) tentang Disiplin PNS, bentuk disiplin bagi PNS adalah yang mengacu pada PP 53 Th. 2010 yang berisi 17 kewajiban dan 15 larangan, sebagai penyempurnaan atas 26 kewajiban dan 18 larangan sebagaimana kita pahami dulu dalam PP sebelumnya (PP 30 Tahun 2010).

Masuk kerja, sebagaimana seluruh pekerjaan lainnya, adalah kewajiban utama. Di sini, harus ada aturan yang mengatur tentang batasan kewajiban masuk kerja yang lebih tegas dan juga bentuk punishment bagi yang melang Peraturan yang baru, malah lebih tegas dan jelas lagi. Di sini tidak perlu menunggu hingga 2 bulan, atau bahkan 6 bulan. Cukup ybs tersebut tidak masuk lebih dari 46 hari, dan menghitungnya tidak perlu berturut-turut alias bisa akumulasi, maka si BS tadi bisa diproses untuk hukuman berat. Biar mas lebih jelas silahkan dibaca ini (sambil menyodorkan kertas ringkasan PP 53 Tahun 2010).

Peraturan yang baru, lebih tegas dan jelas lagi, tidak perlu menunggu hingga 2 bulan, atau bahkan 6 bulan. Cukup ybs tersebut tidak masuk lebih dari 46 hari, dan menghitungnya tidak perlu berturut-turut alias bisa akumulasi, maka bisa diproses untuk hukuman berat.

Hal paling penting dalam pembinaan kepegawaian adalah konsistensi terhadap kebijakan reward and punishment dalam rangka mewujudkan PNS yang disiplin yaitu reward kepada siapapun PNS yang telah berprestasi dan memberikan yang terbaik dalam bentuk sekecil apapun dan punishment yang diberikan kepada siapapun PNS yang melanggar.

Untuk Bulan Februari 2019.

Penerima reward pada bulan Februari 2019 adalah:

1. Nadya Regina Martanti, SKM
2. Atikah Mulyawati, SKM

Penerima punishment pada bulan Februari 2019 adalah:

1. Kliman
2. Anies Mulyani, SKM

Ruang 5R Februari 2019 adalah.

1. Ruang administrasi : Bagian TU
2. Ruang instalasi/laboratorium adalah Instalasi Biologi Lingkungan

Untuk Bulan Maret

Penerima reward pada bulan Maret 2019 adalah:

1. Ana Hidayati, SE
2. Dina Juli Retnaningsih, ST

Penerima punishment pada bulan Maret 2019 adalah:

1. Parjana
2. Rudi Priyanto, S.Si

Sedangkan untuk ruang 5R Maret 2019 adalah.

Ruang administrasi : Bidang SE  
Ruang instalasi/laboratorium adalah Instalasi Laboratorium Kimia

Pada kesempatan ini juga diserahkan SK Kenaikan Pangkat kepada PNS di lingkungan BBTCL PP Yogyakarta  
Selamat untuk para penerima reward.

Jaya BBTCL PP Yogyakarta.



### **Pertemuan Fasilitasi Hak Paten Produk Teknologi Tepat Guna B/BTKLPP di Lingkungan Ditjen P2P, Kemenkes RI, 15 Mei 2019**

Acara fasilitasi yang di laksanakan di Ruang Rapat Aula Lantai 3 BBTCL PP Surabaya, Jalan Sidoluhur Nomor 12, Kemayoran, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur secara resmi dibuka oleh Kepala BBTCLPP Surabaya DR. Harry Sanroso, SKM, M.Epid., di hadapan sekitar 45 undangan yang terdiri atas Nara sumber dari DJKI, KemenkumHam, Kepala Biro Hukormas, Kepala Biro Rokomyanmas, Kepala Bagian Pegum, Kepala B/BTKLPP se-Indonesia, peserta dari staf B/BTKLPP se-Indonesia. Kepala BBTCL PP Jogjakarta DR. dr. irene, MKM menghadiri acara ini bersama Kepala Instalasi TTG, Nur Basuki, ST, MPH.

Selanjutnya, disampaikan materi Fasilitasi Paten oleh Kepala Bagian Hukormas Setditjen P2P, Setyadi Nugroho, SH., MH yang menyampaikan perkembangan paten produk TTG di lingkungan dirjen P2P. Bahwa sejak tahun 2015-2019, Dirjen P2P telah memfasilitasi permohonan paten terhadap produk TTG B/BTKLPP se Indonesia, hingga kini, dari 13 usulan paten yang telah dimohonkan sertifikatnya, 3 di antaranya telah menerima sertifikat paten.

Dilanjutkan paparan materi inti yang disampaikan oleh Kasubdit Pemeriksaan Paten, Ibu Dian Nurfitri, S.Si. Beberapa inti materi yang disampaikan terangkum sebagai Perkembangan paten dari mulai sejarah paten di Eropa dan Amerika hingga sekarang, disertai animasi grafis dan time line perkembangan paten di Indonesia, Kemanfaatan dan keuntungan terhadap produk dan kekayaan intelektual yang dipatenkan, Jaminan perlindungan paten bagi produk yang yang dipatenkan,

Kebijakan pemberian paten, dari masa ke masa., Mekanisme pemberian Paten, mulai dari pengusulan sampai penyampaian sertifikat paten, Proses penyusunan draft paten oleh inventor (Drafting Paten), Paten terhadap produk TTG di lingkungan Kemenkes RI, khususnya B/BTKLPP dan Pembentukan Pusat Layanan Kekayaan Intelektual (sentra Paten) di Lembaga, kementerian dan Badan (K/D/L/I).

Selanjutnya dilakukan Diskusi dan Tanya jawab, dengan beberapa poin penting diantaranya :

1. Terkait dengan usulan paten, sebaiknya sistem pembiayaan di permudah mengingat penganggaran biaya paten harus melalui anggaran bersumber DIPA, sehingga dengan adanya kebutuhan pembiayaan paten yang terlalu tinggi, dirasa memberatkan satker di lingkungan Dirjen P2P.
2. Sistematika penulisan Paten, disesuaikan dengan sistematika usulan paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten, DJKI, Kemenkumham, diantaranya mencakup tentang latarbelakang invensi sampai deskripsi dan penulisan klaim invensi
3. Latar belakang pada deskripsi agar memunculkan hasil penelusuran melalui internet (on line) tentang keberadaan produk serupa yang sudah ada, temukan juga kelemahan-kelemahan dan keunggulan produk tersebut, kemudian dikaitkan dengan mengapa harus muncul invensi dari produk serupa yang sudah ada.
4. Dalam deskripsi, agar dimunculkan keunggulan invensi yang diusulkan dibandingkan dengan produk yang sudah ada, dan alasan mengapa invensi yang diusulkan bias lebih baik dan unggul.
5. Semua penjelasan yang ada di deskripsi ditulis secara berurutan berdasarkan gambar terlampir sebagai acuan penulisan deskripsi, sebab deskripsi sebenarnya merupakan penjelasan langsung dari gambar.
6. Kebijakan pembiayaan, apakah dimungkinkan untuk dibuat free, mengingat produk TTG bukan produk yang bias menguntungkan jika dikomersialisasi.
7. Dimungkinkan untuk mengundang nara sumber dari DJKI KemenkumHam RI untuk memfasilitasi workshop atau pelatihan drafting paten ke instansi atau B/BTKLPP se Indonesia agar segera dicapai percepatan paten terhadap produk-produk teknologi tepat guna di lingkungan Kemenkes RI.

Acara fasilitasi secara resmi ditutup oleh Kepala Bagian Hukormas Setditjen P2P, Setyadi Nugroho, SH., MH



### **Rapat Persiapan Pendirian Pos Kesehatan dan Bantuan Komunikasi BBTKLPP Yogyakarta, 16 Mei 2019**

Meningkatnya jumlah pengguna jalan pada saat arus mudik lebaran dapat menimbulkan masalah di bidang kesehatan. Kondisi ini perlu penanganan serius, cepat, dan tepat dari semua instansi terkait. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden No. 4 tahun 2013 tentang program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Selain itu, Kementerian Kesehatan melalui Instruksi Presiden R.I. No 3 Tahun 2004 mengenai Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran terpadu mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada dan pada tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran antara lain dengan menempatkan pos-pos kesehatan statis dan mobile pada lokasi-lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan, peningkatan efektifitas penanganan korban kecelakaan. BBTKLPP Yogyakarta, berdasarkan Permenkes RI nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 mempunyai tugas melaksanakan kesehatan mitra dimana salah satu aktivitas mitra lapangan = adalah arus mudik lebaran. Berdasarkan hal tersebut maka BBTKLPP Yogyakarta akan mendirikan Pos Kesehatan dan Bantuan Komunikasi (Poskes dan Bankom) selama mudik lebaran 1440H.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu pelibatan berbagai lintas sektor. Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan lintas sector dalam penyelenggaraan Poskes dan bankom, tanggal 16 Mei 2019 BBTCLPP Yogyakarta mengadakan rapat persiapan dan pendirian Poskes dan Bankom dengan mengundang berbagai lintas sektor yang terkait. Pertemuan dilaksanakan di Aula kantor BBTCLPP Yogyakarta dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang terdiri dari perwakilan dari Diskes DIY, DKK Bantul, BPBD Bantul, Puskesmas Sedayu 1, Polsek Sedayu, Koramil Sedayu, SMA Dharma Amiluhur, Kecamatan Sedayu, PMI DIY, Gerakan Pramuka Kwarda DIY, dan PARKIT 832. Pertemuan diawali dengan sambutan dari Kepala BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi, Sayekti Udi Utama, SKM., M.Kes. Disampaikan bahwa Kegiatan Poskes dan Bankom merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun pada musim mudik lebaran. Dan tahun 2019 ini merupakan tahun ke lima pendirian poskes dan bankom. Konsep kegiatan Poskes adalah Pencegahan yang sesuai dengan tupoksi BBTCLPP Yogyakarta sedangkan tujuan Kegiatan Poskes yaitu memberikan Pelayanan promotive dan preventif berupa pengecekan tensi dan gula darah, serta pertolongan pertama dan memberikan pelayanan kecepatan rujukan. Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai gambaran pelaksanaan Poskes dan Bankom oleh Kepala Bidang SE. Disampaikan bahwa Poskes dan Bankom akan didirikan di lokasi sebagaimana tahun sebelumnya yaitu di Jl. Wates Km.9 Bantul. Dukungan sarana, prasana, petugas dan supervisi kegiatan dari berbagai lintas sektor baik di kecamatan Sedayu, kabupaten Bantul maupun di DIY sangat dibutuhkan untuk memastikan pelayanan di Poskes dan Bankom berjalan lancar. Acara dilanjutkan dengan diskusi untuk penyepakatan teknis pelaksanaan Poskes dan Bankom. Dari hasil diskusi disepakati operasional Poskes tanggal 31 Mei-7 Juni 2019, dengan unsur petugas yaitu dari BBTCLPP Yogyakarta, PMI, PARKIT 832, Gerakan Pramuka Kwarda DIY dan Forum Pengurangan Risiko bencana (FPRB) Desa Argomulyo Bantul, alat dan bahan untuk pelayanan dari Poskes akan disediakan oleh BBTCLPP Yogyakarta. Selanjutnya acara ditutup dengan pembacaan hasil kesepakatan.





## **Pertemuan Rencana Perluasan Cakupan Surveilans Japanese Encephalitis di D.I. Yogyakarta**

Japanese Encephalitis (JE) adalah penyakit peradangan otak yang disebabkan oleh virus JE yang termasuk Arbovirus grup B dari famili Flaviviridae. Virus JE ditularkan oleh nyamuk, terutama dari genus Culex. Siklus hidup virus melibatkan burung air dan hewan ternak sebagai reservoir.

Gejala awal JE ditandai dengan demam tinggi mendadak, diikuti nyeri kepala, penurunan kesadaran, kejang, fotopobia dan muntah-muntah. Infeksi JE bisa berkembang menjadi ensefalitis, dan pada kondisi tersebut Case Fatality Rate (CFR) bisa mencapai 30% dan dapat meninggalkan gejala sisa.

Indonesia merupakan daerah endemis JE. Sejak tahun 2014, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memulai pelaksanaan Surveilans Sentinel JE (S3JE) untuk mengidentifikasi besaran permasalahan dan karakteristik kasus JE di Indonesia. Saat ini, S3JE dilaksanakan di 11 provinsi di Indonesia, termasuk di DIY dan Provinsi Jawa Tengah. Di DIY, RS sentinel yang ditunjuk adalah RSUP Dr. Sardjito, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah adalah RSUP Dr Kariadi. Sejak tahun 2018, BBTCLPP Yogyakarta terlibat sebagai pelaksana surveilans dan laboratorium pengujian spesimen suspek kasus JE.

Pada tahun 2019 ini, akan dilaksanakan pengembangan jejaring S3JE di DIY, dengan melibatkan lebih banyak rumah sakit sebagai sentinel. Untuk itu, pada tgl 17 Mei 2019, petugas Sub Direktorat Arbovirosis Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2PTVZ) Kementerian Kesehatan RI dan BBTCLPP Yogyakarta melakukan advokasi untuk penguatan S3JE di DIY ke Dinas Kesehatan DIY. Tim S3JE yang dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Arbovirosis (dr. Guntur Argana, M.Kes.) ditemui oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY (drg. Pembayun Setyaning Astutie M.Kes.), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes DIY (drh. Berty Murtiningsih, M.Kes.), dan Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinkes DIY (Trisno Agung Wibowo, S.K.M., M.Kes.). Dalam pertemuan tersebut, didiskusikan mengenai rencana Sosialisasi Penguatan S3JE dan pemilihan rumah sakit sentinel tambahan untuk kepentingan tersebut.

Pada akhir pertemuan, disepakati bahwa sosialisasi akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Juni 2019 dengan melibatkan RSUD dari lima kabupaten/kota dan beberapa rumah sakit swasta di DIY. Rumah sakit yang akan dilibatkan di S3JE akan ditentukan berdasarkan data sekunder dari kegiatan S3JE tahun-tahun sebelumnya, dan jumlah rumah sakit yang akan dilibatkan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.



## **Pertemuan Penguatan Jejaring dan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Cacar Monyet (Monkey Pox) di BTKL PP Kelas I Batam, 19 Mei 2019**

Pertemuan diawali dengan penyampaian Laporan Pelaksanaan oleh Kepala BBTCL Batam, Slamet Mulsiswanto, SKM, M.Kes, bahwa untuk Kesiapsiagaan dan Jejaring BBTCL PP Kelas I Batam Dalam Menghadapi Kewaspadaan Dini Penyakit Cacar Monyet (Monkey Pox), BBTCL PP Batam melaksanakan kegiatan ini.

Dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dari Kepala Dinas Kota Batam dr. Didi Kusmarjadi, Sp. OG dan sambutan dari Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau DR. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes, sekaligus membuka acara secara resmi.

Presentasi Pertama disampaikan oleh dr. Chita Septiawati, MKM (Subdit Penyakit Infeksi Emerging) dimoderatori oleh Kepala BBTCL PP Jakarta, Zainal Ilyas Nampira, SKM, M.Kes, dengan beberapa hal yang disampaikan :

1. Monkeypox pertama kali ditemukan tahun 1958 di Denmark ketika ada dua kasus seperti cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian, sehingga cacar ini dinamakan 'monkeypox.'
2. Monkeypox merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan oleh virus ke manusia dari hewan seperti monyet dan hewan pengerat (rodent) melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh atau lesi kulit hewan yg terinfeksi, dan mengonsumsi daging hewan liar yang terkontaminasi (bush meat).
3. Penularan antar manusia sangat mungkin, namun jarang.
4. Virus monkeypox dapat ditularkan ke manusia ketika ada kontak langsung dengan hewan terinfeksi (gigitan atau cakaran), pasien terkonfirmasi monkeypox, atau bahan yang terkontaminasi virus (termasuk pengolahan daging binatang liar). Masuknya virus adalah melalui kulit yang rusak, saluran pernapasan, atau selaput lendir (mata, hidung, atau mulut).

5. Masa inkubasi : biasanya 6 – 16 hari, tetapi dapat berkisar dari 5 – 21 hari
  - Fase Prodromal (1-3 hari) : Demam, Sakit kepala hebat, Limfadenopati (pembengkakan kelenjar getah bening), Nyeri punggung, Nyeri otot dan lemas.
  - Fase erupsi (Fase paling infeksius) : Ruam atau lesi pada kulit biasanya dimulai dari wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya secara bertahap; mulai dari: bintik merah seperti cacar (makulopapula), lepuh berisi cairan bening (blister), lepuh berisi nanah (pustule), kemudian mengeras (krusta) atau keropeng lalu rontok. Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai periode lesi tersebut menghilang dan rontok.
6. Monkeypox biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14 – 21 hari.
7. Secara klinis, sulit dibedakan dengan penyakit ruam lain, seperti cacar Smallpox (meskipun sudah dieradikasi), cacar air, campak, infeksi kulit akibat bakteri, kudis, sifilis, dan alergi terkait obat.
8. Diagnosis tepat hanya dapat dilakukan secara pasti melalui pemeriksaan laboratorium rujukan.
9. Spesimen diagnostik yang optimal berasal dari lesi - usapan cairan dari eksudat lesi atau KRUSTA yang disimpan dalam tabung kering dan steril (tidak menggunakan media transportasi virus / VTM) dan harus dijaga agar tetap dingin.
10. Darah dan serum dapat digunakan tetapi seringkali tidak dapat disimpulkan karena durasi viremia yang pendek dan TIMING pengumpulan spesimen.
11. Untuk menafsirkan hasil tes, sangat penting untuk melengkapi informasi pasien pada pengantar spesimen, seperti: perkiraan tanggal timbulnya demam, tanggal timbulnya ruam, tanggal pengumpulan spesimen, status saat ini dari individu (tahapan ruam), dan usia.
12. Perawatan penderita monkey pox
  - Tidak ada pengobatan khusus atau vaksinasi yang tersedia untuk infeksi virus monkeypox.
  - Pengobatan simptomatik dan suportif dapat diberikan untuk meringankan keluhan yang muncul.
  - Pasien Monkeypox dapat dirawat di ruang isolasi untuk mencegah penularan terutama pada fase erupsi.
  - Biasanya pasien berada dalam kondisi penurunan daya tahan tubuh, sehingga rentan terkena infeksi nosocomial.
13. Pencegahan monkey pox
  - Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol.
  - Menghindari kontak langsung dengan tikus atau primata dan membatasi pajanan langsung dengan darah atau daging yang tidak dimasak dengan baik.
  - Menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi, termasuk tempat tidur atau pakaian yang sudah dipakai penderita.

- Menghindari kontak dengan hewan liar atau mengonsumsi daging yg diburu dari hewan liar (bush meat)
- Pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit agar segera memeriksakan dirinya jika mengalami gejala-gejala demam tinggi yang mendadak, pembesaran kelenjar getah bening dan ruam kulit, dalam waktu < 3 minggu setelah kepulangan, dan menginformasikan riwayat perjalanannya
- Petugas kesehatan agar menggunakan sarung tangan, masker dan baju pelindung saat menangani pasien atau binatang yang sakit.

#### 14. Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC)

- Telp : 0214257125 - 02142877588
- WA : 0878-0678-3906
- Surel : poskoklb@kemkes.go.id

Presentasi Kedua disampaikan oleh Triyani S, S.Si (Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2019) dimoderatori oleh Kepala BBTKL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM tentang Tata Cara Penanganan Sample Cacar Monyet (Monkey Pox) mnb dengan beberapa hal yang disampaikan :

##### 1. Jenis sampel :

- Prodrome (gejala awal/onset): swab jaringan tonsil, swab nasofaringeal, serum akut dan whole blood
- Ruam: lesi dari berbagai lokasi di tubuh atau dari lesi yang tampak berbeda dengan lesi lainnya.
- Makula atau papula : swab jaringan tonsil, biopsi lesi, serum akut dan whole blood
- Vesikel (gelembung) atau pustule (bintil): cairan lesi, biopsi lesi, atau lesion roof, serum akut dan whole blood.
- Keropeng atau kerak : lesi keropeng atau kerak, serum akut dan whole blood.
- Post-rash (pasca ruam): serum konvalesen

##### 2. Jenis sampel untuk pemeriksaan PCR : Swab nasofaringeal, swab vesicular lesi dan serum

##### 3. Standar keamanan laboratorium minimum untuk pemeriksaan Monkeypox adalah BSL-2 dengan standar tata laksana BSL-3.

##### 4. Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan : sarung tangan, jas lab sekali pakai (disposable), masker, pelindung wajah.

##### 5. Metode pemeriksaan : Polymerase Chain Reaction, ELISA

##### 6. Defenisi Kasus Cacar Monyet

- Tersangka monkeypox (suspected case):

Penderita dengan riwayat demam akut, diikuti dengan ruam vesiculopustular pada wajah, telapak tangan dan khaki.

- Kasus terkonfirmasi (Confirmed case):

Kasus tersangka dengan hasil konfirmasi laboratorium positif yang dibuktikan dengan IgM positif, PCR, atau isolasi virus)

- Kasus Kontak (Contact Case)

Seseorang yang tidak memiliki gejala namun memiliki riwayat dan sedang kontak dengan kasus tersangka atau cairan tubuh dari penderita dalam waktu 3 (tiga) minggu terakhir (misal dengan cairan luka, cairan mulut, sisa kunyahan makanan, urine, tinja, muntahan, darah, atau kontak seksual)

7. Pengiriman specimen dengan menyertakan formulir (terlampir)
  - Formulir harus diisi lengkap
  - Formulir harus dikirimkan bersama dengan specimen
8. Pengambilan Spesimen
  - Jenis specimen pemeriksaan : Swab nasopharyngeal, Swab vesicular lesi, Serum.
  - Alat Pelindung Diri : Gloves, Jas Lab, Masker, Google atau penutup muka
9. Swab Lesi (Krusta, Cairan Luka)
  - Alat : Tabung steril 1.8ml cryotube, Swab dacron steril, Label, Jarum 26 G atau scalpel, Saline steril, Kasa steril
  - Cara Pengambilan Spesimen
    - Posisikan penderita pada posisi nyaman
    - Usap lesi dengan kasa yang dibasahi saline
    - Pecahkan lesi dengan jarum/scapel
    - Apus cairan lesi dari dasar lesi dengan dacron steril
    - Masukkan swab ke dalam tabung steril tanpa medium (kering)
    - Simpan suhu 4-8oC
    - Kirimkan spesimen segera pada suhu 4-80C.
10. Swab Nasopharyngeal
  - Alat
    - Swab dacron steril
    - Tabung steril ukuran 1.8 ml
    - Label
  - Cara Pengambilan
    - Siapkan swab dacron steril.
    - Penderita duduk (kalau anak-anak dipangku), kepala ditengadahkan sampai muka menghadap keatas
    - Masukkan swab ke hidung agak dalam, diamkan beberapa detik lalu putar sambil swab ditarik keluar
    - Masukkan swab ke tabung steril tanpa medium (kering).
    - Simpan pada suhu 4-80C dan segera kirimkan
11. Pengambilan serum
  - Alat
    - tourniquet
    - jarum disposable
    - vacutainer
    - holder plastic untuk jarum
    - kapas alkohol
    - band-aid
    - tempat sampah biologis
12. Pengepakan dan Pengiriman (terlampir)
13. HASIL KRITIS, Hubungi PHEOC di +6287806783906


Selanjutnya dilakukan Diskusi dan Tanya Jawab dan diambil kesepakatan untuk Kesiapan Menghadapi Kewaspadaan Dini Penyakit Cacar Monyet (Monkey Pox)



### **Pemeriksaan Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Arus Mudik Lebaran Pada Pengemudi di Kabupaten Sragen**


Dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu, berdasarkan Instruksi Presiden R.I. No. 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu, salah satu tugas dari Kementerian Kesehatan R.I. adalah mendukung pengecekan kesiapan (kesehatan) pengemudi di terminal. Pada Tahun 2019 ini, BBTCLPP Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan R.I. melaksanakan Pemeriksaan Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas (FR KLL) Arus Mudik Lebaran di Kabupaten Sragen. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 Mei 2019 di Terminal Pilangsari Kabupaten Sragen. Sasaran pemeriksaan FR KLL adalah pengemudi angkutan umum lebaran Antar Kota-Antar Provinsi (AKAP) di terminal Pilangsari yang akan melakukan perjalanan. Pada kegiatan ini BBTCLPP Yogyakarta berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kabupaten Sragen. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan apel siaga yang diikuti oleh seluruh tim yang terlibat.

Kegiatan pemeriksaan FR KLL diawali dengan pemeriksaan fisik kendaraan dan kelengkapan dokumen perjalanan pada PO. Bus yang beroperasi melakukan perjalanan selama masa mudik lebaran oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Sragen. Pengemudi baik utama maupun cadangan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan antara lain pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, amphetamine dalam urine, dan alkohol pernafasan oleh tim dari BBTCLPP Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.



Sebanyak 54 responden berhasil diperiksa, terdiri dari pengemudi Bus AKAP dan AKDP sebanyak 80%, pengemudi angkot 17% dan travel agent 3%. Dari pemeriksaan ini diperoleh hasil 17% responden memiliki tekanan darah kategori hipertensi ( $> 140/90$  mmHg), 24% responden memiliki kadar gula darah sesaat melebihi normal ( $> 200$  mg/dL), dan 9% pengemudi terdeteksi positif alkohol pernafasan yaitu pengemudi Bus AKAP/AKDP. Pada pemeriksaan amphetamine dalam urin, seluruh pengemudi memiliki hasil negatif. Pada pengemudi dengan hasil pemeriksaan kesehatan berisiko diberikan layanan konseling oleh dr. Sri Subekti, M.Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Pada konseling ini diperoleh informasi bahwa kandungan alkohol yang terdeteksi pada pengemudi berasal dari obat batuk yang dikonsumsi pengemudi bukan dari minuman keras dan faktor kelelahan serta kurang tidur yang memicu tekanan darah beberapa pengemudi masuk pada kategori hipertensi. Rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan untuk meminimalisir risiko KLL antara lain pengemudi diharapkan dapat beristirahat dengan cukup minimal setiap 4 jam perjalanan, kontrol kesehatan secara rutin, dan menjaga stamina. Secara keseluruhan, seluruh pengemudi dinyatakan sehat dan direkomendasikan boleh melanjutkan perjalanan.

---





### **Koordinasi ke Dinkes Provinsi DIY dan BBVET Wates Dalam Penanggulangan KLB Antraks, Jumat, 24 Mei 2019**

Beberapa kejadian dialami berbagai negara di dunia berkaitan penyakit menular, termasuk penyakit bersumber hewan (zoonosis). Kejadian tersebut menyebabkan kerugian besar baik dalam hal sosial-ekonomi, keamanan, serta hilangnya nyawa manusia. Tantangan di bidang kesehatan bisa mempengaruhi aspek pembangunan lain yang lebih luas, seperti keamanan dan stabilitas ekonomi.


Konsep One Health. Perlu diketahui, konsep One Health (satu kesehatan) didefinisikan sebagai suatu upaya kolaboratif dari berbagai sektor, utamanya kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan yang optimal.

Penyakit Zoonosis, atau penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Dunia telah mencatat adanya pandemi antara lain Severe acute respiratory syndrome (SARS), Flu babi (H1N1) yang disebabkan virus influenza tipe A, Ebola, Polio, Mers-COV, dan yang baru-baru ini muncul adalah virus Zika.

Beberapa penyakit menyebar dengan cepat antara lain karena kurangnya kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon dari sebagian besar negara, termasuk negara-negara yang terkena dampak.

Penting bekerja sama memperkuat kemampuan semua negara di dunia untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman kesehatan masyarakat secara global, baik ancaman biologi, kimia, maupun fisik. Selain itu perlu perubahan pemikiran dalam penanganan penyakit zoonosis ini. Dengan konsep one health penanganan penyakit dilakukan melalui kolaborasi multidisiplin dan multisektor, bekerja secara holistik, bergandengan tangan menuju tujuan yang sama dan tindakan yang diperlukan untuk diimplementasikan di masyarakat.






Pengendalian penyakit zoonosis dan antimicrobial resistance (AMR) memerlukan kolaborasi multisektor, tidak hanya terbatas pada kesehatan dan pertanian, tetapi juga dengan kehutanan, lingkungan dan pendidikan. Mulai dari pengawasan terintegrasi pada manusia dan hewan untuk mengatasi kejadian Avian Influenza, Rabies, dan kasus atau wabah Anthrax; penyelidikan epidemiologi wabah pada manusia dan epidemi pada hewan yang terintegrasi; pelatihan terintegrasi untuk sumber daya kesehatan dan pertanian tentang manajemen kasus gigitan hewan dan pengawasannya. Hal-hal tersebut adalah contoh dari apa yang dapat dilakukan oleh setiap negara untuk menangani kasus penyakit zoonosis.

Seperti halnya pengalaman banyak negara berkembang, penyakit zoonosis masih menjadi masalah kesehatan penting di Indonesia, menjadi dilema bagi sektor kesehatan manusia dan hewan. Bagaimanapun juga, morbiditas dan mortalitas pada manusia yang disebabkan penyakit zoonosis tertentu, seperti Avian Influenza (AI) atau lebih dikenal dengan sebutan Flu Burung juga penyakit Leptospirosis cenderung menurun selama dekade terakhir.

Pemerintah Indonesia didukung oleh masyarakat telah berupaya intensif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis pada manusia dan hewan sejak lebih dari 5 dekade yang lalu.

---





## Sosialisasi Kegiatan Surveilans Leptospirosis di Kabupaten Sleman

Kasus Leptospirosis di DIY meningkat cukup tinggi yaitu dari 116 kasus di Tahun 2016 meningkat menjadi 295 kasus di tahun 2017. Demikian halnya dengan kasus leptospirosis di Kabupaten Sleman tercatat ada 2 kasus di tahun 2016 dengan tidak ada kasus meninggal dan meningkat menjadi 48 kasus di tahun 2017 dengan kematian kasus 10 orang. Hal ini mendorong BBTCLPP Yogyakarta untuk melakukan kegiatan Surveilans Leptospirosis di kabupaten Sleman. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran epidemiologi leptospirosis di lokasi kegiatan. Untuk memulai kegiatan, BBTCLPP Yogyakarta dan DKK Sleman menyelenggarakan Sosialisasi kegiatan Surveilans Leptospirosis pada tanggal 25 Mei 2019. Bertempat di Aula POAK Kabupaten Sleman, Pertemuan dihadiri 21 orang peserta terdiri dari struktural dan pengelola program dari DKK Sleman, perwakilan dari Puskesmas Godean I, Godean II, Prambanan dan Moyudan, dan BBTCLPP Yogyakarta. Pertemuan dilaksanakan dengan metode paparan, praktek dan diskusi, dengan susunan acara Pembukaan, pengantar Kegiatan Surveilans Leptospirosis, Penjelasan Teknis Surveilans dan Alur Penemuan Kasus, Penjelasan Teknis Pengambilan dan Pengiriman Darah dan Diskusi.

Acara dimulai dengan Pembukaan oleh kasie P2PM, Dul zaini, S.Kep, disampaikan bahwa di Tahun 2019 ini ada 6 kasus leptospirosis dengan 1 kematian di Kabupaten Sleman pada bulan Februari. Kasus berasal dari Puskesmas Moyudan, Godean I, Cangkringan dan Minggir. Beberapa upaya telah dilakukan oleh DKK Sleman agar kasus Leptospirosis tidak semakin meningkat di Kabupaten Sleman. Selanjutnya adalah Pengantar Kegiatan Surveilans Leptospirosis disampaikan oleh Kasie Advokasi dan KLB, Dien Arsanti, SKM., M.Env dan dilanjutkan dengan Penjelasan Teknis Surveilans dan Alur Penemuan Kasus oleh dr. Ratna Wijayanti, MPH. Paparan terakhir mengenai Teknis Pengambilan dan Pengiriman Darah oleh Dwi Susilowati, AMAK. Acara dilanjutkan dengan diskusi, yang menghasilkan kesepakatan bahwa kegiatan surveilans leptospirosis akan dilaksanakan selama enam bulan dari Bulan Mei-Oktober 2019. Alat dan Bahan untuk pelaksanaan kegiatan telah diserahkan kepada enam puskesmas terpilih. Sampel yang didapat oleh puskesmas diharapkan dikirim ke BBTCLPP Yogyakarta setiap 2 minggu sekali untuk diteruskan ke Laboratorium B2P2VRP Salatiga oleh BBTCLPP Yogyakarta.



## **Pemetaan Luas Wilayah Reseptifitas Malaria, Uji RDT Malaria dan Public Hearing Penyusunan Peraturan Bupati Malaria di Kabupaten Banjarnegara, 26 - 27 Mei 2019**

Malaria merupakan masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 25 April sebagai hari Malaria Sedunia (HMS). Pencanangan "Menuju Indonesia Bebas Malaria" tahun 1998 langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian terbit Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030.

Di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah layanan BBTCL PP Yogyakarta. Setidaknya masih ada 4 kabupaten yang masih endemis malaria di Provinsi ini yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

Pada tanggal 26-27 Mei 2019, Kepala BBTCL PP Jogjakarta, DR. Dr. Irene, MKM bersama dengan Kabid Surveilans Epidemiologi, Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes melakukan supervisi kegiatan survei reseptifitas dan uji RDT di Kabupaten Banjarnegara. Dalam kesempatan ini Kepala BBTCL PP Jogjakarta juga memberikan masukan pada Public Hearing penyusunan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Banjarnegara.

### **Pemetaan Luas Wilayah Reseptifitas Malaria**

Kegiatan pemetaan luas wilayah Reseptifitas dimaksudkan agar memperoleh gambaran tentang wilayah memiliki faktor risiko lingkungan untuk malaria sekaligus prediksi tentang kemungkinan terjadinya dampak kesehatan masyarakat berkenaan penyakit malaria dengan kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat eliminasi malaria di Kabupaten Banjarnegara.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan

Koordinasi ke Dinkes Banjarnegara Untuk Penentuan lokasi dan penentuan pendamping.

Survei kepadatan jentik vektor Malaria

Mendata jenis perindukan dan pemetaan luas Perindukan

Pemetaan perindukan habitat Vektor Malaria

Uji Rapid Diagnostik Test (RDT) Malaria

Salah satu Kebijakan Program Pengendalian Malaria untuk mencapai tujuan eliminasi malaria di Indonesia adalah semua penderita malaria klinis yang ditemukan dan dilakukan pencarian oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus dilakukan diagnosis atau konfirmasi secara mikroskopik. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki kemampuan pemeriksaan mikroskopik dilakukan dengan diagnosis cepat (Rapid Diagnostic Test / RDT), sehingga tidak ada lagi pengobatan penderita malaria tanpa konfirmasi laboratorium untuk mencegah terjadinya resistensi obat malaria.

Kualitas pelayanan mikroskopik malaria dan RDT sangat diperlukan dalam menegakkan diagnosis dan sangat tergantung pada kompetensi dan kinerja petugas laboratorium di setiap jenjang fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan laboratorium pemeriksaan malaria yang berkualitas dilakukan melalui pengembangan jejaring dan pemantapan mutu laboratorium pemeriksa mikroskopik malaria mulai dari tingkat pelaksana seperti laboratorium Puskesmas, Rumah Sakit serta laboratorium kesehatan swasta sampai ke laboratorium crosschecker di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat perlu dilakukan secara terus menerus, untuk itu BBTCL PP Jogjakarta melakukan uji pemeriksaan RDT yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Tim BBTCL PP Jogjakarta langsung dipimpin oleh Kabid Pengembangan Teknologi dan Laboratorium (PTL), Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc bersama Kasi pengendalian Penyakit, Rudi Priyanto, S.Si serta dr. Nur Subagyo HS, M.P.H dan Yulianta, S.ST.

Public Hearing Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Eliminasi Malaria

Pada kesempatan ini Kepala BBTCL PP Jogjakarta juga memberikan masukan pada public hearing penyusunan Peraturan Bupati Tentang Eliminasi Malaria. Guna memaksimalkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, perlu diadakannya public hearing untuk menampung masukan, kritikan dan saran terhadap rancangan peraturan yang sedang disusun.

Oleh karena itu Bagian Hukum menggelar Publikasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria, yang diinisiasi oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara Syahbudin Ismoyo SH, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 di Ruang Rapat Sekda Banjarnegara. Acara ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banjarnegara, Nurul Aini, SH, MM.

Acara ini dihadiri oleh SKPD di Kabupaten Banjarnegara, universitas, Ormas, Tokoh Masyarakat dan juga dihadiri oleh Kepala Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Ambarawa yang memiliki ruang lingkup kerja kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, dr. Sigit Armunanto dan Konsultan WHO untuk Menoreh dan Banjarnegara.

BBTKL PP Jogjakarta sebagai UPT Kemenkes dibidang Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang mempunyai wilayah layanan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY menyambut baik adanya Perbup dan dilakukannya Public Hearing ini. Beberapa masukan yang disampaikan adalah:

1. Malaria masih menjadi masalah kesehatan sebagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan baik oleh masyarakat, swasta maupun Pemerintah.
2. Kabupaten Banjarnegara merupakan Daerah Endemis malaria yang memang perlu percepatan untuk mencapai Eliminasi malaria.
3. Untuk itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/ IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria maka eliminasi penyakit malaria di Pulau Jawa harus dapat dicapai pada Tahun 2015.
4. Sebagai tindak lanjut dari Permenkes tersebut Kabupaten/kota harus menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Eliminasi Malaria, yang juga menjadi salah satu syarat pada saat penilaian eliminasi malaria setelah tidak adanya kasus indogenous selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu Adanya peraturan daerah atau peraturan perundangan lain yang mendukung dan menjamin tersedianya dana secara berkesinambungan untuk pemeliharaan eliminasi malaria (mencegah penularan kembali).
5. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menentukan agar otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
6. Eliminasi malaria terdiri dari 4 tahap meliputi eradikasi, pre-eliminasi, eliminasi, dan pemeliharaan malaria. Kegiatan pemeliharaan malaria misalnya mencegah transmisi malaria dengan memberantas tempat perindukan nyamuk, peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan faktor risiko dengan proteksi terhadap malaria, dan Komunikasi-Informasi dan Edukasi.

7. Peran aktif daerah untuk melakukan kegiatan eliminasi malaria sangat diharapkan, yaitu:

- Menyusun prosedur standar operasional eliminasi malaria di wilayah kabupaten/kota dalam suatu komitmen yang dituangkan dalam perundang-undangan daerah.
- Melaksanakan kegiatan eliminasi malaria.
- Menggerakkan potensi Sumber Daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan eliminasi malaria.
- Mengkoordinasikan kegiatan eliminasi malaria dengan lintas program dan sektor terkait.
- Melaksanakan sistem kewaspadaan dini.
- Menyediakan sarana dan prasarana dalam eliminasi malaria termasuk penanggulangan KLB serta pendistribusiannya.
- Melaksanakan penanggulangan KLB, bencana, dan pengungsian.
- Melaksanakan jejaring Surveilans Epidemiologi dan Sistem Informasi Malaria.
- Memfasilitasi tercapainya akses penemuan dan pengobatan bagi semua penderita.
- Melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam eliminasi malaria termasuk manajemen terpadu balita (MTBS) dan ibu hamil sakit malaria bagi tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar dan rujukan (dokter, perawat, bidan).
- Melakukan pemetaan daerah endemik, potensi KLB, dan resisten.
- Melaksanakan survei-survei (Dinamika Penularan, MBS/MFS, Resistensi Insektisida, Entomologi, dan lain-lain).
- Melakukan pengadaan dan pendistribusian bahan dan alat, termasuk obat anti malaria dan insektisida.
- Menyiapkan Juru Malaria Desa dan kader posmaldes di desa-desa endemik terpencil dan tidak terjangkau pelayanan petugas kesehatan.
- Melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan asistensi bagi sektor swasta, LSM, Organisasi profesi, Civil Society, dan Organisasi lain yang terkait.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya eliminasi malaria dalam pencapaian status eliminasi di wilayahnya.
- Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pencapaian program eliminasi malaria di wilayah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

8. Peraturan Bupati ini diharapkan sebagai penggerak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.

9. Dengan adanya Perbup, Pemda Banjarnegara bisa lebih maksimal dalam menanggulangi potensi terjadinya penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles ini.

10. Dengan adanya Perbup Pemda Banjarnegara dapat menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan penyakit malaria.

11. Dengan adanya payung hukum, ke depan diharapkan Pemda Banjarnegara bisa lebih fokus dalam menyusun program-program khusus untuk memberantas penyakit malaria.
12. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 17, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Bupati (Perbup) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi. Perbup disusun untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau kuasa atas peraturan perundang-undangan.
13. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik secara lisan dan/atau tertulis melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi
14. Public Hearing ini penting karena memperkuat basis atau dasar akademik yang dapat menjadi payung hukum dan partisipasi publik dengan mendahulukan penjangkaran aspirasi publik.
15. Dengan public hearing ini diharapkan Perbup ini nantinya benar-benar dapat diimplementasikan, tidak hanya menjadi sebuah “produk” saja



## **Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, BBTCL PP Yogyakarta, 1 Juni 2019**

Pagi Hari Panen Buah Kiwi  
Pohonnya Dekat Jendela  
Hari Ini Tanggal Satu Juni  
Hari Lahirnya Pancasila

Tanggal 1 Juni adalah Hari Kelahiran Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, bangsa ini diharapkan dapat menghayati dengan mendalam makna kesatuan dan persatuan, dimana warganya dengan latar belakang yang majemuk dapat bertemu, saling memahami dan bersepakat. Merayakan hari Pancasila berarti kita menguatkan fondasi berbangsa, dan merasakan indahnya bersatu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan masyarakat beragam untuk mencapai cita-cita bangsa. Dengan semangat persatuan dan gotong-royong, peringatan hari lahir Pancasila Tahun 2019 ini juga dimaksudkan untuk merekatkan persatuan bangsa yang didukung oleh semangat kebersamaan dan saling menunjang. Dengan demikian masyarakat dapat melihat bahwa Pancasila telah menjadi inspirasi untuk bersatu.

Sabtu, 1 Juni 2019, bertempat di halaman depan BBTCL PP Jogjakarta, dilangsungkan kegiatan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019. Pelaksanaan Upacara Bendera ini berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor UM.02.02/VII/1648/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Pelaksanaan Upacara Hari Lahir Pancasila Tanggal 1 Juni 2019, yang memerintahkan kepada seluruh Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di pimpin oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM dan diikuti semua warga BBTCL PP Yogyakarta, Pejabat Struktural dan Fungsional, karyawan/karyawati sampai dengan tenaga honorer. Hal yang berbeda dari pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila saat ini adalah adanya peserta upacara dari luar Satker BBTCL PP Jogjakarta diantaranya dari BBTCL PP Jakarta, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang mudik.



Peringatan ini berlatar belakang dari rapat para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, yang pada masa kolonial Belanda merupakan Gedung Volksraad, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Setelah melalui proses pembahasan dalam musyawarah, persidangan BPUPKI mengambil kesepakatan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945 inilah kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai lima dasar terbentuknya negara. Istilah Pancasila ini termuat dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka.

Dalam rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai lima dasar negara yang dia sebut dengan nama Pancasila. Berikut cuplikan pidato Soekarno saat itu:

“Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa saya, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Sejak awal, Soekarno menganggap Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya sebuah rumah besar, yakni Republik Indonesia, yang di dalamnya menaungi berbagai macam suku dan agama.

Jepang pada 7 Agustus 1945 mengganti BPUPKI menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau "Dokuritsu Junbi Inkai".

Singkat cerita, Jepang hancur lebur pada Perang Dunia II ketika pasukan sekutu barat pimpinan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan ke Nagasaki pada 9 Agustus 1945.

Kekuatan dan pengaruh Jepang di Indonesia pun melemah sehingga membuat para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berhasil merebut dan memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila pun resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Mulai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 berhubungan dengan Ketetapan No. I/MPR/1988, No. I/MPR/1993, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia hingga kini.

Dasar negara sangat penting bagi suatu bangsa. Tanpa dasar negara, negara akan goyah, tidak mempunyai tujuan yang jelas, dan tidak tahu apa yang ingin dicapai setelah negara tersebut didirikan. Sebaliknya, dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang ambing dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat datang dari arah mana saja. Perumpamaan negara yang tidak memiliki dasar negara yaitu bagaikan bangunan tanpa pondasi, tentu saja bangunan itu akan cepat roboh.

Dalam kegiatan upacara ini Pembina Upacara membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 1 Juni 2019. Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para “pendiri bangsa” merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat Bangsa Indonesia. Arti penting dari peringatan hari lahir Pancasila ini adalah untuk mengenang lahirnya Pancasila dan merefleksikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mari jadikan peringatan hari lahir Pancasila ini sebagai sumber inspirasi, “politik harapan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mari terus menerus konsisten dalam merealisasikan Pancasila sebagai dasar Negara, Ideologi Negara dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan, dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia.

Kita Indonesia, kita Pancasila.



## **Pembukaan Posko Kesehatan dan Bantuan Komunikasi Arus Mudik/Balik Lebaran Tahun 2019 / 1440 H, 1 Juni 2019**

BBTKL PP Yogyakarta dalam mendukung pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2019/1440H, bekerjasama dengan PARKIT, Dinkes Provinsi DIY, PMI DIY, SBH Kwarda DIY, Dinkes Kabupaten Bantul, BPBD Bantul, Camat Sedayu, Polsek Sedayu, Koramil Sedayu, Puskesmas Sedayu 1, SMA Dharma Amiluhur, Mesjid Al Inayah, FKRB Desa Argomulyo, Linmas Desa Argo Mulyo menyelenggarakan Posko Kesehatan dan Bantuan Komunikasi di Dusun Plawonan, Rowulu, Sedayu Bantul.

Pada Sabtu, 1 Juni 2019, posko dibuka secara seremonial Kepala BBTKL PP Yogyakarta, DR. Dr. Irene, MKM, dihadiri stakeholder, lintas sektor, lintas program terkait dan relawan-relawan serta Pramuka dan Saka Bakti Husada.


Mengawali acara adalah Laporan dari Ketua Panitia, Kabid SE, Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes, sambutan dari Camat Sedayu, Drs. Fauzan Mu'arifin dan sambutan serta pembukaan secara resmi oleh Kepala BBTKL PP Yogyakarta.

Posko ini akan dibuka mulai tanggal 30 Mei 2019 sd 7 Juni 2019.

Pada Posko Kesehatan ini disiapkan tempat beristirahat, pemeriksaan kesehatan ringan jika ada keluhan, P3K, Ruangan laktasi dan ambulans untuk merujuk. Posko ini akan siaga 24 jam.

Selain pelayanan medis modern, pihaknya juga akan membuka layanan kesehatan tradisional, seperti pijat refleksi. Layanan ini untuk membantu mereka dalam relaksasi otot setelah tegang berkendara.

Posko ini juga diperkuat dengan Bantuan Komunikasi (Bankom), sebagai suatu kegiatan nyata yang dilakukan oleh PARKIT untuk melakukan bantuan dengan menggunakan sarana KRAP (Radio Antar Penduduk) yang merupakan binaan BBTKL PP Jogjakarta dan sudah menjalin kerja sama (MoU) dengan BBTKL PP Jogjakarta dan tahun ini merupakan Tahun Ke Enam PARKIT memberikan bantuan komunikasi di Posko Kesehatan BBTKL PP Yogyakarta.




Untuk menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Pimpinan Saka Bakti Husada Tingkat Nasional Nomor PK.05.01/B.VI/1700/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Peran Serta SBH dalam Menghadapi Arus Mudik/Balik Hari Raya Idul Fitri 1440H kepada Pinsaka Tingkat Daerah dan Cabang, maka BBTCL PP Jogjakarta juga melibatkan peran aktif Saka Bakti Husadanya pada kegiatan Posko Kesehatan tahun ini. "Rela menolong sudah menjadi kebiasaan Pramuka dari generasi ke generasi, kita juga telah memerintahkan jajaran Kwartir seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat saat mudik"

Pada sore hari setelah pembukaan berkesempatan Ketua PMI DIY, Drs. H. GBPH Prabukusumo, Psi melakukan peninjauan ke Posko Kesehatan dan Bantuan Komunikasi BBTCL PP Yogyakarta.

Diharapkan keberadaan posko ini bisa membantu para pemudik yang hendak istirahat sebelum melanjutkan perjalanan, sehingga kondisi kesehatan pemudik tetap terjaga dan bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat.

---





### **KIE Antraks Pada Masyarakat, Balai Dusun Grogol 4, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul 4 Juni 2019**

Untuk mencegah penyebaran bakteri antraks di Gunungkidul, Kemenkes (BBTKL PP Yogyakarta, subdit Zoonosis dan subdit Surveilans), Kementan, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab / Kota dan Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan dan Desa melakukan pertemuan untuk sosialisasi Antraks untuk kewaspadaan dini dan memutus penularan.

Kegiatan ini hadir oleh BBTCL PP Yogyakarta, Kementerian Kesehatan (Subdit Zoonosis dan Subdit Surveilans), kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Provinsi DIY, dinas Kesehatan dan Pertanian Kabupaten gunung Kidul, Muspika Kecamatan Karangmojo (camat, kapolsek, danramil), perangkat desa Bejiharjo, perangkat dusun Grogol 4, puskesmas, puskesmas dan masyarakat Dusun Grogol 4.

Acara dibuka oleh Bapak Camat Karangmojo, Drs. Marwatahadi, M.Si. Dilanjutkan dengan pemaparan Duku Grogol 4, Ribut Priyanto yang menjelaskan kronologis kasus Antraks.

Selanjutnya disampaikan materi Antraks pada hewan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan, drh. Syamsul Ma'arif, Msi yang menyampaikan tentang gejala, penularan dan tatalaksana Antraks pada Hewan.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM yang menyampaikan tentang gejala, penularan dan tatalaksana Antraks pada manusia, yaitu:

1. Penyakit Antraks adalah termasuk salah satu penyakit Zoonosa yang disebabkan oleh *Bacillus anthracis* terutama pada hewan memamah biak (sapi dan kambing). Penyakit Antraks atau disebut juga Radang Lympha, Malignant pustule, Malignant edema, Woolsorters disease, Rag pickers disease, Charbon. Kata Antraks dalam bahasa Inggris berarti Batubara, dalam bahasa Perancis disebut Charbon, kedua kata tersebut digunakan sebagai nama penyakit pada manusia yang ciri utamanya ditandai dengan luka yang rasanya pedih, ditengahnya berwarna hitam seperti batu bara (Christie 1983).

2. Penyakit Antraks merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501 tahun 2010.
3. Penyakit tersebut pada umumnya menyerang pekerja peternakan, petani, pekerja tempat pemotongan hewan, dokter hewan, pekerja pabrik yang menangani produk-produk hewan yang terkontaminasi oleh spora antraks, misalnya pabrik tekstil, makanan ternak, pupuk, dan sebagainya.
4. Gejala klinis antraks pada manusia dibagi menjadi 4 bentuk yaitu antraks kulit, antraks saluran pencernaan, antraks paru dan antraks meningitis.

a. Antraks Kulit (Cutaneous Anthrax)

Kejadian antraks kulit mencapai 90% dari keseluruhan kejadian antraks di Indonesia. Masa inkubasi antara 1-5 hari ditandai dengan adanya papula pada inokulasi, rasa gatal tanpa disertai rasa sakit, yang dalam waktu 2-3 hari membesar menjadi vesikel berisi cairan kemerahan, kemudian haemoragik dan menjadi jaringan nekrotik berbentuk ulsera yang ditutupi kerak berwarna hitam, kering yang disebut Eschar (patognomonik). Selain itu ditandai juga dengan demam, sakit kepala dan dapat terjadi pembengkakan lunak pada kelenjar limfe regional. Apabila tidak mendapat pengobatan, angka kematian berkisar 5-20%.

b. Antraks Saluran Pencernaan (Gastrointestinal Anthrax)

Masa inkubasi 2-5 hari. Penularan melalui makanan yang tercemar kuman atau spora misal daging, jerohan dari hewan, sayur-sayuran dan sebagainya, yang tidak dimasak dengan sempurna atau pekerja peternakan makan dengan tangan yang kurang bersih yang tercemar kuman atau spora antraks. Penyakit ini dapat berkembang menjadi tingkat yang berat dan berakhir dengan kematian dalam waktu kurang dari 2 hari. Angka kematian tipe ini berkisar 25-75%.

Gejala antraks saluran pencernaan adalah timbulnya rasa sakit perut hebat, mual, muntah, tidak nafsu makan, demam, konstipasi, gastroenteritis akut yang kadang-kadang disertai darah, hematemesis. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pembesaran kelenjar limfe daerah inguinal (lipat paha), perut membesar dan keras, kemudian berkembang menjadi ascites dan oedem scrotum serta sering dijumpai pendarahan gastrointestinal.

c. Antraks Paru-paru (Pulmonary Anthrax)

Masa inkubasi : 1-5 hari (biasanya 3-4 hari). Gejala klinis antraks paru-paru sesuaidengan tanda-tanda bronchitis. Dalam waktu 2-4 hari gejala semakin berkembang dengan gangguan respirasi berat, demam, sianosis, dispneu, stridor, keringat berlebihan, detak jantung meningkat, nadi lemah dan cepat. Kematian biasanya terjadi 2-3 hari setelah gejala klinis timbul.

#### d. Antraks Meningitis (Meningitis Anthrax)

Terjadi karena komplikasi bentuk antraks yang lain, dimulai dengan adanya lesi primer yang berkembang menjadi meningitis hemoragik dan kematian dapat terjadi antara 1-6 hari. Gambaran klinisnya mirip dengan meningitis purulenta akut yaitu demam, nyeri kepala hebat, kejang-kejang umum, penurunan kesadaran dan kakukuduk.

#### e. Etiologi

*Bacillus anthracis*, kuman berbentuk batang ujungnya persegi dengan sudut-sudut tersusun berderet sehingga nampak seperti ruas bambu atau susunan bata, membentuk spora yang bersifat gram positif. Hasil bentuk vegetatif bukan merupakan organisme yang kuat, tidak tahan hidup untuk berkompetisi dengan organisme saprofit. Basil Antraks tidak tahan terhadap oksigen, oleh karena itu apabila sudah dikeluarkan dari badan ternak dan jatuh di tempat terbuka, kuman menjadi tidak aktif lagi, kemudian melindungi diri dalam bentuk spora.

Apabila hewan mati karena Antraks dan suhu badannya antara 28 -30 °C, basil antraks tidak akan didapatkan dalam waktu 3-4 hari, tetapi kalau suhu antara 5 -10 °C pembusukan tidak terjadi, basil antraks masih ada selama 3-4 minggu. Basil Antraks dapat keluar dari bangkai hewan dan suhu luar di atas 20°C, kelembaban tinggi basil tersebut cepat berubah menjadi spora yang tahan hidup selama bertahun-tahun. Bila suhu rendah maka basil antraks akan membentuk spora secara perlahan - lahan (Christie 1983).

5. Masa inkubasi dari penyakit antraks adalah 1-7 hari, pada umumnya berkisar antara 2-5 hari.
6. Sumber penyakit antraks adalah hewan ternak herbivora. Manusia terinfeksi antraks melalui kontak dengan tanah, hewan, produk hewan yang tercemar spora antraks. Penularan juga bisa terjadi bila mengkonsumsi daging hewan yang terinfeksi atau menghirup spora dari produk hewan yang sakit seperti kulit dan bulu.
7. Pengobatan Peniciline masih merupakan antibiotika yang paling ampuh, dengan cara pemberian tergantung tipe dan gejala klinisnya, apabila hipersensitif terhadap penicilline dapat diganti dengan tetracycline, chloramphenicol atau erytromicine. Terapi suportif dan simptomatis perlu diberikan, biasanya plasma expander dan regimen vasopresor.
8. Penanggulangan KLB diprioritaskan pada pengobatan dini penderita dengan Pengobatan yang sesuai standar, penanggulangan KLB antraks pada hewan penular serta produk hewan tercemar sehingga terputusnya mata rantai penularan, serta manajemen hewan tersangka dan produk hewan tercemar.
9. Penyuluhan masyarakat tentang antraks dan upaya penanggulangannya.
  - a. Setiap orang yang menderita penyakit dengan gejala-gejala antraks segera berobat ke Puskesmas atau RS terdekat.
  - b. Perlakuan terhadap jenazah karena antraks mengikuti prinsip pemulasaraan jenazah dengan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Hewan harus disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) bila dipotong di luar RPH harus mendapat ijin dahulu dari Dinas Peternakan setempat
  - d. Tidak diperbolehkan menyembelih hewan sakit antraks.
  - e. Tidak diperbolehkan mengkonsumsi daging yang berasal dari hewan yang sakit antraks.
  - f. Dilarang membuat atau memproduksi barang-barang yang berasal dari hewan sakit atau mati karena penyakit antraks.
  - g. Hewan yang rentan terhadap penyakit antraks seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda di wilayah endemis antraks secara rutin harus divaksinasi terhadap penyakit antraks. Vaksinasi dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat.
10. Pentingnya perilaku PHBS untuk memutus rantai penularan khususnya penggunaan alas kaki, pupuk hewan untuk tanaman hortikultura dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir serta penggunaan air tanah untuk konsumsi minum atau masak serta mencuci sayur yang dikonsumsi mentah
11. Surveilans Ketat pada KLB Antraks  
Pemantauan terhadap perkembangan kasus baru dan kematian akibat antraks menurut bentuk penyakit, waktu mulai sakit, tempat tinggal, dan jenis tempat bekerja. Selain itu perlu juga dilakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus-kasus kesakitan dan kematian pada hewan menurut tempat dan jenis hewan.
12. Kewaspadaan terhadap penyakit Antraks perlu ditingkatkan terutama pada saat menjelang perayaan hari Raya Idul Fitri/Adha, dimana kebutuhan ternak (daging) meningkat sehingga terdapat mobilitas hewan ternak yang cukup tinggi dari dan ke wilayah endemis antraks. Selanjutnya dilakukan praktek CTPS dan eeika batuk oleh dr. Nuri dari Puskesmas Karangmojo.  
Acara ditutup dengan diskusi yang hangat antara masyarakat dengan seluruh narasumber.





## **Buka Bersama Pegawai BBTKL PP Yogyakarta dan Dharma Wanita Persatuan BBTKL PP Yogyakarta bersama Panti Asuhan Nurul Hag**

Bulan ramadhan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah SWT, dan di sebut pula sebagai bulan suci, dimana bulan ramadhan ini diharapkan menjadi wahana untuk menyucikan diri baik jasmani maupun rohani.

Makna bulan Ramadan bagi umat Islam merupakan bulan yang sangat penting dan begitu di muliakan. Banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi dibulan Ramadan yang mempengaruhi Islam hingga sampai saat ini. Contohnya saja, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, berupa Al-Qur'an surat Al-Ala' ayat 1 sampai 5.

Makna bulan Ramadan juga tidak lepas dari keistimewaaan ibadah puasa yang dilakukan umat Islam. Saat bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan melakukan puasa. Puasa adalah menahan diri dari nafsu, makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa di bulan Ramadan dilakukan selama 30 hari selama bulan Ramadan.

Selain itu, masih banyak makna bulan Ramadan yang sangat istimewa karena merupakan bulan yang ditunggu-tunggu dan juga merupakan bulan kemenangan umat Islam.

Makna bulan Ramadan sangat istimewa bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, karena puasa bisa menghapuskan dosa-dosa dan juga bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Selain itu, puasa juga bisa mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita semua.

Makna bulan Ramadan berikutnya bagi umat Islam adalah adanya salah satu malam yang dirahasiakan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan yang jika beribadah dan beramal baik pada malam tersebut maka pahalanya lebih baik dari seribu bulan.

Makna bulan Ramadan yang juga sangat istimewa bagi umat Islam adalah, pada bulan Ramadan, segala jenis amal ibadah dan segala jenis perbuatan baik yang didasari karena Allah SWT akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda. Beberapa amal ibadah yang bisa dilakukan saat bulan Ramadan adalah, salat tarawih, salat sunnah, membaca Al-Qur'an, bersedekah, umrah di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi amal ibadah dan perbuatan baik yang bisa dilakukan agar mendapatkan makna bulan Ramadan yang sangat istimewa.

Pada bulan Ramadhan Tahun 2019, 1440 Hijriah, Keluarga Besar BBTCL PP Yogyakarta melaksanakan acara berbuka bersama dan saling berbagi kasih antar sesama dan juga pada Panti Asuhan Nurul Haq Yogyakarta.

Momentum buka puasa bersama ini bukan hanya acara rutinitas, namun lebih jauh agar makna dari ibadah puasa dibulan Ramadhan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan bagi yang melaksanakannya dengan penuh ikhlas selain itu menekankan semoga umat beragama bisa meningkatkan kualitas kerukunan beragama pegawai BBTCL PP Yogyakarta sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.


Selain itu kegiatan buka bersama mempunyai makna yang penting yaitu menyambung tali silaturahmi, keakraban maupun kekerabatan. Meskipun bisa jadi setiap hari sudah bertatap muka akan tetapi momen buka puasa merupakan momen yang sangat emosional dimana biasanya diselingi dengan canda dan tawa.

Selain itu buka puasa bersama BBTCL PP Yogyakarta juga mempunyai misi sosial untuk berbagi rezeki, tali asih, sedekah serta sedikit membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang lain.

Di bulan yang penuh berkah, cinta kasih dengan berbagi terhadap sesama, merupakan hal yang tentu sangat menyejukkan jiwa, karena disitulah hakekatnya kebahagiaan jiwa dengan saling berbagi terhadap sesama makhluk ciptaanNya. Kebahagiaan yang diharapkan bukan hanya sekedar bersifat individualistik namun secara sosial kebahagiaan tersebut bisa dicapai dengan saling berbagi.

Momentum di bulan penuh dengan rahmat, cinta dan kasih sayang, BBTCL PP Yogyakarta bersama Dharma Wanita Persatuan BBTCL PP Yogyakarta menggelar buka bersama dan santunan kepada anak yatim, piatu dan kaum Duafa Panti Asuhan Nurul Haq sebagai bentuk rasa cinta dan berbagi kepada sesama. meski acara ini, di adakan secara sederhana, namun cukup penting untuk di ambil hikmahnya, mengingat hal tersebut hakekatnya tidak hanya bisa di lakukan di bulan suci, namun dibulan yang lain, hal itu pun juga patut untuk di lakukan.

Panti Asuhan Nurul Haq adalah Panti Asuhan Putra dan Putri dibawah Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim Dan Dhuafa Madania. Beralamat di Jl. Janti Gg. Gemak, Gedongkuning, Tegal Tandan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, Indonesia.




Yayasan Madania, kini menaungi 5 panti asuhan, diantaranya Panti Asuhan Nurul Haq, Panti Asuhan Wahyun Asror, Panti Balita Nurul Haq, Pondok Pesantren Al-Amin dan Wisma Kasepuhan Wahyun Asror. Lima panti asuhan tersebut berjumlah sekitar 200 orang. Terdiri atas anak-anak, remaja, orang tua jompo dan anak-anak yang berkebutuhan khusus dari seluruh provinsi di Indonesia.

Rangkaian acara berbagi di bulan suci Ramadhan, pertama adalah pembukaan Oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta DR. dr. Irene, MKM, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan saritiawah oleh Anak-anak dari Panti Asuhan Nurul Haq, dan acara inti di isi oleh Ustad yang menjelaskan tentang kualitas berpuasa bagi ummat muslim. Bahwa berpuasa tidak hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, namun lebih penting lagi bahwa berpuasa adalah menahan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan negatif yang akan membuat manusia celaka dalam hidupnya.

Dilanjutkan dengan acara berbagi kasih dan berbuka bersama serta shalat magrib berjamaah.

Ramadhan ini seyogianya harus di isi dengan kegiatan-kegiatan positif yang akan berdampak positif juga baik bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan dan masyarakat secara umum. Menjadi manfaat bagi sesama manusia, itulah hakekat kebahagiaan jiwa dengan saling berbagi.

---





## **Penguatan Petugas Kesehatan / Kesehatan Hewan Dalam Penanggulangan KLB Antraks, Hotel Cyka Raya, Wonosari, Gunung Kidul, DIY**

Penyakit Antraks adalah termasuk salah satu penyakit Zoonosa yang disebabkan oleh *Bacillus anthracis* terutama pada hewan memamah biak (sapi dan kambing). Penyakit Antraks atau disebut juga Radang Lympha, Malignant pustule, Malignant edema, Woolsorters disease, Rag pickers disease, Charbon. Kata Antraks dalam bahasa Inggris berarti Batubara, dalam bahasa Perancis disebut Charbon, kedua kata tersebut digunakan sebagai nama penyakit pada manusia yang ciri utamanya ditandai dengan luka yang rasanya pedih, ditengahnya berwarna hitam seperti batu bara.

Penyakit Antraks merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501 tahun 2010.

Penanggulangan KLB antraks diarahkan untuk memutuskan rantai penularan baik dari hewan, produk hewan atau tanah tercemar ke manusia, pengobatan dini penderita serta mencegah penyebaran antraks ke wilayah lain.

Penanggulangan KLB diprioritaskan pada pengobatan dini penderita dengan pengobatan yang sesuai standar, penanggulangan KLB antraks pada hewan penular serta produk hewan tercemar sehingga terputusnya mata rantai penularan, serta manajemen hewan tersangka dan produk hewan tercemar.

Penanggulangan KLB antraks merupakan upaya terpadu antara sektor kesehatan dengan sektor kesehatan hewan.

Penyuluhan masyarakat tentang antraks dan upaya penanggulangannya, merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan. Setiap orang yang menderita penyakit dengan gejala-gejala antraks segera berobat ke Puskesmas atau RS terdekat.

Pada daerah yang belum pernah terjangkau KLB antraks, petugas belum terlatih untuk mengidentifikasi adanya kasus antraks, diagnosis

Sebagai bentuk Kewaspadaan Dini terutama untuk Deteksi Dini dan Tata Laksana, BBTKL PP Jogjakarta melaksanakan kegiatan Penguatan ini. Peserta pada kegiatan ini berasal dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Provinsi DIY, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Pimpinan Puskesmas se Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 35 peserta.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Kabid SE BBTKL PP Jogjakarta, Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes dan dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dan arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, dr. Dewi Irawaty, M.Kes.

Selanjutnya disampaikan arahan dan pembukaan oleh Kepala BBTKL PP Jogjakarta, DR. Dr. Irene, MKM.

Materi yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah:

1. Konsep One Health dalam Penanggulangan Antraks oleh Kepala BBTKL PP Jogjakarta, DR. Dr. Irene, MKM
2. Situasi Penyakit Antraks di Kabupaten Gunung Kidul oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, dr. Dewi Irawaty, M.Kes.
3. Tata Laksana Antraks Pada Hewan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian DIY, drh. Anung Endah Suwasti.
4. Deteksi Dini dan Tata Laksana Antraks pada manusia oleh dr. Dhani Redhono Haryoputro, SpOD dari RS Moewardi Solo.
5. Surveilans Penyakit Antraks oleh Subdit Zoonosis Ditjen P2P, Rahmadona

Dalam upaya menanggulangi KLB antraks di lapangan perlu kerjasama yang baik antara masyarakat, petugas Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian termasuk laboratorium.

Pada saat yang sama di tempat yang berbeda, BBVET Wates melaksanakan Bimbingan Teknis Vaksinasi Antraks pada Petugas Kesehatan Hewan.



### **Launching Program Percontohan Nasional Terminal Sehat dan Peresmian Hasil Penataan Fasilitas Umum Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Solo, 4 Juni 2019**

Guna meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan di Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Solo, Kementerian Perhubungan melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur baik sarana maupun prasarana.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui Program Menuju Terminal Sehat, yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perhubungan dimana Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Solo menjadi terminal percontohan nasional menuju terminal sehat.

Launching Program Percontohan Nasional Terminal Sehat dan Peresmian Hasil Penataan Fasilitas Umum di Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Solo dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan jajarannya (Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat KesjaOR dan BBTCL PP Jogjakarta), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Surakarta serta PT. Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Unilever Indonesia Tbk.

Bentuk kerjasama ini berupa pemasangan stiker tanda keamanan pangan dari Kementerian Kesehatan pada 150 gerai makanan yang telah memenuhi standar kesehatan dan pemasangan tempat cuci tangan, wastafel dan pengering masing-masing sebanyak 55 buah.

Hadir dalam kegiatan ini, Sesjen Kementerian Perhubungan Dr.Ir. DJoko Sasono, M.Sc (Eng), Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Kirana Pritasari, MQIH, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, ATD, MM, Direktur Kesehatan Lingkungan dr. Imran Agus Nurali, SpOK,

Kepala BBTCL PP Jogjakarta, DR. dr. Irene, MKM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kabid Kesmas dr Wahyu Setianingsih, M. Kes. serta Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Dadang Ramadhan dan perwakilan dari Unilever Indonesia.

Sebagai tuan rumah, hadir mewakili Walikota Solo Kepala Dinas Perhubungan Hari Prihatno, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo dr. Siti Wahyuningsih beserta jajarannya, Kepala Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Solo Joko Supriyanto dan Seluruh OPD terkait.

Disampaikan oleh Sesjen Kementerian Perhubungan, dengan kerjasama ini diharapkan, selain meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan di terminal namun juga mewujudkan salah satu mimpi Kementerian Perhubungan untuk membangun "Terminal Rasa Bandara" dimana di terminal sebagaimana bandara ini dibangun dengan tiga zona yang memberikan layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga hal ini mampu merubah persepsi dan cara pandang masyarakat akan keberadaan dan fungsi terminal.

Sebagai salah satu perwujudan peningkatan infrastruktur transportasi, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan PT. Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan penataan fasilitas umum di Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Solo. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk penyerahan bantuan penataan fasilitas umum dari PT. Mandiri (Persero) Tbk kepada Kementerian Perhubungan sejumlah Rp 1 milyar yang digunakan untuk penataan 155 (seratus lima puluh lima) kios dan gapura selamat datang di lingkungan terminal.

Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk yang berpartisipasi untuk pembangunan westafel tempat cuci tangan dan pengering.

Sesjen Kemenhub dan Dirjen Kesmas juga berkesempatan mengunjungi Klinik Laktasi dan melakukan rampcheck salah satu bus serta turut memantau tes kesehatan para pengemudi bus.

BBTKL PP Jogjakarta mengambil peran dalam persiapan pra launching dengan melakukan Surveilans Faktor Resiko Penyakit Dalam Arus Mudik yang bertujuan memberikan gambaran kualitas lingkungan dan makanan minuman yang disajikan di tempat pengelolaan/penyediaan makanan di stasiun dan terminal di Kota Surakarta yang menjadi faktor risiko penyakit berpotensi KLB dengan melakukan wawancara/survei, observasi, inspeksi kesehatan lingkungan, pengambilan dan pengujian contoh uji serta melakukan pembinaan di Stasiun Solo Balapan (Kereta Makan Malioboro Expres, WM. Ibu Tutik Ruwatiningsih, WM Ibu Ngatini, Java Coffee dan Twin Restora) dan di Terminal Tipe A Tirtonadi (WM Gaul, WM Barokah II, WM Duta Sari, WM Handayani dan Riya).

Untuk Terminal Tipe A Tirtanadi hasilnya adalah sebagai berikut:

- Hasil inspeksi kesehatan lingkungan 100% baik
- Hasil Pemantauan Penjamah/Penyaji Makanan hampir seluruhnya memenuhi syarat kecuali dalam menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian yang pada awalnya tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembinaan sudah memenuhi syarat).
- Hasil Pemantauan Alat makan memenuhi syarat setelah melakukan pembinaan pada cara mengeringkan dan lap beraih serta penyimpanan peralatan makan.
- Hasil Pemantauan Bahan Makanan, Bahan Tambahan seluruhnya memenuhi syarat dan untuk Penyajian dilakukan pembinaan pada pembungkusan makanan yaitu agar selalu menjaga makanan jajanan yang diujakan dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup, pembungkus yang digunakan dan atau tutup makanan jajanan dalam keadaan bersih dan tidak mencemari makanan, tidak mudah ditiup angin, pengangkutannya dalam wadah tertutup dan tidak lebih dari 6 jam.
- Hasil Pemantauan sarana penjaja makanan, hampir seluruhnya memenuhi syarat, hanya 1 Warung Makan yang dilakukan pembinaan untuk menyediakan tempat air bersih, tempat sampah dan tempat peralatan makan.
- Hasil Pengujian Contoh Uji Makanan/Minuman Parameter mikrobiologi hampir tidak ditemukan Kuman kecuali E. coli
- HASIL pemeriksaan air bersih parameter fisik, kimia dan biologi dan usapan masih membutuhkan pembinaan.

Selain itu BBTCL PP Jogjakarta juga membantu dalam pemeriksaan Faktor Resiko Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) melalui pemeriksaan kesehatan Pengemudi.

Bersinerginya pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan) dalam rangka membangun suatu pelayanan yang terintegrasi, didukung dengan hadirnya BUMN untuk negeri (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) dan pihak swasta (PT. Unilever Indonesia, Tbk) memberikan warna yang lebih semarak dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Dihimbau kepada pihak-pihak terkait yang mengelola terminal ini agar selalu mengawal aspek yang berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, keamanan pada Terminal Tirtanadi.





## **Rapat Evaluasi Antisipasi Kesiapsiagaan Lebaran Tingkat DIY Tahun 2019**

Meningkatnya jumlah pengguna jalan pada saat arus mudik lebaran dapat menimbulkan masalah di bidang kesehatan. Kondisi ini perlu penanganan serius, cepat, dan tepat dari semua instansi terkait. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden No. 4 tahun 2013 tentang program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Selain itu, Kementerian Kesehatan melalui Instruksi Presiden R.I. No 3 Tahun 2004 mengenai Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran terpadu mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada dan pada tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran antara lain dengan menempatkan pos-pos kesehatan statis dan mobile pada lokasi-lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan, peningkatan efektifitas penanganan korban kecelakaan. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masa antisipasi kesiapsiagaan lebaran dilaksanakan dari H-7 s.d. H+7 lebaran.

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/292/2019 Tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada situasi khusus Libur keagamaan tahun 2019 dan tahun baru 2020, maka kegiatan antisipasi kesiapsiagaan lebaran di wilayah DIY yang dilaksanakan oleh berbagai lintas sektor diantaranya adalah sbb:

1. Pembentukan Pos Kesehatan yang dikelola oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.
2. Penyiapan dan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan Public Safety Center (PSC) 119
3. Pemberian pelayanan kesehatan 24 jam di puskesmas dan rumah sakit di sepanjang jalur mudik, mudik balik dan lokasi wisata
4. Penyiapan Tim Gawat Darurat dan Evakuasi Medik untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan kondisi darurat lainnya serta fasilitasi akses ke lokasi kecelakaan;
5. Pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini faktor risiko kecelakaan pada pengemudi bus antar kota antar provinsi di terminal bus dan pool pemberangkatan dilakukan oleh tim kesehatan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota

6. Pemantauan data tentang morbiditas dan mortalitas penyakit dalam periode arus mudik memanfaatkan sistem Kewaspadaan Dini KLB dan Surveilans penyakit;

7. Pemeriksaan faktor risiko kesehatan di tempat umum, khususnya di rumah makan serta tempat wisata sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

Dengan berakhirnya masa antisipasi kesiapsiagaan lebaran yang dilaksanakan dari H-7 s.d. H+7 lebaran, Dinas Kesehatan DIY menyelenggarakan pertemuan Evaluasi Antisipasi Kesiapsiagaan Lebaran Tingkat DIY Tahun 2020 pada tanggal 19 Juni 2019. Peserta pertemuan terdiri dari berbagai lintas lintas sector terkait di DIY yaitu Dinas kesehatan dari lima kab/kota di DIY, PMI DIY dan PMI dari lima kabupaten/kota di DIY, BPJS, PT Jasa Raharja, DAOP VI PT.KAI, Polda DIY, Satpol PP dan Linmas DIY, Pusbankes 118 DIY, Dinas Perhubungan DIY, RS di DIY dan BBTCLPP Yogyakarta. Dari BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh Kasie Advokasi dan KLB untuk hadir dalam pertemuan yang Bertempat di Aula A Dinas Kesehatan DIY, Jl. Gondosuli 6 Kota Yogyakarta. Pertemuan dibuka oleh Kasie kesdas, Rujukan dan Kesehatan Khusus, dr. Fitri Indah Setyawati, M.Sc yang langsung dilanjutkan dengan penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan mudik lebaran oleh masing-masing instansi yang hadir. Dari hasil penyampaian data yang disampaikan oleh peserta yang hadir diketahui bahwa tingkat fatalitas kecelakaan mengalami penurunan, namun bila dilihat Dari angka kejadian terjadi peningkatan jumlah korban kecelakaan lalu lintas di DIY tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Data PT Jasa Raharja mencatat ada 201 korban (25 diantaranya MD) di tahun 2019 dan di tahun 2018 ada 157 korban (25 diantaranya MD). Sedangkan di lokasi Pariwisata tercatat tingginya jumlah korban sengatan ubur-ubur. Untuk itu perlunya protap untuk tata laksana korban sengatan ubur-ubur. Selama ini penanganan korban sengatan ubur-ubur dengan disiram cuka pada bekas sengatan, sedangkan cuka bukan termasuk bahan medis sehingga tidak bisa diklaim. Selain itu, di lapangan seringkali yang menangani tim sar yang seringkali bukan merupakan tenaga kesehatan. Untuk itu penting untuk segera disusun protap untuk penanganan korban sengatan ubur-ubur. Dari BBTCLPP Yogyakarta, menyampaikan hasil operasional Poskes dan Bankom BBTCLPP Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Wates dari tgl. 31 Mei s.d. 7 Juni 2019. Disampaikan bahwa jumlah KLL yang ditangani di Poskes ada 1 kejadian dan jumlah pemudik yang mengunjungi Poskes sejumlah lima rombongan. Terjadiannya penurunan jumlah pengunjung ini dimungkinkan karena adanya tol trans jawa yang telah beroperasi dimana pintu keluar Tol ada di Kabupaten Boyolali sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pemudik yang lewat di jalan wates. Untuk itu disarankan untuk tahun depan, mungkin lokasi Poskes dan Bankom BBTCLPP Yogyakarta bisa dipertimbangkan untuk dipindah di wilayah yang banyak dilewati pemudik.



## **Pelepasan Pegawai Purnabakti BBTCL PP Yogyakarta Periode 1 Syawal 1439 H sampai 1 Syawal 1440 H**

Kegiatan ini bertujuan melepas pegawai BBTCL PP Yogyakarta yang telah memasuki masa purna Tugas atau pensiun.

Setiap tahunnya kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama dengan Syawwalan BBTCL PP Yogyakarta dan pada periode 1 tahun ini terdapat 8 orang pensiunan, yaitu:

1. Murwani, SKM
2. Triyana
3. Bambang Setiyono
4. Drs. Prayudi Afianto
5. Istiyanto, SKM
6. Tri Guniarti, AMKL
7. Dwi Winasti
8. Waryatun

Acara diawali dengan pembacaan Riwayat Kepegawaian oleh Ibu Sri Iriyani, SE, dilanjutkan dengan pembacaan SK Pensiun pegawai oleh Ibu Christina Handayani, SH dan penyampaian SK dan Penghargaan kepada pegawai yang bersangkutan.

Selanjutnya penyampaian sepatah kata dari pra pensiunan yang diwakili oleh bapak Drs. Prayudi Afianto dan penyampaian sambutan dan ucapan terimakasih oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM.

Dalam sambutannya Kepala BBTCL PP Yogyakarta menyampaikan beberapa hal:

1. Semoga masa purna tugas ini dapat dinikmati dengan penuh rasa kebahagiaan dan suka cita.

2. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, atas pengabdian dan loyalitas yang telah diberikan selama ini, terutama selama menjalankan tugas-tugas pelayanan kemasyarakatan di BBTKL PP Yogyakarta. Semoga segala apa-apa yang, telah disumbangkan, baik berupa tenaga, pikiran, ide, sampai-sampai kadangkala meninggalkan keluarga, demi pelaksanaan tugas yang diembankan, akan mendapat pahala yang setimpal, atas amal bhakti tersebut.
3. Sebagai abdi masyarakat yang selama ini dijalankan tentu tidak akan berakhir, setelah masa purna tugas ini tiba, hanya sebagai pegawai negeri saja. Pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat tersebut, tidak hanya sewaktu kita menjadi PNS saja, namun selalu diwujudkan oleh setiap warga negara yang selalu setia kepada bangsa dan negara.

Sambutan kepala BBTKL PP Yogyakarta diakhiri dengan dua bait pantun yaitu:

Memetik blewah dibuat makanan.  
Makanan dihidangkan untuk menjadi santapan.  
Selamat berpisah kepada pensiunan.  
Semoga Jasa dan budi baik menjadi kenangan.  
Tuntutlah ilmu dan pengetahuan.  
Semoga bermanfaat untuk semua orang.  
Selamat kepada pensiunan.  
Semoga Hari Tua Bahagia dan Senang.

Acara diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama. Dan pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Tarmizi, SKM, M.Kes.



## Syawwalan 1440 H / 2019 M, BBTCL PP Yogyakarta

Menyatukan Perbedaan dan Merajut Ukhuwah Menuju Pribadi Ikhlas, Amanah dan Profesional

Acara Syawwalan BBTCL PP Yogyakarta ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh BBTCL PP Yogyakarta yang dihadiri oleh Pimpinan dan Staf BBTCL PP Yogyakarta beserta keluarga, para pensiunan BBTCL PP Yogyakarta dan lintas Program dan Lintas Sektor terkait untuk menyambung tali silaturahmi.

Kepala Dinas Provinsi DIY, drg. Pembayun Setyaning Astuti, M.Kes, Camat Banguntapan, Dra. Endang Rachmawati, MM, Kepala KKP Yogyakarta, Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM dan Kepala KKP Cilacap Sulistyono, SKM, M.Kes dan lebih kurang 70 orang pensiunan BBTCL PP Yogyakarta ikut menghadiri acara Syawwalan ini.

Kegiatan hari ini diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh Bpk. Suradal dan Saritilawah oleh Lukita Anggraeni, diikuti dengan laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Bp. Drs. Bambang Supramono Hadi, M.Kes.

Selanjutnya sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Provinsi DIY, drg. Pembayun Setyaning Astuti, M.Kes, yang menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan berpesan agar benar-benar mengamalkan tema kegiatan hari ini Menyatukan Perbedaan dan Merajut Ukhuwah Menuju Pribadi Ikhlas, Amanah dan Profesional, agar saling bermaafan dan menjadikan pelayanan sebagai ibadah. Atas nama Pemerintah Provinsi DIY, beliau mengucapkan terimakasih atas keberadaan BBTCL PP Yogyakarta dalam mendukung berbagai kegiatan di bidang kesehatan.

Dalam sambutannya Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM menyampaikan arahan sebagai berikut:

1. Sebagai umat manusia selayaknya kita berlapang dada dan saling memaafkan, yang sudah barang tentu dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya sehingga adanya rasa ketidaknyaman dihati kita, baik itu hasil dari perbuatan kita maupun dari ucapan kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, perbuatan langsung maupun tidak langsung, Spontan maupun terencana, rasa sakit hati, Iri, dengki, dendam, maupun ghibah, yang tentunya akan menambah dan menyuburkan dosa-dosa kita. Untuk kita harus melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan, atas ridho Allah SWT, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antar kita semua.
2. Salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat halal bi halal ini ialah terciptanya ukhuwwah islamiyah, tergalangnya persaudaraan yang lebih akrab diantara sesama kita. Rasa sakit hati, iri, dengki maupun ghibah yang pernah kita lakukan, akan musnah kalau kita saling mengikhhlaskan dan melupakannya. Akan lebih baik lagi, apabila disertai dengan saling berjabat tangan.
3. Selaku pribadi dan selaku Kepala BBTCL PP Yogyakarta, kami mohon maaf kepada hadirin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan diantara kita semua dan memberikan kekuatan lahir dan bathin.

Selanjutnya dibacakan Ikrar Syawalan diwakili oleh Staf Termuda yaitu Ita Latiana Damayanti dan Staf Yang dituakan Ponirah Hayu, S.Si

Berbagai hiburan juga ditampilkan diantaranya Qasidahan Insyallah dan Ya Habibie oleh Staf BBTCL PP Yogyakarta dan tarian panah oleh Sri Ningsih, S.ST, MT dan putri tercinta. Acara diakhiri dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Bpk Ustad Drs. Sukirman, MA.


Ikan gabus ikan pari  
Paling sedap kalau dimakan  
Niat tulus dibulan yang fitri  
Kami berharap untuk dimaafkan



### **Pertemuan Koordinasi Penguatan Surveilans JE di DIY Tahun 2019**


Japanese Encephalitis (JE) adalah penyakit yang mematikan dan dapat menyebabkan cacat permanen. Penyakit JE terjadi akibat infeksi Virus JE dari genus Flavivirus yang menyerang susunan saraf pusat. Virus ini berhubungan dengan Virus Dengue, Virus Yellow fever, dan Virus West Nile. Virus JE ditularkan melalui gigitan nyamuk (mosquito borne viral disease), terutama oleh nyamuk *Culex tritaeniorhynchus*. Yang berfungsi sebagai amplifier host (host tempat agen infeksius berkembang menjadi banyak secara cepat) adalah babi dan hewan besar lainnya, serta burung yang hidup di rawa-rawa.

Sebagai tindak lanjut pertemuan rencana perluasan cakupan surveilans JE di D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 di Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2019 di Hotel Harper Yogyakarta, Sub Direktorat Arboviroses Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2PTVZ) menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Penguatan Surveilans JE di DIY antara Subdit Arbovirosis Direktorat P2PTVZ, Dinas Kesehatan DIY, dinas kesehatan lima kabupaten/kota di DIY, BBTCLPP Yogyakarta, RSUP dr. Sardjito, dan 12 rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta di DIY. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang P2P Dinkes DIY (drh. Berty Murtiningsih, M.Kes.). Setelah itu, dilanjutkan paparan tentang Kebijakan Nasional Pengendalian Arbovirosis oleh Kepala Sub Direktorat Arbovirosis (dr. Guntur Argana, M.Kes.) dan paparan tentang Dukungan BBTCLPP Yogyakarta dalam Pengendalian JE di Provinsi Jawa Tengah dan DIY oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta (Dr. dr. Irene, M.K.M.). Setelah diskusi, acara dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu paparan tentang Tanda, Gejala, dan Tata Laksana JE oleh Prof. Dr. dr. Elizabeth Siti Herini, Sp.A.(K) dan tentang Situasi JE di DIY dan Rencana Pengembangan Surveilans JE oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinkes DIY (Trisno Agung Wibowo, S.K.M., M.Kes.).



Setelah istirahat, acara dilanjutkan dengan penjelasan tentang Cara Pengambilan, Penyimpanan, dan Transportasi Spesimen oleh tim BBTCLPP Yogyakarta, lalu diskusi dan penandatanganan kesepakatan rencana tindak lanjut penguatan surveilans JE. Disepakati bahwa pada tahun 2019, rumah sakit daerah/swasta yang menjadi sentinel pengembangan surveilans JE di DIY dapat mulai mengambil spesimen dari pasien dengan suspek JE dengan logistik yang ada di RS, lalu menyimpan dan menyiapkan transportasi spesimen ke BBTCLPP Yogyakarta. Spesimen yang sudah siap dibawa ke BBTCLPP Yogyakarta akan diambil oleh petugas puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten/kota atau Dinas Kesehatan DIY untuk dibawa ke BBTCLPP Yogyakarta. Setiap ada empat spesimen terkumpul, BBTCLPP Yogyakarta akan melakukan pengujian laboratorium dan melaporkan hasil pengujian spesimen tersebut.

---







## Diseminasi Hasil Kegiatan Survei Vektor DBD di Kabupaten Gunungkidul DIY Tahun 2019

Berkaitan dengan kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Dengue (S3D) di DIY, pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Survei Vektor DBD di Kabupaten Gunungkidul. Lokasi kegiatan Survei Vektor DBD dipilih berdasarkan tiga suspek kasus DBD di RSUD Wonosari yang dipilih secara acak dan terkonfirmasi positif dengan pengujian RT-PCR. Pelaksanaan Survei Vektor DBD di lapangan dilaksanakan pada bulan Februari 2019.

Setelah sampel diproses dan diuji di Laboratorium Entomologi dan Pengendalian Vektor serta Laboratorium Virologi di BBTCLPP Yogyakarta, dilakukan analisa data dan penyusunan laporan. Selanjutnya, pada hari Selasa, 18 Juni 2019 dilaksanakan Diseminasi Hasil Survei Vektor DBD di Kabupaten Gunungkidul DIY bertempat di R.M. Moro Joglo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, Puskesmas Wonosari I, Puskesmas Ponjong I, Puskesmas Karangmojo II, Desa Mulo, Desa Wunung, Desa Bejiharjo, dan Desa Sidorejo, serta perwakilan kader kesehatan di wilayah tersebut.

Hasil lebih lengkap tentang kegiatan Survei Vektor DBD di Kabupaten Gunungkidul DIY Tahun 2019 dapat diakses di BBTCLPP Yogyakarta.



## **Sosialisasi Kegiatan Kajian Penemuan Kasus dan Pemantauan TB di Tempat Khusus (Pondok Pesantren) di Kabupaten Banyumas.**

Dalam rangka pelaksanaan Kajian Penemuan Kasus dan Pemantauan TB di tempat khusus dan tempat berisiko tertular TB dalam hal ini Pondok Pesantren (Ponpes), pada tanggal 21 Juni 2019 bertempat di Aula I Gedung Dinas Kesehatan Banyumas telah dilaksanakan Sosialisasi Kegiatan Kajian Penemuan Kasus dan Pemantauan TB di Tempat Khusus (Pondok Pesantren) yang dihadiri oleh stakeholder terkait berjumlah 20 peserta berasal dari Dinas Kesehatan Banyumas, Puskesmas wilayah kajian, Pengelola Pondok Pesantren wilayah kajian, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Kegiatan kajian bertujuan untuk mengetahui besaran kasus dan orang yang berisiko terkena penyakit TB di ponpes, mengetahui Faktor Resiko (FR) TB lingkungan di ponpes, mengetahui FR Pengetahuan TB, dan mengetahui FR perilaku responden di kantong - kantong TB.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Banyumas (Sadiyanto, SKM, M.Kes) dilanjutkan dengan paparan mengenai Analisa Situasi TBC di Kabupaten Banyumas Tahun 2019, selanjutnya paparan mengenai Peran BBTCLPP Yogyakarta dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019 oleh Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi BBTCLPP Yogyakarta (Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes) Paparan Kasi PD Pontren Banyumas (H. Afifudin Idrus S.Ag., Mpd.I) mengenai Peran Kankemenag dalam Penanggulangan dan Pengendalian TB di Pondok Pesantren Kabupaten Banyumas, dan paparan Ketua Tim Kajian TB (Imam Wahjoedi, SKM, MPH) mengenai Kajian Penemuan Kasus dan Gambaran FR Kejadian TB di Ponpes Kabupaten Banyumas.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diawal kegiatan bertujuan untuk memperkenalkan peran BBTCLPP, memperkenalkan kegiatan kajian dan penjelasan rencana, tahapan, teknis pelaksanaan kegiatan kajian di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dan penentuan responden yang memenuhi kriteria (berasal dari 3 ponpes).

Sebagai rencana tindak lanjut akan dilaksanakan kegiatan yang telah disepakati yaitu :

1. Tanggal 2-4 Juli 2019 kegiatan Pengumpulan Data Awal dan FR Lingkungan.
2. Tanggal 8-10 Juli 2019 kegiatan Pengumpulan Spesimen.



### **Pertemuan Teknis Pelayanan Publik Menuju Satker WBK/WBBM**

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, optimal, profesional dan komprehensif pada tanggal 24-25 Juni 2019 BBTCLPP Yogyakarta menyelenggarakan Pertemuan Teknis Pelayanan Publik Menuju Satker WBK/WBBM. Pertemuan ini dilaksanakan di aula lantai 3 kantor BBTCLPP Yogyakarta.

Acara hari pertama diawali dengan pembacaan Safety Briefing. Selanjutnya sambutan selamat datang oleh Kepala Bagian Tata Usaha BBTCLPP Yogyakarta, Dian Trikoriati, S.T., S.K.M., M.P.H. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Ibu drg. Widyawati, MKM dan Bapak Busroni, SIP. Peserta pertemuan adalah petugas Pelayanan Teknik, Security, Front Office dan pejabat Struktural serta petugas dari KKP Yogyakarta.

Materi pertama disampaikan oleh Ibu drg. Widyawati, MKM. Materi yang disampaikan tentang Pelayanan Publik yang Prima, yaitu antara lain mengenai Persepsi terhadap SDM Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1999, Asas Pelayanan Publik, dan Standart Pelayanan. Dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Busroni, SIP yaitu Tata Cara dan Praktek Penerimaan Telephon dari Pelanggan. Disampaikan dalam materi ini Prinsip Komunikasi dalam Layanan, Hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan selama menerima telephon, service excellent, dan praktek menerima telephon.

Materi pada hari kedua disampaikan oleh Bapak Busroni, SIP tentang Tata Cara dan Praktek Melayani Pelanggan. Pada sesi ini diajarkan dan praktek langsung melayani pelanggan, antara lain cara menyerahkan atau menerima sesuatu dari pelanggan, cara berkomunikasi dengan pelanggan anak-anak yang masih kecil, cara tersenyum yang benar sesuai teori 257.

Materi langsung dilanjutkan dengan Etika kepada pelanggan. Pada materi ini disampaikan bagaimana sikap yang seharusnya dalam melayani pelanggan.

Pertemuan ditutup oleh Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes, Kepala Bidang Surveilans dan Epidemiologi BBTCLPP Yogyakarta dengan menyampaikan ucapan terima kasih untuk nara sumber dan seluruh peserta. Semoga materi yang sudah didapat bisa diterapkan dalam pelayanan sehari-hari sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik.



## **Pelaksanaan Kajian Kualitas Rantai Dingin Vaksin Anti Rabies di Kabupaten Cilacap**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian Kualitas Rantai Dingin Vaksin Anti Rabies, pada tanggal 24 dan 25 Juni 2019 Tim Bidang PTL BBTCLPP Yogyakarta berkunjung di Kabupaten Cilacap. Tim melakukan wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan rantai dingin vaksin anti rabies dan vaksin rutin lainnya. Dalam kegiatan ini Tim melakukan kunjungan di Dinkes Kabupaten Cilacap, selanjutnya dengan didampingi Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Cilacap (Toto Wasono SKM, MH) beserta Penanggung jawab Imunisasi (Priyatningsih SKM), Tim berkunjung ke Puskesmas Jeruklegi I dan RSUD Cilacap. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan dibuat laporan dan diberikan rekomendasi.

Selain itu juga akan diberikan sertifikat kalibrasi untuk refrigerator yang sudah dikalibrasi Tim BBTCLPP Yogyakarta, dimana Lab. Kalibrasi BBTCLPP Yogyakarta sudah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2008. Rekomendasi dan kalibrasi nantinya diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan rantai dingin vaksin anti rabies dan vaksin rutin lainnya di Kabupaten Cilacap.



## **Temu Nasional Pemangku Kepentingan Bidang Akreditasi Dalam Rangka Peringatan Hari Akreditasi Dunia**

Pada tanggal 25 Juni 2019, BBTCLPP Yogyakarta mengikuti acara Temu Nasional Pemangku Kepentingan Bidang Akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Auditorium Utama BPPT II Jl. M.H. Thamrin, Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh 1.200 peserta yang terdiri dari asesor, anggota konsil, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, mitra dan LPK dari seluruh Indonesia. Adapun peserta dari BBTCLPP Yogyakarta dengan menugaskan staf Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium, Dina Juli Retnaningsih.

Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Akreditasi Dunia yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 9 Juni. Tema pertemuan yaitu "Nilai Tambah Akreditasi pada Rantai Pasok" yang diselenggarakan dengan tema Hari Akreditasi Dunia.

Acara dimulai dengan pertunjukan Tari Pasambahan yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta, dilanjutkan Selayang Pandang Akreditasi dan Beberapa Perkembangan Akreditasi oleh Kepala BSN (Prof. Dr. Bambang Prasetya) dan Perkembangan KAN oleh Sekjen KAN (Drs. Kukul S. Achmad, Msc). Dalam sambutannya Kepala BSN menyampaikan saat ini lembaga sertifikat halal di Indonesia sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan adanya pengakuan ini, kegiatan ekspor ke Uni Emirat Arab dalam konteks pengakuan sertifikat halal menjadi lancar. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat akreditasi kepada mitra / instansi dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BSN dan KAN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2019 resmi dibuka oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Mohamad Nasir menyebutkan pentingnya akreditasi. Menurut Menteri Mohamad Nasir, akreditasi memiliki peran yang sangat penting dalam rantai pasok. Jaminan kesesuaian dengan standar / kualitas adalah hal yang mutlak dalam upaya meningkatkan daya saing produk. Mutu dan efisiensi merupakan kata kunci dalam daya saing global. BSN dan KAN selalu berupaya mempersiapkan infrastruktur mutu agar dapat memfasilitasi perdagangan barang atau jasa ke negara mitra.

Dalam pertemuan ini terdapat 2 (dua) diskusi panel yang terdiri dari 2 (dua) materi yaitu: Pentingnya Akreditasi Dalam Mendukung Pemenuhan Regulasi Rantai Pasok Dalam Negeri (dengan pembicara dari Kementerian Kominfo, Kementerian PU-PR, Kementerian Perdagangan) dan Peran Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Memfasilitasi Ekspor Indonesia Melalui Pemenuhan Persyaratan Rantai Pasok Global (oleh: Direktur PT. Mutu Agung Lestari, Direktur PT. Sucofindo, Direktur PT. TUV Rheinland Indonesia).

Pertemuan ditutup oleh Sekjen KAN, Drs. Kukuh S. Achmad, MSc dengan mengharapkan semoga acara ini bisa membawa banyak manfaat khususnya bagi penyelenggaraan perkembangan akreditasi dapat memberikan nilai tambah pada rantai pasok sehingga menjadikan produk dan jasa Indonesia semakin berdaya saing global.





### **Pelaksanaan Kajian Kualitas Rantai Dingin Penyimpanan Vaksin Anti Rabies di Kabupaten Boyolali**


Pada tanggal 26 dan 27 Juni 2019 Tim Bidang PTL BBTCLPP Yogyakarta berkunjung ke Kabupaten Boyolali dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian Kualitas Rantai Dingin Penyimpanan Vaksin Anti Rabies. Dalam kegiatan ini Tim melakukan kunjungan ke Dinkes Kabupaten Boyolali, selanjutnya dengan didampingi Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Boyolali (Teguh Tri Kuncoro, SKM., MPH) beserta Pengelola Program Imunisasi (Sriyani, SKM), Tim berkunjung ke Puskesmas Ampel I, Puskesmas Ampel II, dan RSUD Pandan Arang Boyolali. Tim melakukan wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies dan vaksin rutin lainnya, serta kalibrasi 2 buah refrigerator penyimpanan vaksin. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan dibuat laporan dan diberikan rekomendasi. Selain itu juga akan diberikan sertifikat kalibrasi untuk refrigerator yang sudah dikalibrasi Tim BBTCLPP Yogyakarta, dimana Lab. Kalibrasi BBTCLPP Yogyakarta sudah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2008. Rekomendasi dan kalibrasi nantinya diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies dan vaksin rutin lainnya di Kabupaten Boyolali.



## **Rapat koordinasi dan sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tentang Percepatan Eliminasi Malaria**

Dalam rangka mendukung upaya eliminasi malaria di Pulau Jawa Bali tahun 2023, pada hari jumat, tanggal 28 Juni 2019 bertempat di Gedung Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo diadakan sosialisasi Perbup No 17 tahun 2019 tentang Percepatan Eliminasi Malaria. Pertemuan yang dihadiri oleh sebanyak 74 orang stakeholder lintas sektor di Kabupaten Purworejo dan 2 orang dari BBTCLPP Yogyakarta yaitu Kepala BBTCLPP Yogyakarta, DR dr. Irene, MKN dan Kabid Surveilans Epidemiologi, Sayekti Udi Utama, SKM, M. Kes) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Purworejo Yuni Hastuti. dalam arahnya wabup purworejo berharap dengan terbitnya Perbub ini menunjukkan sebuah langkah dan kontribusi yang nyata dari pemerintah daerah dalam mendukung percepatan eliminasi malaria di Purworejo satu tahun lebih cepat Dari target Yang dicanangkan pada tahun 2023 di wilayah jawa dan Bali menjadi tahun 2022.


Selanjutnya sebelum paparan terkait sosialisasi Perbub no 17 tahun 2019 dari Kementerian Kesehatan Yang diwakili Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. Dr. Irene, MKM. menyampaikan paparan terkait situasi, upaya Dan tantangan eliminasi malaria di kawasan menoreh. Dalam paparannya Kepala Balai menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Purworejo Yang sampai bulan juni 2019 ini berhasil mempertahankan utk tdk terjadi kasus indegeunus di wilayahnya walaupun dengan tantangan yang sangat kompleks. Dalam bagian akhir beliau mengharapkan bahwa keberhasilan eliminasi malaria di Purworejo tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh semua OPD lain di Purworejo sehingga integrasi Dan sinkronisasi program antar OPD sangat diperlukan untuk sama-sama membuat gebrakan dalam upaya eliminasi malaria.



Paparan selanjutnya disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Purworejo dr. Sudarmi, M.Kes. Dalam paparannya beliau menyampaikan terkait materi situasi malaria di Purworejo tahun 2019 dengan penekanan materi terkait berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian eliminasi tahun 2022 serta harapannya pada semua OPD untuk bersama sama dalam penyelesaian malaria di Purworejo.

Pada bagian akhir material sosialisasi Perbub di sampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Dalam perbub no 17 tahun 2019 ini diatur terkait strategi dan peran lintas sektor dalam pengendalian malaria di Kabupaten Purworejo.

---





### **Rakordit Paripurna Ditjen P2P, Ruang Rapat 503 Kemenkes RI Jakarta**

BBTKL PP Yogyakarta sebagai salah satu Ditjen P2P hadir mengikuti Kegiatan Rakordit Paripurna, yang dihadiri langsung oleh Kepala BBTKL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM.

Acara diawali dengan Penandatanganan GNSTA (Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip) yang di tandatangi secara simbolis oleh 7 Perwakilan UPT P2P yaitu KKP Kelas 1 Soeta, KKP Kelas 2, KKP Kelas 3 dan KKP Kelas 4 Jogjakarta, BBTKL PP Jakarta dan BTKL PP Batam dan selanjutnya diikuti oleh semua kepala UPT.

Acara dilanjutkan dengan pelepasan PPIH dan TKHI dari Ditjen P2P Kemenkes RI.

Selanjutnya disampaikan arahan oleh Kepala Biro Umum, dr. Desak Made Wismarini, MKM, bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Arsip dan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/231/2017 tentang Pengelolaan Kearsipan pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka semua UPT harus juga melaksanakan GNSTA ini. Kepala Biro Umum Setjen Kemenkes menjelaskan kepada seluruh audiens/peserta rapat, bahwa salah satu tugas dan fungsi dari Biro Umum adalah sebagai Pembina Kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan, strategi apa yang harus dilakukan oleh masing-masing satuan kerja dalam keberhasilan menata kelola arsip agar dapat lebih tertib dan mudah untuk dicari kembali pada saat dibutuhkan.

Bapak Dirjen P2P dr. Anung Sugihantono, M.Kes menyampaikan bahwa Ditjen P2P sangat berkomitmen mensukseskan GNSTA, pengelolaan arsip yang tidak benar bisa mengakibatkan kita berurusan dengan hukum. Untuk itu dalam rangka mensukseskan GNSTA, pada hari ini Sekua UTP/Satker Ditjen P2P ikut menandatangani komitmen Pencanangan GNSTA dan dilanjutkan dengan sosialisasi selama 2 (dua) hari di Bogor.

Acara dilanjutkan dengan Presentasi dari Bapak Sesditjen P2P, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA dengan judul Evaluasi Kegiatan UPT Ditjen P2P Semester I Tahun 2019 dan dilanjutkan dengan diskusi, beberapa hal yang disampaikan adalah Capaian Kinerja Direktorat dan UPT yang tertinggi dan terendah, Capaian Kinerja Bulan Mei 2019, Capaian Kinerja dibanding dengan Realisasi Anggaran, Konsep Perencanaan Penganggaran UPT Tahun 2020-2024, Perubahan Konsep Perencanaan Tusi UPT, melalui Kegiatan baru khusus UPT dan dukungan manajemen serta Rancangan Pagi Indikatif Program P2P Tahun 2020.

Selanjutnya Dirjen P2P menyampaikan arahan dengan beberapa penekanan:

1. Tahun 2019 Akhir periode RPJMN 2014 – 2019 beberapa Kinerja KEMENKES belum menggembirakan khususnya berkaitan erat dengan Penyakit Tidak Menular (Perokok, Penderita Hipertensi dan Penderita DM).
2. Kinerja Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit SEMESTER 1 Tahun 2019 masih diwarnai KLB (Polio, Demam Berdarah, Difteri, Rabies, Leptospirosis, Anthraks dan Keracunan Makanan);
3. PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK diwarnai dengan klarifikasi HOAX/HOAKS dan KERAGUAN PEJABAT untuk memberikan keterangan pers karena minimnya data dan informasi yang diterima serta SITUASI POLITIK Pilpres.
4. PILPRES dan PEMILU SERENTAK terdapat POLARISASI SIKAP anggota institusi dan terbawa dalam institusi, kurang MEMAKNAI POSISI NETRAL BIROKRASI dalam ranah diskusi di ruang public.
5. PELAYANAN PADA SITUASI KHUSUS lebaran 1440H/2019 terdapat perubahan modus perjalanan, pergerakan masyarakat yang dikaitkan dengan situasi politik.

Disampaikan juga juga beberapa hal terkait administrasi kegiatan dan penganggaran Tahun 2020.



### **Pertemuan Sosialisasi Kantor Berhias, GNSTA dan SOP Bagian Tata Usaha BBTCLPP Yogyakarta**

Pada tanggal 3 Juli 2019 BBTCLPP Yogyakarta menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Kantor Berhias, GNSTA dan SOP Bagian Tata Usaha. Pertemuan ini dilaksanakan di aula lantai 3 kantor BBTCLPP Yogyakarta.

Acara diawali dengan sosialisasi SOP Bagian Tata Usaha yang disampaikan oleh Bagian Kepegawaian Christina Handayani, S.H. SOP yang disampaikan adalah SOP Absensi dan SOP Cuti. Ada beberapa pertanyaan dan masukan yang disampaikan, yaitu dari Nadia Regina Martanti, S.K.M., Indah Nur Haeni, S.Si., M.Sc, dr. Ratna Wijayanti dan Heldhi Broto K, S.K.M.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, M.K.M. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber dr. Desak Made Wismarini, M.K.M. dan jajarannya dari Biro Umum yang bersedia hadir untuk mengawal persiapan kantor berhias dan GNSTA (Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip). Acara ini menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 24 Juni 2019 yang telah ditandatangani kesepakatan bahwa BBTCLPP Yogyakarta akan segera menerapkan GNSTA. Untuk kantor berhias meskipun sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi namun belum ada satupun kantor yang menerapkan. Diharapkan BBTCLPP Yogyakarta menjadi yang pertama menerapkan kantor berhias ini. Peserta pertemuan adalah seluruh ASN, PPNPN dan outsourcing BBTCLPP Yogyakarta serta dari KKP Yogyakarta.

Sambutan kedua oleh dr. Desak Made Wismarini, M.K.M., Kepala Biro Umum yang menyampaikan tentang Salam Revolusi Mental Bidang Kesehatan. Pesan beliau agar hal tersebut dibiasakan dalam setiap rapat atau pertemuan. Selain itu juga disampaikan tentang Budaya Kerja Harian, yaitu : 1. Satu pekerjaan selesai setiap hari, 2.

Dua kebaikan minimal setiap hari, 3. Tiga S : Senyum, Sapa, Salam, 4. Empat menit sebelum pertemuan dimulai harus hadir, 5. Lima R : Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, termasuk paperless. Tentang arsiparis, belum ada BBTCLPP yang memiliki, BBTCLPP Surabaya baru dalam tahap pengajuan.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Kasubbag Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Edwin Arafat. Materi yang disampaikan tentang Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (Berhias) di Lingkungan Kantor Kemenkes RI. Aspek dalam kantor berhias adalah kantor ramah lingkungan, efisiensi energi, kearsipan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan 5 R. Kantor berhias intinya melakukan kegiatan green office. Kantor berhias merupakan aksi lokal dampak global yang dapat memberikan dukungan terhadap SDG's. Konsep green office terkait dengan pengelolaan gedung sesuai Permen PU No. 2 Tahun 2015. Konsep penyelenggaraan gerakan kantor berhias adalah rekayasa dukungan sarana dan prasarana, sosialisasi dan penyebarluasan informasi, penilaian mandiri, penilaian internal dan penilaian independen. Tahun 2019-2024 kantor berhias masuk dalam indikator Renstra.

Materi kedua disampaikan oleh Kasubbag Persuratan, Rosa Jaya. Materi yang disampaikan tentang Organisasi Kearsipan. Disampaikan antara lain tentang 9 langkah pelaksanaan GNSTA, Rumusan Kebutuhan Arsiparis, dan Pemusnahan Arsip. Arsip keuangan harus disimpan selama 10 tahun, arsip administrasi cukup 2 tahun. Pemusnahan arsip dapat dikirim ke Ses Unit Utama atau dapat pula dilakukan sendiri dengan catatan sudah mendapat rekomendasi dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Acara dilanjutkan tanya jawab dan diskusi. Pertanyaan diajukan oleh Kepala Bidang PTL, Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc, Kepala Bagian Tata Usaha, Dian Trikoriati, S.T., S.K.M., M.P.H., dan dari KKP Yogyakarta, Romi Arbanani.

Acara ditutup oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, M.K.M. dengan harapan apabila ada pelatihan/workshop tentang kearsipan agar BBTCLPP Yogyakarta diundang. Untuk kantor berhias BBTCLPP Yogyakarta sudah ada anggaran, mudah-mudahan Ibu Made dapat membantu penggunaan anggaran tersebut agar efisien dan tepat. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi semua.



### **Konsolidasi Budaya Kerja Pegawai Ditjen P2P di Kopeng, Salatiga**

Konsolidasi Budaya Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI, dilaksanakan pada tanggal 4-6 Juli 2019 di Kopeng Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini dihadiri oleh para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Ditjen P2P, terdiri dari Sekretariat, Direktorat P2PML, Direktorat P2PTM, Direktorat Surkakes, Direktorat P2PTVZ dan Direktorat P2MKJN dan Kepala UPT (KKP dan B/BTKL PP Se Indonesia)

BBTKL PP Yogyakarta dihadiri langsung oleh Kepala BBTKL PP Yogyakarta DR. Dr. Irene, MKM bersama Kepala Bagian Tata Usaha, Dian Trikoriati, ST, SKM, MPH dan Kasubag Prolap Dhelina Auza Utami, S.Si, Apt.

Kegiatan yang mengambil tema “Kebersamaan Guna Meningkatkan Kompetensi Apratur Sipil Negara (ASN) Dalam Menyambut Era Revolusi Industri 4.0” ini merupakan suatu forum yang sangat berharga, dimana para peserta bersama-sama saling berinteraksi mengikuti aktifitas-aktifitas yang diadakan sehingga akan meningkatkan keakraban dan kerjasamanya.

Acara pembukaan dilaksanakan di Hotel Laras Asri pada hari Kamis, 4 Juli 2019, diawali dengan penyampaian laporan kegiatan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, drg.Resi Arisandi, MHKes dan dilanjutkan dengan Pembukaan oleh oleh Sekretaris Ditjen P2P, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA yang membacakan sambutan Dirjen P2P , dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa Sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Upaya pemberdayaan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam bentuk proses dan hasil kerja merupakan hal yang perlu dilakukan. Dalam rangka meningkatkan kinerja seseorang khususnya yang terkait dengan perilaku, dirasa perlu tersedianya suatu program pelatihan yang terpadu, sistematis dan tepat yang dapat diimplementasikan secara bersama-sama.



Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui program peningkatan manajemen SDM (Capacity Building).

Selain itu, kata beliau bentuk dari Capacity Building ini merupakan suatu acara yang diadakan baik dalam ruangan maupun di alam terbuka yang mana di dalam acara tersebut para peserta akan dilatih fisik, mental dan disiplin untuk dapat menghadapi berbagai rintangan dan dilatih untuk mencari solusinya serta dilatih agar bisa bekerjasama dengan team (team work).

Adapun rintangan-rintangan itu sebenarnya adalah merupakan suatu latihan untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan-persoalan di dalam lingkungan kerja, jadi pada intinya kita dilatih untuk dapat mencari jalan keluar apabila diri kita mengalami berbagai persoalan, ujanya.

Di dalam acara capacity building ini kita lebih difokuskan untuk bisa membentuk Budaya Kerja yang baik dan positif, sehingga dapat bekerjasama di dalam team dan memupuk rasa solidaritas yang tinggi sesama peserta dan aplikasinya di dalam pekerjaan, agar ada toleransi di antara masing-masing unit kerja terkait dan tidak mementingkan diri sendiri (Super man to be super team), terutama dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.

Capacity Building akan membentuk suatu pribadi yang mandiri, tegar, rasa solidaritas yang tinggi sesama teman dan kerjasama teman yang baik maka suatu target akan lebih mudah tercapai apabila dilakukan secara kompak, bersama dan terarah, sehingga dengan kebersamaan akan mendapatkan sesuatu yang terbaik (Together to be better) yang dibacakan ada pembukaan kegiatan di Hotel Laras Asri, Kamis malam (4/7).

Selanjutnya dilakukan pemberian materi tentang team building, self development, conceptual thinking, effective leadership dan strategic decision making yang disampaikan oleh narasumber Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ., MPH.

Akhirnya dikesempatannya, Dirjen P2P, dr. Anung sugihantono, M.Kes saat hadir pada Hari ke-2 kegiatan tersebut yang dilaksanakan di D'Emmerick, pada 5 Juli 2019, menekankan bahwa kegiatan ini entah itu namanya capacity building atau apapun namun yang terpenting dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah Kebersamaan dan Kekompakan untuk membentuk tim yang Solid sebagai Keluarga Besar Ditjen P2P Kemenkes RI.



### **Implementasi Model / Teknologi sterilisasi alat makan dan Daily Air Purification ( sterilisasi udara ruang ) di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Provinsi JawaTengah.**

Pada tanggal 5 Juli 2019 dilaksanakan Kegiatan Implementasi Model/Teknologi sterilisasi alat makan dan Daily Air Purification ( sterilisasi udara ruang ) di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Provinsi JawaTengah.

Kegiatan ini diawali dengan diskusi rencana pelaksanaan kegiatan bersama Bapak Bambang Sumanto, S.H., M.M. Kepala Bidang BPKD Unit Pengelolaan Asrama Donohudan dan Bapak Joko Pujiyono Kepala Sub Bagian Umum Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Model/Teknologi sterilisasi alat makan dan Daily Air Purification ( sterilisasi udara ruang ) ini merupakan hasil inovasi dari Instalasi Laboratorium Penapisan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang berada di bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium BBTCLPP Yogyakarta.

Kegiatan Implementasi ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dilakukan sosialisasi kegiatan dan penggunaan alat serta dialog interaktif dengan petugas pengelola Asrama Donohudan dan pengolah makanan. Materi sosialisasi yang disampaikan berupa penggunaan Model/Teknologi Sterilisasi alat makan dan Daily Air Purification ( sterilisasi udara ruang ) yang akan dihibahkan, meliputi komposisi alat dan bahan, bagian-bagian alat, fungsi, kegunaan, cara kerja atau cara pemakaian dan cara perawatan alat.

Setelah sosialisasi, kemudian dilakukan Uji fungsi Alat.

A.Uji Fungsi Model/Teknologi sterilisasi alat makan oleh petugas BBTCLPP Yogyakarta dengan melakukan pengambilan sampel/ccontoh uji usap alat makan, sebanyak 9 (sembilan) contoh dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu contoh usap alat piring sebelum dilakukan sterilisasi
2. Satu contoh usap alat gelas sebelum dilakukan sterilisasi
3. Satu contoh usap alat sendok sebelum dilakukan sterilisasi
4. Satu contoh usap alat piring setelah dilakukan sterilisasi selama 30 menit
5. Satu contoh usap alat sendok setelah dilakukan sterilisasi selama 30 menit
6. Satu contoh usap alat gelas setelah dilakukan sterilisasi selama 30 menit
7. Satu contoh usap alat piring setelah dilakukan sterilisasi selama 45 menit
8. Satu contoh usap alat sendok setelah dilakukan sterilisasi selama 45 menit
9. Satu contoh usap alat gelas setelah dilakukan sterilisasi selama 45 menit

B. Uji fungsi Model/Teknologi Daily Air Purification ( sterilisasi udara ruang ) Petugas BBTCLPP Yogyakarta selanjutnya melakukan pengambilan contoh udara ruang di Gedung Mekkah, Lantai 1, Kamar no A1, sebanyak 4 (empat) contoh dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu contoh udara sebelum dilakukan sterilisasi
2. Satu contoh udara setelah dilakukan sterilisasi selama 30 menit
3. Satu contoh udara setelah dilakukan sterilisasi selama 45 menit
4. Satu contoh udara setelah dilakukan sterilisasi selama 60 menit


Kemudian dari sampel/contoh uji tersebut diperiksa di Instalasi Laboratorium Biologi Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta, untuk mengetahui efektifitas alat sterilisasi alat makan dan udara ruang.



## **Diseminasi Hasil Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Zoonosis yang Berpotensi KLB Di Kabupaten Bantul**


Diseminasi hasil kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Zoonosis yang Berpotensi KLB di Kabupaten Bantul dilakukan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada lintas sektor terkait dan sebagai sarana untuk melakukan advokasi terkait tindakan penanggulangan penyakit zoonosis yang berpotensi KLB di Kabupaten Bantul. Diseminasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2019 di Aula BBTCLPP Yogyakarta. Pertemuan dihadiri 25 orang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Puskesmas Pleret, Puskesmas Pleret, RPH Segoroyoso, Pemerintah Kecamatan Pleret, Pemerintah Desa Segoroyoso, Kelompok Ternak Sapid dan Kambing, dan BBTCLPP Yogyakarta.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Seksi Advokasi dan KLB, Ibu Dien Arsanti, S.K.M., M.Env. dan Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Bapak dr. Sri Wahyu Joko Santoso. Acara dilanjutkan dengan presentasi hasil surveilans faktor risiko lingkungan penyakit antraks yang dilakukan di Kabupaten Bantul oleh tim kegiatan BBTCLPP Yogyakarta, Pama Rahmadewi, S.K.M. Hasil kajian menunjukkan bahwa pH sampel tanah di TPH, RPH, dan kandang ternak di wilayah Desa Segoroyoso tempat kajian dilakukan berkisar antara 3 – 5, di bawah pH optimal (pH : 6) untuk bakteri Antraks dapat membentuk spora dan bertahan hidup pada jangka waktu lama. Seluruh sampel lingkungan berupa tanah, air, dan usap permukaan/lantai tempat pemotongan ternak dari TPH, RPH, dan kandang ternak di wilayah Desa Segoroyoso negatif *Bacillus anthracis*. Dalam pelaksanaan pemotongan hewan di RPH telah dilakukan pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan ternak dan desinfeksi sesuai panduan yang direkomendasikan.



Setelah presentasi hasil dilakukan diskusi. Dari hasil diskusi diketahui bahwa RPH Segoroyoso sudah merencanakan untuk membangun RPH dengan kapasitas yang diharapkan dapat menampung seluruh usaha potong hewan di wilayah Segoroyoso, selain itu komitmen dari dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas perdagangan sapi baik dalam kondisi hidup atau dalam bentuk daging terutama menjelang Hari Raya Kurban, Tim surveilans dinkes dan dinas peternakan akan tetap melaksanakan surveilans penyakit zoonosis pada manusia dan ternak, dan upaya saling menjaga baik dari masyarakat, peternak, pelaku usaha daging potong, pemotong ternak, Dinas Kesehatan, dan Dinas PPKP di wilayah Kabupaten Bantul dalam pemantauan penyakit zoonosis baik pada manusia ataupun pada tenak dan produk daging. BBTCLPP Yogyakarta juga akan tetap berupaya melakukan surveilans faktor risiko lingkungan terkait penyakit zoonosis di Kabupaten Bantul.

---






### **Survailen I Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta oleh Komite Akreditasi Nasional**

Pada tanggal 9 Juli 2019 telah dilakukan Survailen I Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Surveiln dilakukan oleh Tim Asesor yaitu Bp. Gangsar Sulistyarto dan Bapak Kuwat Triyana. Tujuan Survailen ini adalah untuk melihat kesesuaian dokumen sistem mutu dan implementasinya dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 guna mempertahankan status akreditasi Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta yang telah mendapatkan status akreditasi kembali pada tanggal 17 Oktober 2018.

Acara dibuka oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, MKM. Diharapkan agar Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta bisa mempertahankan status akreditasinya. Setelah itu disampaikan tujuan survailen dan dilanjutkan tinjauan ke laboratorium oleh Tim Asesor. Hasil dari surveilan ini adalah, Laboratorium telah berupaya untuk menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan konsisten, namun dalam operasinya masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian terkait Personel, Kaji Ulang Permintaan, Penanganan Peralatan, Ketidakpastian Metrologi, Pemastian Keabsahan Hasil, Pelaporan Hasil dan Audit Internal. Tim asesmen akan merekomendasikan agar status akreditasi tetap diberikan, bila seluruh ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti dengan baik dan berstatus memenuhi, dalam waktu yang telah disepakati.

Acara ditutup oleh Kabid PTL BBTKLPP Yogyakarta Indah Nur Haeni, SSI, MSc. Dalam penutupannya diucapkan terima kasih kepada Tim Asesor yang telah mengases dan memberikan masukan. Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta akan segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan waktu yang telah disepakati guna mempertahankan status akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017.




Setelah diberikan teori, dilanjutkan dengan praktek memadamkan kebakaran karena kebocoran gas elpiji dengan cara memutuskan sumber api, yaitu dengan menutup lubang elpiji dengan jari atau bisa juga dengan cara membawa elpiji keluar ruangan dan melepas regulator.

Kebakaran dapat dipadamkan dengan cara menutup sumber api menggunakan karung goni basah. Cara menutup sumber api dengan memperhatikan arah angin. Karung goni basah ditutupkan sesuai dengan arah angin. Setelah sumber api tertutup semua, tepuk-tepuk karung goni, jika keluar asap putih berarti api telah padam. Ambil karung goni tetap dengan posisi melindungi badan kita.

Kebakaran dapat pula ditanggulangi dengan menggunakan APAR. Cara mengambil APAR dengan memanggul di salah satu bahu dan memegang dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain untuk memegang kait. Letakkan APAR, tarik kait pengunci dengan satu tangan, tangan yang lain menahan tabung. Angkat tabung arahkan dan semprotkan searah dengan arah angin ke arah titik api sampai api padam semua.

Acara ditutup dengan praktek oleh perwakilan pegawai. Semoga sosialisasi penggunaan APAR bermanfaat. Untuk ke depan mungkin akan dilakukan simulasi kebakaran.

---





## Sosialisasi Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau fire extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau menanggulangi kebakaran kecil. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada umumnya berbentuk tabung yang diisi dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Dalam hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap Instansi dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan asset kantor. Semua karyawan/pegawai harus bisa menggunakan APAR.

Pada tanggal 12 Juli 2019 diadakan sosialisasi penggunaan APAR untuk seluruh pegawai BBTCLPP Yogyakarta. Praktek bertempat di halaman depan kantor yang dipandu oleh petugas dari PT. Pati Geni.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Bagian Tata Usaha, Dian Trikoriati, S.T., S.K.M., M.P.H. Diharapkan semua pegawai dapat mengikuti sosialisasi ini agar benar-benar paham cara menanggulangi kebakaran menggunakan APAR.

Sebelum dilakukan praktek terlebih dahulu disampaikan hal-hal penting terkait bencana khususnya kebakaran. Pada suatu kantor harus ada jalur evakuasi, titik kumpul yang dilengkapi dengan plang, dan alat-alat safety. Sosialisasi dan simulasi juga penting untuk dilaksanakan agar semua pegawai familiar menghadapi bahaya kebakaran baik di kantor maupun di rumah.

Kebakaran dapat terjadi salah satunya karena ledakan gas elpiji akibat kebocoran gas, sehingga sangat perlu melakukan pengecekan sebelum menggunakan gas. Caranya dengan memberi air pada ujungnya, jika ada gelembung berarti terjadi kebocoran. Selain itu dilakukan pengecekan selang dengan cara diberi busa sabun kalau ada retakan akan timbul gelembung yang menandakan adanya kerusakan selang.






### **Desk RKA-K/L Gelombang I Satker UPT dan Dekon Ditjen P2P TA. 2020**

Desk RKA-K/L Gelombang I Satker UPT dan Dekon Ditjen P2P T.A. 2020 dilaksanakan di hotel Harris Summarecon Hotel & Convention, Bekasi, pada tanggal 17-25 Juli 2019, BBTCL PP Yogyakarta dihadiri oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, Susilo, MKM, beraam pejabat struktural eselon II dan IV dan petugas perencanaan.

Pembukaan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2019 dilaksanakan pembukaan yang diawali dengan Laporan Kepala Bagian Program dan Informasi (dr. Elvieda Saraswati, M.Epid) selaku penyelenggara yang menyampaikan terkait rangkaian acara mulai tanggal 17 sd 26 Juli 2019 dan kepesertaan yang menghadiri.

Pertemuan dibuka oleh Setditjen P2P (dr. Asjikin Iman Dachlan, MHA) dengan pointer sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan pagu di kementerian kesehatan yang berdampak pada seluruh satuan kerja di lingkungan kementerian kesehatan
2. Dalam rangka menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan
3. Skala prioritas tersebut adalah:
  - a. Pemenuhan 001 dan 002
  - b. Pemenuhan kebutuhan target pencapaian prioritas nasional
  - c. Pemenuhan kebutuhan target pencapaian prioritas bidang
  - d. Pemenuhan kebutuhan belanja modal yang telah disetujui pada RKBMN
4. Satker untuk menyiapkan seluruh data dukung yang diperlukan dan menyusun RKAKL sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Diharapkan pereviu untuk melakukan tugasnya dengan intensif dan sungguh-sungguh agar diperoleh usulan perencanaan yang berkualitas




Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 dilanjutkan kembali paparan-paparan dari Narasumber unit utama yaitu Inspektur Jenderal Kemkes RI (Heri Radison, SKM, MKM) dan Kepala Bagian Program dan Informasi (dr. Elvieda Saraswati, M.Epid)

Selanjutnya pada tanggal 19-25 Juli 2019, Tim BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan Desk/Reviu RKAKL 2020:

1. Dengan direktorat dan PI Dirjen P2P dengan hasil reviu sesuai Catatan Hasil Desk (CHD), dilaksanakan penerbitan, penggandaan dan penandatanganan CHD.
2. Dengan Biro Perencanaan dan Anggaran dan diterbitkan draft CHP dari Roren.
3. Dengan Itjen Kemenkes RI dan dilakukan Penerbitan dan penandatanganan CHR

Semoga rangkaian kegiatan ini menghasilkan perencanaan yang berkualitas dalam mengukung tugas pokok dan fungsi BBTCL PP Yogyakarta.

---





## **Pertemuan Pembahasan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pontianak**

Kegiatan Pertemuan pembahasan laboratorium Kesehatan Masyarakat (Laboratorium Entomologi dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan) dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pontianak pada tanggal 19-21 July 2019. BBTCL PP Yogyakarta dihadiri langsung oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM bersama Kabag TU.



Kegiatan dimulai pada hari Jumat, jam 14.00 diawali dengan pembukaan oleh Sesdirjen P2P (dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA) dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Badan Litbangkes (dr. Siswanto, MPH, DTM) dengan judul Kebijakan Pengembangan Laboratorium di Indonesia.

Selanjutnya penyampaian materi oleh Direktur Kesehatan Lingkungan (dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO) dengan judul Kebijakan dan Strategi Direktorat Kesling di KKP dan B/BTKL PP.

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi dan Tanya Jawab dibawah pimpinan Kepala Badan Litbangkes

Pada hari Sabtu, 20 Juli 2019, kegiatan dimulai pada jam 09.00, diawali dengan Arahan dan Dirjen P2P (dr. Anung Sugihantono, M.Kes). Dilanjutkan dengan Pemaparan Kapus UKM Badan Litbangkes (Dr. dr. Vivi Setyawati, M.Biomed) dengan judul Peta Jalan Pengembangan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Selanjutnya dilakukan pembahasan Draft Permenkes Labkesmas, yang terdiri dari 19 Bab dan 24 Pasal.dengan beberapa point sebagai berikut:

- 
1. Bahwa untuk melakukan surveilans, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk laboratorium kesehatan masyarakat.
  2. Bahwa penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat dilaksanakan secara sinergi oleh laboratorium pusat dan daerah.
  3. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yg melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan/atau bidang lain penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- 
- 



## **Workshop Diagnosis Konfirmasi Laboratorium Penyakit Infeksi Emerging**

Penyakit Infeksi Emerging (Penyakit Infem) Adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya (new emerging infectious disease) atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru (re-emerging infectious disease). Penyakit ini disebabkan oleh Virus, Bakteri atau parasite dan berpotensi menimbulkan KLB, Pandemi atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Dari beberapa Kejadian Luar Biasa (KLB) yang pernah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) oleh WHO sebagiann besar adalah penyakit Infeksi seperti Avian Influenza (H1N1) pada tahun 2009, Poliomielitis dan Penyakit virus Ebola pada tahun 2014 dan tahun 2016 penyakit Virus Zika, hanya satu yang ditetapkan sebagai KKMMD yang bukan penyakit infeksi pada rentang waktu 2009-2016 yaitu Kebocoran reaktor nuklir pada tahun 2011. Penyakit Infem diantaranya yaitu Poliomielitis, Malaria, Avian Influenza H5N1, Leptospirosis, Hantavirus dan Ebola. Tidak semua penyakit Infem diketahui besaran masalahnya di masyarakat dan jika tidak terdeteksi maka akan menjadi ancaman munculnya KLB.

Hasil rikhus vektora tahun 2015-2018 yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Badan Litbangkes, menemukan pathogen penyebab penyakit Hantavirus di 29 Provinsi dengan Persentase tikus positif Hantavirus di Indonesia sebesar 6,08%, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Persentase Tikus Positif Hantavirusnya menduduki peringkat, berturut-turut, ke dua dan tiga di Indonesia. Menindaklanjuti temuan tersebut Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan melalui Subdit Penyakit Infem menyelenggarakan workshop diagnosis konfirmasi laboratorium penyakit infeksi emerging.

Workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan dini petugas kesehatan klinisi tentang hantavirus serta meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam penegakan diagnosis Hantavirus berbasis laboratorium yang diperlukan untuk deteksi dini dan merespon terhadap kejadian timbulnya penyakit tersebut. Workshop dilaksanakan di Hotel Grand Wahid Salatiga pada tanggal 24-28 Juni 2019. Peserta pertemuan sejumlah 64 orang terdiri dari UPT Ditjen P2P (B/BTKLPP), dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, Puskesmas terkait serta RS dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Banten, Sumatera Selatan, Kota Kupang dan Sulawesi Selatan. Dari BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh Dien Arsanti, SKM., M.Env dari Bidang SE dan Indaryati, S.ST. dari laboratorium Virologi.

Dalam kegiatan workshop tersebut beberapa Materi pertemuan yang disampaikan meliputi :

- 1.Kebijakan dan strategi Penyakit Infem oleh Kasubdit PIE, Dit. SKK, Ditjen P2P
- 2.Epidemiologi dan deteksi Hantavirus oleh Narsum dari B2P2VRP Salatiga
- 3.Sistem surveilans Penyakit Infeksi Emerging disampaikan oleh staf dari Subdit PIE
- 4.Hantavirus Infection: Clinical manifestation oleh dr. Muhammad Hussein Gasem, Sp.PD-KPTI,Ph.D.
- 5.Pedoman surveilans hantavirus dan pengisian formulir surveilans deteksi hantavirus oleh Kasubdit PIE, Dit. SKK, Ditjen P2P
- 6.Praktek identifikasi Hantavirus dengan metode biomolekuler di Laboratorium Virologi B2P2VRP Salatiga

Metode penyampaian materi dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi dan praktek. Pada hari pertama dan kedua dilakukan penyampaian materi secara ceramah di ruang pertemuan Hotel Grand Wahid Salatiga, yang diikuti oleh seluruh peserta pertemuan, dilanjutkan hari ketiga peserta yang berasal dari laboratorium melakukan praktek identifikasi hantavirus di Laboratorium B2P2VRP Salatiga sedangkan peserta yang lain mengikuti materi di ruang pertemuan Hotel Grand Wahid salatiga. Agenda hari keempat yaitu kunjungan ke B2P2VRP Salatiga untuk mengetahui proses deteksi virus di Laboratorium serta mengenal berbagai vector dan rodent yang dapat menyebarkan penyakit Infem.

Sebagai tindak lanjut dari workshop ini diharapkan RS, Puskesmas dan B/BTKLPP yang mempunyai wilayah sentinel leptospirosis melakukan surveilans syndrome untuk penyakit Hantavirus. Semua sampel dari kasus leptospirosis yang juga dicurigai sebagai kasus hantavirus diambil sampelnya berupa serum untuk kemudian dikirim ke laboratorium yang ditunjuk. Diharapkan dengan adanya surveilans syndrome mandiri yang dilakukan oleh RS, puskesmas atau B/BTKLPP tersebut akan diperoleh gambaran besaran kasus penyakit Hantavirus di masyarakat sebagai dasar bagi Subdit PIE untuk menyusun program pencegahan dan pengendalian penyakit Hantavirus




## **Diseminasi Hasil Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Bawaan Air Melalui Depot Air Minum (DAM) di Kabupaten Rembang Tahun 2019**

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian Kegiatan Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Bawaan Air Melalui Depot Air Minum (DAM) di Kabupaten Rembang maka pada tanggal 24-25 Juli 2019 tim kajian BTKLPP Yogyakarta melaksanakan diseminasi hasil. Pada tanggal 24 Juli 2019 petugas BTKLPP Yogyakarta diterima oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Nurani Her Utami didampingi Kepala Seksi Kesling Kesjaor Al Furqon, S.I.Kom,S.K.M. dan Progamer Kesling Rini Setyowati, S.K.M. Dalam pertemuan ini dibahas tentang persiapan diseminasi hasil yang akan dilaksanakan esok harinya tanggal 25 Juli 2019.

Pertemuan diseminasi hasil dihadiri sepuluh undangan yaitu dua petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dua petugas puskesmas, satu petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, lima perwakilan DAM.


Sambutan pertemuan oleh Kepala Bidang Kesmas dr. Nurani Her Utami. Dalam sambutannya disampaikan terima kasih kepada BTKLPP Yogyakarta atas kesediaannya memaparkan hasil kegiatannya. Ucapan terima kasih juga kepada semua undangan yang telah bersedia hadir. Diharapkan setelah mengetahui hasilnya dari pihak DAM dapat memperbaiki hal-hal yang masih kurang.



Sambutan kedua dari BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc. Disampaikan bahwa hasil yang akan dipaparkan adalah hasil secara umum tidak akan menyebutkan nama-nama DAM satu persatu karena kegiatan ini sifatnya pembinaan. Seandainya DAM minta hasilnya masing-masing dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, laporan per DAM dari BBTCLPP Yogyakarta akan diserahkan ke Dinkes Kabupaten Rembang.

Pemaparan hasil disampaikan oleh tim kajian Sri Ningsih, S.ST., M.T. yang dilanjutkan dengan diskusi (tanya jawab). Peserta terlihat sangat antusias dengan kegiatan ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pertanyaan ataupun masukan. Dari hasil yang telah dipaparkan diharapkan ada pembenahan yang dilakukan, misalnya kebersihan rangkaian peralatan DAM agar selalu dijaga, karyawan yang belum memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi DAM agar diikuti pelatihan, karyawan yang melayani pembeli seharusnya mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu, kuku tidak boleh panjang, pakaian harus rapi dan bersih. Setiap DAM harus menyediakan toilet, tempat cuci tangan dan sabun, tempat sampah tertutup dan kedap air. DAM tidak diperbolehkan melakukan penyegelatan, pemasangan label dan penyimpanan galon bermerk.

Pertemuan ditutup oleh Kepala Seksi Kesling Kesjaor Dinkes Kabupaten Rembang Al Furqon, S.I.Kom,S.K.M. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat dijadikan pemicu untuk membenahi DAM masing-masing sehingga memenuhi syarat dan pemilik DAM mematuhi persyaratan-persyaratan yang ada.








### **Jalan Sehat BBTCLPP Yogyakarta**

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-74 di BBTCLPP Yogyakarta akan diadakan serangkaian acara meliputi berbagai macam lomba dan upacara. Lomba-lomba yang akan diadakan antara lain lomba volly, tenis meja, memasukkan pensil dalam botol, membawa kelereng dengan sendok, makan pisang, memindahkan air dalam baskom, membawa tampah di atas kepala yang berisi bola.

Rangkaian acara diawali dengan dilaksanakannya jalan sehat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 yang diikuti oleh seluruh pegawai BBTCLPP Yogyakarta. Bendera start dikibarkan oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta. Rute yang ditempuh sejauh sekitar 3 Km menyusuri jalan kampung di sebelah timur kantor dan melewati situs cagar budaya Watu Gilang yang terletak di tengah-tengah pemukiman di Kampung Gilang, Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY. Dinamakan "Watu Gilang" mungkin karena letaknya ada di Kampung Gilang.

Watu Gilang berupa batu monolith dari batu tuffa (tuffa stone), bentuknya empat persegi panjang dengan relief di sisi-sisinya. Ukurannya cukup besar yaitu ukuran alas 255 cm x 260 cm x 100 cm, dan ukuran permukaan 240 cm x 230 cm. Pada bagian atas situs rata tidak ada ukiran, namun tepat di tengahnya terdapat lubang sedalam 15 cm dengan diameter 28 cm. Di setiap dinding badan memiliki 2 panel relief. Bentuk reliefnya sendiri menggambarkan berbagai macam binatang, serta dihiasi dengan ornamen bunga dan sulur-suluran.




Pada dinding batu sebelah Utara digambarkan ikan dan musang. Pada sisi Timur dihiasi dengan relief sapi dan kambing, pada sisi sebelah Selatan dihiasi dengan burung dan kuda dan pada sisi Barat terdapat relief Gajah dan Kuda Terbang, dengan sayapnya yang terkembang. Dari cerita mulut ke mulut, ada pendapat yang mengatakan bahwa penggambaran binatang-binatang itu merupakan simbol dari tokoh-tokoh wayang, yang tentu saja sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita sejak lama.

Itu sekilas tentang cagar budaya Watu Gilang.

Jalan sehat diakhiri dengan acara ramah tamah di area parkir. Makan bersama seluruh warga BBTCLPP Yogyakarta dengan sajian menu khas Yogyakarta yaitu angkringan lengkap dengan nasi kucing, telur puyuh, kacang rebus, pisang rebus, ketela rebus, berbagai macam gorengan dan dawet.


---






### **Pertemuan Deteksi Dini Kasus Hantavirus**

Infeksi hantavirus belum banyak dikenal oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun demikian, berdasarkan hasil Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit (Rikhus Vektora) yang diselenggarakan oleh B2P2VRP Salatiga, reservoir hantavirus ditemukan di 27 provinsi lokasi riset tersebut. Selain itu, beberapa penelitian melaporkan terjadinya infeksi hantavirus di Indonesia, walaupun besaran masalah yang sebenarnya belum dapat diidentifikasi karena deteksi hantavirus harus dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengidentifikasi besaran masalah infeksi hantavirus di Indonesia, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan melalui Subdit Penyakit Infeksi Emerging (PIE) berencana melakukan surveilans hantavirus. Untuk itu, pada tanggal 29-30 Juli 2019 dilaksanakan Pertemuan Deteksi Dini Kasus Hantavirus di Hotel Santika Yogyakarta. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan DIY, lima Dinas Kesehatan Kota/Kab di DIY, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan beberapa dinas kesehatan kabupaten di Jawa Timur, serta beberapa perwakilan puskesmas di DIY. BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh Kabid PTL, Ibu Indah Nur Haeni, S.Si., M.Sc dan fungsional epidemiolog dr. Dwi Amalia, M.P.H. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Prov. DIY, drh. Berty Murtiningsih, M.Kes mewakili Kepala Dinas Kesehatan DIY. Materi pertama dengan paparan dari Kasubdit PIE, tentang Kebijakan dan Strategi PIE. Selanjutnya materi mengenai Gambaran Klinis dan Tatalaksana Infeksi Hantavirus oleh Prof. dr. M. Hussein Gasem, Ph.D., Sp.D., KPTI, Epidemiologi dan Deteksi Dini Hantavirus oleh Arif Mulyono S.Si., M.Si., dan Pedoman Surveilans Hantavirus dan Surveilans



Menindaklanjuti pertemuan ini, akan dilaksanakan surveilans hantavirus di DIY yang melibatkan BBTKLPP Yogyakarta sebagai pemeriksa spesimen, dengan target pemeriksaan 100 spesimen hantavirus. Oleh karena gejala klinis awal infeksi hantavirus menyerupai gejala penyakit lainnya, spesimen pemeriksaan didapatkan dari kegiatan yang sudah berlangsung, yaitu Sistem Surveilans Sentinel Arbovirosis (S3A) dan Surveilans Leptospirosis. Selain itu, puskesmas yang hadir dalam pertemuan tersebut dipersilahkan untuk mengirimkan spesimen suspek leptospirosis ke BBTKLPP Yogyakarta untuk konfirmasi leptospirosis dan dilanjutkan dengan hantavirus. Identifikasi hantavirus di BBTKLPP Yogyakarta dilakukan menggunakan metode PCR.

---





### **Pertemuan Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Di Lintas Batas Jawa Barat - Jawa Tengah Tahun 2019**

Pertemuan ini dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait sebanyak 75 orang. Nara sumber pada pertemuan ini adalah Kemenkes RI, Dinkes Provinsi Jawa Tengah dan Dinkes Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pangandaran. BBTKL PP Yogyakarta dihadiri langsung oleh Kepala BBTKL PP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM dan Kabid Surveilans Epidemiologi, Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes.

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes dengan memberikan beberapa arahan diantaranya:

1. Dalam upaya perubahan menuju Paradigma Sehat, upaya pembangunan kesehatan berubah fokus ke arah promotif dan preventif namun tetap mengembangkan pelayanan kuratif secara optimal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi pelayanan jasa, semakin meningkat pula tuntutan masyarakat terkait inovasi upaya kesehatan. Pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu wilayah tidak dapat terlepas dari dampak wilayah lain khususnya yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Oleh karena itu kerjasama antar wilayah mutlak diperlukan.
2. Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memberikan peluang kepada setiap Provinsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk/sistem tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing termasuk dalam menjalin hubungan antar provinsi lainnya.

3. Dalam aspek kesehatan, sebuah daerah memiliki peran yang signifikan dalam berkembangnya sebuah kejadian kesakitan, khususnya wabah penyakit menular. Kemampuan sumber daya kesehatan tentunya akan menjadi suatu faktor utama dalam pengendalian kejadian kesakitan. Beberapa permasalahan kesehatan di Wilayah Lintas Batas Jawa Barat - Jawa Tengah, yaitu masih adanya masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki JKM tetapi harus mendapatkan pelayanan kesehatan, jauhnya jarak/akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, potensi penyebaran penyakit menular diantaranya zoonosis, malaria, kusta dan DBD.
4. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan UKM Sekunder. Jika untuk UKP dari puskesmas akan dirujuk ke RS secara berjenjang, maka untuk UKM dari puskesmas akan berlanjut ke Balkesmas sebagai UKM Sekunder yang saat ini sudah ada 5 (lima) Di Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 1 (satu) di setiap eks Keresidenan. 5 (lima) Balkesmas yang ada adalah Balkesmas Klaten, Balkesmas Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Magelang, Balkesmas Pati dan saat ini telah selesai dibangun Balkesmas Tegal untuk Eks Keresidenan Pekalongan dan kedepan akan disiapkan di eks Keresidenan Banyumas. Dan untuk selanjutnya BBTCL PP sebagai UPT Kemenkes akan menjadi UKM Tersier.

Sesi pertama diawali dengan presentasi oleh dr. Yulianto Prabowo, M.Kes tentang Situasi dan Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah dan Widyawati, SKM, M.Kes tentang Situasi dan Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Jawa Barat di moderatori oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta DR. dr. Irene, MKM.

Setiap sesi diikuti oleh diskusi dan tanya jawab. Sesi selanjutnya adalah Kebijakan Nasional P2TVZ yang disampaikan oleh Narasumber dari Direktorat P2PTVZ Kemenkes RI. Cross Notifikasi Kasus Malaria di Lintas Batas Jabar - Jateng oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupten Pangandaran, Situasi Pengendalian Kusta di Kabupaten Brebes oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan di Lintas Batas Jabar-Jateng dalam Upaya Pencegahan Rabies oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan kesepakatan.


Dengan adanya koordinasi lintas batas terkait penyakit diharapkan dapat terjalin komunikasi yang berkelanjutan serta terpetakan masalah di masing-masing provinsi yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersamayang berguna untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas.



### **On the Job Training (OJT) Kegiatan Surveilans Cacingan Pada Anak Sekolah di Kabupaten Purbalingga**


Cacingan merupakan satu dari 10 besar penyakit anak di Indonesia, dengan prevalensi tahun 2013 sebesar 22,6%. Dampak Cacingan pada anak usia sekolah dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan dan produktifitas penderitanya. Akibat lebih lanjut dari kekurangan gizi kronis adalah kegagalan tumbuh kembang (stunting). Untuk itu BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan Surveilans Cacingan Pada Anak Sekolah di 6 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah di Kabupaten Purbalingga. Tujuan kegiatan yaitu mengetahui prevalensi cacingan pada anak sekolah, oleh karena itu sasaran survei adalah siswa SD/MI di Kabupaten Purbalingga. Tahapan kegiatan terdiri dari sosialisasi teknis kegiatan kepada para pemegang program kecacingan di puskesmas, On the Job Training (OJT) pemeriksaan cacing bagi tenaga laboratorium puskesmas, pengumpulan data dan diseminasi hasil. Sosialisasi teknis telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2019. Untuk itu kegiatan dilanjutkan untuk tahap berikutnya yaitu OJT.

Kegiatan OJT dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2019 di Kabupaten Purbalingga. Hadir sebagai peserta yaitu 20 tenaga laboratorium puskesmas dan labkesda di Kabupaten Purbalingga. Training dibuka oleh Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Semedi, SKM, M.Kes, SH dan PIT Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi, BBTCLPP Yogyakarta, Dien Arsanti, SKM, M.Env.



Selanjutnya disampaikan mengenai gambaran singkat kegiatan surveilans cacangan pada anak sekolah oleh Pama Rahmadewi SKM dan dilanjutkan dengan penyampian teori mengenai Pemeriksaan Laboratorium cacangan dengan Metode KATO oleh Dwoyo Giyatmoko. Setelah teori dilanjutkan dengan praktek pemeriksaan cacangan. Disini peserta diminta untuk mempraktekkan pemeriksaan dengan menggunakan metode KATO. Setelah itu adalah diskusi teknis untuk pelaksanaan tahap berikutnya yaitu pengumpulan data. Hasil diskusi menyepakati pos pemeriksaan sampel cacangan dibuka di dua tempat yaitu di Puskesmas Bobotsari dan Labkesda Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan survei cacangan di Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan pada tanggal 9-13 September 2019. BBTCLPP Yogyakarta akan mempersiapkan tim dan logistik survei sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga akan berkoordinasi mengenai kesiapan personil dan tempat dengan seluruh puskesmas yang terlibat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kemanag Kabupaten Purbalingga.

---








## **Kunjungan kerja Menteri Kesehatan RI di RSUP Dr. Sardjito 7 Agustus 2019**

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM bersama Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Kirana Pritasari, MQIH dan Kepala Dinas Kesehatan DIY, drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes, Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM beserta rombongan mengunjungi Poli Geriatri yang berada di Gedung Instalasi Rawat Jalan RSUP Dr. Sardjito.

Kunjungan tersebut untuk memantau kesiapan RSUP Dr Sardjito dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia (lansia).

Sebagai rumah sakit rujukan nasional, menurut Direktur Utama RSUP Dr Sardjito DR.dr. Darwito, SH.,Sp.B.Onk(K) yang didampingi oleh jajaran manajemen lainnya, menyampaikan bahwa RSUP Dr Sardjito berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi lansia melalui pelayanan yang lebih komprehensif dari berbagai disiplin ilmu kedokteran. Salah satu terobosan layanan yang sedang dikembangkan antara lain Pelatihan layanan geriatri, Pelatihan persiapan pra pensiun, Pendidikan tenaga caregiver dan Pelayanan penitipan lansia. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan lansia dan memberikan kemudahan bagi para lansia.

Kepala Poliklinik Geriatri RSUP Dr Sardjito, Dr. dr. Probosuseno, Sp.PD, KGer, Finasim menyampaikan bahwa golongan lansia Indonesia saat ini masih banyak yang berkualitas rendah, banyak yang masih tergantung pada anak atau orang lain dan kurang produktif dan ini akan meningkat lebih baik dengan naiknya tingkat pendidikan mereka. Lebih lanjut Dr. Probo menyampaikan bahwa Para lansia yang menyandang masalah (37 % memiliki 4 penyakit atau lebih, 35% menyandang 3 penyakit) mereka perlu penanganan yang tidak sederhana. Mereka berobat ke PPK1, sering berlanjut ke PPK2, bahkan PPK3. Ada yang puas, ada yang menerima meskipun kurang atau tidak puas. Bagi yang memiliki ekonomi cukup akan mencari layanan konsultan Geriatrik (KGer).




Menkes menyebut pelayanan lansia di RSUP dr. Sardjito bisa menjadi proyek percontohan bagi RS lainnya. Terlebih RSUP dr Sardjito sudah menerapkan academic health system untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memang kebetulan kan yang usia harapan hidupnya yang paling tinggi di Kota Yogyakarta, 12% lansia ada di sini.

RSUP dr. Sardjito ini juga sudah membuat academic health system. Jadi bekerjasama dengan rumah sakit sampai ke puskesmas. Nanti pelayanan itu bukan hanya di sini. Tapi kita mulai dari puskesmas, ada puskesmas lansia, posyandu lansia.

Menkes berharap kalangan lansia bersedia secara rutin mengecek kesehatannya. Seperti mengecek kesehatan di poliklinik khusus lansia yang disediakan RSUP dr Sardjito. "Jadi kita meminimalkan. Tapi kalau sudah terjadi (sakit) kita juga menolong,".

---





### **Kajian Faktor Risiko Lingkungan Penyakit Antraks, Desa Ketro, Kecamatan Tenon, Kabupaten Sragen**

Pada tanggal 7 Agustus 2019 dilakukan pengumpulan data untuk Kajian Faktor Risiko Lingkungan Penyakit Antraks, dengan cara pengambilan sampel lingkungan berupa tanah tempat menyembelih hewan, tanah tempat mencacah hewan, tanah di sekitar waduk tempat membuang ternak hewan dan tanah kandang ternak pada masing-masing lokasi sebanyak 20 titik yang nantinya akan dikomposit dan diperiksa serta wawancara kepada penduduk sekitar untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang keberadaan kuburan bangkai atau sisa dari hewan ternak yang ada disekitar tempat tinggalnya. Pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan dilakukan oleh petugas BBVet Wates.

Tujuan dari kajian ini secara umum adalah untuk memperoleh peta sebaran faktor risiko lingkungan penyakit antraks di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada tahun 2019.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai kesiapsiagaan petugas dan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini penyakit antraks di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sehingga masyarakat serta pihak-pihak yang berwenang dapat menindaklanjuti dan mengevaluasi upaya kewaspadaan dini pencegahan dan pengendalian penyakit antraks.

Kegiatan diawali dengan koordinasi kembali dan tim BBTKL PP Yogyakarta, Kepala BBTKL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM bersama Kabid Surveilans Epidemiologi, Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes dan Tim Kajian yang terdiri dari Mieng Nova Sutopo, SKM, M.Kes, Dr. Hadi Sumanta, M. Kes, dr. Nur Subagyo HS, MPH dan Endang dari BBVET Wates. Tim diterima langsung oleh Kepala Dinas Kabupaten Sragen, dr. Hargiyanto, M.Kes didampingi Kepala Bidang P2P, dr. Agus Sudarmanto, M.Kes dan Kasi P2PM M.M. Sumiyati, SKM.


Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan Perangkat Desa dan Kecamatan sebelum tim turun ke lapangan. acara dilaksanakan di Kantor Desa Katro, yang dihadiri oleh Tim BBTCL PP Yogyakarta, Tim Dinkes Kabupaten Sragen, Tim Puskesmas Tenon II yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas Tanon II Triyanta, SKM, Kepala Desa Katro, Muspika Kecamatan Tanon yang terdiri dari Kapolsek Heru Budiarto, SH, MH, Danramil Wariyo, dan Sekretaris Camat Tanon. Selanjutnya tim melakukan pengambilan sampel di lapangan.

Gambaran umum Antraks atau anthrax adalah penyakit menular akut yang disebabkan bakteri *Bacillus anthracis* dan sangat mematikan dalam bentuknya yang paling ganas. Antraks paling sering menyerang herbivora-herbivora liar dan yang telah dijinakkan, namun juga dapat menjangkiti manusia karena terekspos hewan-hewan yang telah dijangkiti, jaringan hewan yang tertular, atau spora antraks dalam kadar tinggi. Meskipun begitu, hingga kini belum ada kasus manusia tertular melalui sentuhan atau kontak dengan orang yang mengidap antraks.

Antraks biasa ditularkan kepada manusia karena disebabkan pengeksposan pekerjaan kepada hewan yang sakit atau hasil ternakan seperti kulit dan daging, atau memakan daging hewan yang tertular antraks. Selain itu, penularan juga dapat terjadi bila seseorang menghirup spora dari produk hewan yang sakit misalnya kulit atau bulu yang dikeringkan, atau dari tanah kuburan ternak yang terbongkar. Spora *B. Anthrac* dapat bertahan di dalam tanah dalam waktu yang cukup lama dengan rata-rata hingga 60 tahun. Penanganan penguburan ternak yang mati akibat antraks yang kurang tepat sangat berisiko sebagai sumber penularan penyakit antraks bagi hewan ternak dan manusia jika tanah kuburan tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja terbongkar dan spora bakteri Anthrak terlepas ke permukaan tanah.

Kasus Antraks di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2010 di Desa Katro Kecamatan Tenon Kabupaten Sragen, dengan sumber penularan yang tidak diketahui secara pasti. Mobilitas ternak antar kabupaten dari wilayah Jawa Tengah ke DIY dan sebaliknya sangat dimungkinkan, hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging yang terus meningkat.


Mobilitas ternak dan atau daging ternak yang tidak terpantau kesehatannya sangat berpotensi untuk terjadinya penularan penyakit antraks pada hewan ternak maupun pada manusia. Disamping itu ada kemungkinan terbongkarnya tanah kuburan ternak terjangkit anthrak karena kuburan ternak tersebut sudah terlupakan.



Pencegahan dan pengendalian penyakit antraks dapat dilakukan secara terpadu antar instansi maupun lintas program. Kesiapsiagaan petugas kesehatan dan masyarakat tentang penyakit antraks perlu selalu ditingkatkan khususnya di wilayah yang pernah terjangkit antrak atau terduga Antrak yaitu Kabupaten Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul untuk wilayah D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Kab. Semarang untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah

Untuk itu BBTKLPP Yogyakarta sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan wilayah kerja D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengansalah satu tupoksinya adalah melakukan kajian dan evaluasi pengendalian penyakit menular, pada tahun 2019 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Sragen, Jawa Tengah, BBVet Wates, Puskesmas Tanon II dan Masyarakat, melaksanakan kegiatan kajian dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan pengendalian penyakit zoonosa khususnya penyakit Antraks.

---





### **Pertemuan Persiapan Implementasi eSIMDADU di UPT B/BTKL PP Se Indonesia (5 B/BTKL PP)**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai/ Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKLPP), diperlukan dukungan teknologi informasi berupa penggunaan aplikasi Elektronik Sistem Informasi Manajemen Data Terpadu (eSIMDADU).

Pertemuan koordinasi persiapan implementasi aplikasi eSIMDADU B/BTKL PP pada tanggal 8 s.d 10 Agustus 2019 dilaksanakan di Kantor BBTCLPP Yogyakarta, dibuka oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM.

Koordinasi ini bertujuan untuk membuat standarisasi alur dan format yang terdapat dalam aplikasi tersebut dan dihadiri oleh B/BTKL PP yang akan mengimplementasikan eSIMDADU, sebagai berikut:

1. BBTCL PP Yogyakarta
2. BBTCL PP Surabaya, Kasi PP dan Plt. Kasi TL Dwi Sulaksono, ST, M. Kes beserta tim.
3. BBTCL PP Jakarta, dihadiri oleh Kabid PTL dr. Grace Ginting Munthe, MARS beserta tim.
4. BTKL PP Kelas I Medan, dihadiri oleh Plt Kepala Priagung A. Bowono, SKM, M. Med, Sc (PH) beserta tim.
5. BTKL PP Kelas I Palembang, Kabid PTL Dr. Erma Gustina, ST, M. Kes beserta tim.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- 1.Seluruh peserta sepakat bahwa dalam penyusunan format output yang akan digunakan pada aplikasi eSIMDADU harus mengacu pada peraturan-peraturan/panduan yang berlaku. Format output yang akan disepakati meliputi form registrasi contoh uji, form distribusi contoh uji, form laporan/sertifikat hasil uji dan laporan eksekutif manajemen.
- 2.Seluruh peserta sepakat akan bersama-sama melaksanakan implementasi aplikasi eSIMDADU pada B/BBTKLPP dengan mengacu pada format output pada aplikasi yang telah disepakati bersama. Format output akan disampaikan sebagai lampiran dari kesepakatan.
- 3.Seluruh peserta sepakat akan bersama-sama dalam pelaksanaan implementasi aplikasi eSIMDADU, setiap B/BBTKLPP menunjuk 1 (satu) orang sebagai administrator aplikasi yang akan dijadikan sebagai technical support kepada user.
- 4.Seluruh peserta sepakat akan bersama-sama dalam pelaksanaan implementasi aplikasi eSIMDADU, apabila B/BBTKLPP belum memiliki perangkat hardware berupa server, maka akan aplikasi eSIMDADU yang digunakan akan ditempatkan pada server yang dimiliki oleh BBTKLPP Yogyakarta.
- 5.Penyusunan format pada aplikasi yang belum terselesaikan pada pertemuan ini terkait dengan kebijakan dengan Unit Utama (Dijten P2P), dapat dijadikan bahan diskusi dan rekomendasi pada rapat pimpinan.
- 6.Kegiatan penyusunan format dan implementasi aplikasi eSIMDADU sebaiknya melibatkan dari B/BBTKLPP lainnya.



### **Konsultasi Teknis Pengembangan TGT di Pusat Teknologi Lingkungan BPPT dan Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Jakarta**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBTCLPP Yogyakarta pada pengembangan teknologi tepat guna dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi tepat guna, maka BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan konsultasi teknis ke Pusat Teknologi Lingkungan BPPT dan Balai Besar Kimia dan Kemasan yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2019.

Konsultasi ke Pusat Teknologi Lingkungan BPPT bertujuan untuk konsultasi teknis terkait uji desain dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan teknologi tepat guna di BBTCLPP Yogyakarta. Pada kunjungan ini tim BBTCLPP Yogyakarta ditemui oleh beberapa peneliti yaitu Bapak Wahyu Widayat (Peneliti di bidang pengolahan air dan limbah), Bapak Sri Wahyonno dan Bapak Firman (Peneliti di bidang pengolahan sampah) dan Ibu Amita Indah Sitomurni (Perekayasa di Bidang Kimia). Lokasi kantor BPPT berpusat di Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, sedangkan untuk kunjungan lapangan dilakukan di kantor Pusat Teknologi Lingkungan BPPT yang terletak di Gedung Geostech Puspiptek Serpong.

Pada tahun 2019, BBTCLPP Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengolahan air untuk Fe dan Mn tinggi dan air payau, konsultasi ini difokuskan terkait pengolahan tersebut, apakah desain yang dibuat sudah sesuai atau masih memerlukan penyempurnaan serta bagaimana solusi dari kendala-kendala yang dihadapi.

Disampaikan oleh Bapak Wahyu Widayat, beberapa pengolahan air yang sudah dikembangkan oleh Pusat Teknologi Lingkungan BPPT diantaranya: Pengolahan Fe dan Mn, Pengolahan Air Payau, Pengolahan Air Gambut, Pengolahan Air Kesadahan tinggi, Pengolahan air terintegrasi dengan pengolahan limbah. Pengolahan yang sudah dilaksanakan ada skala nasional dan internasional.



Selain itu, pada tahun 2020, BBTKLPP direncanakan akan mengembangkan teknologi tepat guna pengolahan sampah domestik dengan konsep recycle, reduce dan reuse sehingga diperlukan informasi ke institusi lain yang sudah pernah mengembangkan seperti di Pusat Teknologi Lingkungan BPPT ini. Untuk aplikasi pengolahan sampah di kantor Pusat Teknologi Lingkungan BPPT sendiri sudah dilaksanakan dengan dibuat menjadi kompos. Pengolahan sampah pada umumnya dapat diolah menjadi biogas dan dibuat kompos. Kemudian sampah plastik dan kertas dapat dikumpulkan di bank sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk lain.

Konsultasi teknis ini dilanjutkan ke Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian Perindustrian untuk mengetahui tentang kualitas produk bahan alami sehingga tahu cara penyimpanan, penentuan masa kadaluarsa dan bagaimana penentuan terhadap bahan aktif yang terkandung dalam bahan alami tersebut.

Pada konsultasi teknis ini, tim BBTKLPP Yogyakarta ditemui oleh Kepala Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi (Ibu Nur Hidayati) dan staf. Dijelaskan bahwa Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). BBKK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standarisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri kimia dan kemasan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Adapun beberapa penelitian dan alih teknologi yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Kimia dan Kemasan antara lain: Penelitian tentang pewarna alami makanan yang berasal dari ubi ungu, daun suji dan kayu secang dan alat perangkap nyamuk dengan memanfaatkan limbah tambang PT. Timah yaitu  $TiO_2$ , bahan ini dapat menghasilkan aroma seperti aroma tubuh manusia sehingga dapat menarik nyamuk.

Diharapkan konsultasi teknis ini dapat meningkatkan wawasan personil di BBTKLPP Yogyakarta dan dapat mengembangkan teknologi tepat guna yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.



### **Penyerahan Hasil Medical Check Up**

Menindaklanjuti surat dari Dirjen P2P Nomor KP. 05.04 / IV/114/2019 tentang pemeriksaan kesehatan untuk aparatur Negara di lingkungan Kemenkes dan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi, maka pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.00 – selesai telah dilaksanakan General Medical Check Up (MCU) di RSUP. Dr. Sardjito, Yogyakarta yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural eselon 2, 3 dan 4 BBTCLPP Yogyakarta.

Pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 dilaksanakan kegiatan penyerahan hasil tes MCU tersebut oleh petugas dari RSUP. Dr. Sardjito, Yogyakarta di ruang rapat kepala BBTCLPP Yogyakarta. Hasil MCU diserahkan kepada masing – masing peserta untuk diberi penjelasan tentang hasil MCU tersebut oleh pihak rumah sakit.

Adapun pemeriksaan MCU meliputi:

1. Pemeriksaan Dokter Spesialis penyakit dalam
2. Pemeriksaan Dokter Spesialis THT
3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata
4. Pemeriksaan Dokter Spesialis obsgyn
5. Laboratorium :
  - DLO (Darah lengkap Otomatis)
  - Urin Rutin Full Otomatik
  - ALT / SGPT
  - AST / SGOT
  - Asam Urat
  - Gula Darah Puasa
  - Gula darah 2 jam setelah makan
  - Ureum / BUN
  - Kreatinin
  - Kolesterol
  - Trigliserid
  - AFP
  - CEA

- 6.Rontgen Thoraks (GCU)
- 7.ECG Biasa / Simple
- 8.Histokimia (Patologi Anatomi)
- 9.Pemeriksaan Sitologi Pap Smear
- 10.Pendaftaran
- 11.Rangkuman
- 12.Konsumsi

Dengan dilaksanakannya MCU tersebut diharapkan dapat mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini, sehingga para pegawai ASN khususnya para pejabat struktural BBTCLPP Yogyakarta dapat melakukan evaluasi diri terhadap kesehatan masing – masing.



### Simposium Pengembangan Industri Obat Tradisional dan Peningkatan Penggunaan Obat Tradisional 2019

Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) membuka "Simposium Pengembangan Industri Obat Tradisional dan Peningkatan Penggunaan Obat Tradisional 2019" yang dilaksanakan di Yogyakarta, 20-21 Agustus 2019.

Pembukaan Simposium diisi dengan Laporan Panitia Penyelenggara oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI., Dra. Engko Sosialine, Apt., M. Biomed., Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si. Dilanjutkan dengan Sambutan dan Pembukaan oleh Menteri Kesehatan RI., Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K). Dilanjutkan Minum Jamu Bersama.

Kegiatan simposium diikuti oleh Academic, Business, Government & Community. BBTCL PP Yogyakarta dihadiri oleh Kepala BBTCL PP, Dr. dr. Irene MKM.

Usai pembukaan dilanjutkan dengan Kunjungan Pameran yang diikuti oleh 20 Industri Obat Tradisional yang memproduksi Obat Fitofarmaka dan Obat Herbal Terstandar dan lain-lain.

Kegiatan hari Selasa, 20 Agustus 2019, dilanjutkan dengan Diskusi Panel 1:

1. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Industri Obat Tradisional dan Peningkatan Penggunaan Obat Tradisional (Direktur Jenderal Farmalkes)
2. Peluang Pengembangan Obat Tradisional Indonesia (Dr.rer.nat. Nanang Fakhruddin, M.Si, Apt.)
3. Perspektif Industri terhadap Penggunaan Obat Tradisional di Sarana Pelayanan Kesehatan (Ketua GP. Jamu)

Selanjutnya pada Diskusi Panel 2 disampaikan materi:

- 1.Pemanfaatan Obat Tradisional di Puskesmas (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)
- 2.Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Rumah Sakit Pendidikan (RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta)  
Kegiatan hari pertama diakhiri dengan dialog ABGC (Academic, Business, Government & Community)

Kegiatan hari Rabu, 21 Agustus 2019, akan diisi dengan diskusi panel:

- 1.Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional dengan 12 Formula Ramuan Jamu dalam Program Sainifikasi Jamu (Kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan)
- 2.Pemanfaatan Obat Tradisional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional)



### **Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) Ke 8 Tahun 2019**

Kegiatan diawali dengan Opening Ceremony oleh dr. Ketut Suarjaya, MPPM, dilanjutkan dengan Commite Report oleh drg. R. Vensya Sihotang, M.Epid dan selanjutnya dibuka oleh Dirjen P2P dr. Anung Sugihantono, M.Kes pada tanggal 20 Agustus 2019 dan menyampaikan Keynote Specch yang berjudul The Role of Field Epidemiologist on Disaster Risk reduction. BBTCL PP Yogyakarta Dihadiri oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM.

Dilanjutkan dengan Plenary Session 1 : Disaster Risk Management dimoderatori oleh Dr. dr. tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc

Selanjutnya pada hari kedua Conference diawali dengan Plenary Session 2 : Surveillance dimoderatori oleh Ansariadi, S.KM, M.Sc, Ph.D, dengan 4 topik yaitu:

- 1.GOARN oleh WHO Indonesia
- 2.Early Warning and Response in Indonesia oleh drg. R. Vensya Sihotang, M.Epid (Director of Direktorat of Surveillance and Health Quarantine, MoH)
- 3.Storm of AFP Surveillance in Papua oleh DR. dr. Hariadi Wibisono, MPH (PAEI)
- 4.Diseases Vector and Reservoir Distributions in Indonesia oleh Drs. Ristiyanto, M.Kes (B2P2VRP Salatiga)

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian Poster Presentation.

Setelah istirahat makan siang, dilanjutkan dengan Oral Presentation Session 9-12, diawali dengan :

- Session 9 : Zoonotic Deseases, HIV-STI
- Session 10 : Food and Water Born Diseases 4
- Session 11 : Food and Water Born Diseases 5
- Session 12 : Vaccine Preventable Diseases




## **Diseminasi Informasi Hasil Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit di Lingkungan Asrama Haji Tahun 2019**

Pada tanggal 20 Agustus 2019 dilaksanakan Diseminasi Informasi Hasil Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit di Lingkungan Asrama Haji tahun 2019. Bertempat di ruang pertemuan VIP Gedung Madinah Lantai 1 Asrama Donohudan, Boyolali. Dihadiri 12 tamu undangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Puskesmas Kecamatan Ngemplak, KKP Semarang, Penyedia Katering Al Hikmah selaku penyedia catering selama embarkasi/debarkasi haji 1440 H tahun 2019 dan Pengelola asrama Donohudan.

Yang pertama sambutan dari Kepala Bidang BPKD Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Bapak Bambang Sumanto, S.H., M.M yang menyampaikan bahwa mulai tahun 2019 asrama haji Donohudan dengan SOTK baru menjadi Asrama Donohudan yang direncanakan digunakan untuk banyak kegiatan tidak hanya pelayanan haji saja dengan target PAD 5,3 M per tahun. Diharapkan dari kegiatan yang dilakukan dapat menjadi masukan karena tahun 2020 akan disusun DED pembangunan gedung dan dibangun tahun 2021. Ucapan terimakasih atas pemberian alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berupa alat sterilisasi alat makan dan ruang. Untuk Alat makan diletakkan di ruang makan gedung Makkah Lt 2, sedangkan alat sterilisasi udara ruang di operasikan di ruang inap calon jamaah haji gedung Makkah Lt 2 asrama donohudan, semoga ke depan bisa terjalin kerjasama yang lebih baik lagi dalam upaya mengantisipasi faktor risiko penyakit bagi calon jamaah haji.

Yang ke dua dari Kepala Seksi KKO Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Boyolali melaksanakan IKL asrama dan jasa boga serta sosialisasi bagi 60 orang penjamah makanan di luar asrama.




Kemudian yang ketiga oleh Kepala Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia mewakili Kepala BBTCLPP Yogyakarta sekaligus membuka acara Bapak Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc menyampaikan permohonan maaf ibu kepala Balai masih dalam perjalanan ke Donohudan karena mendampingi ibu menteri pada kunjungan ke DIY hari ini.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil kegiatan disampaikan oleh ketua tim Bapak Suharsa, S.ST, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Disepakati bahwa Kegiatan yang dilakukan BBTCLPP Yogyakarta ini bukanlah penelitian melainkan surveilans atau pemantauan yang hasilnya menjadi masukan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan. Apabila dalam pelaksanaan tahun ini ada yang terlewatkan akan dilakukan perbaikan di tahun yang akan datang untuk kelengkapan dan perbaikan data. Untuk perbaikan pelayanan Asrama Donohudan perlu dilakukan optimalisasi IPAL, saat ini IPAL sudah cukup efektif menurunkan kadar pencemar pada limbah cair yang dihasilkan, namun belum sampai memenuhi Nilai Ambang Batas yang dipersyaratkan.

Pada pertemuan ini kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr Irene, M.K.M memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kegiatan, sekaligus menutup pertemuan dengan menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Hasil kegiatan yang ada hendaknya menjadi masukan perbaikan di masa yang akan datang demi meningkatkan pelayanan bagi calon jamaah haji di Donohudan.

---








## **Diseminasi Hasil Kajian Faktor Risiko Flu Burung di Kabupaten Bantul Tahun 2019**

Pertemuan Diseminasi Hasil Kajian Faktor Risiko Flu Burung di Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 di RM Parangtritis, Gabusan, Bantul. Pertemuan ini dihadiri oleh 70 orang dari Direktorat P2PTVZ Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Peternakan Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Balai Besar Veteriner Wates, 10 Puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul, enam Puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul, tujuh Kecamatan yang menjadi lokasi kegiatan, delapan Desa yang menjadi lokasi kegiatan, 12 peternakan yang disurvei, dan BBTCLPP Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Bapak Joko Waluyo, S.Pt., M.Si. Selanjutnya disampaikan materi pertama tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis (Flu Burung) oleh Direktur P2PTVZ Ditjen P2P Kemenkes RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi, M.Epid.

Materi kedua disampaikan oleh Bapak Joko Waluyo, S.Pt., M.Si. dengan judul Strategi Pengendalian Flu Burung di Kabupaten Bantul. Kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil Kajian Faktor Risiko Flu Burung di Kabupaten Bantul Tahun 2019 oleh Kepala Seksi Lingkungan Biologi, Ibu dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.


Diakhir acara, Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Ibu Dr. dr. Irene, M.K.M. menyampaikan materi ketiga tentang Penggulungan Flu Burung pada Manusia sekaligus memberikan kesimpulan dan menutup acara pertemuan.



Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 47 spesimen yang diambil di 12 peternakan yang disurvei, terdapat 13 spesimen di enam peternakan yang positif Influenza tipe A dengan tiga spesimen di satu peternakan diantaranya yang positif H5N1.

Pada setiap sesi materi ataupun paparan dilakukan diskusi dan tanya jawab. Beberapa hal yang disampaikan pada sesi diskusi yaitu kebutuhan peternak akan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat terutama cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar, adanya program vaksinasi dan desinfeksi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Y. dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang dapat dimanfaatkan oleh peternak, Puskesmas siap memberikan edukasi tentang pelaksanaan vaksin dan desinfeksi, serta Dinkes dan Puskesmas berharap jejaring pengendalian flu burung tetap terjalin.

---






### **Malam Penghargaan Publikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Tahun 2019**

Kementerian Kesehatan menggelar Acara Malam Penghargaan Publikasi dan Pelayanan Publik di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019. Dalam kegiatan itu, Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Yogyakarta sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Ditjen P2P yang berkedudukan di Yogyakarta dengan 2 (dua) wilayah layanan yaitu Provinsi DIY dan Jawa Tengah meraih 4 (empat) Penghargaan yang langsung diterima oleh Kepala BBTKL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM, yaitu:

1. Juara 1 Kompetisi Penilaian Kepatuhan PPID Satker dan UPT
2. Juara 2 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kolaborasi Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Monster Da Ruwat RS (Mikro Organisma Nosokomial Sterilisator Udara Ruang Perawatan Rumah Sakit)
3. Juara 3 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kolaborasi Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Steam Asraji (Sterilisasi Alat Makan di Asrama Haji)
4. Juara Harapan I Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Inklusif Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat, Desa Secodi (Desinfeksi Air Sederhana Berupa Clorin Difuser)

Acara ini merupakan kedua kalinya digelar oleh Kemenkes, hadir dalam kesempatan ini Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M(K), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin, M.Si, Sekjen Kemenkominfo Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si, Ketua Ombudsman Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, Ketua Komisi Informasi Pusat Drs. Gede Narayana, M.Si, Kepala Perpustnas Drs Muh. Syarif Bando, MM, Deputy Bidang Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. serta para pimpinan madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan.




Ketua Ketua Komisi Informasi Pusat Drs. Gede Narayana, M.Si, secara langsung menyerahkan penghargaan untuk kategori Kompetisi Penilaian Kepatuhan PPID Satker dan UPT, dimana BBTCL PP Yogyakarta menjadi pemuncak pada kategori ini.

MenPANRB Drs. Syafruddin, M.Si, menyerahkan penghargaan kategori Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berkinerja Tinggi dimana BBTCL PP Yogyakarta mendapatkan 3 (tiga) penghargaan dari 12 penghargaan di kategori ini, beliau mengapresiasi para pemenang pada kategori tata kelola pelayanan publik. Menurutnya, semangat memberikan inovasi pada bidang pelayanan publik meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia menjuarai ajang United Nations of Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan oleh PBB dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2017 dan 2018.

Dalam kesempatan itu, Menkes mengatakan media massa memiliki kekuatan besar dalam kehidupan masyarakat. Di era yang serba digital saat ini, kekuatan media jadi semakin menonjol.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi berharap terselenggaranya acara ini membuat semakin luas informasi yang didapat masyarakat. Kemudian juga makin meningkatkan perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Lomba dilaksanakan secara terbuka dan dinilai oleh juri independen selain dari pemilik program. Perbaikan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda prioritas Kemenkes. Inovasi pelayanan publik bagi unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan fungsi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan pelayanan publik. Inovasi diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.





### **Seminar Hari Pengendalian Nyamuk Tahun 2019**

Dalam rangka menyambut Hari Pengendalian Nyamuk (2019), Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan Seminar Nasional HPN 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Semarang.

Kegiatan ini dihadiri oleh para peneliti, dosen, mahasiswa, tenaga entomolog, petugas kesehatan di Puskesmas, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai/Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKL PP), Litbang, pest control dan praktisi di bidang vector control. Pada Seminar HPN ini BBTCL PP Yogyakarta dihadiri oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM, Kabid Surveilans Epidemiologi Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes, Kabid ADKL Feri Astuti, ST, MPH, dan 3 (tiga) orang Entomolog yaitu Dr. Andiyatu, SKM, M.Si., Yohanes Didik Setiawan, S.Si. M.Sc dan Yuli Patmasari, Am.KL.

Penyakit tular vektor, khususnya nyamuk masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia. Target Kementerian Kesehatan RI saat ini di antaranya tahun 2025 mencapai eliminasi filariasis (kaki gajah) dan reduksi demam berdarah, dan penyakit malaria bisa tereliminasi pada Tahun 2030. Demam berdarah, malaria juga kaki gajah adalah sebagian dari penyakit yang ditularkan oleh sektor nyamuk. Untuk mengoptimalkan pencapaian target, maka dukungan semua pihak dibutuhkan, di antaranya masyarakat. Pengendalian secara lintas sektoral merupakan upaya preventif pencegahan penyakit-penyakit tersebut.

Dalam 30 tahun terakhir ini, Indonesia mengalami transisi epidemiologi yaitu suatu kondisi berubahnya pola masalah kesehatan yang ditandai dengan beban ganda atau double burden dari pelayanan kesehatan. Pada kondisi itu, di Indonesia, penyakit menular termasuk penyakit tular vektor masih merupakan masalah kesehatan, sedangkan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas akibat penyakit tidak menular semakin meningkat.

Kegiatan ini diawali dengan Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Kes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P Kemenkes RI, tentang pelaksanaan dan tujuan kegiatan ini.

Selanjutnya adalah Pelantikan SICENTIK oleh Ketua TP PKK Kota Semarang Krisseptiana Hendrar Prihadi yang kemudian menyanyikan lagu Pemantau Jentik. SICENTIK adalah kegiatan Siswa/siswi di SD/ sederajat dan SLTP/ Sederajat diajak untuk memantau jentik di rumah masing-masing setiap hari Minggu dan dilaporkan kepada guru kelas setiap hari Senin.

Di Kota Semarang, pengendalian lintas sektoral sangat baik, diantaranya peranan tim penggerak PKK Kota Semarang lewat gerakan satu rumah satu jemantik yang berkontribusi terhadap pengendalian demam berdarah di Semarang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Yulianto Prabowo, M.Kes, menyampaikan bahwa berkehidupan secara bersih dan sehat perlu terus ditanamkan, hal lain yang diterapkan di antaranya mendorong dokter klinik di setiap klinik di Jateng menguasai 155 diagnosis penyakit termasuk diagnosis Demam Berdarah Dengue yang disebabkan nyamuk *Aedes aegypti* ini. Penyakit dengue diklasifikasikan menjadi tiga, yakni DBD atau Dengue Hemorrhagic Fever, Dengue High Fever (DHF) dan Dengue Shock Syndrome (DSS). DHF dan DSS urusan rumah sakit. Tetapi masyarakat terkena DBD harus bisa didiagnosis oleh dokter klinik dan puskesmas.

Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis Undip, Dr. Darsono, S.E., Akt., MBA menyampaikan bahwa seminar ini diinisiasi oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip dan Kemenkes. Semoga lewat ini, ada pemecahan masalah agar penyakit-penyakit tersebut kasusnya cepat berkurang.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan (Menkes) Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM(K) pada "Seminar Nasional Peringatan Hari Pengendalian Nyamuk 2019" yang dibacakan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes disampaikan, kondisi yang sama juga terjadi di banyak negara berkembang. Beberapa pakar menyebut kondisi itu sebagai triple burden karena mereka memisahkan penyakit menular dengan kecelakaan/ruda paksa atau injury. Mengingat potensi penyebaran penyakit tular vektor yang sangat banyak dan wilayahnya sangat luas, maka upaya melakukan pengendalian vektor tanpa mengganggu ekosistem menjadi ujung tombak dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor di Indonesia.

Pengendalian vektor tidak sederhana karena berkaitan dengan lingkungan sebagai tempat perkembangbiakan yang pada beberapa kesempatan ada hubungannya dengan sumber perekonomian masyarakat. Selain itu juga berkaitan dengan perilaku masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai determinan kehidupan sosial kemasyarakatan atau kultural di masing-masing daerah.

Pengendalian vektor menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, akademisi dan/ atau dunia usaha.

Di negara tropis seperti Indonesia, nyamuk dengan mudah berkembang biak karena mempunyai habitat yang sesuai, seiring dengan meningkatkan mobilitas penduduk. Kondisi ini menyebabkan transmisi penyakit tular nyamuk dapat terjadi di mana saja bukan hanya di kota, namun juga di desa bahkan di daerah pegunungan atau rawa, hutan bakau dan berbagai ekosistem lainnya.

Usai Sambutan Dirjen P2P dilakukan Penyerahan Rekor MURI Nomor 9130 untuk Survei Nyamuk Dengan Spesies Terbanyak, dimana Kemenkes RI (Ditjen P2P dan Litbang-BP2PRV Salatiga) melakukan pengumpulan spesimen nyamuk dari 29 Provinsi di Indonesia melalui Rikhus Vektora pada tahun 2015 hingga 2018. Hasil penelitian tersebut telah terkumpul 221 spesies dan 18 genus yang terdiri dari 55 spesies *Aedes*, 45 spesies *Anopheles*, 1 Spesies *Aedeomyia*, 15 spesies *Armigeres*, 39 spesies *Culex*, 4 spesies *Coquillettidia*, 1 Spesies *Ficalbia*, 1 spesies *Heizmannia*, 4 spesies *Lutzia*, 1 spesies *Malaya*, 8 spesies *Mansonia*, 3 spesies *Mimomyia*, 2 spesies *hodgesia*, 5 spesies *Topomyia*, 4 spesies *Toxorhynchites*, 5 spesies *Tripteroidea*, 27 spesies *uranotaenia*, 2 spesies *Bironella* yang berhasil dikoleksi dalam periode waktu tersebut. Beberapa spesies dari genus *Anopheles*, *Culex*, *Aedes*, *Mansonia* dan *Armigeres* telah diidentifikasi sebagai vektor malaria, sedangkan *Japanese encephalitis*, *Vilariasis* diidentifikasi deman berdarah dengue dan chikungunya. Hasil inventarisasi nyamuk dan habitatnya ini diharapkan dapat melengkapi data keberadaan nyamuk di Indonesia sebagai pendukung upaya pengendalian penyakit tular vektor secara efektif dan efisien.

Mengakhiri rangkaian acara pembukaan, adalah Sambutan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) mestinya bisa memberantas vektor nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria, DBD, dan lainnya. "Saya menjadi gemas, kalau program Germas ternyata belum bisa memberantas vektor nyamuk". Solusi pengendalian nyamuk selain IPTEK adalah Germas. Germas ini korelasinya dengan pendidikan, ekonomi dan tingkat kesejahteraan, karena ketika pendidikan, ekonomi dan kesejahteraannya baik, nalar pun akan berubah. Tetapi, ketika pengetahuan rendah, ekonominya rendah, otomatis aksesnya juga rendah. Di Jerman, untuk membangun masyarakat sehat, tertib butuh waktu 50 tahun prosesnya. Kita semua harus terlibat mendorong kuat-kuat.

Setelah acara pembukaan dilakukan presentasi Panel Pertama Perkembangan Penelitian Nyamuk *Aedes Ber-Wolbachia* di Indonesia dan dampaknya dimoderatori oleh Direktur P2PTVZ dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Kes, yang kemudian dilanjutkan dengan Kunjungan ke Pameran.

Setelah itu dilanjutkan dengan Presentasi Panel 2 yaitu Keterpaduan program dan riset Bidang P2PTVZ yang dimoderatori oleh Sesditjen P2P dr. Ahmad Yurianto.

Panel 3 dimoderatori oleh Prof. Sudomo, Ph.D yaitu Pengendalian Vektor, Panel 4 dimoderatori oleh Kapus UKM yaitu Diagnosis dan Tatalaksana, serta Panel 5 dimoderatori oleh DR. dr. Rita Kusriastuti, M.Sc yaitu Best Practice Vector and Dengue Control in Taiwan. Dan seminar ini diakhiri dengan penutupan oleh Direktur P2PTVZ.

Pada kesempatan ini juga dilakukan Lomba Poster, yang mana BBTCL PP Yogyakarta mempresentasikan 3 poster yang berjudul:

1. Rapid Survey tingkat pemilikan dan Penggunaan Kelambu Berinsektisida – LLINs di Kabupaten Lintas Batas Bukit Menoreh dan Sekitarnya.
2. Uji Resistensi Vektor *Anopheles maculatus* dan *Anopheles vagus* dengan Metode WHO dan CDC Bottle di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.
3. Monitoring dan Resistensi Vektor Malaria Terhadap Insektisida Pyretroid di Purworejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
4. Monitoring dan Resistensi Vektor Malaria Terhadap Insektisida Pyretroid di Purworejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Keesokan harinya dilakukan city tour disejumlah objek wisata terfavorit di kota Semarang dan sekitarnya, seperti Kota Lama, Lawang Wewu, Sam Poo Kong, Candi Gedong Songo, taman bunga Celosia Bandungan, Agro Wisata Tlogo dan lain-lain.





### **Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM**

Sejak Juli 2017, BBTCL PP Yogyakarta berinisiatif secara sukarela dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Dan pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Dirjen P2P, BBTCL PP Yogyakarta ditunjuk sebagai Satker yang menerapkan Zona Integritas berdasarkan Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/1/141/2017 dan pada Bulan November 2018, BBTCL PP Yogyakarta ditunjuk sebagai Satker yang sudah Menerapkan Zona Integritas oleh Menteri Kesehatan.

Desk Evaluasi WBK ini merupakan tindak lanjut penunjukkan BBTCL PP Yogyakarta bersama 14 Satker lainnya di Kementerian Kesehatan RI oleh Tim KemenPAN-RB, yang diselenggarakan di Ruang Rapat 306 di Kementerian Kesehatan RI, pada tanggal 22-23 Agustus 2019.

Kegiatan sudah dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2019, dengan Desk yang diawali oleh 9 Satker (3 WBBM dan 6 WBK) dan pada tanggal 23 Agustus 2019, BBTCL PP Yogyakarta bersama 6 Satker (1 WBK dan 5 WBBM) melaksanakan Desk pada tanggal 23 Agustus 2019.

Desk dibagi 2 (dua) kelas dan BBTCL PP Yogyakarta melakukan desk bersama Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BPKM) Surakarta dan BTKL PP Medan. Acara tersebut dihadiri oleh Tim Evaluator KemenPAN-RB yang dipimpin oleh Bpk. Heru dan Tim dari IR 5 Inspektorat Jenderal Kemenkes RI.

Mengawali kegiatan Tim Evaluator KemenPAN-RB menyampaikan bahwa ada sebanyak 2.200 unit kerja layanan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini. Jumlah itu meningkat dua kali lebih dibandingkan usulan tahun 2018 sebanyak 910 unit.

Budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani merupakan nilai-nilai pokok dalam pembangunan zona integritas sehingga akan menciptakan pelayanan yang berkualitas. Komitmen pimpinan unit kerja memiliki peranan penting dalam melakukan perubahan.

Implementasi reformasi birokrasi harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Ke depan, pihaknya akan melihat terus kemajuan-kemajuan, progres, maupun inovasi terbaru pelayanan yang dilakukan unit kerja layanan. Ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan pelayanan di pemerintah sangat tinggi, terutama untuk menekan praktik pungutan liar atau pungli.

Dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terdapat enam aspek penilaian, yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas, serta pengawasan.

Di hadapan tim evaluator Kemenpan RB, 3 (tiga) Satker memaparkan Desk Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Presentasi pertama disampaikan oleh kepala BKPM Surakarta, dr. Yudhaputra Tristanto, M.Kes didampingi Tim dan dilanjutkan dengan presentasi oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM didampingi tim yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Dian Trikoriati, ST, SKM, MPH, Kepala Bagian PTL/Ketua Pokja WBK Indah Nur Haeni, S.Si, M.Si, Kepala Instalasi Yantek Sri Ningsih, S.ST, M.T dan tim teknis yang terdiri dari Mardiansyah, S.Kom dan Anton Kurnia Yudi. Presentasi terakhir disampaikan oleh Plt. Kepala BTKL Medan, Priagung Adhi Bawono, SKM, M. Med, Sc(PH) beserta tim.

Kepala BBTCL PP Yogyakarta juga menyampaikan berbagai kegiatan inovasi maupun profil BBTCL PP Yogyakarta di hadapan tim dari Kemenpan RB tersebut.

Setelah presentasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, Evaluator Kemenpan RB menanyakan beberapa hal terkait paparan yang disajikan, diantaranya tugas pokok fungsi, kegiatan dan pemantauan AoC (Agen of Change), Aplikasi yang digunakan dan diciptakan oleh Unit Kerja masing-masing, perencanaan dan pemanfaatan TTG komitmen pimpinan dan bagaimana pimpinan memastikan bahwa semua unsur sudah WBK, semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh tim BBTCL PP Yogyakarta. Saat diskusi dan tanya jawab semua anggota Tim berperan aktif dalam menjawab berbagai pertanyaan.

Selanjutnya, evaluator mencermati dokumen pendukung yang telah disiapkan untuk mendapatkan nilai indicator, dan nantinya akan dikompilasi dengan Hasil Survei dari BPK atau SMS Blast dan survei lapangan akan dilakukan setelah kompilasi hasil tersebut.

Dengan adanya predikat WBK, diharapkan pihaknya dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, bagus dan bersih, untuk ditetapkan predikat WBK.

Pada sore harinya kegiatan ditutup oleh Inspektur II Itjen Kemenkes RI, drg. Moh. Nur Nasiruddin, M.Kes.



## **Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Pusat dan Daerah, 25 Agustus 2019**

Pada hari pertama, Pertemuan ini diawali dengan laporan Sekjen Kemenkes RI, drg. Oskar Primadi, MPH tentang pelaksanaan pertemuan ini.

Peserta pertemuan ini adalah Dinkes seluruh provinsi, Unit Utama Kemenkes RI, UPT Kemenkes RI (KKP, B/BTKL PP, Poltekkes, BBLK, UPT Badan Litbang dan rumah sakit vertikal) untuk melakukan kolaborasi pelaksanaan pembangunan antara pusat daerah. BBTCL PP Yogyakarta langsung dihadiri oleh Kepala UPT BBTCL PP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM.

Selanjutnya Sambutan Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji, menyampaikan bahwa terkait dengan bidang kesehatan perlu mendapat perhatian serius oleh semua kelapa daerah, serta harus ada sinergitas untuk menyelaraskan program pusat dan daerah demi hasil yang maksimal.

Karena kesehatan ini salah satu unsur yang membangun SDM selain bidang pendidikan.

Perhatian harus selaras jangan sampai program pusat A program daerah B. Misalnya bagaimana harus mencegah TBC, bagaimana menekan angka kematian Balita, kemudian bagaimana menghilangkan stunting. Jadi program pusat dengan daerah harus selaras.

Selanjutnya Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M(K), memberikan arahan sekaligus membuka pertemuan secara resmi, dengan beberapa penekanan:

1. Pertemuan ini untuk melanjutkan membuat rencana kerja Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan antara pusat dan daerah untuk satu sinergi.
2. Misalnya kita akan melakukan suatu peningkatan pelayanan kesehatan, dalam pelayanan kesehatan ini adanya SDM kesehatan, adanya sarana dan prasana dan harus memenuhi formasi kesehatan serta bagaimana mengelola suatu manajemen dan tentu juga regulasi pembiayaan sistem informasi yang semua ini untuk mendukung bidang kesehatan.
3. Saat ini sudah memulai dengan adanya rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kemudian mencoba menguraikan dan mendengar visi dari Presiden dan tentunya terkait bagaimana tujuan dan strategi yang akan dilakukan dibidang kesehatan.

4. Sangat diperlukan regulasi, evaluasi, monitor, bimbingan teknis dalam hal ini terkait sarana prasarana dan juga harus selaras antara program pusat sampai Kabupaten kota yang akhirnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Puskesmas harus tetap menjaga masyarakatnya agar tetap sehat itulah yang kita butuhkan. Kita tidak mengharapkan masyarakat sakit tapi setidaknya kita bisa obati.
6. Diharapkan perbaikan infrastruktur untuk perbaikan pelayanan kesehatan bukan hanya jalan saja tapi bagaimana menjangkau sampai ke pelosok, hal ini terkait dengan akses untuk pelayanan kesehatan.
7. Presiden mengatakan tidak boleh ada lagi angka kematian ibu, anak dan stunting harus diturunkan. Karena Kesehatan adalah fundamental dasar dari kehidupan.

Selanjutnya disampaikan materi oleh Sekretaris Jendral Kemenkes RI tentang Substansi Rancangan RPJMN 2020-2024, Pedoman Penyusunan Renstra 2020-2024, peta strategis dan sasaran strategis renstra dengan beberapa penekanan yaitu:

1. Visi Kemenkes : Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan

2. Misi Kemenkes :

- Memperkuat upaya kesehatan masyarakat yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
- Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
- Meningkatkan keteraediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
- Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

3. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu

- a. Upaya intensif mempercepat penurunan stunting, AKI & AKN
- b. Kolaborasi pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
- c. GERMAS dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat
- d. Isu-isu lain yang perlu disikapi oleh pusat dan daerah seperti limbah medis, akreditasi, pengendalian kanker, digital platform, kesiapan penanganan bencana, kesehatan tradisional, AMR.
- e. Pembangunan SDM

menjadi fokus prioritas berikutnya

Selanjutnya kepala Biro Perencanaan dan Anggaran menyampaikan progress RPJMN dan tatacara dan pembagian diskusi kelompok, yaitu:

1. Kelompok Peningkatan KIA, Penurunan Stunting & Germas
2. Kelompok Peningkatan Pengendalian Penyakit
3. Peran Daerah dalam mendukung Pencapaian indikator PN
4. Peningkatan mutu SDM dalam mendukung Pencapaian indikator PN

Pada hari kedua, pertemuan diawali dengan presentasi Panel dari Unit Utama di Kemenkes RI, dr. Kirana Pritasari, MQIH yaitu Dirken Kesehatan Masyarakat, PRIORITAS NASIONAL PENURUNAN AKI, AKB, STUNTING DAN PEMBUDAYAAN GERMAS dan Dirjen P2P, dr. Anung Sigihantono, M.Kes tentang harmonisasi Program P2P di pusat dan daerah.

Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, untuk menyamakan pemahaman tentang indikator dengan daerah dan UPT dan melengkapi matrik dengan fungsi-fungsi dari Kabupaten/Kota dan pengayaan oleh UPT Kemenkes sebagai pelaksana teknis di daerah.

Pada malam harinya dilakukan persentasi dari keempat kelompok dan selanjutnya dilakukan penutupan oleh Bapak Sekjen Kemenkes.



### **Workshop Pemanfaatan Kerja Sama Luar Negeri bertajuk Implementasi MoU Bilateral Bidang Kesehatan, 25 Agustus 2019**

Workshop ini dilaksanakan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri yang dihadiri oleh lebih kurang 150 peserta yang terdiri dari Unit Utama Kemenkes RI, Direktur RS Vertikal, UPT (B/BTKL PP, BBPTOT, BBPVET, BBPK) dan Direktur Poltekkes Kemenkes dari seluruh Indonesia. BBTCL PP Yogyakarta di hadiri langsung oleh Kepala BBTCL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM.

Workshop diawali dengan laporan dari ketua panitia, Kepala Biro KLN, Acep Somantri, SIP, MBA tentang pelaksanaan kegiatan dan dilanjutkan dengan arahan dan pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH, yang dalam sambutan dan arahannya mengapresiasi upaya Kemenkes yang sampai saat ini telah membangun kerja sama kesehatan dengan 18 negara-negara sahabat. Suatu pencapaian yang luar biasa bila dibandingkan dengan situasi pada tahun 2015 yang hanya memiliki 3 MoU yang aktif.

Workshop diagendakan dalam 2 Panel Diskusi menghadirkan 2 Narasumber dari Kemenkes yaitu Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri serta 3 Narasumber dari Kementerian Luar Negeri yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktur Timur Tengah, serta Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya.

Panel pertama diawali dengan penyampaian materi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH, yang menyampaikan tentang Pemanfaatan Kerjasama Luar Negeri Bidang Kesehatan. Ada 18 negara yang telah bekerjasama dengan Kemenkes yakni Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Belanda, Brunei Darussalam, Denmark, India, Iran, Korea Selatan, Kolombia, Kuba, Papua Nugini, Qatar, Singapura, Tiongkok, Timor-Leste, Turki, dan Vietnam. Selain itu, juga terdapat 18 MoU lainnya yang masih dalam proses pembahasan, yaitu dengan negara Filipina, Inggris, Kamboja, Kuwait, Laos, Maladewa, Malaysia, Meksiko, Mesir, Myanmar, Oman, Persatuan Emirat Arab, Rusia, Thailand, Tunisia, Yordania, Australia (supersede) dan Viet Nam (supersede).

Pembicara kedua adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Dr. Ratu Silvy Gayatri mengatakan beberapa potensi kerja sama bilateral kesehatan dengan negara-negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa, di antaranya yang potensial adalah dengan negara Kanada, Prancis, Belgia, Suriname, Spanyol dan Yunani.

Selain itu, Direktur Timur Tengah, Achmad Rizal Purnama, mewakili Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu mengatakan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, potret kerja sama kesehatan dengan Asia Pasifik dan Afrika, antara lain dapat dimanfaatkan untuk pasar kerja bagi tenaga medis profesional Indonesia (Jepang, Korea, Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Kuwait), Pasar industri farmasi & alkes Indonesia (Singapura, negara Afrika dan Timur Tengah), Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur kesehatan (kerja sama SDM kesehatan RI-Australia, RI-China).

Panel kedua diawali dengan penyampaian materi oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Acep Somantri, SIP, MBA, yang menyampaikan Capaian MOU Bidang Kesehatan Tahun 2019.

Selanjutnya Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemenlu, Lefianna Hartati Ferdinandus, menjelaskan bahwa kementerian perlu memperhatikan detail prosedur kerja sama bilateral dengan negara-negara sahabat, penyusunan perjanjian internasional serta perjanjian dengan karakter internasional. Diperlukan juga prinsip kehati-hatian untuk menjalin kerja sama dengan asing. Untuk itulah, Kemenlu hadir untuk mengawal proses perjanjian tersebut. Monitoring dan Evaluasi MoU merupakan salah satu cara untuk memetakan potensi kerja sama di bidang kesehatan. Diakui koordinasi lintas sektor saat ini masih lemah, namun demikian dengan adanya pemetaan diharapkan masing-masing stakeholder dapat menemukan mitra kerja sama yang tepat untuk mengimplementasikan kerja sama secara konkret. Lebih lanjut disebutkan bahwa Kemenkes dipilih menjadi Pilot Project Kemenlu untuk Monev MOU Bilateral Bidang Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Acep Somantri, SIP, MBA, menyambut baik dan menyatakan bahwa dirinya berbangga dengan ditunjuknya Kemenkes menjadi Pilot Project Kemenlu untuk Monev MoU Bilateral Bidang Kesehatan dan sekaligus merasa tertantang untuk menjadi Kementerian yang terbaik dalam implementasi capaian MoU.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menunjukkan semangat Kementerian Kesehatan untuk terus meningkatkan kolaborasi kemitraan dengan negara-negara sahabat untuk menyukseskan pembangunan Indonesia sehat.




## **Narasumber Dalam Penyuluhan Kesehatan dan Skrining Penyakit dalam Pengendalian Rumah Sakit Tanpa Dinding di Pongpes Salaf Api Kabupaten Purworejo**

Atas undangan dari Balkesmas Magelang, BTKLPP Yogyakarta memberikan penyuluhan pada santri di Pongpes Salaf API Purworejo. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan melalui kegiatan UKBM di Pesantren sebagai wujud pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2019 bertempat di masjid Pongpes Salaf API Winong Purworejo. Peserta penyuluhan adalah para santri yang mondok di Pongpes Salaf API Winong Purworejo. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Tim dari Dinkes Purworejo yang dipimpin Kabid P2 dr. Darus, tim dari Balkesmas Magelang yang dipimpin kasie pelayanan, dr. Whidy, tim Puskesmas Winong yang dipimpin Kapus dr. Susi, Camat Kemiri, Kepala Desa Winong dan perwakilan dari Kemenag setempat.


Pada kesempatan tersebut, BTKLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kasie Advokasi dan KLB, Dien Arsanti, SKM., M.Env., menyampaikan mengenai penyakit Hepatitis. Dalam paparannya disampaikan bahwa penyebab Hepatitis bermacam-macam ada yang disebabkan virus, bakteri, parasite maupun selain mikroorganisme seperti kebiasaan minum-minuman keras, konsumsi obat-obatan tertentu, dll. Selanjutnya paparan lebih difokuskan pada penyakit Hepatitis yang disebabkan oleh Virus dimana ada lima type virus yang umum menyebabkan Hepatitis yaitu Virus Type A, B, C, D dan E. dari lima type virus tersebut dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara penularannya yaitu type virus yang ditularkan melalui cairan tubuh terdiri dari Type B, C dan D dan Type virus yang ditularkan secara fecal-oral yaitu virus Type Adan E. lebih lanjut disampaikan mengenai bahaya dari infeksi virus berdasarkan Type, gejala dan pengobatan serta pencegahannya.





Peserta antusias dengan materi yang disampaikan, karena beberapa faktor risiko Hepatitis tanpa mereka sadari telah dilakukan sehari-hari seperti kondisi sanitasi terkait perilaku BAB dan penyediaan air bersih dan air minum dan bagaimana menjaga personal hygiene. Sebagai penutup, disampaikan oleh pemateri bahwa harus diupayakan untuk memperbaiki beberapa kondisi sanitasi dan merubah perilaku yang berisiko menjadi faktor terjadinya penularan Hepatitis di tempat khusus. Pada kesempatan tersebut, DKK Purworejo, Puskesmas Winong dan Balkesmas Magelang melakukan screening HepA pada santri Ponpes Salaf API dan melakukan peninjauan sarana sanitasi di Ponpes tersebut serta melakukan silaturahmi dengan pimpinan Ponpes Salaf Api Winong Purworejo.

---





## **Diseminasi Hasil Kajian Faktor Risiko Flu Burung di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019**

Pertemuan Diseminasi Hasil Kajian Faktor Risiko Flu Burung di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Graha Srikandi Gedung PKK Komplek Pendopo Jl. Alun-alun Utara No. 1, Kabupaten Purbalingga. Pertemuan ini dihadiri oleh 54 orang, yang terdiri dari petugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Balai Besar Veteriner Wates, UPTD Puskesmas Kabupaten Purbalingga, delapan puskesmas di wilayah Kabupaten Purbalingga, tujuh kecamatan yang menjadi lokasi kegiatan, delapan desa yang menjadi lokasi kegiatan, 11 peternakan yang menjadi lokasi kegiatan, serta BBTKLPP Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Ibu drh. Maria Sri Maharsi Wulan. Selanjutnya beliau menyampaikan materi pertama tentang Strategi Pengendalian Avian Influenza di Kabupaten Purbalingga.

Materi kedua disampaikan oleh Ibu Feri Astuti, S.T., M.P.H. dengan judul Perilaku Bersih dan Sehat di Peternakan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil Kajian Faktor Risiko Flu Burung di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 oleh Kepala Seksi Lingkungan Biologi, Ibu dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.

Materi ketiga tentang Teknis Pencegahan dan Pengendalian Avian Influenza di Peternakan oleh Ibu drh. Elly Puspasari Lubis, M.Sc. dari BBVet Wates Kulon Progo.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 50 spesimen yang diambil di 12 peternakan yang disurvei, terdapat dua spesimen di dua peternakan yang positif Influenza tipe A, namun semuanya negatif H5N1.

Beberapa hasil diskusi yaitu perlu adanya tindaklanjut pertemuan berupa pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peternak dan karyawan peternakan, perlu dilakukan inisiasi penguatan jejaring pengendalian dan pencegahan penyakit flu burung melalui program one health di Kabupaten Purbalingga, dan perlu diperjuangkan adanya dasar hukum yang kuat di bidang peternakan melalui peraturan daerah untuk melindungi peternak dan masyarakat serta memudahkan dalam penyelesaian konflik.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi, acara ditutup oleh Ibu Feri Astuti, S.T., M.P.H.



### **Puncak Acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74**

Rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 telah terlaksana dengan lancar yaitu jalan sehat, lomba-lomba dan upacara 17 Agustus 2017. Rangkaian acara peringatan hari kemerdekaan RI diakhiri dengan dilaksanakannya upacara tanggal 31 Agustus 2019 di halaman kantor BBTCLPP Yogyakarta. Peserta apel yang terdiri dari PNS, CPNS, PPNPN dan siswa magang mengenakan pakaian adat Yogyakarta.

Pada upacara tersebut bertindak sebagai pembina apel Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta upacara terutama kepada siswa magang yang seharusnya sudah selesai namun tetap bersedia untuk mengikuti acara ini. Pada upacara ini dilaksanakan serangkaian acara yaitu penyerahan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, penyerahan hadiah bagi pemenang lomba, dan foto bersama keluarga besar BBTCLPP Yogyakarta.

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yaitu penghargaan untuk pengelola PPID (Kasubbag Program dan laporan, kasubbag umum, Mardiansyah, S.Kom, Andriyani, Karsidi, Zuanah, Shinta Nur Atika, Tri Ardi Tahta, M. Didi Kurniawan), pengelola Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc. dan Rudi Priyanto, S.Si., penulis Sinovik Kemenkes 2019 (Nur Basuki, S.T., M.P.H. dan Dina Juli Retnaningsih, S.T.), eselon III dengan capaian kinerja terbaik (Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc.), eselon IV dengan capaian kinerja terbaik (Nila Cakrawati, S.T., M.Sc.), struktural dengan disiplin terbaik (Dian Trikoriati, S.T., S.K.M., M.P.H. dan Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc.), pegawai dengan disiplin terbaik (Evi Asmilaningsih, S.Si. dan Suharsa, S.ST.), ruang administrasi dengan 5R terbaik (Ruang Tata Usaha) dan ruang laboratorium dengan 5R terbaik (Laboratorium Biologi Lingkungan)

Lomba-lomba yang telah dilaksanakan adalah lomba volly dengan juara putra : 1. Tim Garuda, 2. Tim Singa, 3. Tim Elang; volly putri : 1. Tim Mawar (Bidang ADKL), 2. Tim Tulip (Bidang SE), 3. Tim Melati (Bagian TU). Tenis meja : 1. M. Didi Kurniawan-Ratna Murti H, 2. Rudi Priyanto-Christina Handayani, 3. Nanang Himawan-Parjana. Lomba estafet air : 1. Tim Bidang PTL, 2. Tim Lab. FK. Air, 3. Tim Lab. FK. Gas dan Radiasi. Lomba"nyunggi" tampah dengan membawa bola : 1. Ita Latiana D, 2. Indaryati, 3. Tri Mulyani. Lomba memasukkan pensil ke dalam botol : 1. Tim Bagian TU, 2. Tim Instalasi Yantek, 3. Tim Lab. FK. Air 2. Lomba lari estafet membawa kelereng dengan sendok : 1. Tim Bidang ADKL, 2. Tim Lab. FK. Air 1, 3. Tim Lab. FK. Air 2. Lomba catur : 1. Rudi Priyanto, 2. Sarjito, 3. Saryadi. Lomba makan pisang putra : 1. Bagus, 2. Karsidi, 3. Odi; putri : 1. Ana Hidayati, 2. Anjas Wulansari, 3. Erna Yunita.

Rangkaian acara upacara diakhiri dengan pengambilan foto bersama.



### **Pemeriksaan Executive Brain Assesment (EBA) di BBTCLPP Yogyakarta Oleh Pusat Analisis Determinan Kesehatan**

Menindaklanjuti Kepmenkes no HK.01.07/menkes/580/2017 tentang rencana aksi revolusi mental di lingkungan kementerian kesehatan, maka perlu penguatan manajemen perubahan. Salah satu upaya dengan melakukan sistem pengukuran kesehatan intelegensia pejabat struktural dan fungsional yang dapat digunakan sebagai rekomendasi pengangkatan dan pengisian kebutuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu sekaligus analisis kebutuhan pengembangan dan pelatihan. Untuk itu dilaksanakan pemeriksaan executive brain assesment (EBA) di UPT yang sedang dalam proses penilaian WBK/WBBM Kemenpan RB diantaranya BBTCLPP Yogyakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Analisis Determinan Kesehatan dengan jumlah tim 3 orang tanggal 3 September 2019 di BBTCLPP Yogyakarta. Peserta pemeriksaan EBA sebanyak 53 orang yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan CPNS.

Acara dibuka oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr.dr. Irene, M.K.M yang menyampaikan pesan supaya peserta dapat mengikuti dengan sebaik baiknya dan jawab semua pertanyaan sesuai kondisi yang sebenarnya supaya hasilnya dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan tepat. Selanjutnya disampaikan materi pengantar pemeriksaan EBA oleh tim, pemeriksaan

EBA oleh semua peserta dan penutupan.

Diharapkan dengan terlaksananya pemeriksaan EBA maka memudahkan organisasi untuk memperoleh figur-figur pejabat struktural dan fungsional yang profesional dengan modalitas belajar dominasi penalaran dan preferensi berfikir yang memadai untuk melaksanakan kewenangan strategis dalam kebijakan kesehatan.



### **Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL dan Pelatihan Penilaian AMDAL di PSLH UGM**

Sebagai respon terhadap permintaan Pemerintah Daerah, khususnya dari Komisi Penilai AMDAL (KPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, KPA Kota Yogyakarta, dan KPA Kabupaten Sleman, kepada BBTCLPP Yogyakarta untuk mengirimkan perwakilannya sebagai Anggota Komisi Tetap KPA dan/atau anggota tim teknis, BBTCLPP Yogyakarta mengirim beberapa personilnya untuk mengikuti Pelatihan Dasar-dasar AMDAL dan/atau Pelatihan Penilaian Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (AMDAL) pada tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat 5c, Komisi Penilai wajib memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit dua orang dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit tiga orang.

Untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut dalam rangka memenuhi permintaan Pemerintah Daerah terkait Komisi Penilai AMDAL, BBTCLPP Yogyakarta menugaskan Kepala Bidang ADKL (Feri Astuti, S.T., M.P.H.) untuk mengikuti Pelatihan Dasar-dasar AMDAL di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 2-7 September 2019. Selain itu, BBTCLPP Yogyakarta juga menugaskan Kepala Seksi Fisika Kimia (Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc.) untuk mengikuti Pelatihan Penilaian AMDAL di PSLH UGM pada tanggal 8-20 Juli 2019, setelah lulus Pelatihan Dasar-dasar AMDAL pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tanggal 9-21 September 2019, Kepala Bidang ADKL (Feri Astuti, S.T., M.P.H.) dan Kepala Seksi Lingkungan Biologi (dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.) ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan Penilaian AMDAL di PSLH UGM, setelah sebelumnya lulus mengikuti Pelatihan Dasar-dasar AMDAL. Setelah mengikuti pelatihan ini, perwakilan BBTCLPP Yogyakarta yang ditugaskan sebagai anggota Komisi Tetap KPA dan/atau anggota tim teknis Komisi Penilai AMDAL diharapkan dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.



### **Penyelenggaraan reviu pagu alokasi anggaran RKA-K/L Tahap I Satker UPT dan Dekon Ditjen P2P T.A. 2020, 7 September 2019**

Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, Susilo, MKM dan pejabat struktural eselon III dan IV yang membidangi hadir bersama tim perencananya dalam rangka penyiapan proses penyusunan RKAKL BBTCLPP Yogyakarta TA. 2020.

dr. Achmad Yurianto, Sesditjen P2P membuka acara tersebut dengan penekanan kepada seluruh satker untuk lebih teliti dalam pemenuhan rambu-rambu aturan yang berlaku dan strategis dalam menyusun program dan kegiatannya agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Proses pelaksanaan reviu oleh Tim Internal P2P (Setditjen dan Direktorat) dan Tim Biro Perencanaan dan Anggaran Kemkes berlangsung selama 5 (lima) hari efektif.

Reviu diakhiri dengan terbitnya Catatan Hasil Desk (CHD) oleh P2P dan Catatan Hasil Penelitian (CHP) oleh Biro Perencanaan dan Anggaran untuk satker BBTCLPP Yogyakarta. Selanjutnya proses reviu dilanjutkan oleh Tim APIP Inspektorat Jenderal Kemkes yang direncanakan akan berlangsung pekan depan.

Semoga rangkaian kegiatan ini menghasilkan perencanaan yang berkualitas dalam mengukung tugas pokok dan fungsi BBTCLPP Yogyakarta. Berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.





### **Pameran Teknologi Tepat Guna BBTCLPP Yogyakarta Dalam Acara The 1ST Technofarmalkes 2019**

Dalam rangka mendorong kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri dan mendukung inovasi teknologi produk kesehatan era 4.0 untuk pembangunan kesehatan, telah dilaksanakan The 1st Technofarmalkes 2019: Indonesian Health Tech Innovation di Hotel Sultan Jakarta tanggal 10 -11 September 2019. Acara dibuka oleh Menteri Kesehatan, Prof. Dr.dr. Nila Moeloek, SPM.

Kegiatan berupa seminar dan pameran yang diikuti oleh BBTCLPP Yogyakarta dan beberapa instansi/akademisi antara lain Poltekkes Kemenkes, BPPT, RS Hasan Sadikin, Universitas Airlangga-RSUD Dr. Soetomo, Indonesia Medical Education and Research Institusi (IMERI), Balitbangkes Kemenkes RI, Swiss German University (SGU) dan RnD Medical device Departement.

Adapun teknologi tepat guna (TTG) yang ikut dipamerkan pada kegiatan ini adalah Sterilisator udara ruang Pelayanan Kesehatan, Sterilisator alat makan, Larvitrap dan mosquito trap, Penjernih Air Keruh SehatAir-ku, chlorine diffuser, dan produk TTG lainnya.

Stand pameran BBTCLPP Yogyakarta dikunjungi oleh Menteri Kesehatan, Dirjen P2P, Sekjend Kemenkes, Dirjen Farmalkes dan pengunjung lainnya.

Banyak yang mendorong untuk hilirisasi produk TTG serta memberi masukan untuk pengembangan inovasi produk TTG yang akan datang sehingga lebih efektif, sesuai kebutuhan saat ini dan dapat diproduksi dalam jumlah besar.



### **Review Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) di Lingkungan Bandara Adi Sucipto**

Pada tanggal 11-12 September 2019, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Yogyakarta menyelenggarakan review rencana kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan masyarakat (KKM) di lingkungan Bandara Adi Sucipto. Latar belakang diselenggarakannya pertemuan ini adalah adanya faktor risiko terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) di Yogyakarta diantaranya dengan sudah beroperasinya bandara internasional yang baru (Yogyakarta International Airport), Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia serta budaya masyarakat di Yogya yang ramah terhadap pengunjung. Untuk itu di setiap pintu masuk negara seperti bandara harus mempunyai dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) sebagai perwujudan kesiapan jika terjadi KKM. Rencana kontijensi ini harus direview setiap tahun dengan melibatkan semua pihak yang terkait, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2018 mengenai Kekearifan Kesehatan dan Instruksi presiden Nomor 4 tahun 2019 Mengenai Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Hal ini disampaikan oleh narasumber yaitu Kepala Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar udara, Gunawan Wahyu Nugroho, SKM., MKM. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam dokumen Renkon akan mengatur mengenai siapa berbuat apa, untuk itu diharapkan peserta yang terdiri dari berbagai lintas sektor yang ada di lingkungan Bandara Adi Sucipto diantaranya Angkasa Pura, AirNav, karantina ikan, karantina pertanian serta lintas sektor yang berada di luar lingkungan Bandara Adi Sucipto diantaranya Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman serta BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kasie Advokasi dan KLB untuk bisa terlibat aktif mereview dokumen Renkon yang ada.

Dengan demikian hasil review ini sudah merupakan kesepakatan antara berbagai lintas sektor yang nantinya akan menjadi pedoman dalam respon jika terjadi kondisi KKM. Demikian materi yang disampaikan oleh narasumber sebagai pengantar untuk membuka pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta. Agenda selanjutnya di hari pertama yaitu pencermatan dokumen renkon oleh seluruh peserta dipimpin oleh narasumber serta pengorganisasian diskusi kelompok untuk review dokumen yang akan dilaksanakan pada hari kedua.

Hari kedua yaitu tanggal 12 September 2019, peserta dibagi menjadi empat kelompok yaitu; 1. Kelompok logistik yang terdiri dari Kadis Ops Lanud, Ground Handling, KKP Yogyakarta, BPBD Sleman, ARFF, Maskapai, Airport Costumer Service; 2. Kelompok Bidang Keamanan terdiri dari POM AU, AVSEC, Polsek Depok Timur; 3. Kelompok informasi dan komunikasi terdiri dari Imigrasi, Bea cukai, Airport Duty Manager, AirNav, Karantina pertanian dan karantina ikan; 4. Kelompok Bidang kesehatan terdiri dari KKP Yogyakarta

RSUP Dr. Sardjito, RSPAU Dr. S. Harjolakito, RSIY PDHI, RS Bhayangkara, RS Panti Rini, Puskesmas Depok I, Dinkes DIY, Dinkes Sleman, BBTCLPP Yogyakarta. Masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai peran, tugas, jumlah SDM dan sarana serta prasana yang bisa diberikan oleh masing-masing instansi ketika terjadi KKM. Demikian halnya dengan kelompok Bidang Kesehatan. Dari BBTCLPP Yogyakarta menyampaikan dapat mendukung dalam respon jika terjadi KKM di Bandar Udara Adi Sucipto dengan berperan dalam: 1. Melakukan pengambilan, pengepakan dan pengiriman sample ke litbangkes, ; 2. Pengendalian Lingkungan Pasca PHEIC, 3. Surveilans Epidemiologi Lanjutan Dan Penyelidikan Epidemiologi, 4. koordinasi dengan litbangkes terkait hasil pengujian sampel untuk selanjutnya disampaikan oleh pejabat yang berwenang serta mendukung sarana dan prasarana berupa tenda, Veldbed, alat bahan dan APD untuk pengambilan, pengepakan dan pengiriman sample, Mesin Fogging, Mist Blower, Spraycan, Insektisida, disinfektan untuk air, permukaan, dan ruangan, unit pengolahan air portable, serta bahan penjernih air. Hasil diskusi masing-masing kelompok selanjutnya diserahkan kepada dan difinalisasi oleh KKP Yogyakarta dimana hasilnya akan diinformasikan kepada peserta melalui email.



### **Survei Persepsi Dan Tingkat Kepuasan Satker Atas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Jenderal Kemenkes**

Dalam rangka pelaksanaan Survei Persepsi dan Tingkat Kepuasan Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan, maka pada tanggal 12 September 2019 tim Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan RI berkunjung ke BBTCLPP Yogyakarta untuk melaksanakan survei tersebut.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ibu Kepala Balai BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat kepala. Salah satu kegiatan ini adalah dengan mengisi formulir survey yang dapat diakses melalui <https://s.id/SurveiltjenKemenkes>.

Kegiatan survei ini di ikuti oleh :

1. Kepala Satuan Kerja /KPA
2. Pejabat Pembuat Komitmen / PPK
3. PPSPM
4. Bendahara Penerima dan / atau Pengeluaran
5. Pejabat Pengadaan barang / Jasa
6. Pejabat Struktural eselon2, 3 dan 4
7. Pejabat pelaksana atau staf terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Itjen Kemenkes

Hasil survey online ini langsung diterima oleh Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan RI secara murni. Kuesioner persepsi dari BBTCLPP Yogyakarta terhadap kinerja Itjen ini merupakan salah satu perangkat pengendalian manajemen pengawasan untuk monitoring dan evaluasi, serta dalam rangka memperoleh gambaran kinerja Tim Pengawas Inspektorat Jenderal selama melaksanakan kegiatan pengawasan. Oleh karena itu diharapkan pengisian formulir dapat memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya, adapun kerahasiaan responden terjamin, dan informasi yang diberikan tidak akan berdampak apapun terhadap responden.




### **Pelaksanaan Training SAKTI melalui aplikasi Zoom**

Sehubungan dengan akan diterapkannya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah melalui Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.08/2018 tanggal 14 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI .

Proses terbentuknya SAKTI yang merupakan pengintegrasian berbagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang saat ini berlaku, yaitu aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) pada bendahara, aplikasi RKAKL pada penganggaran, aplikasi Simak BMN pada persediaan, serta aplikasi SAIBA pada laporan keuangan. "Dengan terintegrasinya seluruh sistem aplikasi pengelolaan keuangan negara ini, akan memudahkan dalam pengambilan data dan dalam fungsi pengawasan keuangan Negara

Saat ini telah dikembangkan SAKTI Web yang merupakan versi Web Based dari Aplikasi SAKTI desktop dan rencananya SAKTI Web tersebut akan diimplementasikan pada seluruh Satuan Kerja pada akhir tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya training dalam rangka sharing knowledge serta sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja Mitra KPPN Yogyakarta terkait SAKTI dan juga SAKTI Web.


Dalam rangka koordinasi persiapan training SAKTI kepada seluruh Satuan Kerja Mitra KPPN Yogyakarta dimaksud, maka KPPN telah melakukan Video Conference dengan Satuan Kerja Mitra KPPN Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 melalui aplikasi Zoom dengan room id 727.384.0624



Mengingat pentingnya persiapan implementasi SAKTI demi berjalannya fungsi pengawasan keuangan Negara, pelaksanaan Video Conference telah dilakukan secara langsung (live) oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr.dr.Irene, MKM didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dian Trikoriati, ST, SKM, MPH dan Operator SAKTI Dani Martanto, SE di ruang Kepala BBTCLPP Yogyakarta dengan durasi 120 menit. Pada sesi Video Conference dilakukan dengan metode wawancara atau tanya jawab hal-hal yang belum diketahui oleh Satuan Kerja seputar SAKTI dan saat itu juga diberikan jawaban melalui penjelasan oleh 2 orang Narasumber dari KPPN Yogyakarta terdiri dari Sdr.Wakhid dan Sdr.Mardiyah.

Dari kegiatan ini diperoleh informasi dan hal-hal penting terkait gambaran umum serta langkah-langkah persiapan implementasi SAKTI.

SAKTI merupakan hal baru bagi Satuan Kerja MITRA KPPN Yogyakarta sehingga akan terus dilakukan pendampingan secara khusus dan berkesinambungan oleh KPPN Yogyakarta sampai penerapan SAKTI benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diharapkan sistem penggunaan dan pengawasan Keuangan Negara akan menjadi lebih baik di era mendatang.





### **Audit Internal ISO 9001:2015**

Audit Internal adalah proses pengecekan Internal yang dilakukan oleh Tim atau Koordinator Audit Internal yang sudah mengerti atau mendapatkan pelatihan Mengenai Audit Internal.

Tujuan dari Audit Internal adalah untuk memberikan pelayanan kepada organisasi, dalam rangka membantu semua anggota organisasi tersebut agar semua anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara efektif serta mengecek apakah sistem berjalan sesuai yang seharusnya.

BBTKLPP Yogyakarta melaksanakan Audit Internal ISO 9001:2015 pada tanggal 12-13 September 2019. Opening Meeting Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019 di Aula BBTKLPP Yogyakarta, dihadiri oleh Tim Auditor dan perwakilan Auditee. Acara dibuka oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M. Dalam sambutannya disampaikan bahwa audit bukan mencari kesalahan namun mencocokkan antara sistem yang berjalan dengan SOP. Selamat melaksanakan audit selama dua hari, semoga berjalan lancar.

Setelah acara opening meeting selesai, dilanjutkan dengan audit sesuai jadwal. Hari pertama Tim Auditor yang terdiri dari Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc., Siswati E. Tarigan, S.K.M., M.P.H. dan Sri Ningsih, S.ST., M.T. melakukan audit di Bidang SE. Tim Auditor Dhelina Auza Utami, S.Farm., Apt. dan Heni Amikawati, S.K.M. melakukan audit di Bidang PTL. Tim Auditor Indah Nur Haeni, S.Si., M.Sc., Nila Cakrawati, S.T., M.Sc. dan Rudi Priyanto, S.Si. melakukan audit di Bidang ADKL. Tim Auditor Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes. dan Dien Arsanti, S.K.M., M.Env. melakukan audit di Bagian TU.

Pada hari kedua tanggal 13 September 2019 dilakukan audit kepada Kepala Balai (Top Manajemen) dan Manajemen Representatif/Document Control oleh Tim Auditor Ponirah Hayu, S.Si. dan Sukoso, S.ST., M.Sc. Dilanjutkan dengan penyampaian hasil dan closing meeting.

Hasil audit ditemukan 12 ketidak sesuaian dengan rincian : dua kategori observasi dan sepuluh kategori minor yang akan diselesaikan sesuai kesepakatan.

Acara ditutup oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M. dengan harapan ketidaksesuaian ditindaklanjuti dan diselesaikan tepat waktu



## **Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Area Parkir BBTKLPP Yogyakarta**

Dalam rangka dimulainya Pembangunan Gedung Pelayanan dan Area Parkir BBTKLPP Yogyakarta, maka pada hari Jumat, 13 September 2019 telah digelar Peletakan Batu Pertama di lokasi pembangunan gedung Jalan Imogiri Timur, Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, yang dihadiri oleh perwakilan TP4D Kejati DIY, Perwakilan Dinas PU - PKP DIY, Perwakilan Dinas PU - PKP Kabupaten Bantul, Camat Banguntapan, Kepala Desa

Wirokerten, Kepala Desa Tamanan, perwakilan Warga Dusun Botokenceng, Konsultan Perencana PT. Kalaprana, Konsultan Pengawas PT Elcentro, dan konsultan Pelaksana Fisik PT. Trimustika Abadi.

Pembangunan gedung pelayanan dan area parkir merupakan pembangunan gedung tahap II, dimana pada tahun 2018 telah selesai dilakukan pembangunan tahap I yaitu Gedung Laboratorium, yang keduanya dilakukan di lahan seluas 3.078 m<sup>2</sup>.

Peletakan Batu Pertama merupakan kegiatan dalam meminta doa restu dan dukungan dari semua pihak demi tercapainya kelancaran, kesuksesan, keamanan dalam pekerjaan, keamanan dalam sisi hukum, ketepatan waktu, mutu, sasaran dan kesesuaian pembangunan dengan spesifikasi yang sudah direncanakan. Selanjutnya, dilakukan pemotongan tumpeng dan peletakan batu pertama dilakukan oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta selaku KPA, kemudian dilanjutkan oleh PPK BBTKLPP Yogyakarta, perwakilan TP4D Kejati DIY, perwakilan Dinas PU - PKP Kabupaten Bantul, Camat Banguntapan, dan Wakil Warga Dusun Botokenceng.

Disampaikan juga permintaan izin dan permohonan maaf oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta Dr.dr. Irene, MKM, jika selama proses pembangunan dan perpindahan nantinya terdapat gangguan keramaian dan gangguan kenyamanan yang dialami masyarakat sekitar.





### **Pertemuan Jejaring Laboratorium Kesehatan Daerah DIY dan Jawa Tengah di BBTCLPP Yogyakarta**

Sehubungan dengan Program Penyehatan Lingkungan dalam mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan dan banyaknya permintaan pelayanan uji laboratorium terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025 di wilayah DIY dan Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu adanya pertemuan Jejaring Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dengan BBTCLPP Yogyakarta. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 September 2019 di Aula BBTCLPP Yogyakarta yang dihadiri oleh 37 Kepala Labkesda DIY dan Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr.dr.Irene, MKM. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi oleh Direktur Penyehatan Lingkungan (PL) dr.Imran Agus Nurali Sp.KO 'Program Penyehatan Lingkungan dalam mendukung Kebijakan Kementerian Kesehatan', Kepala BBTCLP Yogyakarta ' Peran Laboratorium Terakreditasi dalam Mendukung Program P2P', Kabid PTL Indah Nur Haeni, SSI, MSc 'Tata Cara Pendaftaran Laboratorium Terakreditasi KAN sesuai SNI/ISO IEC 17025:2017'. Setelah penyampaian materi dilanjutkan Sharing Labkesda yang terakreditasi ISO 17025 dan KALK oleh Kepala Labkesda Kota Magelang dan Kota Semarang. Acara diakhiri dengan menyusun kesepakatan Rencana Tindak Lanjut, yang isi kesepakatannya adalah : Perlu dibentuk Asosiasi laboratorium kesehatan daerah di DIY ; Akan diselenggarakan pertemuan rutin antar labkesda DIY Jateng Tahun 2020 di BBTCLPP Yogyakarta; Perlu adanya kejelasan Pembina Labkesda DIY dan Provinsi Jateng; Labkesda membuat program rencana pengembangan laboratorium dari sumber daya dan kemampuan uji; Perlu ada forum komunikasi Labkesda DIY Jateng, misal : WA, bulletin; BBTCLPP Yogyakarta membuat paket-paket konsultasi berdasarkan usulan dari Labkesda.



### **Sosialisasi ISO 9001:2015**

Pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 di aula lantai 3 (Barat) BBTKLPP Yogyakarta telah dilaksanakan Apel Korpri. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Balai BBTKLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM. Dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa arahan dan informasi bahwa BBTKLPP Yogyakarta telah mengikuti pameran di Jakarta yaitu "The First Techno Farmalkes" yang di selenggarakan oleh Farmalkes pada tanggal 9 – 11 September 2019.

Dalam apel tersebut juga disampaikan sosialisasi pedoman mutu ISO 9001 : 2015. ISO 9001 : 2015 adalah standar mutu untuk manajemen yang dibuat sendiri oleh manajemen dengan tujuan agar dapat melaksanakan pelayanan yang lebih bermutu, sehingga tingkat pelayanan publik menjadi meningkat. Hal ini akan mendukung BBTKLPP Yogyakarta menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Lingkup ISO 9001:2015 ada 3 lingkup yaitu Bidang ADKL, Bidang SE dan Bidang PTL.

Diantaranya adalah :

1. Memberikan pelayanan yang bermutu sehingga dapat memuaskan pelanggan anda.
2. Pahami dan hayati VISI dan MISI BBTKLPP Yogyakarta
3. Pahami kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sudah di tetapkan
4. Pahami dan laksanakan prosedur yang telah ditetapkan bagian masing - masing
5. Peliharalah arsip, rekam mutu, informasi dan dokumentasi yang telah ditetapkan bagian masing – masing
6. Melakukan perbaikan berkesinambungan.

Dalam sosialisasi ini diharapkan seluruh pegawai BBTCLPP Yogyakarta dapat mengetahui SOP – SOP yang ada di BBTCLPP Yogyakarta dan siapa – siapa saja yang terlibat di dalam tim ISO.

Tim tersebut adalah :

- Top Manajemen : Dr. dr. Irene, MKM
- Manajemen Reserepresentatif : Dian Tri Koriati, ST, SKM, MPH
- Pengendali Mutu : Nadia Regina M, SKM
- Ketua Tim Anggota : Indah Nur Haeni, SSi. Msc
- Anggota

1. Dien Arsanti, SKM, M.Env
2. dr Dwi Amalia, MPH
3. Dr. Andiyatu, SKM, Msi
4. Mieng Nova Soetopo, SKM, M.Kes
5. Kristina Handayani, SH
6. Suharsa, S.ST
7. Anjas Wulansari, SKM, MPH
8. Nanang Himawan, SH
9. Kisniati, Amd
10. Theresia Aprilia Girsang, Amd
11. Restu Wiratni, Amd
12. Tri Mulyani, Amd
13. Rahma

Tim Audit Internal antara lain :

1. Nila Cakrawati, ST, M.Sc
2. Sri Ningsih, S.ST, MT
3. Feri Astuti, ST, MPH
4. Sayekti Udi Utama, SKM, Mkes
5. Dhelina Auza Utami, S.Farm, Apt
6. Heni Amikawati, SKM
7. Rudi Priyanto, S.Si
8. Tri Setyo Winaryanti, ST, Msc
9. dr Y Gita Chandra, MS
10. Ponirah hayu, S.Si
11. Sukoso S.ST, MSc
12. Siswati ET, SKM, MKM

Dengan disosialisasikan kembali SOP ini, pesan yang harus ditanamkan pada pegawai BBTCLPP Yogyakarta, bahwa “kami pegawai BBTCLPP Yogyakarta bertekad untuk dapat melaksanakan SOP dengan baik dan benar”.

Dalam rangka melaksanakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta bahwa sebagai pegawai kami sangat bangga dan bersemangat karena pimpinan BBTCLPP Yogyakarta memiliki komitmen yang kuat untuk membawa institusi ke arah yang lebih baik untuk mencapai sukses bersama, InsyaAllah kami memiliki tekad akan selalu berusaha untuk melaksanakan hal tersebut dalam rangka implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001.




### **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi PNBP TA 2019 di Lingkungan Kementerian Kesehatan**

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta mengikuti pertemuan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi PNBP TA 2019 di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan BMN pada tanggal 25-27 September 2019 di Harris Hotel dan Convention Ciumbuleuit Bandung. Satker yang diundang sebanyak 149. BBTKLPP Yogyakarta diwakili oleh Bendahara Penerima, Sunarsih, S.E. dan Pengelola PNBP, Sri Ningsih, S.ST., M.T.

Acara dibuka pada tanggal 25 September 2019. Pada pembukaan acara disampaikan laporan panitia dan sambutan pembukaan. Laporan panitia oleh Ka. Bag. TLK dan Perbendaharaan, Bapak Nugroho. Dalam laporannya disampaikan bahwa tujuan pertemuan adalah untuk meningkatkan laporan PNBP dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan. Sambutan pembukaan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN, Drs. Setyo Budi Hartono, M.M. Dalam sambutannya disampaikan bahwa selama enam tahun berturut-turut Kemenkes mendapatkan opini WTP. Kemenkes juga mendapat opini tertinggi dari BPK. Menurut penilaian KPK, Kemenkes mendapatkan predikat terbaik kedua, di bawah Kementerian Keuangan. Disampaikan pula bahwa PP RI No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan telah terbit menggantikan PPRI No. 21 Tahun 2013.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Overview Target dan Realisasi PNBP. Narasumber Kepala Biro Keuangan dan BMN, Drs. Setyo Budi Hartono, M.M. dengan moderator Ka. Bag. TLK dan Perbendaharaan, Bapak Nugroho.



Pada hari kedua tanggal 26 September 2019 acara diawali dengan penyampaian materi tentang Manajemen Resiko dalam Pengelolaan PNBP. Narasumber dari Direktorat PNBP Bapak Robby Martaputra didampingi Bapak Bima Panji Dharma. Moderator oleh Ka. Subbag. TLK 1, Bapak Roy Berridge.


Materi kedua Kebijakan Penyusunan Rencana Penggunaan Dana PNBP. Narasumber dari Direktorat PNBP Bapak Robby Martaputra dengan moderator Kepala Bagian TLK II, Ibu Rahani.

Materi ketiga Sosialisasi Single Source Database (SSD) PNBP oleh Direktorat PNBP, Bapak Bima Panji Dharma dengan moderator Ka. Subbag. TLK I, Bapak Roy Berridge.

Tanggal 27 September 2019 di hari ketiga pertemuan disampaikan materi tentang Matrik Sebelum Menjadi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemenkes. Narasumber Ka. Subbag. TLK I, Bapak Roy Berridge.

Dengan berakhirnya materi tersebut maka berakhir pula seluruh rangkaian acara. Pertemuan ditutup oleh Ka. Bag. TLK dan Perbendaharaan, Bapak Nugroho. Disampaikan ucapan terima kasih dan harapan semoga pertemuan dapat bermanfaat dan kita dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama ini.

---






### **Pelaksanaan Audit Surveilans ISO 9001:2015 TCL BBTCLPP Yogyakarta**

Audit Surveilans adalah audit (pemantauan) yang wajib dilakukan oleh badan sertifikasi independen setiap enam bulan atau satu tahun sekali terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO. Tujuan audit tersebut yaitu untuk menentukan apakah organisasi tersebut masih berhak menyangand sertifikat ISO atau tidak.

BBTKLPP Yogyakarta juga dilakukan audit surveilans dari TCL pada tanggal 3 Oktober 2019. Opening meeting dilaksanakan di Aula Lantai III, dihadiri oleh Tim Pelaksana Implementasi ISO 9001: 2015. Acara dibuka oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M. Dalam sambutan pembukaan disampaikan ucapan terima kasih untuk Tim Pelaksana Implementasi ISO 9001:2015 yang telah menghadiri acara. Ucapan terima kasih juga untuk auditor Bapak Yuwono Dwisilo Sucipto dari TCL serta permohonan maaf atas diundurnya jadwal pelaksanaan audit surveilans ISO 9001:2015.

Sambutan kedua dari auditor, Bapak Yuwono Dwisilo Sucipto. Diucapkan terima kasih kepada BBTCLPP Yogyakarta atas penyambutan yang telah diterima.

Disampaikan pula dalam sambutannya, tujuan dari kegiatan survei sama dengan kegiatan audit yang sebelumnya, yaitu memberi masukan untuk peningkatan berkelanjutan BBTCLPP Yogyakarta. Penyampaian klasifikasi temuan ada 3 : major, minor dan observasi. Jika ada temuan major, maka sertifikat ditunda; jika temuan minor, sertifikat masih direkomendasikan tetapi tetap harus melakukan pencarian akar penyebab masalahnya dan dilakukan tindakan revisi; jika temuan bersifat observasi, dari sudut pandang auditor akan memberikan saran. Adapun pelaksanaan audit dilaksanakan berurutan di Manajemen Representatif (MR), Subbag Program dan Laporan, Bidang Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium, dan Bidang ADKL.




Sebelum auditor melaksanakan audit terlebih dahulu dilakukan pengenalan singkat tim pelaksana implementasi ISO 9001:2015 oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta. Dilanjutkan audit yang dilakukan di masing-masing ruang bidang/bagian.

Setelah audit selesai, pada hari dan tanggal yang sama dilakukan Closing Meeting yang diawali dengan penyampaian hasil audit oleh auditor Bapak Yuwono Dwisilo Sucipto dari TCL. Sebelumnya disampaikan pemaparan materi pengantar tentang Audit Criteria, Audit Scope dan Surveilans Audit.

Dari hasil audit ditemukan satu ketidaksesuaian kategori minor di Bagian Manajemen Representatif dan ada tujuh saran dari auditor. Pemaparan hasil audit dilanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi ada pertanyaan dari Kepala Bagian TU selaku Manajemen Representatif (MR) terkait batas waktu penyelesaian temuan yang langsung disepakati dalam waktu lima hari sudah direspon dan bukti dilampirkan pada audit yang akan dilaksanakan di waktu mendatang.

Acara kemudian ditutup oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M. dengan harapan kedepannya agar audit bisa dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan jadwal.

---





## **Pertemuan Penataan dan Pembinaan Pegawai di Lingkungan Ditjen P2P**


Pada tanggal 8-11 Oktober 2019 dilaksanakan Pertemuan penataan dan pembinaan pegawai di lingkungan DITJEN P2P dengan tema penataan pegawai dalam rangka membangun talent pool yang diselenggarakan di hotel grand savero Bogor. Acara dibuka oleh Dirjen P2P Bapak dr. Anung Sugihantoro, M.Kes yang dalam sambutannya menyampaikan point penting antara lain bahwa:

- 1.Rekrutmen pegawai harus dengan system yang bagus dan benar agar mendapatkan CPNS yang berkualitas sehingga dapat diajak bekerja secara cepat
- 2.Dapat membangun kultur kerja yang benar. Kinerja institusi menghasilkan output yang terukur.
- 3.Penghargaan pemerintah terhadap ASN mempunyai ukuran yang jelas berdasarkan indikator kinerja
- 4.Pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas dan kebutuhan institusi

Materi yang disampaikan dalam pertemuan antara lain:

- 1.Kebijakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI
- 2.Penataan Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur oleh Asisten Deputi III Kempan RB
- 3.Pengembangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Kemenkes RI
- 4.Pengelolaan Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Kabag Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Biro Kepegawaian Kemenkes RI
- 5.Pengelolaan Penegakan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Kabag Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Kemenkes RI
- 6.Evaluasi Formasi Inpassing oleh Kabag Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian Kemenkes RI






Disamping disampaikan materi tentang kepegawaian juga dilakukan Desk Pemutakhiran Data dan Desk Evaluasi Formasi Inpassing oleh tim desk yang terdiri dari kepegawaian P2P dan Biro Kepegawaian kementerian kesehatan RI.

Pada acara penutupan disampaikan bahwa urusan kepegawaian merupakan kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sehingga acara kepegawaian yang diselenggarakan merupakan ajang sharing pengalaman dan informasi sehingga ke depan penataan dan pembinaan kepegawaian menjadi lebih baik.

---





### **Pertemuan Pemutakhiran Data dan Web Sistem Tahun 2019 Direktorat Jenderal P2P**

Bali 10/2019, Pertemuan Pemutakhiran Data dan Web Sistem Tahun 2019 diselenggarakan oleh Ditjen P2P di Kuta Paradiso Hotel selama 4 (empat) hari dari tanggal 9 s.d. 12 Oktober 2019, dengan mengundang peserta utama staf monev dari 49 satker UPT (B/BTKLPP dan KKP) dan 34 Dinas Kesehatan Provinsi.

Sesditjen P2P, dr. Achmad Yurianto, membuka acara tersebut dengan penekanan sebagai berikut:

1. Saat ini apapun yang dilakukan pembangunan kesehatan tidak hanya dimonitor oleh Kementerian Kesehatan saja. Bappenas sebagai penanggung jawab perencanaan pembangunan nasional memiliki kepentingan yang sangat besar terkait monev, karena merupakan perencana pembangunan nasional yang orientasinya bagaimana merencanakan pembangunan berikutnya, sedangkan Kementerian Keuangan dalam konteks ini melihat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga memiliki kepentingan yang besar. Kementerian Kesehatan mengukur capaian prioritas nasional sesuai dengan amanat Renstra
2. Perencanaan yang disusun harus berdasarkan evaluasi yang lalu; jangan membuat perencanaan dengan hymne “copy paste” atau “replace all”
3. Monev harus didasari dengan data yang valid
4. Laporan tidak hanya soal check list atau absensi, tapi juga kualitas, karena akan menentukan tahun 2020 sebagai transisi renstra, tahun 2021 sebagai basis untuk tahun berikutnya
5. Harapannya perencanaan program tahun mendatang berbasis pada evidence based data. Perencanaan yang baik merupakan 50% dari pekerjaan. Kalau perencanaan baik, maka 50% pekerjaan selesai. Perencanaan yang tidak karuan akan semakin menyulitkan dalam pelaksanaan
6. Data adalah pasar terbuka dan tidak pernah bisa disembunyikan. Oleh karena itu, jika melakukan evaluasi basisnya adalah data. Kebijakan Kementerian Kesehatan sudah tegas menyatakan tentang “satu data”, artinya bagian kinerja pembangunan kesehatan akan bermuara pada satu data yang berada pada tingkat nasional dan inilah yang menjadi dashboard. Program besar, anggaran besar, namun capaian tidak sesuai, maka akan menjadi tanda tanya besar

7. Monitoring berbicara tentang validitas baik waktu maupun kualitas data; evaluasi adalah mengolah data yang benar untuk merencanakan kegiatan berikutnya
8. Bagaimana merencanakan adalah hasil sebuah evaluasi. Evaluasi yang berbasis pada data-data yang benar namun tidak tepat waktu tidak berguna; data yang tepat waktu namun salah, juga tidak akan berguna;
9. Semangat monev adalah melakukan penilain obyektif dari sebuah perencanaan
10. Dalam e-performance mestinya menyandingkan capaian kinerja satker dengan tuis yang sama, sehingga tidak perlu khawatir terhadap perbedaan-perbedaan

Senada dengan pengarahannya Sesditjen P2P, Dirjen P2P dr. Anung Sugihantono, M. Kes. menyampaikan materi dengan topik "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan". Dalam paparannya, Dirjen menyampaikan tentang tujuan, perbandingan, tahapan, dan implementasi suatu monitoring dan evaluasi, di mana monev merupakan kegiatan yang menjadi satu kesatuan dari sistem pembangunan, termasuk saat perencanaan, serta merupakan bagian dari proses manajemen. Monev harus di-feed back-kan dan ditindaklanjuti secara komprehensif. Pengelolaan data merupakan bagian dari sistem monev dalam kerangka sistem kerja institusi. Sebagai penutup, beliau menyampaikan harapannya agar pengelola data aktif dan pro aktif mengumpulkan, melihat, mengelola dan mem-feed back-kan data, baru kemudian dianalisa untuk pengambilan keputusan manajemen oleh pimpinan.

Selain pengarahannya dari Sesditjen P2P dan paparan Dirjen P2P, peserta juga mendapat asupan materi yang dipaparkan oleh narasumber dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kepala Bagian Program dan Informasi Setditjen P2P.

Narasumber dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan memaparkan materi dengan topik "Implementasi Kebijakan Evaluasi Kinerja Anggaran T.A. 2019 Ditjen P2P". Beberapa poin yang dipaparkan adalah: urgensi kinerja anggaran; cakupan evaluasi kinerja anggaran dari 3 aspek (implementasi, manfaat, dan konteks); penilaian kinerja anggaran; partisipasi pelaporan Kemenkes; kinerja anggaran Ditjen P2P T.A. 2019 (capaian keluaran program: 31,51; pencapaian kinerja: 32,92; rata-rata nilai satker: 26,3); peta informasi kinerja anggaran K/L T.A. 2019; catatan atas pelaporan kinerja anggaran pada beberapa satker lingkup Ditjen P2P, baik UPT dan Dinkes Provinsi (umumnya berupa data anomali).

Pada sesi pemaparan oleh narasumber dari Bappenas, disampaikan topik “Paparasi Teknis Aplikasi e-Monev PP 39/2006”. Narasumber menyampaikan beberapa poin, antara lain: capaian kinerja dan keuangan per Direktorat di lingkungan Ditjen P2P periode sampai Triwulan III T.A. 2019; daftar satker dengan kelengkapan data rendah; pendekatan input realisasi fisik; cara mengidentifikasi permasalahan berdasarkan kategorinya; bukti pendukung sebagai salah satu pendekatan dalam aplikasi e-monev generasi 3.0; manfaat data – monev; beberapa kesalahan dalam pengisian data; dan reviu pelaporan untuk setiap Komponen dalam Program P2P.

Kepala Bagian Program dan Informasi, dr. Elvieda Sariwati, M. Epid memaparkan materi terkait topik “Data, Informasi, Monev, dan Pelaporan dalam Menunjang Pelaksanaan Program P2P”. Selain memaparkan konsep-konsep, Kabag PI mengingatkan kembali kesepakatan pemutakhiran data tahun 2018 dengan deadline tanggal 10 setiap periode pengumpulan data capaian program pusat, sedangkan deadline pelaporan e-monev DJA, e-monev Bappenas, SIMPEKA, dan e-performance adalah tanggal 10 setiap bulan. Hal lain yang disampaikan adalah absensi pelaporan per satker untuk tiap aplikasi, capaian indikator kinerja Program P2P serta per satker UPT (B/BTKL-PP dan KKP). Pada akhir paparannya, Kabag PI menegaskan kembali bahwa: 1) data berperan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan program; 2) ketepatan dan kelengkapan data menjadi kunci dalam pengambilan keputusan dalam menunjang monev dan pelaporan program; 3) perlu komitmen di semua level untuk meningkatkan ketepatan dan kelengkapan data.

Setelah refreshing melalui paparan-paparan di atas, kegiatan dilanjutkan dengan desk monitoring dan evaluasi laporan aplikasi SMART DJA, Bappenas, dan e-Performance. Hasil desk dituangkan dalam Berita Acara Hasil Desk Monitoring dan Evaluasi Laporan BBTCLPP Yogyakarta. Berdasarkan Berita Acara tersebut tidak terdapat catatan kekurangan atas monev yang dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta semua data sudah terinput dengan lengkap, benar dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

Pada bagian akhir acara, Kasubag Informasi dan Evaluasi Setditjen P2P menyampaikan secara ringkas hasil pertemuan, antara lain:

1. Satker-satker yang belum lengkap input data s.d. Triwulan III T.A. 2019, baik laporan e-Monev DJA, e-Monev Bappenas, dan e-Performance Kemenkes
2. Kesepakatan jadwal pemutakhiran data tahun 2019, yaitu tanggal 10 setiap bulan
3. Pertemuan pemutakhiran data tahun 2020 direncanakan akan diselenggarakan 2 kali (semester I dan semester II)

Dengan berakhirnya penyampaian sesi ini, maka pertemuan ditutup secara resmi oleh Kasubag Informasi dan Evaluasi



## **Kunjungan Laboratorium dari Universitas Negeri Malang di BBTCLPP Yogyakarta**

Dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan tentang laboratorium kesehatan lingkungan, telah diadakan kunjungan studi lapangan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Fak. Kesehatan Masyarakat Jurusan Keolahragaan melakukan kunjungan Laboratorium ke BBTCLPP YK. Kunjungan laboratorium dipimpin oleh Bp. Muhammad Al - Irsyad, SKM, MPH selaku dosen pembimbing dan 4 dosen pendamping. Dalam sambutannya beliau mengucapkan banyak terimakasih karena sudah diperkenankan untuk berkunjung ke BBTCLPP Yogyakarta. Kegiatan kunjungan ini adalah bagian dari perkuliahan praktek kerja lapangan yaitu ekspedisi kesehatan masyarakat. Harapannya bagi para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat mengeksplor banyak hal khususnya yang terkait dengan laboratorium kesehatan lingkungan, epidemiologi dan mungkin juga dalam peminatan - peminatan yang lain. Seluruh peserta berjumlah 80 Mahasiswa.

Kunjungan diterima di aula gedung C oleh Ibu Kepala BBTCLPP Yk Ibu Dr. dr. Irene, MKM, Kabid PTL Ibu Indah Nur Haeni, SSi, MSc, Kasie. Teknologi Laboratorium Ibu Nila C, ST, MSc dan juga Kepala Instalasi Diklat Bp. Mieng Nova Soetopo, SKM, MKes. Dalam sambutannya Ibu Kepala Balai, Ibu Dr. dr. Irene, MKM memberikan penjelasan dan gambaran terkait tugas pokok dan fungsi BBTCLPP YK serta membuka pintu lebar - lebar bagi Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berminat untuk magang ataupun penelitian di BBTCLPP Yogyakarta. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Laboratorium yang ada di BBTCLPP YK antara lain Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (PPTTG), Fisika Kimia Gas & Radiasi, Fisika Kimia. Air, Fisika Kimia Padatan & B3, Lab. biologi Lingkungan dan Lab. Entomologi dan Pengendalian Vektor yang di pandu oleh Kasie. Teknologi Laboratorium Ibu Nila Cakrawati, ST, MSc. Dalam kunjungan ke laboratorium tersebut Mahasiswa juga mendapatkan penjelasan tentang laboratorium dari masing-masing kepala instalasi laboratorium. Harapannya dalam kunjungan ini dapat menambah wawasan, ilmu serta pengalaman bagi para mahasiswa kedepannya.



### **Sosialisasi Pelaksanaan PP RI Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan RI**

Sehubungan dengan telah terbitnya PP RI No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan yang telah diundangkan tanggal 17 September 2019 dan sudah harus mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan yaitu tanggal 17 Oktober 2019 serta berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bahwa satker harus segera melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan PNBPN maka pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 BBTCLPP Yogyakarta melakukan Sosialisasi Pelaksanaan PP RI No. 64 Tahun 2019 kepada pelanggan.

Sosialisasi dilaksanakan di Aula Lantai 3 BBTCLPP Yogyakarta yang dihadiri oleh 34 perwakilan pelanggan dari 50 pelanggan yang diundang, dihadiri pula oleh pejabat struktural dan kepala instalasi. Pelanggan yang diundang antara lain dari instansi pemerintah, perusahaan, rumah sakit, dan hotel.

Acara diawali sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, M.K.M. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para pelanggan. Disampaikan pula permohonan maaf untuk saat ini pelayanan yang diberikan mungkin sedikit kurang optimal karena adanya rencana pindah gedung pada bulan November-Desember 2019. Dalam pertemuan ini akan disampaikan pula aplikasi e-Lang dan Playstore. Setelah sambutan, acara dibuka secara resmi.

Acara dilanjutkan dengan paparan secara parallel :

1. Materi 1 : Sosialisasi PP RI No. 64 Tahun 2019 oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Dian Trikoriati, S.T., S.K.M., M.P.H.

Pada materi ini ditayangkan perbandingan tarif antara PP yang lama yaitu PP RI No. 21 Tahun 2013 dengan PP yang baru yaitu PP RI No. 64 Tahun 2019. Disampaikan pula bahwa tidak diperbolehkan memungut PNPB yang tidak ada dasar hukumnya.

2. Materi 2 : Sosialisasi Pelayanan Pengambilan Contoh Uji oleh Kepala Bidang PTL, Indah Nurhaeni, S.Si, M.Sc.

Dipaparkan jenis-jenis paket pelayanan yang ada di BBTCLPP Yogyakarta beserta kemampuan laboratorium dalam melakukan pengambilan contoh uji. Kepala Bidang PTL juga berpesan apabila ada keluhan tentang pengambilan, pengujian atau apapun agar disampaikan langsung ke BBTCLPP Yogyakarta atau bisa menghubungi Instalasi Pelayanan Teknik.

3. Materi 3 : Sosialisasi Aplikasi e-Lang dan Playstore oleh Mardiansyah, S.Kom.

Materi ini tentang aplikasi yang memudahkan pelanggan untuk mengakses status contoh uji yang diujikan di BBTCLPP Yogyakarta melalui android di manapun berada. BBTCLPP Yogyakarta juga akan menggunakan sms gateway untuk memberitahukan hasil uji sudah jadi atau ada keterlambatan. Aplikasi akan dicoba pada bulan November-Desember 2019, nantinya diharapkan saran dan masukan dari pelanggan untuk dapat menyempurnakan aplikasi ini.

Pelanggan terlihat begitu antusias dan penuh perhatian dalam mengikuti sosialisasi materi demi materi. Diskusi berjalan lancar dan cukup banyak tanggapan maupun pertanyaan yang disampaikan antara lain dari RSUD Tidar Magelang, RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Hotel Santika Yogyakarta, Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, Hotel Melia Purosani Yogyakarta, dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Sebelum acara ditutup terlebih dahulu disampaikan arahan dari Kepala BBTCLPP Yogyakarta. Dalam arahannya disampaikan bahwa BBTCLPP Yogyakarta merupakan instansi WBK, dimohon untuk tidak memberikan apapun baik uang maupun barang kepada petugas selain biaya yang ditagihkan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang terus dikembangkan diharapkan dapat memudahkan pelanggan dan dapat menekan keterlambatan hasil uji. Selanjutnya acara ditutup secara resmi dengan harapan kerja sama tetap terjalin dengan baik. Di gedung yang baru mudah-mudahan pelayanan dapat lebih baik dan lebih cepat seperti yang diinginkan pelanggan.




### **Pertemuan Penguatan Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat Bagi B/BTKLPP dan B/BLK**

Pada tanggal 21-24 Oktober 2019, diselenggarakan Pertemuan Penguatan Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat Bagi B/BTKLPP dan B/BLK di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK) serta CDC. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun rencana operasional jejaring laboratorium kesehatan masyarakat di Indonesia tahun 2020. Peserta pertemuan terdiri dari perwakilan B/BTKLPP se-Indonesia, B/BLK se-Indonesia, Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (BTDK) Balitbangkes, Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Balitbangkes, perwakilan dari sub direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, Bagian Hukormas Ditjen P2P, Bagian Hukormas Balitbangkes, Kementerian Pertanian RI, PT. Biofarma, FAO, serta pendamping dari CDC/APHL (The Association of Public Health Laboratories) yaitu: Kim Lewis dan Dave Mills. Perwakilan dari BBTCLPP Yogyakarta dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL), Indah Nur Haeni, S.Si., M.Sc., dan Kepala Seksi Lingkungan Biologi, dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.


Agenda kegiatan meliputi pemaparan Kebijakan Surveilans dalam Penguatan Labkesmas oleh Direktur SKK, drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid; Draft Concept Jejaring Labkesmas Kementerian Kesehatan oleh Kepala PBTDK, Dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed; Roadmap Labkesmas oleh Kasubdit Surveilans, drh. Endang Burni Prasetyowati, M.Kes; Agenda Overview and Completing the Operational Plans Matrix oleh Dave Mills; serta Operational Plans dan Monitoring & Evaluation oleh Kim Lewis.





Penyusunan matrik rencana operasional tahun 2020 yang merupakan turunan dari rencana strategis lima tahunan (tahun 2020-2024) dilakukan dengan diskusi kelompok. Rencana strategi terbagi menjadi sembilan fokus, yaitu: 1) Struktur Organisasi dan Kerangka Hukum, 2) Layanan Laboratorium yang Tersedia, 3) Tenaga Kerja dan Pengembangan Kapasitas SDM, 4) Penunjang Pelayanan Laboratorium, 5) Sistem Manajemen Mutu, 6) Infrastruktur dan Keselamatan Kerja (termasuk Keamanan Hayati dan Biosekuriti), 7) Manajemen Data; Pemantauan dan Evaluasi, 8) Surveilans, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat; Fungsi Kesehatan Masyarakat, serta 9) Penelitian Kesehatan Masyarakat. Pada hari terakhir disusun kesepakatan dan rencana tindak lanjut, lalu pertemuan ditutup oleh Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Subdit Surveilans Direktorat SKK, dr. Triya Novita Dinihari.

---





### **Table Top Exercise-Tata laksana Penyakit Menular Terkait Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta**

Pada tanggal 21 Oktober 2019 RSUP Dr. Sardjito menggelar Table Top Exercise –Tata laksana Penyakit Menular terkait kedaruratan kesehatan masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD). Bertempat di ruang seminar, Gedung Administrasi Pusat RSUP Dr. Sardjito, acara dihadiri selain dari internal RSUP Dr. Sardjito juga dari berbagai lintas sektor di D.I. Yogyakarta diantaranya BPBD DIY, KKP Yogyakarta, RSUD di wilayah DIY, Dinkes DIY dan BBTKLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kasie Advokasi dan KLB. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk: 1) Reviu bersama terkait panduan/prosedur/alur terkait system dan jejaring penanggulangan KKM-MD di Yogyakarta; 2) mengidentifikasi permasalahan; 3) merencanakan tindak lanjut.

Kegiatan dilaksanakan dengan diskusi kelompok terfokus. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok. Selanjutnya dipaparkan beberapa skenario untuk didiskusikan oleh masing-masing kelompok dan selanjutnya masing-masing kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya kepada audience. Dari hasil diskusi kelompok terfokus beberapa hal dicatat untuk ditindaklanjuti oleh berbagai sector terkait diantaranya: 1) perlunya penunjukan RS rujukan selain dua RS rujukan yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes dan perlu dipikirkan sumber pembiayaan bagi kasus terkait KKM-MD yang dirawat selain di dua RS yang ditunjuk oleh Kemenkes, 2) adanya potensi untuk pembiayaan pada point 1 tersebut dari anggaran BPBD DIY namun untuk itu perlu dibuat payung hukumnya oleh dinas terkait, 3) perlu adanya opsi transportasi kasus terkait KKM-MD (ambulans) selain dari RS rujukan, 4) akan dilakukan Table top Exercise internal RSUD sardjito untuk memantapkan kesiapsiagaan RS dalam menghadapi penyakit menular KKM-MD.



### **Pengiriman Logistik ke Rumah Sakit yang Terlibat dalam Pengembangan Sistem Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis (S3JE) di DIY**

Pada pertengahan tahun 2019, kegiatan S3JE di DIY dikembangkan dengan menambahkan 12 rumah sakit sentinel untuk memperluas cakupan surveilans. Untuk mendukung pelaksanaan surveilans dan pengambilan sampel di 12 rumah sakit sentinel yang baru dilibatkan tersebut, pada tanggal 21 - 30 Oktober 2019 dilakukan pengiriman logistik untuk pengambilan dan pengiriman spesimen JE. Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh Bidang ADKL BBTKLPP Yogyakarta dengan melibatkan Instalasi Laboratorium Imunoserologi. Logistik yang dikirim ke rumah sakit antara lain adalah tabung vacutainer, wing needle, cryotube, spuit injeksi, icepack, icebox, dan alat-alat kelengkapan pengambilan spesimen lainnya, serta formulir investigasi acute encephalitis syndrome (AES) dan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium AES/suspek JE. Logistik diterima oleh petugas laboratorium yang bertanggungjawab untuk menyiapkan spesimen S3JE di rumah sakit terkait. Di setiap rumah sakit, kegiatan ini melibatkan tim yang terdiri atas dokter spesialis anak, dokter penanggungjawab laboratorium, petugas laboratorium, dan petugas surveilans rumah sakit. Pengiriman spesimen ke BBTKLPP Yogyakarta dilakukan bekerjasama dengan dinas kesehatan dari masing-masing kabupaten/kota. Kerjasama tim intern rumah sakit maupun antara tim rumah sakit dan dinas kesehatan berjalan dengan lancar. Hingga saat ini, sudah diterima 12 spesimen JE dari rumah sakit-rumah sakit pengembangan di DIY tersebut.



### **Diseminasi Informasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis di Kabupaten Sukoharjo**

Meningkatnya kasus penyakit Zoonosis terutama Leptospirosis dengan angka kematian yang cukup tinggi, perlu disikapi dengan meningkatkan Kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit Zoonosis. Kab Sukoharjo tidak termasuk daerah endemis leptospirosis namun angka kejadian leptospirosis cukup tinggi dengan IR tahun 2018 adalah 1,92. Selain itu Kab Sukoharjo berbatasan dengan Kabupaten Klaten yang endemis leptospirosis dengan IR tahun 2018 adalah 5,72. Berdasarkan hal tersebut BBTCLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis berupa surveilans factor risiko leptospirosis di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada Bulan Mei-Juni 2019 di dua desa di Kabupaten Sukoharjo.

Hasil dari pengumpulan data ini disampaikan dalam bentuk pertemuan yang diselenggarakan di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober 2019. Pertemuan dihadiri oleh 20 orang peserta yang berasal dari berbagai lintas sektor di Kabupaten Sukoharjo yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 3 orang, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukoharjo 3 orang, Puskesmas Kec. Kartasura 4 orang, Puskesmas Kec. Bulu 4 orang, Perangkat dan PKK Desa Gonilan 2 orang, Perangkat dan PKK Desa Karangasem 2 orang, Perangkat Kecamatan Bulu 1 orang dan perangkat Kecamatan Kartasura 1 orang. Pertemuan dibuka oleh Kabid P2 Dinkes Sukoharjo, Bejo Rahardjo, SKM., M.Kes. yang dilanjutkan dengan paparan hasil kegiatan surveilans factor risiko leptospirosis di Kabupaten Sukoharjo oleh koordinator kegiatan, dr. Dwi Amalia, MPH. Disampaikan bahwa ditemukan bakteri leptospira pada sampel tikus dan kambing serta manusia. Menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan diskusi untuk menyusun rencana tindak lanjut. Hasil dari diskusi yaitu: 1) Dinas Peternakan akan melakukan usulan kegiatan pengecekan kesehatan hewan secara berkala, 2) di tingkat desa/kecamatan akan melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian leptospirosis dengan melibatkan masyarakat dalam penanggulangan leptospirosis dan akan bekerjasama dengan puskesmas dalam penyuluhan penyakit leptospirosis di berbagai kegiatan di masyarakat, 3) BBTCLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinkes Sukoharjo akan menyelenggarakan pertemuan untuk koordinasi penanganan kasus leptospirosis dengan berbagai fasyankes di Kabupaten Sukoharjo.



### **Workshop Metrologi Bidang Lingkungan Tahun 2019 di P3KLL Serpong Tangerang**

Pada tanggal 23 Oktober 2019, BBTCLPP Yogyakarta mengikuti undangan Workshop Metrologi Bidang Lingkungan Tahun 2019 di Pusat Penelitian Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Serpong, Tangerang Selatan. Acara dihadiri oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, MKM dan Kasi Teklab Nila Cakrawati, ST, MSc.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Metrologi dan Kalibrasi Pusat sebagai Ketua Panitia, Ir. Wisnu Eka Yulyanto. Dalam sambutannya disampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk pengembangan metrologi bidang lingkungan dan nantinya akan menjadikan laboratorium lingkungan yang diundang menjadi laboratorium expert. Laboratorium yang dipilih berjumlah 22 sedangkan yang hadir ada 20 laboratorium. Setelah sambutan dari ketua panitia, dilanjutkan sambutan dari Kepala P3KLL Ir. Herman Hermawan, MM, sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya diharapkan pada akhir acara diperoleh rencana tindak lanjut (RTL) yang nantinya pada tahun berikutnya akan dievaluasi. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pemberian materi dan diskusi kelompok. Materi yang diberikan adalah :

Peranan Jejaring Laboratorium Pengujian Terkait dengan Metrologi di Bidang Lingkungan oleh Ir. Wisnu Eka Yulyanto; Penyelenggaraan Uji Profisiensi 2018 oleh Sufenal Healthi SSi, MSi; Ketertelusuran Pengujian untuk Parameter DHL, Zn dan Mn oleh Ernawati Nasir, SSi; Pengujian dan Ketertelusuran Parameter Merkuri oleh Ibu Affrida Esther South. Setelah pemberian materi dilakukan diskusi kelompok, dimana peserta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : Kelompok DHL, Zn dan Mn (I) dan Kelompok Merkuri (II). Dalam diskusi ini dilakukan sharing pengalaman pengujian parameter sesuai kelompoknya, dimana nantinya peserta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengujian dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok. Keikutsertaan dalam acara ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja laboratorium di BBTCLPP Yogyakarta.



## **Rakor Pertemuan Penguatan Layanan Kepegawaian Kementerian Kesehatan**

Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2019, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan telah melaksanakan pertemuan Penguatan Layanan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan di Hotel Arya Duta Makassar. Kegiatan yang dibuka oleh Bapak drg. OSCAR PRIMADI, MPH, Sekretaris Jenderal Kemenkes, dan dihadiri oleh perwakilan Biro dan kantor pusat di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kemenkes, Ditjen P2P beserta UPT, Ditjen Kesmas beserta UPT, Setditjen Farmasi dan Alat Kesehatan, UPT Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam upaya peningkatan layanan administrasi kepegawaian. Sebagai wakil dari BBTKLPP Yogyakarta telah ditunjuk 2 orang pengelola kepegawaian, Sri Iriyani, SE dan Christina Handayani, SH untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Sekretaris Jenderal dalam arahannya mengharapkan setiap satuan kerja melakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM. Selain perolehan WBK/WBBM, diharapkan pula agar tiap satuan kerja mengupayakan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan.

Dalam kegiatan ini disampaikan pula paparan dari para Kepala Bagian di Setjen Kemenkes:

1. Bagian Pengadaan Pegawai dengan materi Perencanaan dan Formasi ASN Kementerian Kesehatan
2. Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan materi Urusan Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
3. Bagian Pengembangan Pegawai, dengan materi Pengembangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, dengan materi Disiplin dan Kesejahteraan PNS

Selain paparan materi, juga dilakukan diskusi paralel yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok/kelas.


1. Kelas 1 Pembahasan Permasalahan tentang Perencanaan Pegawai, Jabatan Fungsional, Tubel/Ibel
2. Kelas 2 Pembahasan Permasalahan tentang Kenaikan Pangkat, Pencantuman Gelar, Pemindahan, Pemberhentian, SKP, Data dan Informasi
3. Kelas 3 Pembahasan Permasalahan tentang Status, Hukuman Disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai



### **Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada Kecamatan Banguntapan 2019-2024**


Sebagai implementasi dari Permenkes Nomer : 38 Tahun 2019, tentang Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bhakti Husada, bertepatan dengan acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2019 di Lapangan Upacara Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta sekaligus dijadikan agenda Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada Kecamatan Banguntapan Periode 2019-2024. Acara pelantikan dan penantingan bagi calon Pengurus Saka Bhakti Husada Kecamatan Banguntapan dilakukan oleh Ketua Kwarcab Kabupaten Bantul (Drs. H. Totok Sudarto, M.Pd). Kepengurusan Saka Bhakti Husada Kecamatan Banguntapan merupakan wujud kepengurusan terintegrasi antar Instansi dan Institusi Kesehatan baik Pusat maupun Daerah se Kecamatan Banguntapan yang terdiri dari unsur Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta, Puskesmas Banguntapan 1, Puskesmas Banguntapan 2, Puskesmas Banguntapan 3 dan STIKES Surya Global. Dalam kepengurusan tersebut ditetapkan sebagai Ketua Mabisaka Kepala BBTKLPP Yogyakarta (Dr.dr Irene, MKM) dengan didukung jajaran kepengurusan, Pinsaka dan Instruktur yang berasal dari ke empat instansi dan institusi tersebut di atas. Kepengurusan Saka Bakti Husada Kwaran Banguntapan periode 2019-2024 mengampu 6 Krida yang terdiri atas Krida : Pengendalian Penyakit, Bina Keluarga Sehat, Bina Gizi, Bina Lingkungan Sehat, Bina Obat serta Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan sasaran peserta didik Pramuka Penegak dan Pandega yang berminat untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan praktis di Bidang Kesehatan.





Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pertemuan antara Pengurus Kwarda Kabupaten Bantul dan Pengurus terlintik Saka Bhakti Husada Kecamatan Banguntapan. Dalam arahannya Ka Kwarda Kabupaten Bantul (Kak Drs. H. Totok Sudarto, M.Pd) sangat berharap bahwa dengan terbentuknya Kepengurusan Saka Bhakti Husada Kecamatan Banguntapan ini dapat memotivasi ranting lainnya untuk mendirikan pangkalan yang sama sehingga gerakan kepramukaan dapat kembali marak di Kwarda Kabupaten Bantul. Selanjutnya Sebagai langkah awal kerja Kepengurusan Saka Bhakti Husada Kak Irene selaku Ketua Mabisaka Satuan Karya Bhakti Husada Kecamatan Banguntapan beserta jajaran pengurus lainnya berjanji akan segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana kerja kegiatan untuk periode kepengurusan 2019-2024.


---





### **Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS/Fasyankes di Kabupaten Grobogan Terkait Pengembangan Sentinel S3D dan Survei Vektor DBD di Provinsi Jawa Tengah**


Pada tanggal 30 Oktober 2019, tim BBTCLPP Yogyakarta yang terdiri dari dr. Ratna Wijayanti, M.P.H. (Epidemiolog Kesehatan), Kustiah, S.Si. (Entomolog Kesehatan), Indah Setyorini, S.T., M.Kes. (Sanitarian), dan Ita Latiana Damayanti, A.Md.K.L. (Sanitarian) melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS/fasyankes calon sentinel S3D (RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo) di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, tim ditemui oleh Bapak Gunawan Cahyo Utomo, M.P.H. (pemegang program DBD, TB, ISPA dan Bapak Mas Puryanto (pemegang program Malaria, Diare, Kusta, HIV AIDS, Hepatitis). Tim menyampaikan bahwa kegiatan S3D sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 di RSUD Wonosari dan RS Tugurejo Semarang. Berdasarkan hasil koordinasi dan monitoring evaluasi pada awal tahun 2019 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, BBTCLPP Yogyakarta diminta untuk mengembangkan kegiatan S3D ke Kabupaten Grobogan terkait angka kasus yang tinggi di Kabupaten Grobogan. Rumah sakit yang dicalonkan sebagai sentinel S3D adalah RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo. Beberapa kasus suspek DBD yang telah dikonfirmasi secara molekular akan ditindaklanjuti dengan survei vektor untuk melakukan konfirmasi vektor secara molekular.



Selain untuk konfirmasi vektor secara molekular dari spesimen jentik dan nyamuk, survei vektor bertujuan mengidentifikasi tempat perindukan.

Di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, tim BBTKLPP Yogyakarta dan Dinkes Kab. Grobogan diterima oleh plt. Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo (dr. Titik W.), Kabid Pelayanan Medik (Ibu Diana), dr. Bambang R., Dokter Spesialis Patologi Klinik (dr. Diah), dan Kepala Laboratorium Bapak Warsono. Tim menjelaskan tentang alur kegiatan S3D, mulai dari pengambilan spesimen di RS, pengiriman spesimen ke Laboratorium BBTKLPP Yogyakarta, dan pengujian spesimen di BBTKLPP Yogyakarta. Pihak RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo menyambut baik rencana kegiatan, tetapi kemungkinan pasien rujukan tidak banyak mengingat RS termasuk kelas B. Pihak RS siap melakukan skrining, bagian laboratorium siap melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen untuk dikirim ke BBTKLPP Yogyakarta lewat pos yang difasilitasi oleh BBTKLPP Yogyakarta.

---





## **Pertemuan Penyusunan Target Pagu Indikatif PNBP Kementerian Kesehatan TA 2021**

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta mengikuti pertemuan Penyusunan Target Pagu Indikatif PNBP Kementerian Kesehatan TA 2021 yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan BMN pada tanggal 30 Oktober-01 November 2019 di Lombok Raya Hotel, Mataram, NTB. Satker yang diundang sebanyak 137. BBTKLPP Yogyakarta diwakili oleh Atasan Langsung PNBP, Heni Amikawati, S.K.M. dan Pengelola PNBP, Sri Ningsih, S.ST., M.T.

Acara diawali dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia dan sambutan pembukaan. Laporan panitia oleh Ka. Subbag. TLK 1, Bapak Roy Berridge, S.E., M.K.M. Dalam laporannya disampaikan pertemuan direncanakan berlangsung selama tiga hari yaitu tanggal 30 Oktober-01 November 2019. Peserta dari unit eselon 1, atasan langsung PNBP, pengelola PNBP dan bendahara penerima. Sampai acara dibuka ada 248 peserta yang sudah hadir.

Sambutan pembukaan oleh plt. Kepala Bagian TLK dan Perbendaharaan, Bapak Syarif Hidayat, S.Kep., Ners. Dalam sambutannya disampaikan tentang tahap penyusunan target pagu PNBP dan dasar hukum PNBP. Dengan diberlakukannya PP RI No. 64 Tahun 2019 diharapkan penerimaan PNBP dpt optimal.

Paparan yang disampaikan narasumber selama acara adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penyusunan Target Pagu PNBPN Kemenkes TA 2021. Narasumber plt. Kepala Bagian TLK dan Perbendaharaan, Bapak Syarif Hidayat, S.Kep., Ners. dengan moderator Ka. Subbag. TLK 1, Bapak Roy Berridge, S.E., M.K.M.
2. Pengawasan Pengelolaan PNBPN dan Penyampaian Laporan Pengawasan oleh APIP Kemenkes. Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemenkes, Bapak Harnyoto dengan moderator Ka. Subbag. TLK 1, Bapak Roy Berridge, S.E., M.K.M.
3. Tata Cara Perencanaan Kegiatan Bersumber Dana PNBPN Berdasarkan Pagu Penggunaan PNBPN. Narasumber dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, Bapak Hadi dengan moderator Ka. Subbag. TLK 2, Ibu Rahani.
4. Tata Cara Penyusunan Target Pagu PNBPN TA 2021 dan Implementasi PP 64/ 2019 terhadap Target Pagu PNBPN Kemenkes. Narasumber dari Direktur PNBPN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dengan moderator Ka. Subbag. TLK 2, Ibu Rahani.
5. Penyusunan Target Pagu Indikatif PNBPN Satker TA 2021. Narasumber dari Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dengan moderator Ka. Subbag. TLK 1, Bapak Roy Berridge, S.E., M.K.M.

Setelah seluruh rangkaian acara selesai, acara ditutup oleh Ka. Subbag. TLK 1, Bapak Roy Berridge, SE., M.K.M. dengan harapan penyusunan target PNBPN dapat dilakukan serealistis mungkin. Setelah pertemuan ini unit eselon 1 masing-masing akan mengadakan pertemuan yang sama. Jika nanti ada kendala, Biro Keuangan dan BMN siap menerima keluhan dan siap membantu.



### **Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Leptospirosis dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo**

Pada tanggal 6 November 2019, BBTCLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sukoharjo menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Leptospirosis dengan Dinas Kesehatan. Peserta pertemuan sejumlah 40 orang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (6 orang), Petugas medis Puskesmas di Kab. Sukoharjo (13 orang), Pemegang program Leptospirosis Puskesmas di Kab. Sukoharjo (11 orang) dan Petugas medis di RS/Klinik di Kab. Sukoharjo (10 orang). Pertemuan yang bertempat di candi Resto Kabupaten Sukoharjo tersebut dibuka dengan laporan penyelenggara pertemuan yang diwakili oleh Seksi Advokasi dan KLB BBTCLPP Yogyakarta, Dien Arsanti, SKM., M.Env. Disampaikan bahwa hasil pemantauan FR Leptospirosis yang dilakukan BBTCLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo di dua Kec. Di Kab. Sukoharjo menunjukkan adanya potensi penularan leptospirosis di lokasi kegiatan karena ditemukan tikus dan hewan ternak yang terinfeksi leptospira patogen. Karena itu kasus leptospirosis harus bisa dideteksi dan ditangani di tingkat pelayanan kesehatan pertama/Puskesmas sedini mungkin. Hal tersebut melatarbelakangi diselenggarakannya pertemuan koordinasi ini yang mempunyai tujuan agar petugas kesehatan waspada dan mampu melakukan deteksi dini leptospirosis berikut tata laksana kasus serta untuk koordinasi antar sektor terkait dalam penanganan kasus leptospirosis. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Kabid P2P Dinkes Sukoharjo, Bejo Rahardjo, SKM., M.Kes. disampaikan bahwa Masalah kesehatan yang disebabkan oleh Leptospirosis di Kab. Sukoharjo saat ini lebih besar daripada DBD, dikarenakan trend kasus DBD mengalami penurunan, sedangkan leptospirosis mengalami kenaikan dengan fatalitas kasus cukup tinggi.

Leptospirosis merupakan 155 penyakit yang harus bisa ditangani di FKTP. Oleh karenanya, kemampuan diagnosis klinis leptospirosis oleh petugas kesehatan harus lebih tajam sehingga tidak ada kasus leptospirosis yang tidak terdeteksi maupun terlambat ditangani. Pelaporan kasus leptospirosis oleh klinik swasta dan Rumah Sakit diupayakan agar lebih baik, terutama dalam hal laporan KDRS (Kewaspadaan Dini Rumah Sakit) yang seharusnya dilakukan oleh semua RS/Klinik yang merawat pasien leptospirosis. Petugas pemegang program leptospirosis dan petugas kesehatan di Puskesmas berperan penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang leptospirosis. Untuk itu Dinkes Kab. Sukoharjo Menyambut baik kegiatan pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh BBTCLPP Yogyakarta dalam upaya penanganan leptospirosis di Kab. Sukoharjo.

Agenda pertemuan berikutnya adalah penyampaian materi yang diawali dengan materi Materi I. yaitu Gambaran Kasus dan Pelaksanaan Surveilans Leptospirosis di Kabupaten Sukoharjo oleh Kepala Bidang P2P Kabupaten Sukoharjo, Bejo Raharjo, SKM, M.Kes, Materi II. Dengan judul Tantangan Diagnosis dan Tatalaksana Leptospirosis - Studi Kasus dari RSUD Sunan Kalijaga Demak oleh dr. Lisa Novi, SpPD, dan ditutup dengan Materi III. Dengan judul Upaya Pelayanan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinkes Sukoharjo dr. Agus Kristiyanto yang dilanjutkan dengan diskusi untuk Optimalisasi system rujukan kasus leptospirosis di Kab. Sukoharjo. Dari hasil diskusi disepakati diantaranya bahwa 1) Puskesmas akan Melakukan sosialisasi internal mengenai situasi dan gejala leptospirosis untuk meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan di Puskesmas mengenai penyakit tersebut dan memasukkan leptospirosis sebagai salah satu diagnosis banding pasien dengan demam akut, 2) di tingkat RS akan menyusun mekanisme internal dalam hal pelaporan kasus leptospirosis ke Dinas Kesehatan. Selain melibatkan petugas surveilans/rekam medis rumah sakit, disarankan agar menunjuk perawat bangsal sebagai koordinator di luar jam kerja, untuk melaporkan adanya kasus leptospirosis kepada rekam medis dan Memasukkan pemeriksaan ureum/kreatinin sebagai pemeriksaan CITO di UGD untuk skining pasien leptospirosis 3) Laboratorium kesehatan Daerah Siap melakukan pemeriksaan ureum/kreatinin untuk mendukung diagnosis leptospirosis di Puskesmas, dan 4) Dinkes akan Meningkatkan kerjasama dan komunikasi internal antara upaya pelayanan kesehatan perseorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dalam hal pengendalian leptospirosis.




### **Koordinasi dengan RS/Fasyankes di Kota Semarang Sebagai Calon Sentinel Pengembangan S3JE di Provinsi Jawa Tengah**

Pada tanggal 8 November 2019, tim BBTKLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Seksi Lingkungan Biologi (dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.), Ketua Tim S3JE BBTKLPP Yogyakarta (dr. Dwi Amalia, M.P.H.), dan Sanitarian Ahli (Anjas Wulansari, S.K.M., M.P.H.), melaksanakan koordinasi dengan RS/fasyankes calon sentinel S3JE di Kota Semarang dalam rangka Surveilans Sentinel Arbovirosis. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.


Di Dinas Kesehatan Kota Semarang, tim menemui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Mada Gautama. M.Kes., dan penanggungjawab program pengendalian arbovirosis Ibu Dwi Susanti, S.K.M. Saat diskusi dengan pejabat di Dinas Kesehatan Kota Semarang, tim BBTKLPP Yogyakarta berkoordinasi tentang rencana pengembangan jejaring S3JE di Jawa Tengah. Sejak tahun 2018 BBTKLPP Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Sistem Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis (S3JE) di Provinsi Jawa Tengah dengan RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah sakit sentinel. Pada tahun 2020, direncanakan akan dilakukan penambahan satu rumah sakit sentinel di area Semarang dan sekitarnya, karena jumlah kasus AES di RSUP Dr. Kariadi mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan karena rumah sakit daerah sudah mampu melakukan penatalaksanaan kasus AES, sehingga tidak perlu merujuk kasus ke RSUP Dr. Kariadi. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyambut baik rencana pengembangan jejaring S3JE dan pencalonan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro sebagai rumah sakit sentinel. Diinformasikan bahwa rumah sakit tersebut telah berkembang pesat dan menerima rujukan pasien dari wilayah timur dan selatan Kota Semarang, termasuk dari daerah yang berbatasan dengan Kab. Ungaran. Alternatif lain adalah RSUD Tugurejo yang menerima rujukan dari wilayah barat Kota Semarang.





Di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, diskusi dihadiri oleh Wakil Direktur Pelayanan dr. Lia Sasdesi M., Sp.Rad, dokter spesialis anak, dokter koordinator laboratorium klinik, dokter spesialis penyakit dalam, dan petugas rekam medis/surveilans rumah sakit. Tim BBTCLPP Yogyakarta mengutarakan tujuan kedatangan di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro terkait pencalonan RSUD tersebut sebagai salah satu rumah sakit sentinel dalam kegiatan S3JE, yaitu untuk mengetahui jumlah kasus encephalitis pada anak yang ditangani rumah sakit setiap tahunnya, kemungkinan untuk melakukan skrining kasus JE, pola rujukan, dan kesiapan laboratorium. Pihak RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro menyambut baik rencana kegiatan yang disampaikan. Dokter spesialis anak siap untuk melakukan skrining, dan laboratorium siap melakukan pengambilan dan penyiapan spesimen untuk dikirim ke BBTCLPP Yogyakarta lewat pos (bisa difasilitasi oleh BBTCLPP Yogyakarta melalui PT. Pos Indonesia). Di akhir pertemuan, Direktur RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, dr. Susi Herawati, M.Kes., berkenan menemui tim BBTCLPP Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan menyampaikan siap mendukung kegiatan S3JE.

---





### **Sosialisasi dan Penguatan Program Pengawasan di Lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan**

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta mengikuti pertemuan Sosialisasi dan Penguatan Program Pengawasan di Lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang diselenggarakan oleh Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes pada tanggal 13-16 November 2019 di Hotel Harris Cimbuleuit, Jl. Cimbuleuit No. 50-58 Hegarmanah, Cidadak, Bandung. BBTKLPP Yogyakarta dihadiri oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, M.K.M. dan Kepala Instalasi Pelayanan Teknik, Sri Ningsih, S.ST., M.T.

Rangkaian acara pembukaan antara lain menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan panitia dan sambutan pembukaan. Seditjen P2P Bapak dr. Ahmad Yuriyanto dalam laporannya menyampaikan bahwa pertemuan direncanakan berlangsung selama empat hari yaitu tanggal 13-16 November 2019 dengan peserta dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes, Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Para Direktur di Lingkungan Ditjen P2P, Kepala KKP seluruh Indonesia, Kepala BBTKLPP seluruh Indonesia, Kepala Bagian Advokasi Hukum Biro dan Organisasi Setjen Kemenkes, Para Kepala Sub Direktorat di Lingkungan Ditjen P2P, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Jenderal P2P, Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Ditjen P2P dan Staf Bagian Hukormas. Jumlah undangan ada 109 orang.

Acara dibuka oleh Dirjen P2P Bapak dr. Anung Sugihantono, M.Kes. yang dalam sambutannya menyampaikan tentang perbaikan yang harus dilakukan adalah aspek pola pikir, aspek pola sikap dan aspek pola tindak yang semuanya harus dibingkai dalam sebuah tatanan tata kelola yang benar. Disampaikan juga bahwa akan dilaksanakan pertemuan nasional yang direncanakan tanggal 4 Desember 2019. Paparan yang disampaikan narasumber adalah sebagai berikut :


- 1.Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenkes dengan narasumber Inspektur III Bapak Heri Radison, S.K.M., M.K.M. yang didampingi moderator Sesditjen P2P Bapak dr. Ahmad Yurianto.
- 2.Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Menciptakan Budaya Kerja Organisasi yang Bebas dari Konflik Kepentingan. Narasumber Inspektur Jenderal, Ibu drg. Murti Utami, M.P.H. dengan moderator Sesditjen P2P Bapak dr. Ahmad Yurianto
- 3.Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Narasumber dari Inspektur II, Bapak Muh. Nur Nasirudin dengan moderator Ibu Naning
- 4.Strategi Pengendalian Gratifikasi, LHKPN dan LHKASN. Narasumber Ka.Bag. TU dan Kepegawaian Bapak Dedi Mulyadi didampingi Bapak Iwan Sofian Fauzi, S.K.M.
- 5.Permenkes RI No. 24 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kemenkes. Narasumber Ka.Bag. TU dan Kepegawaian Bapak Dedi Mulyadi didampingi Bapak Iwan Sofian Fauzi, S.K.M.
- 6.Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkes. Narasumber dari Inspektur I Bapak Edward Harefa dengan moderator Kepala KKP Soekarno Hatta Bapak Anas Ma'ruf, M.K.M.

Setelah seluruh rangkaian acara selesai, acara ditutup oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, M.K.M. dengan harapan kita dapat melaksanakan pengawasan dengan sebaik mungkin




### **Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yogyakarta**

Pada tanggal 15 dan 16 November 2019, BBTCLPP Yogyakarta mengikuti undangan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Hotel Novotel Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat. Acara dihadiri oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M dan Kepala Bidang ADKL Feri Astuti, S.T., M.P.H. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kasubdit Pengaman Limbah dan Radiasi Direktorat Kesehatan Lingkungan Jelsi Natalia Marampa. Dalam laporannya disampaikan bahwa tujuan kegiatan ini agar semua Kab/Kota dan Fasyankes yang ada di DIY dapat segera tersosialisasi Permenkes RI No. 41 tahun 2019 dan dapat segera diimplementasikan di semua Fasyankes sehingga akhir tahun 2020 semua Fasyankes di DIY telah melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri seperti termometer, tensimeter, dan dental malgam serta dapat menjadi model bagi provinsi lainnya. Peserta sosialisasi terdiri dari Dinas Kesehatan Kab/Kota se DIY, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Organisasi Profesi. Setelah laporan dari penyelenggara, dilanjutkan dengan ucapan selamat datang oleh Kepala Dinkes DIY dan sambutan/arahan serta pembukaan secara resmi oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat.



Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pemberian materi dan diskusi. Adapun materi yang disampaikan antara lain Isu, Tantangan dan Upaya Kementerian Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Medis, Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri disampaikan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan; Dukungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Medis, Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri disampaikan oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Dukungan Pemerintah DIY dalam Pengelolaan Limbah Medis, Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri disampaikan oleh Kepala Dinkes DIY; Mekanisme Penarikan dan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri (Permenkes RI No. 41 Tahun 2019) disampaikan oleh Kasubdit PLR. Acara dilanjutkan dengan FGD untuk diskusi terarah tentang mekanisme dalam penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta dilakukan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Sebelum penutupan dilakukan penandatanganan kesepakatan penarikan alat kesehatan bermerkuri, kemudian acara sosialisasi ditutup oleh Kasubdit PRL.

---






### **Workshop Petugas B/BTKL dalam Rangka Optimalisasi Penggunaan Pedoman KLB Tahun 2019**

Epidemiologi merupakan ilmu dasar kesehatan masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap epidemiolog kesehatan sebagai kunci dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk itu diperlukan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini adalah kemampuan para tenaga epidemiolog dalam melakukan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini serta penanggulangan KLB/wabah demikian juga dalam mendukung pengembangan tupoksi BBTCLPP ke depan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas tenaga epidemiolog kesehatan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon penyakit dan memberikan solusi yang aplikatif terhadap masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat BBTCLPP Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Petugas B/BTKL Dalam Rangka Optimalisasi Penggunaan Pedoman KLB Tahun 2019.

Workshop dilaksanakan di kantor BBTCLPP Yogyakarta pada tanggal 24 November 2019. Peserta workshop sejumlah 23 orang terdiri dari struktural di Bidang Surveilans Epidemiologi, epidemiolog, sanitarian, dan pranata laboratorium dari BBTCLPP Yogyakarta dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta. Workshop dibuka oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM. Disampaikan bahwa workshop ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan petugas dalam merespon terutama pada kejadian luar biasa (KLB) sesuai pedoman yang ada. Selain itu empat orang CPNS sebagai calon epidemiolog diikutkan agar dalam waktu 3 Jam ini walaupun mungkin tidak optimal namun bisa mendapatkan ilmu yang praktis dalam menanggulangi KLB.dari narasumber.



Lebih lanjut disampaikan harapan diselenggarakannya workshop ini adalah dengan meningkatnya kapasitas petugas kesehatan akan berdampak pada berkualitasnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sehingga dapat mengurangi risiko penyakit. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi pertemuan yang terdiri dari Studi kasus Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Infeksi Emerging yang pernah ada di Indonesia yang terdiri dari Difteri (1 JPL), Polio (1 JPL) serta Rabies dan Anthraks (1 JPL). Narasumber berasal dari Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) pusat Bapak Dr. Dr, Hariadi Wibisono, MPH. Dari hasil pemaparan materi dan diskusi dapat ditarik kesimpulan bahwa Essensi epidemiologi adalah tanggap terhadap kejadian dan ketajaman dalam melakukan penggalan yang mendalam terhadap kenapa suatu peristiwa/KLB itu terjadi sangat menentukan dalam keberhasilan dari suatu tindakan atau respon untuk penanggulangan KLB.

---

